



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 1).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 95);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Per 31 Desember 2024 memuat laporan keuangan yang meliputi :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan operasional;
- e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp3.490.788.052.662,00	
b. Belanja dan Transfer	Rp3.485.295.242.921,00	
Surplus/(Defisit)		Rp5.492.809.741,00
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp 32.866.807.668,00	
2) Pengeluaran	Rp 7.482.125.637,00	
Pembiayaan Neto		Rp25.384.682.031,00

- (2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp254.739.991.367,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp3.745.528.044.029.00	
2. Realisasi pendapatan	Rp3.490.788.052.662.00	
Selisih kurang	(Rp 254.739.991.367,00)	
b. Selisih . . .		

b. Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi belanja sejumlah (Rp285.099.608.776,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp3.770.394.851.697,00
2. Realisasi belanja dan Transfer	Rp3.485.295.242.921,00
Selisih kurang	(Rp 285.099.608.776,00)

c. Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp30.359.617.409,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran defisit setelah perubahan	(Rp 24.866.807.668,00)
2. Realisasi Defisit	Rp 5.492.809.741,00
Selisih lebih	Rp 30.359.617.409,00

d. Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 32.866.807.668,00
2. Realisasi penerimaan pembiayaan	Rp 32.866.807.668,00
Selisih	Rp 0,00

e. Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah (Rp517.874.363,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp 8.000.000.000,00
2. Realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp 7.482.125.637,00
Selisih	(Rp 517.874.363,00)

f. Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp517.874.363,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp24.866.807.668,00
2. Realisasi pembiayaan netto	Rp25.384.682.031,00
Selisih kurang	(Rp 517.874.363,00)

g. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah :

1. Defisit (Pendapatan-Belanja)	Rp 5.492.809.741,00
2. Pembiayaan Neto	Rp 25.384.682.031,00
Jumlah	Rp 30.877.491.772,00

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

1) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	Rp 32.866.807.668,00
2) Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 32.866.807.668,00
Sub Jumlah	Rp 0,00

b. Sisa . . .

b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp 30.877.491.772,00
Sub Jumlah	Rp 30.877.491.772,00
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
Lain-lain	Rp 0,00
Saldo Anggaran lebih Akhir	Rp 30.877.491.772,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp4.934.230.224.204,46
b. Jumlah Kewajiban	Rp 148.357.705.087,67
c. Jumlah Ekuitas	Rp4.785.872.519.116,79

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan - LO	Rp3.542.428.158.909,29
b. Jumlah Beban Operasional - LO	Rp3.402.126.390.467,58
c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp (1.799.258.212,83)
d. Jumlah Pos Luar Biasa – LO	Rp 0,00
e. Surplus – LO	Rp 138.502.510.228,88

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp432.629.209.192,00
b. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp434.618.525.088,00)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
d. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp 1.358.340,00
e. Kenaikan/Penurunan Kas	(Rp 1.987.957.556,00)
f. Saldo awal kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 32.886.363.634,00
g. Saldo akhir kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 30.898.406.078,00
h. Saldo kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
i. Saldo kas per 31 Desember tahun 2024	Rp 30.898.406.078,00

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp4.678.828.762.677,73
b. Surplus – LO	Rp 138.502.510.228,88
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp (31.458.753.789,82)</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp 4.785.872.519.116,79

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 9

(1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri :

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran (lra) terdiri atas;
 - 1. lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. lampiran I.2 : ringkasan apbd yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3. lampiran I.3.1 : rincian apbd menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
s/d I.3.58
 - 4. lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
lampiran ii . . .
- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III : laporan operasional;
- d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V : neraca;
- f. lampiran VI : laporan arus kas;
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

k. lampiran . . .

- k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas;
 - 1. lampiran XX.1 ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
 - 2. lampiran XX.2 ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

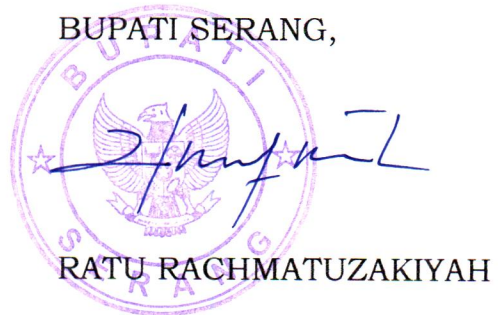
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Agustus 2025

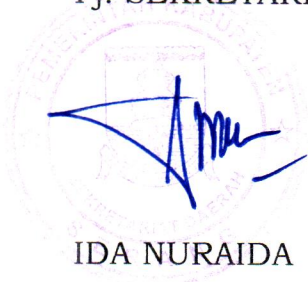
BUPATI SERANG,



RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



IDA NURaida

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN; (5,22/2025)



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	337.812.243.159,00	323.424.117.774,00	(14.388.125.385,00)	95,74
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	278.629.334.740,00	295.617.854.896,00	16.988.520.156,00	106,10
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	73.261.212.350,00	70.271.313.715,00	(2.989.898.635,00)	95,92
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT DR.DRADJAT PRAWIRANEGARA	205.368.122.390,00	225.346.541.181,00	19.978.418.791,00	109,73
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	59.182.908.419,00	27.806.262.878,00	(31.376.645.541,00)	46,98
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	59.182.908.419,00	27.806.262.878,00	(31.376.645.541,00)	46,98
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.093.760.556,00	16.689.537.008,00	(404.223.548,00)	97,64
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.542.300.000,00	854.618.600,00	(687.681.400,00)	55,41
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.542.300.000,00	854.618.600,00	(687.681.400,00)	55,41
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	692.700.000,00	691.427.368,00	(1.272.632,00)	99,82
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	692.700.000,00	691.427.368,00	(1.272.632,00)	99,82
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.296.720.556,00	889.800.200,00	(1.406.920.356,00)	38,74
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.296.720.556,00	889.800.200,00	(1.406.920.356,00)	38,74
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	12.500.000.000,00	14.202.276.340,00	1.702.276.340,00	113,62
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.500.000.000,00	14.202.276.340,00	1.702.276.340,00	113,62
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	62.040.000,00	51.414.500,00	(10.625.500,00)	82,87
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	62.040.000,00	51.414.500,00	(10.625.500,00)	82,87

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	138.200.000,00	132.389.665,00	(5.810.335,00)	95,80
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	138.200.000,00	132.389.665,00	(5.810.335,00)	95,80
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	138.200.000,00	132.389.665,00	(5.810.335,00)	95,80
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.390.483.840.314,00	3.150.542.008.215,00	(239.941.832.099,00)	92,92
5.02	KEUANGAN	3.390.483.840.314,00	3.150.542.008.215,00	(239.941.832.099,00)	92,92
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	794.769.680.391,00	575.087.944.286,00	(219.681.736.105,00)	72,36
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.595.714.159.923,00	2.575.454.063.929,00	(20.260.095.994,00)	99,22
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.745.528.044.029,00	3.490.788.052.662,00	(254.739.991.367,00)	93,20
5	BELANJA DAERAH				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.333.294.029.463,00	2.227.579.447.508,00	(105.714.581.955,00)	95,47
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.185.192.959.924,00	1.144.669.590.612,00	(40.523.369.312,00)	96,58
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.185.192.959.924,00	1.144.669.590.612,00	(40.523.369.312,00)	96,58
	BELANJA OPERASI	1.080.221.317.587,00	1.040.833.634.333,00	(39.387.683.254,00)	96,35
	Belanja Pegawai	740.776.992.114,00	716.162.122.373,00	(24.614.869.741,00)	96,68
	Belanja Barang dan Jasa	267.011.822.724,00	254.045.203.778,00	(12.966.618.946,00)	95,14
	Belanja Hibah	72.432.502.749,00	70.626.308.182,00	(1.806.194.567,00)	97,51
	BELANJA MODAL	104.971.642.337,00	103.835.956.279,00	(1.135.686.058,00)	98,92
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.386.715.630,00	81.107.801.705,00	(278.913.925,00)	99,66
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.830.368.059,00	10.019.307.526,00	(811.060.533,00)	92,51
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.754.558.648,00	12.708.847.048,00	(45.711.600,00)	99,64
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	649.789.045.666,00	620.655.817.035,00	(29.133.228.631,00)	95,52
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	313.097.631.291,00	294.433.431.714,00	(18.664.199.577,00)	94,04
	BELANJA OPERASI	291.590.759.147,00	277.505.193.182,00	(14.085.565.965,00)	95,17
	Belanja Pegawai	109.374.539.745,00	106.368.718.824,00	(3.005.820.921,00)	97,25
	Belanja Barang dan Jasa	181.716.219.402,00	170.637.301.158,00	(11.078.918.244,00)	93,90
	Belanja Hibah	500.000.000,00	499.173.200,00	(826.800,00)	99,83
	BELANJA MODAL	21.506.872.144,00	16.928.238.532,00	(4.578.633.612,00)	78,71
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.936.813.144,00	10.223.310.232,00	(1.713.502.912,00)	85,65
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.182.880.000,00	6.374.647.900,00	(2.808.232.100,00)	69,42
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	387.179.000,00	330.280.400,00	(56.898.600,00)	85,30
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT DR.DRADJAT PRAWIRANEGARA	336.691.414.375,00	326.222.385.321,00	(10.469.029.054,00)	96,89
	BELANJA OPERASI	309.253.670.590,00	299.292.171.130,00	(9.961.499.460,00)	96,78

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Pegawai	102.260.987.625,00	93.421.590.496,00	(8.839.397.129,00)	91,36
	Belanja Barang dan Jasa	206.992.682.965,00	205.870.580.634,00	(1.122.102.331,00)	99,46
	BELANJA MODAL	27.437.743.785,00	26.930.214.191,00	(507.529.594,00)	98,15
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.766.247.180,00	19.376.084.922,00	(390.162.258,00)	98,03
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.803.200.000,00	5.741.329.269,00	(61.870.731,00)	98,93
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.868.296.605,00	1.812.800.000,00	(55.496.605,00)	97,03
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	431.425.335.243,00	399.265.668.827,00	(32.159.666.416,00)	92,55
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	431.425.335.243,00	399.265.668.827,00	(32.159.666.416,00)	92,55
	BELANJA OPERASI	156.850.457.762,53	140.948.864.296,00	(15.901.593.466,53)	89,86
	Belanja Pegawai	30.915.558.000,00	28.149.690.409,00	(2.765.867.591,00)	91,05
	Belanja Barang dan Jasa	89.598.672.475,00	79.736.098.591,00	(9.862.573.884,00)	88,99
	Belanja Hibah	36.336.227.287,53	33.063.075.296,00	(3.273.151.991,53)	90,99
	BELANJA MODAL	274.574.877.480,47	258.316.804.531,00	(16.258.072.949,47)	94,08
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.804.742.103,00	5.716.396.700,00	(88.345.403,00)	98,48
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.832.967.041,47	70.713.956.590,00	(6.119.010.451,47)	92,04
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	191.937.168.336,00	181.886.451.241,00	(10.050.717.095,00)	94,76
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.921.928.480,00	24.490.195.419,00	(1.431.733.061,00)	94,48
1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.921.928.480,00	24.490.195.419,00	(1.431.733.061,00)	94,48
	BELANJA OPERASI	25.222.492.080,00	23.822.116.369,00	(1.400.375.711,00)	94,45
	Belanja Pegawai	6.375.000.000,00	5.851.593.013,00	(523.406.987,00)	91,79
	Belanja Barang dan Jasa	9.900.200.298,00	9.200.118.576,00	(700.081.722,00)	92,93
	Belanja Hibah	3.947.291.782,00	3.770.404.780,00	(176.887.002,00)	95,52
	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	699.436.400,00	668.079.050,00	(31.357.350,00)	95,52
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.436.400,00	289.505.000,00	(9.931.400,00)	96,68
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	378.574.050,00	(21.425.950,00)	94,64
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	29.443.366.847,00	28.199.789.865,00	(1.243.576.982,00)	95,78
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.812.126.354,00	13.336.761.167,00	(475.365.187,00)	96,56
	BELANJA OPERASI	13.812.126.354,00	13.336.761.167,00	(475.365.187,00)	96,56
	Belanja Pegawai	8.514.529.000,00	8.176.906.409,00	(337.622.591,00)	96,03
	Belanja Barang dan Jasa	5.297.597.354,00	5.159.854.758,00	(137.742.596,00)	97,40
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.631.240.493,00	14.863.028.698,00	(768.211.795,00)	95,09

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	BELANJA OPERASI	15.573.065.493,00	14.807.303.698,00	(765.761.795,00)	95,08
	Belanja Pegawai	7.773.515.474,00	7.225.779.143,00	(547.736.331,00)	92,95
	Belanja Barang dan Jasa	7.799.550.019,00	7.581.524.555,00	(218.025.464,00)	97,20
	BELANJA MODAL	58.175.000,00	55.725.000,00	(2.450.000,00)	95,79
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.175.000,00	55.725.000,00	(2.450.000,00)	95,79
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	11.521.393.303,00	10.298.385.750,00	(1.223.007.553,00)	89,38
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	11.521.393.303,00	10.298.385.750,00	(1.223.007.553,00)	89,38
	BELANJA OPERASI	11.441.311.303,00	10.281.285.750,00	(1.160.025.553,00)	89,86
	Belanja Pegawai	6.183.979.000,00	5.730.297.665,00	(453.681.335,00)	92,66
	Belanja Barang dan Jasa	4.107.332.303,00	3.417.808.085,00	(689.524.218,00)	83,21
	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	650.000.000,00	633.180.000,00	(16.820.000,00)	97,41
	BELANJA MODAL	80.082.000,00	17.100.000,00	(62.982.000,00)	21,35
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.082.000,00	17.100.000,00	(62.982.000,00)	21,35
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	227.240.949.168,85	205.345.303.756,00	(21.895.645.412,85)	90,36
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	11.389.577.010,00	10.674.951.791,00	(714.625.219,00)	93,73
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11.389.577.010,00	10.674.951.791,00	(714.625.219,00)	93,73
	BELANJA OPERASI	10.667.395.510,00	9.971.812.406,00	(695.583.104,00)	93,48
	Belanja Pegawai	6.398.123.000,00	5.988.231.055,00	(409.891.945,00)	93,59
	Belanja Barang dan Jasa	4.269.272.510,00	3.983.581.351,00	(285.691.159,00)	93,31
	BELANJA MODAL	722.181.500,00	703.139.385,00	(19.042.115,00)	97,36
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	722.181.500,00	703.139.385,00	(19.042.115,00)	97,36
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.638.990.598,00	1.348.377.128,00	(290.613.470,00)	82,27
2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.638.990.598,00	1.348.377.128,00	(290.613.470,00)	82,27
	BELANJA OPERASI	1.638.990.598,00	1.348.377.128,00	(290.613.470,00)	82,27
	Belanja Barang dan Jasa	1.638.990.598,00	1.348.377.128,00	(290.613.470,00)	82,27
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	957.688.819,00	886.887.278,00	(70.801.541,00)	92,61
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	957.688.819,00	886.887.278,00	(70.801.541,00)	92,61
	BELANJA OPERASI	957.688.819,00	886.887.278,00	(70.801.541,00)	92,61
	Belanja Barang dan Jasa	957.688.819,00	886.887.278,00	(70.801.541,00)	92,61
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4.664.621.175,00	464.427.592,00	(4.200.193.583,00)	9,96
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.664.621.175,00	464.427.592,00	(4.200.193.583,00)	9,96

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	BELANJA OPERASI	68.900.000,00	26.680.000,00	(42.220.000,00)	38,72
	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	NaN
	Belanja Barang dan Jasa	68.900.000,00	26.680.000,00	(42.220.000,00)	38,72
	BELANJA MODAL	4.595.721.175,00	437.747.592,00	(4.157.973.583,00)	9,53
	Belanja Modal Tanah	4.588.221.175,00	437.747.592,00	(4.150.473.583,00)	9,54
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	27.526.264.391,00	25.877.430.833,00	(1.648.833.558,00)	94,01
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27.526.264.391,00	25.877.430.833,00	(1.648.833.558,00)	94,01
	BELANJA OPERASI	27.478.565.791,00	25.861.570.833,00	(1.616.994.958,00)	94,12
	Belanja Pegawai	11.686.649.000,00	10.882.118.485,00	(804.530.515,00)	93,12
	Belanja Barang dan Jasa	15.791.916.791,00	14.979.452.348,00	(812.464.443,00)	94,86
	BELANJA MODAL	47.698.600,00	15.860.000,00	(31.838.600,00)	33,25
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.698.600,00	15.860.000,00	(31.838.600,00)	33,25
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.179.288.182,00	18.137.771.925,00	(2.041.516.257,00)	89,88
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.179.288.182,00	18.137.771.925,00	(2.041.516.257,00)	89,88
	BELANJA OPERASI	18.446.331.682,00	16.817.149.925,00	(1.629.181.757,00)	91,17
	Belanja Pegawai	12.646.438.000,00	11.522.601.296,00	(1.123.836.704,00)	91,11
	Belanja Barang dan Jasa	5.799.893.682,00	5.294.548.629,00	(505.345.053,00)	91,29
	BELANJA MODAL	1.732.956.500,00	1.320.622.000,00	(412.334.500,00)	76,21
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.732.956.500,00	1.320.622.000,00	(412.334.500,00)	76,21
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.260.017.718,00	15.982.002.372,00	(2.278.015.346,00)	87,52
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.260.017.718,00	15.982.002.372,00	(2.278.015.346,00)	87,52
	BELANJA OPERASI	18.185.415.718,00	15.907.750.372,00	(2.277.665.346,00)	87,48
	Belanja Pegawai	6.765.306.000,00	6.130.121.254,00	(635.184.746,00)	90,61
	Belanja Barang dan Jasa	11.420.109.718,00	9.777.629.118,00	(1.642.480.600,00)	85,62
	BELANJA MODAL	74.602.000,00	74.252.000,00	(350.000,00)	99,53
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.602.000,00	74.252.000,00	(350.000,00)	99,53
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	28.058.442.262,00	26.709.418.377,00	(1.349.023.885,00)	95,19
2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	28.058.442.262,00	26.709.418.377,00	(1.349.023.885,00)	95,19
	BELANJA OPERASI	27.736.857.462,00	26.443.296.377,00	(1.293.561.085,00)	95,34
	Belanja Pegawai	7.343.868.077,00	6.882.535.947,00	(461.332.130,00)	93,72
	Belanja Barang dan Jasa	20.392.989.385,00	19.560.760.430,00	(832.228.955,00)	95,92

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	BELANJA MODAL	321.584.800,00	266.122.000,00	(55.462.800,00)	82,75
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	321.584.800,00	266.122.000,00	(55.462.800,00)	82,75
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	37.986.330.007,00	37.143.816.729,00	(842.513.278,00)	97,78
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	37.986.330.007,00	37.143.816.729,00	(842.513.278,00)	97,78
	BELANJA OPERASI	33.122.760.507,00	32.290.520.729,00	(832.239.778,00)	97,49
	Belanja Pegawai	10.231.272.999,94	9.897.497.531,00	(333.775.468,94)	96,74
	Belanja Barang dan Jasa	22.891.487.507,06	22.393.023.198,00	(498.464.309,06)	97,82
	BELANJA MODAL	4.863.569.500,00	4.853.296.000,00	(10.273.500,00)	99,79
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	688.393.500,00	684.800.000,00	(3.593.500,00)	99,48
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.175.176.000,00	4.168.496.000,00	(6.680.000,00)	99,84
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.355.490.622,00	18.533.015.931,00	(1.822.474.691,00)	91,05
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	20.355.490.622,00	18.533.015.931,00	(1.822.474.691,00)	91,05
	BELANJA OPERASI	17.151.550.640,00	15.496.482.181,00	(1.655.068.459,00)	90,35
	Belanja Pegawai	5.405.328.000,00	5.045.472.623,00	(359.855.377,00)	93,34
	Belanja Barang dan Jasa	11.746.222.640,00	10.451.009.558,00	(1.295.213.082,00)	88,97
	BELANJA MODAL	3.203.939.982,00	3.036.533.750,00	(167.406.232,00)	94,77
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.948.950.482,00	2.782.044.250,00	(166.906.232,00)	94,34
	Belanja Modal Aset Lainnya	254.989.500,00	254.489.500,00	(500.000,00)	99,80
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	13.311.199.006,00	10.947.893.177,00	(2.363.305.829,00)	82,25
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.311.199.006,00	10.947.893.177,00	(2.363.305.829,00)	82,25
	BELANJA OPERASI	12.755.671.606,00	10.928.887.577,00	(1.826.784.029,00)	85,68
	Belanja Pegawai	9.722.632.000,00	8.512.091.991,00	(1.210.540.009,00)	87,55
	Belanja Barang dan Jasa	3.033.039.606,00	2.416.795.586,00	(616.244.020,00)	79,68
	BELANJA MODAL	555.527.400,00	19.005.600,00	(536.521.800,00)	3,42
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	555.527.400,00	19.005.600,00	(536.521.800,00)	3,42
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	18.396.612.386,00	15.338.318.734,00	(3.058.293.652,00)	83,38
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18.396.612.386,00	15.338.318.734,00	(3.058.293.652,00)	83,38
	BELANJA OPERASI	15.631.769.736,00	12.657.507.734,00	(2.974.262.002,00)	80,97
	Belanja Pegawai	8.104.100.307,00	7.813.301.647,00	(290.798.660,00)	96,41
	Belanja Barang dan Jasa	7.527.669.429,00	4.844.206.087,00	(2.683.463.342,00)	64,35
	BELANJA MODAL	2.764.842.650,00	2.680.811.000,00	(84.031.650,00)	96,96
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.764.842.650,00	2.680.811.000,00	(84.031.650,00)	96,96
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	13.713.143.290,85	13.258.489.400,00	(454.653.890,85)	96,68

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	13.713.143.290,85	13.258.489.400,00	(454.653.890,85)	96,68
	BELANJA OPERASI	13.656.316.290,85	13.201.889.400,00	(454.426.890,85)	96,67
	Belanja Pegawai	4.804.680.000,00	4.446.972.349,00	(357.707.651,00)	92,56
	Belanja Barang dan Jasa	1.901.636.290,85	1.804.917.051,00	(96.719.239,85)	94,91
	Belanja Hibah	6.950.000.000,00	6.950.000.000,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	56.827.000,00	56.600.000,00	(227.000,00)	99,60
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.827.000,00	56.600.000,00	(227.000,00)	99,60
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	578.812.954,00	313.904.304,00	(264.908.650,00)	54,23
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	578.812.954,00	313.904.304,00	(264.908.650,00)	54,23
	BELANJA OPERASI	578.812.954,00	313.904.304,00	(264.908.650,00)	54,23
	Belanja Barang dan Jasa	578.812.954,00	313.904.304,00	(264.908.650,00)	54,23
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	15.735.836,00	10.891.836,00	(4.844.000,00)	69,22
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	15.735.836,00	10.891.836,00	(4.844.000,00)	69,22
	BELANJA OPERASI	15.735.836,00	10.891.836,00	(4.844.000,00)	69,22
	Belanja Barang dan Jasa	15.735.836,00	10.891.836,00	(4.844.000,00)	69,22
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.286.720.000,00	1.258.134.337,00	(28.585.663,00)	97,78
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.286.720.000,00	1.258.134.337,00	(28.585.663,00)	97,78
	BELANJA OPERASI	1.248.410.000,00	1.219.834.337,00	(28.575.663,00)	97,71
	Belanja Barang dan Jasa	1.248.410.000,00	1.219.834.337,00	(28.575.663,00)	97,71
	BELANJA MODAL	38.310.000,00	38.300.000,00	(10.000,00)	99,97
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.310.000,00	38.300.000,00	(10.000,00)	99,97
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	8.388.178.672,00	7.983.325.332,00	(404.853.340,00)	95,17
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	8.388.178.672,00	7.983.325.332,00	(404.853.340,00)	95,17
	BELANJA OPERASI	6.831.793.482,00	6.479.100.332,00	(352.693.150,00)	94,84
	Belanja Pegawai	4.342.921.000,00	4.098.267.169,00	(244.653.831,00)	94,37
	Belanja Barang dan Jasa	2.488.872.482,00	2.380.833.163,00	(108.039.319,00)	95,66
	BELANJA MODAL	1.556.385.190,00	1.504.225.000,00	(52.160.190,00)	96,65
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.294.515.190,00	1.242.925.000,00	(51.590.190,00)	96,01
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	261.870.000,00	261.300.000,00	(570.000,00)	99,78
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	533.836.240,00	476.246.680,00	(57.589.560,00)	89,21
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	533.836.240,00	476.246.680,00	(57.589.560,00)	89,21
	BELANJA OPERASI	433.301.240,00	380.346.680,00	(52.954.560,00)	87,78
	Belanja Barang dan Jasa	433.301.240,00	380.346.680,00	(52.954.560,00)	87,78
	BELANJA MODAL	100.535.000,00	95.900.000,00	(4.635.000,00)	95,39

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.535.000,00	95.900.000,00	(4.635.000,00)	95,39
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	59.807.887.434,15	55.321.308.210,00	(4.486.579.224,15)	92,50
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.949.550.855,00	13.031.247.918,00	(918.302.937,00)	93,42
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	13.949.550.855,00	13.031.247.918,00	(918.302.937,00)	93,42
	BELANJA OPERASI	13.763.336.855,00	12.847.694.518,00	(915.642.337,00)	93,35
	Belanja Pegawai	7.059.091.001,00	6.496.562.102,00	(562.528.899,00)	92,03
	Belanja Barang dan Jasa	6.704.245.854,00	6.351.132.416,00	(353.113.438,00)	94,73
	BELANJA MODAL	186.214.000,00	183.553.400,00	(2.660.600,00)	98,57
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.920.000,00	84.430.000,00	(2.490.000,00)	97,14
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.294.000,00	99.123.400,00	(170.600,00)	99,83
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.163.787.950,15	1.931.121.785,00	(232.666.165,15)	89,25
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	2.163.787.950,15	1.931.121.785,00	(232.666.165,15)	89,25
	BELANJA OPERASI	2.163.787.950,15	1.931.121.785,00	(232.666.165,15)	89,25
	Belanja Pegawai	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.160.287.950,15	1.931.121.785,00	(229.166.165,15)	89,39
	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	NaN
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	NaN
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	39.611.077.711,00	36.450.696.747,00	(3.160.380.964,00)	92,02
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	39.611.077.711,00	36.450.696.747,00	(3.160.380.964,00)	92,02
	BELANJA OPERASI	38.376.386.511,00	36.199.932.747,00	(2.176.453.764,00)	94,33
	Belanja Pegawai	23.284.228.803,00	22.373.842.403,00	(910.386.400,00)	96,09
	Belanja Barang dan Jasa	14.133.607.708,00	12.867.584.344,00	(1.266.023.364,00)	91,04
	Belanja Bantuan Sosial	958.550.000,00	958.506.000,00	(44.000,00)	100,00
	BELANJA MODAL	1.234.691.200,00	250.764.000,00	(983.927.200,00)	20,31
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.227.201.200,00	250.764.000,00	(976.437.200,00)	20,43
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.490.000,00	0,00	(7.490.000,00)	0,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.597.960.818,00	2.508.850.865,00	(89.109.953,00)	96,57
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.597.960.818,00	2.508.850.865,00	(89.109.953,00)	96,57
	BELANJA OPERASI	2.597.960.818,00	2.508.850.865,00	(89.109.953,00)	96,57
	Belanja Barang dan Jasa	2.597.960.818,00	2.508.850.865,00	(89.109.953,00)	96,57
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.274.309.050,00	1.205.283.035,00	(69.026.015,00)	94,58
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.274.309.050,00	1.205.283.035,00	(69.026.015,00)	94,58
	BELANJA OPERASI	1.274.309.050,00	1.205.283.035,00	(69.026.015,00)	94,58

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Barang dan Jasa	1.274.309.050,00	1.205.283.035,00	(69.026.015,00)	94,58
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	211.201.050,00	194.107.860,00	(17.093.190,00)	91,91
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	211.201.050,00	194.107.860,00	(17.093.190,00)	91,91
	BELANJA OPERASI	211.201.050,00	194.107.860,00	(17.093.190,00)	91,91
	Belanja Barang dan Jasa	211.201.050,00	194.107.860,00	(17.093.190,00)	91,91
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	197.225.219.326,00	182.340.641.617,00	(14.884.577.709,00)	92,45
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	86.518.478.088,00	80.738.812.510,00	(5.779.665.578,00)	93,32
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	86.518.478.088,00	80.738.812.510,00	(5.779.665.578,00)	93,32
	BELANJA OPERASI	85.867.761.288,00	80.201.600.010,00	(5.666.161.278,00)	93,40
	Belanja Pegawai	30.948.089.464,00	27.649.698.688,00	(3.298.390.776,00)	89,34
	Belanja Barang dan Jasa	45.729.671.824,00	43.361.901.322,00	(2.367.770.502,00)	94,82
	Belanja Hibah	9.190.000.000,00	9.190.000.000,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	650.716.800,00	537.212.500,00	(113.504.300,00)	82,56
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	NaN
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	650.716.800,00	537.212.500,00	(113.504.300,00)	82,56
4.02	SEKRETARIAT DPRD	110.706.741.238,00	101.601.829.107,00	(9.104.912.131,00)	91,78
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	110.706.741.238,00	101.601.829.107,00	(9.104.912.131,00)	91,78
	BELANJA OPERASI	109.714.791.238,00	100.862.910.107,00	(8.851.881.131,00)	91,93
	Belanja Pegawai	50.499.653.204,00	49.306.500.982,00	(1.193.152.222,00)	97,64
	Belanja Barang dan Jasa	59.215.138.034,00	51.556.409.125,00	(7.658.728.909,00)	87,07
	BELANJA MODAL	991.950.000,00	738.919.000,00	(253.031.000,00)	74,49
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	666.398.400,00	664.279.000,00	(2.119.400,00)	99,68
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	551.600,00	0,00	(551.600,00)	0,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	325.000.000,00	74.640.000,00	(250.360.000,00)	22,97
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	729.689.312.289,00	609.464.360.382,00	(120.224.951.907,00)	83,52
5.01	PERENCANAAN	18.784.941.926,00	16.488.072.238,00	(2.296.869.688,00)	87,77
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18.784.941.926,00	16.488.072.238,00	(2.296.869.688,00)	87,77
	BELANJA OPERASI	18.351.327.826,00	16.091.612.238,00	(2.259.715.588,00)	87,69
	Belanja Pegawai	9.339.000.000,00	8.536.813.656,00	(802.186.344,00)	91,41
	Belanja Barang dan Jasa	9.012.327.826,00	7.554.798.582,00	(1.457.529.244,00)	83,83
	BELANJA MODAL	433.614.100,00	396.460.000,00	(37.154.100,00)	91,43
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	433.614.100,00	396.460.000,00	(37.154.100,00)	91,43
5.02	KEUANGAN	679.330.943.706,00	563.319.749.221,00	(116.011.194.485,00)	82,92

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	43.147.611.245,00	39.280.946.520,00	(3.866.664.725,00)	91,04
	BELANJA OPERASI	42.759.403.440,00	38.902.458.520,00	(3.856.944.920,00)	90,98
	Belanja Pegawai	32.369.765.712,00	29.210.873.013,00	(3.158.892.699,00)	90,24
	Belanja Barang dan Jasa	10.389.637.728,00	9.691.585.507,00	(698.052.221,00)	93,28
	BELANJA MODAL	388.207.805,00	378.488.000,00	(9.719.805,00)	97,50
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	296.676.000,00	288.350.000,00	(8.326.000,00)	97,19
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.531.805,00	90.138.000,00	(1.393.805,00)	98,48
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	636.183.332.461,00	524.038.802.701,00	(112.144.529.760,00)	82,37
	BELANJA OPERASI	31.356.565.823,00	26.596.488.765,00	(4.760.077.058,00)	84,82
	Belanja Pegawai	12.845.754.184,00	10.380.966.905,00	(2.464.787.279,00)	80,81
	Belanja Barang dan Jasa	18.510.811.639,00	16.215.521.860,00	(2.295.289.779,00)	87,60
	BELANJA MODAL	21.822.598.605,00	1.988.620.705,00	(19.833.977.900,00)	9,11
	Belanja Modal Tanah	20.373.634.475,00	723.685.123,00	(19.649.949.352,00)	3,55
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.251.264.130,00	1.068.448.000,00	(182.816.130,00)	85,39
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.700.000,00	196.487.582,00	(1.212.418,00)	99,39
	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.775.000.000,00	397.087.640,00	(5.377.912.360,00)	6,88
	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000,00	397.087.640,00	(5.377.912.360,00)	6,88
	BELANJA TRANSFER	577.229.168.033,00	495.056.605.591,00	(82.172.562.442,00)	85,76
	Belanja Bagi Hasil	119.439.270.033,00	37.417.907.591,00	(82.021.362.442,00)	31,33
	Belanja Bantuan Keuangan	457.789.898.000,00	457.638.698.000,00	(151.200.000,00)	99,97
5.03	KEPEGAWAIAN	28.728.471.707,00	26.918.114.637,00	(1.810.357.070,00)	93,70
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28.728.471.707,00	26.918.114.637,00	(1.810.357.070,00)	93,70
	BELANJA OPERASI	27.597.069.107,00	25.830.833.201,00	(1.766.235.906,00)	93,60
	Belanja Pegawai	22.181.629.001,00	21.539.445.644,00	(642.183.357,00)	97,10
	Belanja Barang dan Jasa	5.415.440.106,00	4.291.387.557,00	(1.124.052.549,00)	79,24
	BELANJA MODAL	1.131.402.600,00	1.087.281.436,00	(44.121.164,00)	96,10
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.111.402.600,00	1.067.301.436,00	(44.101.164,00)	96,03
	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.094.955.000,00	1.075.881.136,00	(19.073.864,00)	98,26
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.094.955.000,00	1.075.881.136,00	(19.073.864,00)	98,26
	BELANJA OPERASI	1.094.955.000,00	1.075.881.136,00	(19.073.864,00)	98,26
	Belanja Pegawai	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.054.955.000,00	1.035.881.136,00	(19.073.864,00)	98,19
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.749.999.950,00	1.662.543.150,00	(87.456.800,00)	95,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.749.999.950,00	1.662.543.150,00	(87.456.800,00)	95,00
	BELANJA OPERASI	1.749.999.950,00	1.662.543.150,00	(87.456.800,00)	95,00
	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	NaN
	Belanja Barang dan Jasa	1.749.999.950,00	1.662.543.150,00	(87.456.800,00)	95,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	25.985.983.941,00	23.075.469.419,00	(2.910.514.522,00)	88,80
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	25.985.983.941,00	23.075.469.419,00	(2.910.514.522,00)	88,80
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	25.985.983.941,00	23.075.469.419,00	(2.910.514.522,00)	88,80
	BELANJA OPERASI	25.980.342.941,00	23.069.869.419,00	(2.910.473.522,00)	88,80
	Belanja Pegawai	18.936.200.000,00	17.310.602.725,00	(1.625.597.275,00)	91,42
	Belanja Barang dan Jasa	7.044.142.941,00	5.759.266.694,00	(1.284.876.247,00)	81,76
	BELANJA MODAL	5.641.000,00	5.600.000,00	(41.000,00)	99,27
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.641.000,00	5.600.000,00	(41.000,00)	99,27
7	UNSUR KEWILAYAHAN	130.100.944.081,00	115.910.069.770,00	(14.190.874.311,00)	89,09
7.01	KECAMATAN	130.100.944.081,00	115.910.069.770,00	(14.190.874.311,00)	89,09
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN ANYAR	5.608.568.600,00	4.965.816.804,00	(642.751.796,00)	88,54
	BELANJA OPERASI	5.552.593.600,00	4.934.616.804,00	(617.976.796,00)	88,87
	Belanja Pegawai	3.006.570.000,00	2.827.792.169,00	(178.777.831,00)	94,05
	Belanja Barang dan Jasa	2.546.023.600,00	2.106.824.635,00	(439.198.965,00)	82,75
	BELANJA MODAL	55.975.000,00	31.200.000,00	(24.775.000,00)	55,74
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.975.000,00	31.200.000,00	(24.775.000,00)	55,74
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BANDUNG	3.495.947.830,00	3.242.701.488,00	(253.246.342,00)	92,76
	BELANJA OPERASI	3.402.994.030,00	3.199.401.488,00	(203.592.542,00)	94,02
	Belanja Pegawai	2.578.820.000,00	2.454.090.102,00	(124.729.898,00)	95,16
	Belanja Barang dan Jasa	824.174.030,00	745.311.386,00	(78.862.644,00)	90,43
	BELANJA MODAL	92.953.800,00	43.300.000,00	(49.653.800,00)	46,58
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.953.800,00	43.300.000,00	(49.653.800,00)	46,58
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN BAROS	5.294.223.086,00	4.544.901.113,00	(749.321.973,00)	85,85
	BELANJA OPERASI	5.227.942.086,00	4.489.256.113,00	(738.685.973,00)	85,87
	Belanja Pegawai	3.127.913.000,00	2.835.518.588,00	(292.394.412,00)	90,65
	Belanja Barang dan Jasa	2.100.029.086,00	1.653.737.525,00	(446.291.561,00)	78,75
	BELANJA MODAL	66.281.000,00	55.645.000,00	(10.636.000,00)	83,95
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.281.000,00	55.645.000,00	(10.636.000,00)	83,95
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BINUANG	3.375.389.352,00	2.905.642.109,00	(469.747.243,00)	86,08

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	BELANJA OPERASI	3.360.936.352,00	2.905.642.109,00	(455.294.243,00)	86,45
	Belanja Pegawai	2.423.932.000,00	2.277.076.425,00	(146.855.575,00)	93,94
	Belanja Barang dan Jasa	937.004.352,00	628.565.684,00	(308.438.668,00)	67,08
	BELANJA MODAL	14.453.000,00	0,00	(14.453.000,00)	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.453.000,00	0,00	(14.453.000,00)	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BOJONEGARA	3.658.906.073,00	3.323.315.620,00	(335.590.453,00)	90,83
	BELANJA OPERASI	3.615.562.073,00	3.280.615.620,00	(334.946.453,00)	90,74
	Belanja Pegawai	2.767.856.000,00	2.585.710.535,00	(182.145.465,00)	93,42
	Belanja Barang dan Jasa	847.706.073,00	694.905.085,00	(152.800.988,00)	81,97
	BELANJA MODAL	43.344.000,00	42.700.000,00	(644.000,00)	98,51
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.344.000,00	42.700.000,00	(644.000,00)	98,51
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN CARENANG	3.531.392.352,00	3.174.247.263,00	(357.145.089,00)	89,89
	BELANJA OPERASI	3.497.515.352,00	3.140.457.263,00	(357.058.089,00)	89,79
	Belanja Pegawai	2.581.835.000,00	2.332.657.377,00	(249.177.623,00)	90,35
	Belanja Barang dan Jasa	915.680.352,00	807.799.886,00	(107.880.466,00)	88,22
	BELANJA MODAL	33.877.000,00	33.790.000,00	(87.000,00)	99,74
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.877.000,00	33.790.000,00	(87.000,00)	99,74
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN CIKANDE	5.588.786.354,00	5.290.070.609,00	(298.715.745,00)	94,66
	BELANJA OPERASI	5.588.786.354,00	5.290.070.609,00	(298.715.745,00)	94,66
	Belanja Pegawai	3.031.989.000,00	2.898.429.245,00	(133.559.755,00)	95,59
	Belanja Barang dan Jasa	2.556.797.354,00	2.391.641.364,00	(165.155.990,00)	93,54
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN CIKEUSAL	3.731.129.208,00	3.308.473.963,00	(422.655.245,00)	88,67
	BELANJA OPERASI	3.697.729.908,00	3.275.713.963,00	(422.015.945,00)	88,59
	Belanja Pegawai	2.723.388.000,00	2.454.383.660,00	(269.004.340,00)	90,12
	Belanja Barang dan Jasa	974.341.908,00	821.330.303,00	(153.011.605,00)	84,30
	BELANJA MODAL	33.399.300,00	32.760.000,00	(639.300,00)	98,09
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.399.300,00	32.760.000,00	(639.300,00)	98,09
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN CINANGKA	5.124.970.101,00	4.515.867.748,00	(609.102.353,00)	88,12
	BELANJA OPERASI	5.073.912.101,00	4.480.537.748,00	(593.374.353,00)	88,31
	Belanja Pegawai	2.787.995.000,00	2.670.683.012,00	(117.311.988,00)	95,79
	Belanja Barang dan Jasa	2.285.917.101,00	1.809.854.736,00	(476.062.365,00)	79,17
	BELANJA MODAL	51.058.000,00	35.330.000,00	(15.728.000,00)	69,20
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.058.000,00	35.330.000,00	(15.728.000,00)	69,20
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN CIOMAS	4.621.479.985,00	4.126.661.673,00	(494.818.312,00)	89,29

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	BELANJA OPERASI	4.573.514.985,00	4.085.661.673,00	(487.853.312,00)	89,33
	Belanja Pegawai	2.567.902.200,00	2.420.011.176,00	(147.891.024,00)	94,24
	Belanja Barang dan Jasa	2.005.612.785,00	1.665.650.497,00	(339.962.288,00)	83,05
	BELANJA MODAL	47.965.000,00	41.000.000,00	(6.965.000,00)	85,48
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.965.000,00	41.000.000,00	(6.965.000,00)	85,48
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN CIRUAS	6.049.585.970,00	5.599.340.461,00	(450.245.509,00)	92,56
	BELANJA OPERASI	5.981.882.970,00	5.553.954.461,00	(427.928.509,00)	92,85
	Belanja Pegawai	3.726.064.000,00	3.537.971.384,00	(188.092.616,00)	94,95
	Belanja Barang dan Jasa	2.255.818.970,00	2.015.983.077,00	(239.835.893,00)	89,37
	BELANJA MODAL	67.703.000,00	45.386.000,00	(22.317.000,00)	67,04
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.703.000,00	45.386.000,00	(22.317.000,00)	67,04
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN GUNUNGSARI	3.588.428.694,00	3.132.660.424,00	(455.768.270,00)	87,30
	BELANJA OPERASI	3.546.649.894,00	3.132.660.424,00	(413.989.470,00)	88,33
	Belanja Pegawai	2.638.646.500,00	2.455.516.926,00	(183.129.574,00)	93,06
	Belanja Barang dan Jasa	908.003.394,00	677.143.498,00	(230.859.896,00)	74,57
	BELANJA MODAL	41.778.800,00	0,00	(41.778.800,00)	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.778.800,00	0,00	(41.778.800,00)	0,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN JAWILAN	3.632.993.771,00	3.062.345.257,00	(570.648.514,00)	84,29
	BELANJA OPERASI	3.606.093.771,00	3.038.265.257,00	(567.828.514,00)	84,25
	Belanja Pegawai	2.684.915.769,00	2.359.220.077,00	(325.695.692,00)	87,87
	Belanja Barang dan Jasa	921.178.002,00	679.045.180,00	(242.132.822,00)	73,71
	BELANJA MODAL	26.900.000,00	24.080.000,00	(2.820.000,00)	89,52
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.900.000,00	24.080.000,00	(2.820.000,00)	89,52
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN KIBIN	5.722.333.748,00	5.513.592.259,00	(208.741.489,00)	96,35
	BELANJA OPERASI	5.702.516.748,00	5.493.792.259,00	(208.724.489,00)	96,34
	Belanja Pegawai	3.085.118.000,00	3.077.060.388,00	(8.057.612,00)	99,74
	Belanja Barang dan Jasa	2.617.398.748,00	2.416.731.871,00	(200.666.877,00)	92,33
	BELANJA MODAL	19.817.000,00	19.800.000,00	(17.000,00)	99,91
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.817.000,00	19.800.000,00	(17.000,00)	99,91
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN KOPO	3.600.934.695,00	3.395.020.581,00	(205.914.114,00)	94,28
	BELANJA OPERASI	3.600.934.695,00	3.395.020.581,00	(205.914.114,00)	94,28
	Belanja Pegawai	2.664.115.000,00	2.528.392.882,00	(135.722.118,00)	94,91
	Belanja Barang dan Jasa	936.819.695,00	866.627.699,00	(70.191.996,00)	92,51
	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	NaN

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	NaN
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN KRAGILAN	6.687.141.967,00	6.158.476.977,00	(528.664.990,00)	92,09
	BELANJA OPERASI	6.636.547.967,00	6.108.026.977,00	(528.520.990,00)	92,04
	Belanja Pegawai	4.106.858.000,00	3.840.286.576,00	(266.571.424,00)	93,51
	Belanja Barang dan Jasa	2.529.689.967,00	2.267.740.401,00	(261.949.566,00)	89,64
	BELANJA MODAL	50.594.000,00	50.450.000,00	(144.000,00)	99,72
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.594.000,00	50.450.000,00	(144.000,00)	99,72
7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN KRAMATWATU	6.964.693.920,00	6.595.404.614,00	(369.289.306,00)	94,70
	BELANJA OPERASI	6.909.838.589,00	6.543.354.614,00	(366.483.975,00)	94,70
	Belanja Pegawai	4.499.720.040,00	4.277.194.923,00	(222.525.117,00)	95,05
	Belanja Barang dan Jasa	2.410.118.549,00	2.266.159.691,00	(143.958.858,00)	94,03
	BELANJA MODAL	54.855.331,00	52.050.000,00	(2.805.331,00)	94,89
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.855.331,00	52.050.000,00	(2.805.331,00)	94,89
7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN LEBAK WANGI	3.723.670.742,00	3.362.070.384,00	(361.600.358,00)	90,29
	BELANJA OPERASI	3.656.613.842,00	3.321.470.384,00	(335.143.458,00)	90,83
	Belanja Pegawai	2.804.944.000,00	2.688.197.766,00	(116.746.234,00)	95,84
	Belanja Barang dan Jasa	851.669.842,00	633.272.618,00	(218.397.224,00)	74,36
	BELANJA MODAL	67.056.900,00	40.600.000,00	(26.456.900,00)	60,55
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.056.900,00	40.600.000,00	(26.456.900,00)	60,55
7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN MANCAK	3.820.792.190,00	3.426.136.449,00	(394.655.741,00)	89,67
	BELANJA OPERASI	3.793.005.450,00	3.406.361.449,00	(386.644.001,00)	89,81
	Belanja Pegawai	2.788.178.000,00	2.644.446.403,00	(143.731.597,00)	94,84
	Belanja Barang dan Jasa	1.004.827.450,00	761.915.046,00	(242.912.404,00)	75,83
	BELANJA MODAL	27.786.740,00	19.775.000,00	(8.011.740,00)	71,17
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.786.740,00	19.775.000,00	(8.011.740,00)	71,17
7.01.0.00.0.00.20.0000	KECAMATAN PABUARAN	4.932.795.447,00	4.117.290.226,00	(815.505.221,00)	83,47
	BELANJA OPERASI	4.908.278.247,00	4.117.290.226,00	(790.988.021,00)	83,88
	Belanja Pegawai	2.560.653.000,00	2.153.751.524,00	(406.901.476,00)	84,11
	Belanja Barang dan Jasa	2.347.625.247,00	1.963.538.702,00	(384.086.545,00)	83,64
	BELANJA MODAL	24.517.200,00	0,00	(24.517.200,00)	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.517.200,00	0,00	(24.517.200,00)	0,00
7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN PADARINCANG	4.437.006.240,00	3.292.157.020,00	(1.144.849.220,00)	74,20
	BELANJA OPERASI	4.365.019.240,00	3.292.157.020,00	(1.072.862.220,00)	75,42
	Belanja Pegawai	2.362.200.000,00	2.188.708.660,00	(173.491.340,00)	92,66

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Belanja Barang dan Jasa	2.002.819.240,00	1.103.448.360,00	(899.370.880,00)	55,09
	BELANJA MODAL	71.987.000,00	0,00	(71.987.000,00)	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.987.000,00	0,00	(71.987.000,00)	0,00
7.01.0.00.0.00.22.0000	KECAMATAN PAMARAYAN	3.584.517.352,00	3.221.814.184,00	(362.703.168,00)	89,88
	BELANJA OPERASI	3.566.612.352,00	3.221.814.184,00	(344.798.168,00)	90,33
	Belanja Pegawai	2.636.500.000,00	2.388.242.654,00	(248.257.346,00)	90,58
	Belanja Barang dan Jasa	930.112.352,00	833.571.530,00	(96.540.822,00)	89,62
	BELANJA MODAL	17.905.000,00	0,00	(17.905.000,00)	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.905.000,00	0,00	(17.905.000,00)	0,00
7.01.0.00.0.00.23.0000	KECAMATAN PETIR	3.633.949.830,00	3.433.097.962,00	(200.851.868,00)	94,47
	BELANJA OPERASI	3.618.146.230,00	3.417.294.362,00	(200.851.868,00)	94,45
	Belanja Pegawai	2.714.643.856,00	2.588.069.892,00	(126.573.964,00)	95,34
	Belanja Barang dan Jasa	903.502.374,00	829.224.470,00	(74.277.904,00)	91,78
	BELANJA MODAL	15.803.600,00	15.803.600,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.803.600,00	15.803.600,00	0,00	100,00
7.01.0.00.0.00.24.0000	KECAMATAN PONTANG	5.190.990.450,00	4.487.320.708,00	(703.669.742,00)	86,44
	BELANJA OPERASI	5.137.733.450,00	4.444.864.708,00	(692.868.742,00)	86,51
	Belanja Pegawai	3.077.643.367,00	2.798.618.446,00	(279.024.921,00)	90,93
	Belanja Barang dan Jasa	2.060.090.083,00	1.646.246.262,00	(413.843.821,00)	79,91
	BELANJA MODAL	53.257.000,00	42.456.000,00	(10.801.000,00)	79,72
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.257.000,00	42.456.000,00	(10.801.000,00)	79,72
7.01.0.00.0.00.25.0000	KECAMATAN PULO AMPEL	3.284.870.830,00	2.862.936.196,00	(421.934.634,00)	87,16
	BELANJA OPERASI	3.268.227.030,00	2.862.936.196,00	(405.290.834,00)	87,60
	Belanja Pegawai	2.369.034.316,00	2.229.332.458,00	(139.701.858,00)	94,10
	Belanja Barang dan Jasa	899.192.714,00	633.603.738,00	(265.588.976,00)	70,46
	BELANJA MODAL	16.643.800,00	0,00	(16.643.800,00)	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.643.800,00	0,00	(16.643.800,00)	0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000	KECAMATAN TANARA	4.379.407.720,00	3.283.739.716,00	(1.095.668.004,00)	74,98
	BELANJA OPERASI	4.346.547.720,00	3.283.164.716,00	(1.063.383.004,00)	75,53
	Belanja Pegawai	2.245.435.000,00	2.130.521.076,00	(114.913.924,00)	94,88
	Belanja Barang dan Jasa	2.101.112.720,00	1.152.643.640,00	(948.469.080,00)	54,86
	BELANJA MODAL	32.860.000,00	575.000,00	(32.285.000,00)	1,75
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.860.000,00	575.000,00	(32.285.000,00)	1,75
7.01.0.00.0.00.27.0000	KECAMATAN TIRTAYASA	4.843.380.013,00	4.271.857.909,00	(571.522.104,00)	88,20

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	BELANJA OPERASI	4.786.162.083,00	4.220.707.909,00	(565.454.174,00)	88,19
	Belanja Pegawai	2.744.149.346,00	2.488.817.720,00	(255.331.626,00)	90,70
	Belanja Barang dan Jasa	2.042.012.737,00	1.731.890.189,00	(310.122.548,00)	84,81
	BELANJA MODAL	57.217.930,00	51.150.000,00	(6.067.930,00)	89,40
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.217.930,00	51.150.000,00	(6.067.930,00)	89,40
7.01.0.00.0.00.28.0000	KECAMATAN TUNJUNG TEJA	3.371.579.433,00	3.152.700.693,00	(218.878.740,00)	93,51
	BELANJA OPERASI	3.342.124.033,00	3.124.305.693,00	(217.818.340,00)	93,48
	Belanja Pegawai	2.317.568.000,00	2.218.819.104,00	(98.748.896,00)	95,74
	Belanja Barang dan Jasa	1.024.556.033,00	905.486.589,00	(119.069.444,00)	88,38
	BELANJA MODAL	29.455.400,00	28.395.000,00	(1.060.400,00)	96,40
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.455.400,00	28.395.000,00	(1.060.400,00)	96,40
7.01.0.00.0.00.29.0000	KECAMATAN WARINGINKURUNG	4.621.078.128,00	4.144.409.360,00	(476.668.768,00)	89,68
	BELANJA OPERASI	4.586.162.428,00	4.113.685.660,00	(472.476.768,00)	89,70
	Belanja Pegawai	2.430.365.000,00	2.343.825.654,00	(86.539.346,00)	96,44
	Belanja Barang dan Jasa	2.155.797.428,00	1.769.860.006,00	(385.937.422,00)	82,10
	BELANJA MODAL	34.915.700,00	30.723.700,00	(4.192.000,00)	87,99
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.915.700,00	30.723.700,00	(4.192.000,00)	87,99
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	67.050.525.994,00	66.258.642.259,00	(791.883.735,00)	98,82
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	67.050.525.994,00	66.258.642.259,00	(791.883.735,00)	98,82
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	67.050.525.994,00	66.258.642.259,00	(791.883.735,00)	98,82
	BELANJA OPERASI	66.841.321.494,00	66.096.802.759,00	(744.518.735,00)	98,89
	Belanja Pegawai	4.248.461.550,00	3.987.662.009,00	(260.799.541,00)	93,86
	Belanja Barang dan Jasa	8.117.438.944,00	7.685.386.750,00	(432.052.194,00)	94,68
	Belanja Hibah	54.475.421.000,00	54.423.754.000,00	(51.667.000,00)	99,91
	BELANJA MODAL	209.204.500,00	161.839.500,00	(47.365.000,00)	77,36
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209.204.500,00	161.839.500,00	(47.365.000,00)	77,36
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.770.394.851.697,00	3.485.295.242.921,00	(285.099.608.776,00)	92,44
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.866.807.668,00)	5.492.809.741,00	30.359.617.409,00	(22,09)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	28.111.008.655,00	28.111.008.655,00	0,00	100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	2.226.185.733,00	2.226.185.733,00	0,00	100,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT DR.DRADJAT PRAWIRANEGARA	25.884.822.922,00	25.884.822.922,00	0,00	100,00
5.02	KEUANGAN	32.866.807.668,00	32.866.807.668,00	0,00	100,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.755.799.013,00	4.755.799.013,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.866.807.668,00	32.866.807.668,00	0,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
5.02	KEUANGAN	40.866.807.668,00	40.348.933.305,00	(517.874.363,00)	98,73
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.000.000.000,00	7.482.125.637,00	(517.874.363,00)	93,53
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00	7.482.125.637,00	(517.874.363,00)	93,53
	PEMBIAYAAN NETTO	24.866.807.668,00	25.384.682.031,00	517.874.363,00	102,08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	30.877.491.772,00	30.877.491.772,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.178.942.369.555,00	944.314.942.625,00	80,10	878.932.689.941,00
4.1.01	Pajak Daerah	789.769.680.391,00	573.381.060.252,00	72,60	539.805.674.041,00
4.1.02	Retribusi Daerah	350.923.371.865,00	336.443.197.168,00	95,87	35.321.450.150,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.600.932.217,00	19.600.932.217,00	100,00	21.844.221.657,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.648.385.082,00	14.889.752.988,00	79,84	281.961.344.093,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.552.116.912.460,00	2.535.579.868.449,00	99,35	2.360.342.962.129,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.243.493.030.000,00	2.226.087.824.008,00	99,22	2.068.190.600.021,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	308.623.882.460,00	309.492.044.441,00	100,28	292.152.362.108,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.468.762.014,00	10.893.241.588,00	75,29	10.272.840.346,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	14.468.762.014,00	10.893.241.588,00	75,29	10.272.840.346,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.745.528.044.029,00	3.490.788.052.662,00	93,20	3.249.548.492.416,00
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.709.222.572.109,53	2.561.521.309.939,00	94,55	2.425.562.062.591,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.393.436.743.654,94	1.325.832.224.608,00	95,15	1.321.436.650.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.124.845.835.636,06	1.050.074.683.873,00	93,35	948.772.846.825,00
5.1.05	Belanja Hibah	184.331.442.818,53	179.022.715.458,00	97,12	147.121.371.516,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.608.550.000,00	6.591.686.000,00	99,74	8.231.193.500,00
5.2	BELANJA MODAL	478.168.111.554,47	428.320.239.751,00	89,58	360.811.320.041,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	24.961.855.650,00	1.161.432.715,00	4,65	748.902.305,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.776.035.310,00	132.027.958.530,00	95,83	111.613.710.440,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.445.430.905,47	93.613.564.317,00	90,50	91.356.409.648,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.367.819.941,00	188.198.027.641,00	94,87	133.901.375.096,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.016.980.248,00	12.970.147.048,00	99,64	22.895.922.552,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	599.989.500,00	349.109.500,00	58,19	295.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.775.000.000,00	397.087.640,00	6,88	119.786.500,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000,00	397.087.640,00	6,88	119.786.500,00
5.4	BELANJA TRANSFER	577.229.168.033,00	495.056.605.591,00	85,76	495.591.536.367,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	119.439.270.033,00	37.417.907.591,00	31,33	31.058.297.367,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	457.789.898.000,00	457.638.698.000,00	99,97	464.533.239.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.770.394.851.697,00	3.485.295.242.921,00	92,44	3.282.084.705.499,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.866.807.668,00)	5.492.809.741,00	(22,09)	(32.536.213.083,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.866.807.668,00	32.866.807.668,00	100,00	69.969.842.685,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.866.807.668,00	32.866.807.668,00	100,00	69.969.842.685,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00	7.482.125.637,00	93,53	4.566.821.934,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	2.482.125.637,00	82,74	3.066.821.934,00
	PEMBIAYAAN NETTO	24.866.807.668,00	25.384.682.031,00	102,08	65.403.020.751,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	30.877.491.772,00	0,00	32.866.807.668,00





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.080.221.317.587,00	1.040.833.634.333,00	104.971.642.337,00	103.835.956.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.080.221.317.587,00	1.040.833.634.333,00	104.971.642.337,00	103.835.956.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.080.221.317.587,00	1.040.833.634.333,00	104.971.642.337,00	103.835.956.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	744.845.968.647,00	719.353.066.019,00	116.252.000,00	112.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.587.000,00	98.596.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.970.000,00	22.243.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45.637.000,00	29.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000,00	10.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.330.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.330.000,00	2.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.720.000,00	6.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.600.000,00	26.393.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	740.874.792.114,00	716.244.822.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	740.776.992.114,00	716.162.122.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danrnnpengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.000.000,00	64.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.170.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.170.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.500.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.500.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.400.836.462,00	762.601.635,00	115.585.000,00	111.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.946.600,00	27.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000,00	0,00	115.585.000,00	111.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194.000.000,00	185.427.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	33.726.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.651.000,00	23.380.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000,00	33.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.060.211.862,00	458.671.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.921.754.671,00	1.821.734.061,00	667.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	787.444.000,00	714.196.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.134.310.671,00	1.107.537.830,00	667.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.328.400,00	396.461.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.328.400,00	119.551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	25.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	98.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.000.000,00	152.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	315.740.478.940,00	303.956.088.314,00	104.818.160.337,00	103.723.406.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	150.516.840.073,00	147.967.758.290,00	86.626.978.061,00	86.065.536.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	1.432.994.000,00	1.361.206.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	169.660.000,00	144.886.050,00	949.875.911,00	907.183.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	397.522.000,00	377.655.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	181.133.000,00	172.001.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	200.382.166,00	191.997.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	122.000.000,00	112.797.844,00	52.231.969.000,00	52.231.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	9.097.943,00	0,00	955.052.000,00	901.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	134.999.900,00	133.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.000.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	305.000.000,00	301.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000,00	12.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	129.298.410.018,00	129.274.276.306,00	25.847.753.157,00	25.768.458.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	190.000.000,00	189.378.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0,00	0,00	2.223.303.000,00	2.117.005.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	125.604.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	47.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	20.000.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00	49.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.000.000,00	24.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00	0,00	131.250.000,00	129.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	75.000.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	2.854.780.993,00	2.648.361.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	370.500.410,00	286.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	275.646.000,00	118.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	16.989.384.636,00	15.031.875.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	84.808.153.318,00	82.063.312.299,00	17.530.854.251,00	17.089.021.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	681.558.400,00	656.381.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	1.524.105.300,00	1.454.419.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	348.142.700,00	331.324.300,00	348.142.700,00	323.877.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	21.573.381.697,00	19.559.082.010,00	2.450.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	145.196.800,00	137.606.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.211.336.500,00	2.100.708.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.904.541.047,00	2.753.863.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.474.089.825,00	1.403.929.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	116.452.300,00	93.161.500,00	2.531.647.100,00	2.531.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.024.300.000,00	1.024.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	71.900.000,00	59.370.000,00	2.814.700.000,00	2.704.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	123.750.000,00	118.223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	165.000.000,00	129.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	219.950.000,00	219.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.602.938.509,00	50.580.796.306,00	8.969.347.021,00	8.965.899.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	112.200.000,00	112.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000,00	99.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	95.734.000,00	95.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	20.000.000,00	19.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000,00	99.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	440.316.000,00	340.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	94.900.000,00	36.132.000,00	501.403.730,00	294.227.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	249.250.000,00	249.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	26.250.000,00	26.078.500,00	157.500.000,00	156.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	85.000.000,00	79.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.488.523.940,00	2.379.926.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	29.360.705.800,00	29.071.441.544,00	592.792.550,00	568.848.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	290.000.000,00	286.094.805,00	25.811.020,00	25.811.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	157.404.500,00	66.682.260,00	243.528.000,00	219.784.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	47.086.000,00	44.700.000,00	260.414.000,00	260.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	400.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	150.098.500,00	147.088.000,00	50.000.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100.000.000,00	99.909.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5.000.000,00	3.995.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2.615.000.000,00	2.613.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100.050.000,00	99.830.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	24.369.410.000,00	24.269.012.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	199.800.100,00	199.129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	30.021.300,00	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	35.003.200,00	34.729.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.300.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	40.000.000,00	39.496.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35.003.200,00	15.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	501.529.000,00	471.959.329,00	11.049.530,00	11.049.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	225.000.000,00	220.365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.000.000,00	49.926.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	51.054.779.749,00	44.853.576.181,00	67.535.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	5.896.737.749,00	4.695.589.261,00	33.815.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.426.900.000,00	1.409.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	16.598.180.000,00	16.169.487.420,00	33.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	58.450.000,00	58.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	27.074.512.000,00	22.520.377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	202.770.000,00	60.650.000,00	37.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	202.770.000,00	60.650.000,00	37.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	67.500.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	270.000,00	0,00	37.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	67.500.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	67.500.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	19.387.100.000,00	17.463.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.387.100.000,00	17.463.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.000.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.382.100.000,00	17.459.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	600.844.429.737,00	576.797.364.312,00	48.944.615.929,00	43.858.452.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	291.590.759.147,00	277.505.193.182,00	21.506.872.144,00	16.928.238.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	181.037.408.670,00	172.139.163.734,00	8.874.893.281,00	7.169.013.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.437.000,00	89.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.120.000,00	7.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.333.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.984.000,00	69.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	105.867.809.744,00	103.024.787.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	105.726.302.444,00	102.906.971.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danrnnPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.119.000,00	27.021.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	58.104.900,00	52.380.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49.283.400,00	38.414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.324.956,00	75.577.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	56.535.000,00	47.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.789.956,00	27.695.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.136.238.855,00	836.463.025,00	142.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.766.120,00	1.760.000,00	142.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.324.329,00	93.119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.593.406,00	16.577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.883.000,00	725.005.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	330.610.400,00	112.780.400,00	4.949.389.600,00	3.997.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	0,00	2.850.000.000,00	2.848.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	50.610.400,00	0,00	949.389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	112.780.400,00	1.150.000.000,00	1.149.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.502.310.499,00	1.426.318.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	864.714.935,00	791.261.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	637.595.564,00	635.056.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.270.814,00	195.054.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.889.814,00	151.433.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.381.000,00	43.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	71.704.406.402,00	66.379.160.275,00	3.782.991.681,00	3.171.313.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	71.704.406.402,00	66.379.160.275,00	3.782.991.681,00	3.171.313.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90.410.849.755,00	86.703.783.656,00	12.631.978.863,00	9.759.225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.858.410.608,00	7.105.849.410,00	12.250.605.363,00	9.394.587.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	651.558.000,00	318.943.408,00	7.677.880.000,00	6.054.007.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	650.362.000,00	312.909.300,00	1.505.000.000,00	320.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.650.000,00	10.100.000,00	3.067.725.363,00	3.019.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	65.983.000,00	53.761.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.166.157.608,00	6.126.633.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	294.700.000,00	283.501.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.975.297.147,00	79.186.296.350,00	381.373.500,00	364.637.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	212.348.000,00	192.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	150.500.100,00	99.886.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	463.561.900,00	461.714.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	59.200.000,00	54.046.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	53.690.000,00	52.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	50.000.000,00	30.953.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.810.000,00	6.410.000,00	12.450.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.000.000,00	29.539.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.095.081.464,00	1.041.290.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	68.977.000,00	56.202.000,00	6.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	556.099.600,00	541.665.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	394.028.000,00	364.331.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	780.145.000,00	450.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	550.000.000,00	548.073.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	382.490.000,00	327.714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	599.423.523,00	553.264.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	183.379.850,00	164.178.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	252.432.500,00	204.537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	117.018.100,00	108.168.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	133.234.300,00	122.058.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	90.000.000,00	48.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.200.175.400,00	1.092.953.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.247.094.620,00	44.667.402.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	97.000.000,00	67.593.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	27.777.387.890,00	26.768.245.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	198.372.000,00	150.035.918,00	299.500.000,00	299.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	149.666.900,00	145.238.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	120.875.000,00	95.973.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	135.695.800,00	92.220.800,00	14.304.200,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	424.824.700,00	412.216.945,00	48.175.300,00	38.537.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.000.000,00	9.895.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	20.000.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	15.218.500,00	12.658.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	25.902.000,00	23.876.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	299.665.000,00	186.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	51.930.000,00	29.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	51.930.000,00	29.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525.212.000,00	382.392.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	56.412.000,00	26.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	278.800.000,00	224.143.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	190.000.000,00	131.624.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	12.161.001.722,00	10.842.361.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	213.892.500,00	101.644.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	68.587.500,00	40.119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	145.305.000,00	61.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendencygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	10.165.425.544,00	9.101.424.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	9.982.397.544,00	8.958.055.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	183.028.000,00	143.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.781.683.678,00	1.639.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.781.683.678,00	1.639.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	525.131.000,00	466.729.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	88.730.000,00	54.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	88.730.000,00	54.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	255.472.000,00	250.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	255.472.000,00	250.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	180.929.000,00	161.873.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	180.929.000,00	161.873.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.456.368.000,00	7.353.154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.937.440.000,00	6.921.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6.937.440.000,00	6.921.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	496.088.000,00	410.314.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	496.088.000,00	410.314.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.840.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22.840.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT DR.DRADJAT PRAWIRANEGARA	309.253.670.590,00	299.292.171.130,00	27.437.743.785,00	26.930.214.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	306.449.716.133,00	296.825.971.622,00	2.762.485.000,00	2.736.547.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.944.255.821,00	74.144.827.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77.944.255.821,00	74.144.827.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	228.490.460.312,00	222.681.144.029,00	2.762.485.000,00	2.736.547.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	228.490.460.312,00	222.681.144.029,00	2.762.485.000,00	2.736.547.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.803.954.457,00	2.466.199.508,00	24.675.258.785,00	24.193.666.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	403.954.457,00	220.747.950,00	24.675.258.785,00	24.193.666.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	15.079.213.242,00	14.960.964.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	403.954.457,00	220.747.950,00	9.596.045.543,00	9.232.701.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.400.000.000,00	2.245.451.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.400.000.000,00	2.245.451.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	156.850.457.762,53	140.948.864.296,00	274.574.877.480,47	258.316.804.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	156.850.457.762,53	140.948.864.296,00	274.574.877.480,47	258.316.804.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.647.724.772,00	32.409.644.384,00	1.588.747.213,00	1.576.637.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	532.482.603,00	343.194.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	348.704.103,00	179.323.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	183.778.500,00	163.870.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.833.308.000,00	27.095.190.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.805.528.000,00	27.073.410.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	27.780.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.360.202.470,00	1.197.408.950,00	1.566.418.713,00	1.555.146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.002.400,00	17.776.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	496.419.170,00	491.794.300,00	1.566.418.713,00	1.555.146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.130.900,00	121.214.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.130.000,00	30.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	657.460.000,00	502.936.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.031.988.899,00	2.933.323.070,00	22.328.500,00	21.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.035.895.582,00	959.036.344,00	10.403.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	744.139.532,00	735.438.258,00	9.741.500,00	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.245.563.785,00	1.232.458.468,00	2.184.000,00	2.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875.642.800,00	826.427.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	512.910.800,00	486.565.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.460.000,00	134.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	223.272.000,00	205.602.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.367.079.707,00	7.191.832.794,00	6.432.067.221,00	5.839.913.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.595.026.195,00	2.527.821.914,00	96.566.665,00	96.566.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	136.537.270,00	132.867.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	117.977.600,00	117.977.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.0091	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	50.000.000,00	49.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.774.712.725,00	1.714.513.600,00	96.566.665,00	96.566.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	408.610.600,00	406.316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	107.188.000,00	106.676.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.772.053.512,00	4.664.010.880,00	6.335.500.556,00	5.743.346.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.028.326.000,00	984.088.000,00	6.293.781.556,00	5.701.896.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.578.758.787,00	1.566.613.944,00	41.719.000,00	41.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	241.899.400,00	233.055.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	468.106.000,00	438.680.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	183.858.800,00	175.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.271.104.525,00	1.265.798.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	24.014.229.916,00	19.787.381.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	24.014.229.916,00	19.787.381.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	311.420.368,00	289.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	136.842.148,00	135.224.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.524.132.066,00	689.570.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.878.689.650,00	12.197.304.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8.953.145.684,00	6.384.554.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	210.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.435.828.276,00	1.169.465.994,00	6.770.797.650,00	6.547.110.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.435.828.276,00	1.169.465.994,00	6.770.797.650,00	6.547.110.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.013.136.000,00	863.637.200,00	228.001.200,00	228.001.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	422.692.276,00	305.828.794,00	6.542.796.450,00	6.319.108.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.569.994.004,00	11.138.114.169,00	61.078.881,00	60.693.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.569.994.004,00	11.138.114.169,00	61.078.881,00	60.693.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	1.405.292.538,00	1.237.464.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	547.708.049,00	545.911.028,00	61.078.881,00	60.693.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.169.880.917,00	6.921.708.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	572.112.500,00	558.030.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.869.276.949,00	2.658.337.429,00	4.505.148.875,00	4.236.880.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.869.276.949,00	2.658.337.429,00	4.505.148.875,00	4.236.880.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	49.904.632,00	30.073.632,00	2.087.439.875,00	1.960.610.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	2.187.953.357,00	2.108.806.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	269.065.932,00	163.994.862,00	2.417.709.000,00	2.276.270.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	362.353.028,00	355.462.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19.980.494.567,53	17.079.831.392,00	66.489.994.462,47	61.225.883.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	19.980.494.567,53	17.079.831.392,00	66.489.994.462,47	61.225.883.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.613.527.039,53	3.695.760.599,00	3.282.688.861,47	3.135.901.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14.111.527.128,00	12.467.883.093,00	63.207.305.601,00	58.089.981.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.255.440.400,00	916.187.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.341.226.648,00	1.434.491.198,00	11.196.759.588,00	10.303.353.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.341.226.648,00	1.434.491.198,00	11.196.759.588,00	10.303.353.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2.341.226.648,00	1.434.491.198,00	11.196.759.588,00	10.303.353.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	44.986.905.923,00	41.680.624.320,00	177.530.283.590,00	168.526.332.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	44.986.905.923,00	41.680.624.320,00	177.530.283.590,00	168.526.332.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	260.286.205,00	246.126.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.891.471.896,00	3.836.089.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	830.805.782,00	627.962.682,00	28.111.842.000,00	26.572.616.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	19.900.313.572,00	17.869.008.323,00	130.775.818.362,00	124.354.485.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	973.698.040,00	963.206.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	234.297.900,00	119.369.600,00	1.415.572.000,00	1.332.041.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	764.667.043,00	269.424.412,00	6.340.912.478,00	6.017.204.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.374.415.084,00	1.358.100.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	606.356.742,00	449.948.000,00	9.220.296.000,00	8.672.009.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	16.005.667.309,00	15.930.789.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan	144.926.350,00	10.599.000,00	1.665.842.750,00	1.577.974.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.212.780.000,00	3.176.269.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	574.913.000,00	573.551.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	144.929.300,00	144.929.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	429.983.700,00	428.622.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	157.480.500,00	123.345.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	94.480.896,00	60.345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	58.017.264,00	58.017.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	4.982.340,00	4.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2.480.386.500,00	2.479.372.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	1.274.056.500,00	1.273.042.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	1.206.330.000,00	1.206.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.424.917.000,00	3.222.871.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	40.000.000,00	36.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	40.000.000,00	36.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.537.698.686,00	2.423.804.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	52.503.000,00	51.384.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	141.268.000,00	120.004.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	267.920.000,00	266.414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1.544.001.686,00	1.492.033.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	532.006.000,00	493.967.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	279.483.472,00	265.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	279.483.472,00	265.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	567.734.842,00	496.931.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	112.666.962,00	89.659.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	82.000.000,00	69.986.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR	112.056.368,00	100.306.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	261.011.512,00	236.978.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.222.492.080,00	23.822.116.369,00	699.436.400,00	668.079.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.222.492.080,00	23.822.116.369,00	699.436.400,00	668.079.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.840.308.318,00	9.209.092.010,00	278.547.400,00	270.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	729.662.991,00	722.957.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.337.126,00	99.279.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.300.000,00	81.544.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	544.025.865,00	542.134.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.654.546.116,00	6.125.317.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.375.000.000,00	5.851.593.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	259.546.116,00	253.984.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.000.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.240.109,00	278.025.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.405.412,00	15.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.591.637,00	148.031.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.931.060,00	38.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.312.000,00	58.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.261.610,00	16.426.000,00	278.547.400,00	270.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.261.610,00	16.426.000,00	278.547.400,00	270.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.385.977.239,00	1.345.982.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	636.044.344,00	602.924.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	749.932.895,00	743.057.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	748.620.253,00	720.382.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	490.668.600,00	473.457.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.334.033,00	187.750.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.617.620,00	59.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	869.037.264,00	829.347.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	453.000.000,00	451.408.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	90.800.000,00	90.357.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	344.650.000,00	343.501.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	88.366.700,00	70.658.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	88.366.700,00	70.658.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	18.150.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	186.364.664,00	177.867.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	186.364.664,00	177.867.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	123.155.900,00	112.312.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	123.155.900,00	112.312.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.557.846.726,00	5.257.190.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.690.283.000,00	1.655.868.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.690.283.000,00	1.655.868.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.867.563.726,00	3.601.322.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	291.779.600,00	286.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	3.575.784.126,00	3.314.528.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6.393.692.977,00	6.153.976.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	6.393.692.977,00	6.153.976.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.393.692.977,00	6.153.976.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.561.606.795,00	2.372.509.987,00	420.889.000,00	397.324.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.561.606.795,00	2.372.509.987,00	420.889.000,00	397.324.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.561.606.795,00	1.439.311.845,00	420.889.000,00	397.324.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.000.000.000,00	933.198.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	29.385.191.847,00	28.144.064.865,00	58.175.000,00	55.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.812.126.354,00	13.336.761.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.946.055.117,00	10.540.088.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	166.749.800,00	166.397.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.768.600,00	87.768.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.981.200,00	28.679.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.598.229.000,00	8.260.606.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.514.529.000,00	8.176.906.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	209.304.000,00	208.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	209.304.000,00	208.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	891.134.329,00	866.143.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.614.000,00	8.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.372.000,00	39.257.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.963.129,00	47.587.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	23.980.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.630.200,00	44.070.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	714.555.000,00	702.634.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.168.288,00	660.063.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.969.544,00	290.808.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	397.198.744,00	369.255.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.469.700,00	378.292.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.231.300,00	61.276.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.819.000,00	288.191.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.419.400,00	28.825.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.866.071.237,00	2.796.672.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.588.481.337,00	2.545.857.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	206.926.600,00	206.926.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.309.337.487,00	1.290.938.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	127.412.250,00	126.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	344.505.000,00	339.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	594.900.000,00	581.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	256.612.000,00	229.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	37.850.000,00	37.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	22.112.000,00	22.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	68.250.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	20.977.900,00	20.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	20.977.900,00	20.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.573.065.493,00	14.807.303.698,00	58.175.000,00	55.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.984.660.106,00	9.310.511.183,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.461.870,00	107.999.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.210.870,00	47.918.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.251.000,00	60.080.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.842.004.576,00	7.294.094.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.773.515.474,00	7.225.779.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danrnnpengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.489.102,00	68.315.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.044.586,00	135.044.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	135.044.586,00	135.044.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.201.324,00	522.349.300,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.030.800,00	12.959.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.585.000,00	15.284.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.590.800,00	55.513.700,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.549.724,00	27.044.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	71.450.000,00	69.354.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.995.000,00	342.192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.888.799,00	678.142.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	93.137.289,00	93.137.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	442.900.000,00	421.797.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.851.510,00	163.208.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	626.058.951,00	572.880.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.423.551,00	96.587.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	462.850.000,00	431.951.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.905.400,00	29.341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.880.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.705.121.551,00	2.666.415.039,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	257.000.000,00	248.592.288,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	114.000.000,00	113.246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	143.000.000,00	135.345.888,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.987.780.592,00	1.958.686.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.387.185.580,00	1.379.625.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	272.070.440,00	257.755.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	328.524.572,00	321.305.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	460.340.959,00	459.136.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	234.620.000,00	234.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	225.720.959,00	225.116.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.883.283.836,00	2.830.377.476,00	48.725.000,00	48.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.501.561.469,00	2.449.501.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.598.568.265,00	1.565.028.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	902.993.204,00	884.472.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	381.722.367,00	380.876.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	381.722.367,00	380.876.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	0,00	0,00	48.725.000,00	48.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0,00	0,00	48.725.000,00	48.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	11.441.311.303,00	10.281.285.750,00	80.082.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	11.441.311.303,00	10.281.285.750,00	80.082.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.846.875.681,00	7.045.502.670,00	80.082.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.278.150,00	29.216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.611.900,00	13.311.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.277.850,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.146.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.642.400,00	12.643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.183.299.000,00	5.730.297.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.183.299.000,00	5.730.297.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	514.332.072,00	382.545.143,00	80.082.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.971.700,00	6.941.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	80.082.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.290.600,00	34.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.597.000,00	24.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.200,00	13.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407.472.572,00	303.679.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.629.459,00	752.227.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	499.658.200,00	438.158.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.971.259,00	314.068.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.337.000,00	151.215.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.337.000,00	151.215.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.065.805.803,00	1.062.686.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.538.750,00	10.634.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	13.538.750,00	10.634.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.052.267.053,00	1.052.051.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	416.486.400,00	416.483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	611.878.753,00	611.692.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	21.981.900,00	21.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	5.950.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5.950.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5.950.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	228.176.405,00	171.383.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	136.462.803,00	82.859.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	24.117.400,00	19.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	12.329.600,00	6.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	6.000.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.700.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	47.660.803,00	23.391.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	24.055.000,00	17.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.900.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	3.975.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.625.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	4.100.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	91.713.602,00	88.524.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.575.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	18.350.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	26.629.500,00	24.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	44.159.102,00	44.159.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.421.957.364,00	1.145.371.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.421.957.364,00	1.145.371.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	583.167.264,00	348.400.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	41.990.100,00	22.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	796.800.000,00	774.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	791.819.700,00	770.249.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	749.420.000,00	728.107.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	649.350.000,00	629.187.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	100.070.000,00	98.919.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	42.399.700,00	42.142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	25.511.900,00	25.308.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	16.887.800,00	16.834.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	80.726.350,00	80.166.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	80.726.350,00	80.166.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	54.726.350,00	54.166.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.667.395.510,00	9.971.812.406,00	722.181.500,00	703.139.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	10.667.395.510,00	9.971.812.406,00	722.181.500,00	703.139.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10.667.395.510,00	9.971.812.406,00	722.181.500,00	703.139.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.398.586.409,99	7.793.747.092,00	722.181.500,00	703.139.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.937.020,00	143.683.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.098.920,00	43.904.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.600.000,00	16.001.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	21.238.100,00	21.021.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000,00	62.755.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.413.123.000,00	6.001.809.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.398.123.000,00	5.988.231.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000,00	13.578.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000,00	6.197.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000,00	6.197.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	524.100.800,00	511.071.090,00	22.181.500,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.408.200,00	7.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.569.600,00	175.078.100,00	22.181.500,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.603.000,00	47.055.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.520.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.000.000,00	259.232.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	700.000.000,00	684.739.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	700.000.000,00	684.739.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946.383.406,46	804.298.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	467.747.236,46	356.362.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	478.636.170,00	447.936.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.042.183,53	326.687.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.233.000,00	167.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.360.000,00	83.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.449.183,53	76.369.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	322.950.000,00	313.614.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	322.950.000,00	313.614.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	176.250.000,00	170.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	146.700.000,00	143.574.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.189.685.600,00	1.144.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.008.378.400,00	964.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.008.378.400,00	964.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	72.000.000,00	71.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	72.000.000,00	71.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	61.807.200,00	61.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	61.807.200,00	61.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	47.500.000,00	47.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	47.500.000,00	47.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	420.810.500,01	417.790.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	112.810.500,01	112.178.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	35.079.550,00	34.897.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	40.000.000,00	39.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	37.730.950,01	37.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	207.000.000,00	205.689.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	207.000.000,00	205.689.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	101.000.000,00	99.922.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	40.000.000,00	39.130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	61.000.000,00	60.791.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	335.363.000,00	302.394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	157.440.000,00	135.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	20.000.000,00	19.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	137.440.000,00	116.451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	177.923.000,00	166.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	177.923.000,00	166.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.638.990.598,00	1.348.377.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.638.990.598,00	1.348.377.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	485.849.000,00	380.042.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	51.849.000,00	39.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	20.000.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	17.599.000,00	8.147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	434.000.000,00	340.045.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	18.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	404.000.000,00	321.416.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	235.597.900,00	197.134.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	108.727.900,00	99.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	73.327.900,00	66.583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.400.000,00	32.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	92.360.000,00	64.609.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	92.360.000,00	64.609.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.510.000,00	33.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.510.000,00	33.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	45.000.000,00	38.438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	38.438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	38.438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	6.000.000,00	5.769.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.000.000,00	5.769.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	6.000.000,00	5.769.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	301.837.150,00	291.982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	31.870.150,00	31.219.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	31.870.150,00	31.219.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	269.967.000,00	260.762.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	244.967.000,00	235.823.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.939.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	564.706.548,00	435.009.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60.657.100,00	48.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	60.657.100,00	48.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	435.531.448,00	328.319.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	292.411.448,00	257.525.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	143.120.000,00	70.793.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.518.000,00	58.039.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	34.008.000,00	29.093.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	34.510.000,00	28.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	957.688.819,00	886.887.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	957.688.819,00	886.887.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	406.000.000,00	375.414.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	406.000.000,00	375.414.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	356.000.000,00	325.464.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	50.000.000,00	49.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	442.780.419,00	421.302.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	37.500.000,00	25.189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20.000.000,00	15.189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	319.120.419,00	316.982.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	284.923.519,00	284.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	34.196.900,00	32.697.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	86.160.000,00	79.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	46.160.000,00	41.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	40.000.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	20.000.000,00	19.880.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10.000.000,00	9.934.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10.000.000,00	9.934.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.945.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.945.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	88.908.400,00	70.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	88.908.400,00	70.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	88.908.400,00	70.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	68.900.000,00	26.680.000,00	4.595.721.175,00	437.747.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	68.900.000,00	26.680.000,00	4.595.721.175,00	437.747.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	15.300.000,00	10.800.000,00	1.482.240.000,00	3.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	15.300.000,00	10.800.000,00	1.482.240.000,00	3.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	15.300.000,00	10.800.000,00	1.482.240.000,00	3.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	53.600.000,00	15.880.000,00	3.113.481.175,00	434.661.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	53.600.000,00	15.880.000,00	3.113.481.175,00	434.661.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	53.600.000,00	15.880.000,00	3.113.481.175,00	434.661.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	27.478.565.791,00	25.861.570.833,00	47.698.600,00	15.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27.478.565.791,00	25.861.570.833,00	47.698.600,00	15.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.768.513.900,00	12.835.584.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.577.000,00	122.410.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.827.500,00	47.901.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.859.500,00	72.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.759.368.780,00	10.954.786.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.686.649.000,00	10.882.118.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.000.000,00	54.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.979.780,00	8.979.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.685.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.991.200,00	132.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	144.891.200,00	102.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.669.600,00	267.450.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.557.800,00	55.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	69.928.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.111.800,00	7.111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000,00	129.996.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.176.349.586,00	1.115.245.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	429.377.122,00	409.387.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	432.500.000,00	397.627.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.200.000,00	27.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284.272.464,00	281.181.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.557.734,00	242.791.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	247.665.734,00	242.791.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	195.050.000,00	95.486.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	95.050.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	95.050.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	93.626.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	100.000.000,00	93.626.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	599.606.580,00	543.017.651,00	30.924.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	480.500.080,00	424.720.501,00	30.924.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	146.250.000,00	144.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	11.428.000,00	11.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	322.822.080,00	268.930.501,00	30.924.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	119.106.500,00	118.297.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	9.004.000,00	8.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	110.102.500,00	109.329.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	860.534.350,00	844.073.300,00	16.774.000,00	15.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	860.534.350,00	844.073.300,00	16.774.000,00	15.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	93.755.000,00	93.587.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	739.157.600,00	725.466.000,00	16.774.000,00	15.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	7.760.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	19.861.750,00	19.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	32.875.000,00	19.666.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	32.875.000,00	19.666.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.375.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	29.500.000,00	16.366.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	150.412.000,00	141.451.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.412.000,00	141.451.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	35.862.000,00	30.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	114.550.000,00	111.381.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	112.201.150,00	88.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.201.150,00	88.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	75.291.150,00	63.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	12.440.000,00	10.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	24.470.000,00	15.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	89.915.500,00	89.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.915.500,00	89.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	89.915.500,00	89.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	83.129.450,00	77.003.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	83.129.450,00	77.003.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	67.098.500,00	62.641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	16.030.950,00	14.362.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.586.327.861,00	11.127.287.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	11.571.702.861,00	11.112.662.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	39.103.000,00	38.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	70.028.000,00	69.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.004.029.356,00	967.406.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	10.458.542.505,00	10.037.348.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.446.331.682,00	16.817.149.925,00	1.732.956.500,00	1.320.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.446.331.682,00	16.817.149.925,00	1.732.956.500,00	1.320.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.951.663.182,00	16.392.155.566,00	1.732.956.500,00	1.320.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	336.060.664,00	324.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.720.664,00	67.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.790.000,00	257.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.259.797.255,00	13.129.721.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.646.438.000,00	11.522.601.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.613.359.255,00	1.607.120.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.292.974.500,00	1.935.643.769,00	1.732.956.500,00	1.320.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.658.500,00	13.689.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.342.200,00	2.100.000,00	1.732.956.500,00	1.320.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.641.914.400,00	1.295.711.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.622.400,00	41.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	81.402.000,00	81.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510.035.000,00	501.350.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	913.902.763,00	875.429.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	359.120.000,00	343.129.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.900.000,00	71.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.882.763,00	460.484.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.928.000,00	126.525.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.928.000,00	126.525.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	150.149.200,00	120.695.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	150.149.200,00	120.695.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	52.599.200,00	38.525.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	97.550.000,00	82.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	98.337.000,00	74.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	98.337.000,00	74.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	98.337.000,00	74.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	220.426.300,00	204.450.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	91.237.000,00	78.530.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	52.637.000,00	39.930.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	129.189.300,00	125.920.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	92.430.000,00	90.256.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	36.759.300,00	35.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	25.756.000,00	25.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	25.756.000,00	25.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	25.756.000,00	25.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.185.415.718,00	15.907.750.372,00	74.602.000,00	74.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.185.415.718,00	15.907.750.372,00	74.602.000,00	74.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.587.025.258,00	7.741.993.226,00	74.602.000,00	74.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.175.300,00	45.035.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.286.800,00	15.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.888.500,00	29.460.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.774.029.700,00	6.136.274.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.765.306.000,00	6.130.121.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.723.700,00	6.152.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.045.222,00	461.212.638,00	74.602.000,00	74.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.167.800,00	6.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	74.602.000,00	74.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.993.300,00	16.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.316.700,00	111.986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.268.622,00	8.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.668.600,00	10.745.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.630.200,00	288.649.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	727.281.036,00	650.275.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.597.600,00	266.630.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	409.683.436,00	383.644.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.494.000,00	449.194.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302.254.000,00	286.734.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.160.000,00	17.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145.080.000,00	144.850.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	131.196.000,00	83.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	131.196.000,00	83.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	40.000.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	91.196.000,00	76.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	79.505.500,00	38.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	79.505.500,00	38.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	72.675.500,00	34.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6.830.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.966.971.560,00	5.971.977.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.966.971.560,00	5.971.977.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52.500.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	146.860.000,00	128.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	274.994.360,00	272.626.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.565.617.200,00	4.729.958.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	55.450.000,00	35.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	50.000.000,00	27.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	148.075.000,00	147.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	539.575.000,00	533.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	109.900.000,00	78.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.420.717.400,00	2.071.452.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.420.717.400,00	2.071.452.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	88.597.500,00	82.158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	135.203.600,00	86.271.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	42.649.150,00	42.648.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	103.733.000,00	63.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.479.410.100,00	1.238.507.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	27.224.200,00	27.218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	543.899.850,00	531.023.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	27.736.857.462,00	26.443.296.377,00	321.584.800,00	266.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27.736.857.462,00	26.443.296.377,00	321.584.800,00	266.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.342.158.631,00	8.517.726.022,00	321.584.800,00	266.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.119.300,00	30.197.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.799.300,00	18.190.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.320.000,00	12.007.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.343.868.077,00	6.882.535.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.343.868.077,00	6.882.535.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	517.489.402,00	481.007.434,00	321.584.800,00	266.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.485.500,00	7.441.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	321.584.800,00	266.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.998.600,00	44.658.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.530.402,00	18.673.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.490.900,00	7.447.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	433.784.000,00	401.707.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.001.673.552,00	945.126.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.800.000,00	274.205.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	701.873.552,00	670.921.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.568.300,00	178.857.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	261.515.600,00	134.167.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.377.000,00	33.179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.888.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.787.500,00	11.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	683.461.500,00	680.577.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	34.461.500,00	32.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	34.461.500,00	32.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	649.000.000,00	648.027.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	299.000.000,00	298.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	330.000.000,00	329.467.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	20.000.000,00	19.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.337.754.331,00	8.895.753.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.408.795.800,00	2.371.683.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	137.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1.433.599.800,00	1.402.957.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	435.000.000,00	433.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	99.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	50.196.000,00	49.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000,00	248.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.619.907.131,00	3.440.544.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.013.800.000,00	1.993.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.572.526.131,00	1.413.904.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	33.581.000,00	32.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.627.796.400,00	2.456.004.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	134.648.400,00	127.990.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.401.072.500,00	2.289.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	23.001.500,00	383.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	69.074.000,00	37.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	681.255.000,00	627.521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	35.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	28.750.000,00	10.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	617.500.000,00	617.255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	8.373.483.000,00	8.349.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	498.483.000,00	474.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	153.600.000,00	132.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	14.983.000,00	14.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000,00	297.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	29.900.000,00	29.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.875.000.000,00	7.874.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	4.125.000.000,00	4.124.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	33.122.760.507,00	32.290.520.729,00	4.863.569.500,00	4.853.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	33.122.760.507,00	32.290.520.729,00	4.863.569.500,00	4.853.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.864.374.258,32	13.372.253.398,00	48.772.000,00	48.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	196.645.246,00	168.644.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.846.900,00	55.781.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.054.746,00	22.355.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.743.600,00	90.507.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.372.701.039,94	10.038.835.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.231.272.999,94	9.897.497.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	135.328.200,00	135.328.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.099.840,00	6.009.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	263.996.400,00	263.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	263.996.400,00	263.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	785.329.360,38	736.378.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.999.050,00	29.992.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176.961.357,00	176.571.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	141.416.541,00	140.958.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436.952.412,38	388.856.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	48.772.000,00	48.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	48.772.000,00	48.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	921.689.346,00	904.314.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	181.617.300,00	181.617.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	528.183.296,00	510.810.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.888.750,00	211.886.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.324.012.866,00	1.260.083.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	255.117.550,00	249.585.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	659.411.400,00	601.676.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	409.483.916,00	408.821.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15.491.518.058,68	15.369.165.786,00	4.814.797.500,00	4.805.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.341.875.613,68	11.317.712.590,00	4.175.176.000,00	4.168.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	198.778.900,00	198.579.000,00	4.175.176.000,00	4.168.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	11.143.096.713,68	11.119.133.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	443.873.700,00	443.873.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	443.873.700,00	443.873.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	158.208.650,00	137.058.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	158.208.650,00	137.058.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	937.074.614,00	906.801.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	199.291.382,00	189.191.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	434.934.382,00	416.791.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	302.848.850,00	300.818.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.506.463.849,00	1.491.220.000,00	639.621.500,00	636.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	691.463.849,00	689.530.000,00	639.621.500,00	636.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	815.000.000,00	801.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	32.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	32.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	106.858.650,00	106.858.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	106.858.650,00	106.858.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	904.623.882,00	884.101.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	845.221.482,00	845.221.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.402.400,00	38.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.539.100,00	60.539.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60.539.100,00	60.539.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.490.893.464,00	1.273.251.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	128.358.650,00	123.158.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.07.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	128.358.650,00	123.158.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	418.006.100,00	218.006.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.10.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	418.006.100,00	218.006.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	388.852.314,00	388.852.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	388.852.314,00	388.852.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	555.676.400,00	543.234.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	555.676.400,00	543.234.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	27.625.000,00	27.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	27.625.000,00	27.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.04.2.01.0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	27.625.000,00	27.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.248.349.726,00	2.248.299.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.05.2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.248.349.726,00	2.248.299.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.248.349.726,00	2.248.299.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.151.550.640,00	15.496.482.181,00	3.203.939.982,00	3.036.533.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	17.151.550.640,00	15.496.482.181,00	3.203.939.982,00	3.036.533.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.780.978.140,00	11.765.615.201,00	2.341.040.482,00	2.173.634.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.325.918,00	3.225.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.325.918,00	3.225.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.405.328.000,00	5.045.472.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.405.328.000,00	5.045.472.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.743.182,00	27.922.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	44.743.182,00	27.922.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.429.816.038,00	1.304.964.292,00	1.902.191.300,00	1.757.234.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.891.200,00	8.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	0,00	1.902.191.300,00	1.757.234.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.430.700,00	11.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.243.000,00	60.725.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.272.100,00	31.577.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	14.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	68.749.438,00	67.014.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.729.600,00	42.492.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.103.500.000,00	1.068.857.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	438.849.182,00	416.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	438.849.182,00	416.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.593.929.302,00	5.089.260.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	168.837.300,00	167.645.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.105.319.908,00	3.695.023.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.319.772.094,00	1.226.592.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.835.700,00	294.769.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.530.000,00	231.297.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.512.200,00	29.825.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.793.500,00	33.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.797.137.046,00	3.171.306.951,00	49.339.500,00	49.339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.797.137.046,00	3.171.306.951,00	49.339.500,00	49.339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	9.993.954,00	9.993.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	872.675.256,00	649.407.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	19.051.836,00	4.651.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	2.731.316.000,00	2.408.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	164.100.000,00	99.169.840,00	49.339.500,00	49.339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	573.435.454,00	559.560.029,00	813.560.000,00	813.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.190.000,00	3.171.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	490.000,00	471.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	570.245.454,00	556.388.729,00	813.560.000,00	813.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	428.750.000,00	425.791.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	86.554.018,00	76.045.693,00	813.560.000,00	813.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	54.941.436,00	54.551.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.755.671.606,00	10.928.887.577,00	555.527.400,00	19.005.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12.755.671.606,00	10.928.887.577,00	555.527.400,00	19.005.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.671.754.056,00	10.184.822.077,00	555.527.400,00	19.005.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.598.586,00	79.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.118.886,00	24.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.779.700,00	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.700.000,00	34.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.722.632.000,00	8.512.091.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.722.632.000,00	8.512.091.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	115.999.550,00	107.699.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	115.999.550,00	107.699.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	694.449.216,00	675.208.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.325.400,00	7.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.002.750,00	30.002.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.998.066,00	21.465.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	114.223.000,00	107.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.000.000,00	489.933.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	554.633.400,00	19.005.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	554.633.400,00	19.005.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	755.435.248,00	606.070.777,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	458.523.020,00	369.684.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296.912.228,00	236.386.736,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.839.456,00	204.044.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.939.100,00	204.044.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.515.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	69.280.000,00	69.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	69.280.000,00	69.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	69.280.000,00	69.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	55.980.000,00	54.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	55.980.000,00	54.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	55.980.000,00	54.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	30.479.750,00	29.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.479.750,00	29.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.479.750,00	29.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	11.350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	11.350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	295.350.250,00	292.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	295.350.250,00	292.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	295.350.250,00	292.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	302.477.050,00	201.939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	302.477.050,00	201.939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	103.253.500,00	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	141.675.000,00	137.499.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	57.548.550,00	55.889.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	319.000.000,00	96.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	319.000.000,00	96.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	319.000.000,00	96.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.631.769.736,00	12.657.507.734,00	2.764.842.650,00	2.680.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.631.769.736,00	12.657.507.734,00	2.764.842.650,00	2.680.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.491.067.351,00	10.980.244.351,00	515.450.650,00	436.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.111.650,00	232.021.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.911.650,00	27.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.200.000,00	14.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	143.211.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.122.600.307,00	7.825.051.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.104.100.307,00	7.813.301.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.500.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.382.417.462,00	786.258.598,00	515.450.650,00	436.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.586.000,00	22.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.712.000,00	0,00	515.450.650,00	436.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	232.511.600,00	178.504.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173.416.200,00	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.400.000,00	41.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	159.509.000,00	146.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	592.282.662,00	344.264.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.463.303.732,00	1.713.363.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.891.836,00	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	537.000.000,00	357.809.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.892.411.896,00	1.351.313.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.234.184.200,00	393.098.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	467.110.000,00	232.876.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.700.000,00	78.493.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.294.200,00	81.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	199.285.200,00	118.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.385.200,00	18.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	41.385.200,00	18.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	157.900.000,00	99.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	157.900.000,00	99.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	347.786.000,00	281.938.302,00	5.236.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	347.786.000,00	281.938.302,00	5.236.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	347.786.000,00	281.938.302,00	5.236.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	466.863.800,00	394.128.000,00	6.082.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	466.863.800,00	394.128.000,00	6.082.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	211.954.600,00	201.980.000,00	6.082.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	141.000.000,00	97.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	113.909.200,00	94.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	738.644.000,00	597.831.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	738.644.000,00	597.831.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	155.500.000,00	105.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	325.643.200,00	308.871.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	257.500.800,00	183.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	388.123.385,00	285.248.881,00	2.238.074.000,00	2.233.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	388.123.385,00	285.248.881,00	2.238.074.000,00	2.233.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	388.123.385,00	285.248.881,00	2.238.074.000,00	2.233.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.656.316.290,85	13.201.889.400,00	56.827.000,00	56.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	13.656.316.290,85	13.201.889.400,00	56.827.000,00	56.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.176.417.554,85	5.801.670.900,00	56.827.000,00	56.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.402.120,85	115.927.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.219.376,85	11.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.244.300,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.414.744,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.949.200,00	8.858.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.574.500,00	88.562.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.805.441.300,00	4.446.972.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.804.680.000,00	4.446.972.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	761.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	120.686.848,00	120.686.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	120.686.848,00	120.686.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.724.856,00	469.323.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.295.700,00	7.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.092.000,00	10.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.418.300,00	10.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.050.000,00	43.049.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.067.356,00	10.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.706.800,00	18.659.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351.030.000,00	351.029.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.064.700,00	5.990.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	56.827.000,00	56.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	56.827.000,00	56.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.298.430,00	556.982.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.402.000,00	314.085.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.896.430,00	242.896.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.864.000,00	91.778.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.424.000,00	57.110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000,00	2.308.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.940.000,00	32.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	487.304.736,00	410.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	187.304.736,00	110.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	31.910.500,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	73.181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	39.743.000,00	39.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	42.469.436,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.742.594.000,00	6.739.475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	292.594.000,00	291.747.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	292.594.000,00	291.747.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	50.000.000,00	47.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	50.000.000,00	47.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	578.812.954,00	313.904.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	578.812.954,00	313.904.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	578.812.954,00	313.904.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	578.812.954,00	313.904.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	252.022.554,00	251.855.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	50.000.000,00	48.939.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	267.670.400,00	13.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	15.735.836,00	10.891.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	15.735.836,00	10.891.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	15.735.836,00	10.891.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.735.836,00	10.891.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.735.836,00	10.891.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.248.410.000,00	1.219.834.337,00	38.310.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.248.410.000,00	1.219.834.337,00	38.310.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	614.647.000,00	612.241.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Lakukannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	255.000.000,00	254.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	255.000.000,00	254.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	359.647.000,00	357.427.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	294.647.000,00	292.697.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	65.000.000,00	64.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	195.000.000,00	194.382.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	195.000.000,00	194.382.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	195.000.000,00	194.382.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	150.353.000,00	149.492.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.353.000,00	149.492.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	150.353.000,00	149.492.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	288.410.000,00	263.718.035,00	38.310.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	288.410.000,00	263.718.035,00	38.310.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	232.744.000,00	219.128.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	11.690.000,00	11.290.000,00	38.310.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	43.976.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.831.793.482,00	6.479.100.332,00	1.556.385.190,00	1.504.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6.831.793.482,00	6.479.100.332,00	1.556.385.190,00	1.504.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.075.341.632,00	5.730.771.182,00	1.281.399.190,00	1.229.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.760.988,00	83.956.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.416.988,00	65.902.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.624.000,00	5.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.220.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.354.026.419,00	4.107.630.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.342.921.000,00	4.098.267.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.085.419,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.020.000,00	8.613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.100.770,00	652.897.240,00	1.281.399.190,00	1.229.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.789.750,00	10.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.575.550,00	90.670.000,00	1.281.399.190,00	1.229.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194.899.500,00	189.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.019.290,00	41.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	17.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.816.680,00	302.686.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653.375.755,00	643.236.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.918.946,00	256.530.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.456.809,00	386.706.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.077.700,00	243.050.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.561.400,00	148.217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.365.000,00	30.377.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.149.500,00	40.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.001.800,00	23.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	756.451.850,00	748.329.150,00	274.986.000,00	274.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	492.529.300,00	487.447.400,00	274.986.000,00	274.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	10.390.000,00	10.380.000,00	210.000.000,00	209.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.682.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	36.824.500,00	36.431.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.706.800,00	129.396.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	52.534.500,00	51.070.000,00	13.116.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	134.766.500,00	132.356.000,00	51.870.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.625.000,00	91.413.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	263.922.550,00	260.881.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	112.208.700,00	111.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	92.168.700,00	90.805.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	59.545.150,00	58.941.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	433.301.240,00	380.346.680,00	100.535.000,00	95.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	433.301.240,00	380.346.680,00	100.535.000,00	95.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	421.208.340,00	370.361.680,00	100.535.000,00	95.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	108.353.040,00	95.068.260,00	100.535.000,00	95.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	70.615.285,00	62.466.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	37.737.755,00	32.602.000,00	100.535.000,00	95.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	72.968.800,00	50.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	72.968.800,00	50.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	239.886.500,00	224.888.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	226.874.500,00	212.061.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	13.012.000,00	12.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	12.092.900,00	9.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	12.092.900,00	9.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	12.092.900,00	9.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13.763.336.855,00	12.847.694.518,00	186.214.000,00	183.553.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.763.336.855,00	12.847.694.518,00	186.214.000,00	183.553.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	13.763.336.855,00	12.847.694.518,00	186.214.000,00	183.553.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.431.184.357,00	8.754.166.314,00	86.920.000,00	84.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.895.200,00	153.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.495.200,00	71.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.400.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.070.703.701,00	6.508.013.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.059.091.001,00	6.496.562.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.612.700,00	11.451.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	851.372.119,00	796.490.171,00	86.920.000,00	84.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.555.000,00	19.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.186.000,00	2.040.000,00	86.920.000,00	84.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.155.119,00	73.411.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.547.000,00	36.373.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.429.000,00	44.682.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	444.500.000,00	417.635.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.068.582.337,00	1.051.801.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.550.800,00	216.692.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	849.031.537,00	835.109.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.631.000,00	244.396.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.969.000,00	112.092.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.970.000,00	66.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.692.000,00	66.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	840.087.193,00	827.896.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	73.237.000,00	67.654.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	39.352.000,00	34.339.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	33.885.000,00	33.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	108.769.300,00	105.246.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	46.350.200,00	44.552.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	24.033.800,00	22.500.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	38.385.300,00	38.193.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	653.995.893,00	650.909.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	653.995.893,00	650.909.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.323.250.205,00	3.099.710.092,00	99.294.000,00	99.123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	150.000.000,00	145.946.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000,00	145.946.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	52.875.000,00	52.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	52.875.000,00	52.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.120.375.205,00	2.901.013.507,00	99.294.000,00	99.123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	85.960.000,00	75.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.514.789.904,00	1.512.921.554,00	99.294.000,00	99.123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.437.135.750,00	1.240.465.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	82.489.551,00	71.811.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	21.500.000,00	21.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	21.500.000,00	21.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	7.100.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	14.400.000,00	14.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	147.315.100,00	144.577.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	107.049.100,00	105.699.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	107.049.100,00	105.699.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	29.216.000,00	27.827.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.216.000,00	27.827.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.163.787.950,15	1.931.121.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	2.163.787.950,15	1.931.121.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.250.122.537,00	1.067.928.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	363.267.537,00	357.747.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	363.267.537,00	357.747.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	155.977.500,00	154.954.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	155.977.500,00	154.954.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	643.629.500,00	471.992.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	93.374.500,00	55.962.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	225.792.500,00	215.199.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	324.462.500,00	200.830.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	87.248.000,00	83.233.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	87.248.000,00	83.233.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	417.079.946,00	378.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	417.079.946,00	378.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	112.079.946,00	109.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000,00	164.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	58.000.000,00	57.853.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	58.000.000,00	57.853.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	58.000.000,00	57.853.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	438.585.467,15	426.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	438.585.467,15	426.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	323.585.467,15	311.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	38.376.386.511,00	36.199.932.747,00	1.234.691.200,00	250.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	38.376.386.511,00	36.199.932.747,00	1.234.691.200,00	250.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.851.073.086,00	25.608.418.846,00	1.229.919.400,00	246.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	314.847.254,00	303.635.100,00	19.630.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	229.847.254,00	229.359.100,00	19.630.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.000.000,00	74.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.301.872.603,00	22.394.710.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.276.468.803,00	22.373.842.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.421.800,00	13.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.982.000,00	6.912.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.978.869,00	161.638.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180.978.869,00	161.638.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	558.166.222,00	529.406.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.606.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.500.000,00	45.017.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	8.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000,00	43.221.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	408.346.400,00	408.276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.319.822,00	14.559.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.500.000,00	8.475.200,00	1.152.145.600,00	192.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.500.000,00	8.475.200,00	1.152.145.600,00	192.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.045.197.838,00	1.890.642.743,00	50.653.800,00	35.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.167.800,00	431.315.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.549.030.038,00	1.459.327.230,00	50.653.800,00	35.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.510.300,00	319.911.100,00	7.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.105.300,00	228.011.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.405.000,00	91.900.000,00	7.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.340.690.932,00	6.930.673.706,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.540.225.000,00	4.365.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.100.075.000,00	4.002.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	440.150.000,00	362.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.673.395.514,00	2.453.829.156,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.094.576.536,00	1.041.463.480,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.578.818.978,00	1.412.365.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	127.070.418,00	111.719.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	119.770.418,00	106.694.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	7.300.000,00	5.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.789.648.769,00	2.436.907.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.221.113.000,00	1.199.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.211.838.000,00	1.192.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	9.275.000,00	7.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.568.535.769,00	1.237.232.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.568.535.769,00	1.237.232.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	545.441.918,00	479.889.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	117.821.000,00	94.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	117.821.000,00	94.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	347.620.918,00	315.938.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	347.620.918,00	315.938.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	80.000.000,00	69.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	80.000.000,00	69.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	172.944.606,00	165.752.598,00	4.644.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	172.944.606,00	165.752.598,00	4.644.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	51.603.500,00	48.157.500,00	4.644.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	65.246.306,00	62.961.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	56.094.800,00	54.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	676.587.200,00	578.290.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	676.587.200,00	578.290.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	325.809.350,00	304.747.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	226.815.300,00	221.036.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	123.962.550,00	52.506.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.597.960.818,00	2.508.850.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.597.960.818,00	2.508.850.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	8.500.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	8.500.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	8.500.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.090.378.744,00	1.090.169.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	160.316.044,00	160.206.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	15.865.000,00	15.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	144.451.044,00	144.436.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	930.062.700,00	929.962.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	930.062.700,00	929.962.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	210.566.000,00	178.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	155.379.500,00	144.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.379.500,00	25.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	125.000.000,00	119.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.036.500,00	19.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	41.036.500,00	19.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	864.838.574,00	847.282.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	864.838.574,00	847.282.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	841.734.574,00	827.437.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	23.104.000,00	19.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	193.045.500,00	167.671.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	193.045.500,00	167.671.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	140.000.000,00	125.651.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	53.045.500,00	42.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	230.632.000,00	221.209.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	230.632.000,00	221.209.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	230.632.000,00	221.209.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.274.309.050,00	1.205.283.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.274.309.050,00	1.205.283.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.231.809.050,00	1.169.283.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.231.809.050,00	1.169.283.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	14.237.500,00	14.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	934.167.550,00	927.990.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	248.416.000,00	227.121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	34.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	11.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	11.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	11.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	31.500.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	31.500.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	31.500.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	211.201.050,00	194.107.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	211.201.050,00	194.107.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	211.201.050,00	194.107.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	211.201.050,00	194.107.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	69.221.050,00	65.976.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	50.000.000,00	49.879.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	42.000.000,00	28.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	85.867.761.288,00	80.201.600.010,00	650.716.800,00	537.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	85.867.761.288,00	80.201.600.010,00	650.716.800,00	537.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	85.867.761.288,00	80.201.600.010,00	650.716.800,00	537.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.831.306.025,00	59.923.226.947,00	570.116.800,00	517.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.332.300,00	248.365.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	271.332.300,00	248.365.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.450.682.813,00	27.951.898.466,00	160.887.000,00	159.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.280.574.263,00	25.784.334.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.596.000.000,00	1.595.887.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danrnnPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	343.636.350,00	342.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	230.472.200,00	228.745.000,00	160.887.000,00	159.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	354.718.753,00	344.482.061,00	22.913.600,00	16.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	232.157.453,00	226.790.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	122.561.300,00	117.692.000,00	22.913.600,00	16.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	946.474.000,00	833.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	357.724.000,00	244.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	588.750.000,00	588.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.383.252.148,00	10.276.771.300,00	89.577.400,00	58.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	332.602.020,00	323.673.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.965.278.728,00	2.880.045.200,00	89.577.400,00	58.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	347.107.600,00	340.039.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	328.397.600,00	326.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000,00	149.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.244.866.200,00	3.241.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.015.000.000,00	3.014.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.616.535.230,00	6.849.772.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.397.435.624,00	3.294.054.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.065.252.190,00	1.453.950.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.153.847.416,00	2.101.767.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.925.535.800,00	2.469.145.475,00	200.282.500,00	200.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.896.800,00	156.062.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.149.059.700,00	909.189.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	84.006.700,00	83.265.000,00	24.182.500,00	24.182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	245.823.100,00	238.996.000,00	176.100.000,00	176.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	576.977.600,00	566.116.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	570.422.100,00	409.546.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	142.349.800,00	105.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.667.515.201,00	1.865.364.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.667.515.201,00	1.865.364.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	225.197.000,00	218.796.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	153.388.300,00	147.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	71.808.700,00	71.467.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	2.146.981.500,00	2.116.155.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	931.900.000,00	927.770.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	299.320.000,00	299.264.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	915.761.500,00	889.120.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6.843.081.280,00	6.749.388.110,00	83.006.300,00	69.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	1.323.766.000,00	1.323.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3.848.345.000,00	3.754.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.670.970.280,00	1.670.943.110,00	83.006.300,00	69.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.403.707.000,00	16.935.114.881,00	20.250.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	716.571.850,00	648.155.831,00	20.250.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	148.773.800,00	118.099.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	396.402.250,00	381.223.750,00	20.250.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	171.395.800,00	148.832.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.167.217.500,00	13.134.069.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.247.980.550,00	3.244.830.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	869.798.850,00	840.572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	9.049.438.100,00	9.048.666.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.314.557.650,00	2.956.563.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	972.744.550,00	866.120.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	2.045.160.300,00	1.805.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danrnnPengelolaan Informasi Hukum	296.652.800,00	284.747.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	205.360.000,00	196.326.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	205.360.000,00	196.326.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.632.748.263,00	3.343.258.182,00	60.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	974.251.000,00	840.763.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	427.954.700,00	340.097.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	358.766.000,00	348.850.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	187.530.300,00	151.815.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.230.373.850,00	1.080.532.300,00	60.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	626.990.650,00	603.369.400,00	28.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	297.404.000,00	292.202.100,00	31.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	305.979.200,00	184.960.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.428.123.413,00	1.421.962.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	744.241.900,00	740.693.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	248.766.605,00	247.564.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	435.114.908,00	433.704.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	109.714.791.238,00	100.862.910.107,00	991.950.000,00	738.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	109.714.791.238,00	100.862.910.107,00	991.950.000,00	738.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.748.723.124,00	56.867.984.921,00	766.950.000,00	664.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.136.800,00	119.233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.648.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.166.500,00	15.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.396.500,00	19.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.535.900,00	21.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16.865.900,00	16.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.798.000,00	27.193.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.726.000,00	8.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.685.250.704,00	49.481.555.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.495.133.204,00	49.306.500.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000,00	87.678.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.476.000,00	10.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	71.005.000,00	68.445.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.636.500,00	8.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	252.994.653,00	212.954.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	252.994.653,00	212.954.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.397.435.500,00	1.329.245.150,00	666.950.000,00	664.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.631.600,00	36.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	285.018.400,00	279.943.750,00	666.950.000,00	664.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	508.428.600,00	485.088.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	197.356.900,00	175.980.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	162.000.000,00	161.991.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.000.000,00	189.517.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.140.801.851,00	1.990.358.818,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.336.089.774,00	1.271.172.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	419.759.118,00	396.725.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.527.000,00	57.021.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272.425.959,00	265.440.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.625.703.616,00	1.130.113.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.178.200.000,00	698.037.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	292.632.416,00	289.199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.871.200,00	142.875.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	857.500.000,00	698.643.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	607.500.000,00	607.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	250.000.000,00	91.143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	2.666.900.000,00	1.905.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	39.360.000,00	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.627.540.000,00	1.896.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	49.966.068.114,00	43.994.925.186,00	225.000.000,00	74.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.209.280.000,00	2.381.437.100,00	225.000.000,00	74.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramrnPembentukan Peraturan Daerah	704.200.000,00	526.613.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.956.800.000,00	1.545.131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	142.260.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganrnnNaskah Akademik	2.260.000,00	0,00	225.000.000,00	74.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	403.760.000,00	169.691.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.050.970.000,00	1.695.769.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	312.230.000,00	303.740.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	304.970.000,00	292.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	632.110.000,00	624.872.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	511.830.000,00	200.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	289.830.000,00	274.031.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	20.649.980.000,00	17.787.376.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5.001.910.000,00	4.201.662.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5.001.910.000,00	4.891.851.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5.011.910.000,00	4.259.611.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5.010.910.000,00	3.830.907.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	200.310.000,00	196.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganrnnPertanggungjawaban Kepala Daerah	423.030.000,00	406.535.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	6.761.688.714,00	6.262.450.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	3.235.000.000,00	3.052.944.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	363.897.755,00	335.904.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	647.215.959,00	573.633.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	384.000.000,00	290.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	288.620.000,00	280.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.842.955.000,00	1.729.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	8.916.320.000,00	8.856.426.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	365.140.000,00	342.526.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	8.551.180.000,00	8.513.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	176.872.000,00	126.741.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	176.872.000,00	126.741.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	8.200.957.400,00	6.884.723.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.093.120.000,00	1.032.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7.107.837.400,00	5.852.568.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	18.351.327.826,00	16.091.612.238,00	433.614.100,00	396.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	PERENCANAAN	18.351.327.826,00	16.091.612.238,00	433.614.100,00	396.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18.351.327.826,00	16.091.612.238,00	433.614.100,00	396.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.630.684.149,00	11.209.134.246,00	433.614.100,00	396.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.598.085,00	226.328.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	183.672.680,00	127.886.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	153.925.405,00	98.442.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.650.405.900,00	8.764.179.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.339.000.000,00	8.536.813.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	106.467.000,00	73.336.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	204.938.900,00	154.028.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.349.868.652,00	1.169.979.177,00	433.614.100,00	396.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.041.300,00	32.132.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	433.614.100,00	396.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.853.700,00	10.853.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	267.480.000,00	242.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.944.652,00	82.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000,00	52.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.749.000,00	61.181.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	827.800.000,00	687.930.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.308.457,00	392.905.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	241.200.000,00	178.288.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.108.457,00	214.616.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	784.503.055,00	655.742.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.400.000,00	278.748.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.756.000,00	139.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	260.347.055,00	237.794.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.910.991.839,00	2.673.689.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.477.354.203,00	1.371.931.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	318.590.265,00	315.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	426.792.338,00	409.763.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	7.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3.192.600,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	232.319.200,00	230.458.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	47.475.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	441.924.800,00	375.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	471.275.200,00	406.881.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	191.168.000,00	175.532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	257.339.200,00	215.146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	22.768.000,00	16.202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	709.191.068,00	653.843.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	384.178.568,00	343.264.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	325.012.500,00	310.578.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	253.171.368,00	241.033.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	141.885.368,00	140.551.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	109.036.000,00	100.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.809.651.838,00	2.208.788.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	600.000.000,00	380.823.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	131.223.600,00	41.888.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22.745.400,00	17.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	33.031.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	33.395.000,00	31.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	193.339.800,00	125.291.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.180.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.180.200,00	13.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	155.905.000,00	131.876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	600.000.000,00	336.566.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.936.800,00	53.624.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	46.014.700,00	10.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	67.576.500,00	36.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	137.890.300,00	107.612.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	64.126.800,00	38.641.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	36.479.700,00	5.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	63.514.900,00	27.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	108.460.300,00	57.133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.609.651.838,00	1.491.398.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	315.000.000,00	299.760.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.000.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	140.000.000,00	129.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	514.651.838,00	492.957.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	365.000.000,00	331.976.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.000.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000,00	12.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	240.000.000,00	219.271.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	KEUANGAN	74.115.969.263,00	65.498.947.285,00	22.210.806.410,00	2.367.108.705,00	5.775.000.000,00	397.087.640,00	577.229.168.033,00	495.056.605.591,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	42.759.403.440,00	38.902.458.520,00	388.207.805,00	378.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.382.007.832,00	33.815.093.229,00	378.207.805,00	371.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.051.900,00	93.045.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.660.500,00	21.434.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.678.200,00	14.698.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.678.200,00	14.698.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.035.000,00	42.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.373.440.012,00	29.214.329.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.369.765.712,00	29.210.873.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.674.300,00	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.186.541.470,00	2.020.406.238,00	286.676.000,00	280.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	71.893.420,00	70.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	286.676.000,00	280.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	215.574.050,00	212.919.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.074.000,00	65.486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.756.000.000,00	1.653.177.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.837.498.010,00	1.714.570.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.996.000,00	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.009.200.000,00	908.166.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	821.302.010,00	799.413.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	884.476.440,00	772.741.600,00	91.531.805,00	90.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.368.640,00	222.124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.160.000,00	30.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	507.157.800,00	482.494.500,00	91.531.805,00	90.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.790.000,00	37.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.377.395.608,00	5.087.365.291,00	10.000.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.377.395.608,00	5.087.365.291,00	10.000.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	102.478.600,00	55.506.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	394.825.750,00	383.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	750.210.300,00	722.498.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	207.659.100,00	205.983.600,00	10.000.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	738.634.922,00	730.921.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	535.483.550,00	470.788.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.069.309.900,00	1.058.802.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	632.189.768,00	596.401.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	429.530.968,00	428.011.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	3.111.750,00	2.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	129.133.800,00	95.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4.800.000,00	4.663.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	324.977.450,00	296.536.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	55.049.750,00	34.750.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	31.356.565.823,00	26.596.488.765,00	21.822.598.605,00	1.988.620.705,00	5.775.000.000,00	397.087.640,00	577.229.168.033,00	495.056.605.591,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.718.753.674,00	14.820.323.638,00	21.822.598.605,00	1.988.620.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	216.259.888,00	206.235.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.259.888,00	86.599.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000,00	5.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.000.000,00	108.800.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.843.034.184,00	10.380.966.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.843.034.184,00	10.380.966.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	183.300.000,00	167.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	175.000.000,00	167.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.955.505.350,00	1.906.244.520,00	57.860.130,00	47.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.897.830,00	77.897.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	57.860.130,00	47.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	270.488.050,00	262.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	186.579.000,00	185.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	216.330.000,00	216.138.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.076.410.470,00	1.072.232.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	109.800.000,00	74.371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	21.567.038.475,00	1.744.785.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	1.193.404.000,00	1.021.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	20.373.634.475,00	723.685.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.459.608.452,00	1.366.534.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	742.440.770,00	736.787.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	717.167.682,00	629.746.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.061.045.800,00	793.092.588,00	197.700.000,00	196.487.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	218.150.800,00	95.581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.060.400,00	250.257.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.050.000,00	239.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	143.843.183,00	197.700.000,00	196.487.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.770.000,00	19.475.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.014.600,00	43.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.828.350.745,00	8.953.023.267,00	0,00	0,00	5.775.000.000,00	397.087.640,00	577.229.168.033,00	495.056.605.591,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.754.167.088,00	3.465.978.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	553.998.000,00	520.530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	572.510.945,00	539.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	297.920.000,00	207.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	136.225.133,00	121.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	798.774.010,00	770.808.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	690.279.000,00	611.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	441.710.000,00	440.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	162.150.000,00	156.126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.600.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.971.853.657,00	2.771.802.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.229.168.033,00	495.056.605.591,00
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	757.156.000,00	744.201.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	146.460.357,00	68.797.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.229.168.033,00	495.056.605.591,00
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	214.750.000,00	202.649.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	192.290.000,00	169.683.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	585.803.307,00	552.289.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.075.393.993,00	1.034.180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.225.830.000,00	1.935.259.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	776.990.000,00	728.180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	661.760.000,00	656.073.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	508.880.000,00	408.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	278.200.000,00	142.878.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	136.000.000,00	130.309.800,00	0,00	0,00	5.775.000.000,00	397.087.640,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	136.000.000,00	130.309.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775.000.000,00	397.087.640,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	740.500.000,00	649.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	740.500.000,00	649.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.809.461.404,00	2.823.141.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.809.461.404,00	2.823.141.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	619.464.500,00	617.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	368.137.500,00	325.247.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.730.838.504,00	1.454.886.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	911.878.400,00	299.018.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	179.142.500,00	126.504.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	27.597.069.107,00	25.830.833.201,00	1.131.402.600,00	1.087.281.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	27.597.069.107,00	25.830.833.201,00	1.131.402.600,00	1.087.281.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.793.534.971,00	23.800.927.346,00	1.111.402.600,00	1.067.301.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.222.194,00	73.950.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.850.604,00	44.333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.371.990,00	7.586.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.999.600,00	22.030.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.198.617.501,00	21.553.499.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.176.529.001,00	21.539.445.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.088.500,00	14.053.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.998.650,00	102.798.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	102.998.650,00	102.798.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	850.580.100,00	773.479.880,00	1.111.402.600,00	1.067.301.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.610.600,00	18.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.600.000,00	8.002.600,00	1.111.402.600,00	1.067.301.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	252.102.400,00	247.588.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.267.100,00	67.924.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.000.000,00	22.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	409.156.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.185.046.376,00	994.172.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	122.936.364,00	99.650.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	439.698.880,00	385.780.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.600.000,00	193.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	412.811.132,00	315.041.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.070.150,00	303.026.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.620.150,00	164.928.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.700.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.750.000,00	112.998.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.803.534.136,00	2.029.905.855,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	623.269.836,00	615.961.255,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	46.707.000,00	45.925.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	167.642.000,00	162.849.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	155.769.000,00	154.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	42.000.000,00	41.750.000,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	152.651.836,00	152.141.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	48.000.000,00	47.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.405.388.000,00	808.109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	230.738.000,00	219.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	1.172.150.000,00	585.860.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	470.539.500,00	439.961.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	380.772.000,00	357.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	89.767.500,00	82.404.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	304.336.800,00	165.874.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	136.866.100,00	111.285.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	122.000.000,00	22.399.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	34.470.700,00	25.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	11.000.000,00	6.469.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.094.955.000,00	1.075.881.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.094.955.000,00	1.075.881.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.094.955.000,00	1.075.881.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	431.000.000,00	418.394.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	431.000.000,00	418.394.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	663.955.000,00	657.486.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	235.500.000,00	231.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	314.455.000,00	312.102.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	86.000.000,00	85.586.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.749.999.950,00	1.662.543.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.749.999.950,00	1.662.543.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.749.999.950,00	1.662.543.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	145.572.000,00	141.968.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	145.572.000,00	141.968.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	693.118.000,00	659.252.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	234.336.000,00	220.332.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	458.782.000,00	438.919.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	245.896.000,00	244.180.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	139.916.000,00	138.362.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	105.980.000,00	105.818.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	665.413.950,00	617.141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	481.147.750,00	444.666.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	184.266.200,00	172.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	25.980.342.941,00	23.069.869.419,00	5.641.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	25.980.342.941,00	23.069.869.419,00	5.641.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.664.624.241,00	20.242.393.459,00	5.641.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.200.000,00	97.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.200.000,00	13.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.000.000,00	82.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.936.200.000,00	17.310.602.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.936.200.000,00	17.310.602.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.096.000.000,00	718.575.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.096.000.000,00	718.575.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.086.081.500,00	921.967.590,00	5.641.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.134.900,00	7.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	5.641.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	384.326.800,00	359.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.119.800,00	35.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	15.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.500.000,00	504.813.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.082.792.741,00	892.600.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.982.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.986.824,00	150.583.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	897.823.917,00	737.117.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.350.000,00	301.088.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.450.000,00	205.551.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.900.000,00	95.537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.558.637.600,00	2.163.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.414.162.600,00	2.037.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	691.750.000,00	631.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	819.000.000,00	617.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	151.150.000,00	140.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	221.475.000,00	221.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	127.000.000,00	96.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	403.787.600,00	329.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	144.475.000,00	126.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianrnNegara/Daerah	32.650.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	111.825.000,00	96.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	757.081.100,00	663.732.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	39.863.800,00	18.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	15.429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	24.434.100,00	18.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	717.217.300,00	645.152.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	131.653.000,00	82.562.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46.100.000,00	45.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	477.888.300,00	458.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	61.576.000,00	58.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	128.950.583.580,00	115.173.100.470,00	1.150.360.501,00	736.969.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	KECAMATAN	128.950.583.580,00	115.173.100.470,00	1.150.360.501,00	736.969.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN ANYAR	5.552.593.600,00	4.934.616.804,00	55.975.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.543.869.200,00	3.260.055.304,00	55.975.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.006.570.000,00	2.827.792.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.006.570.000,00	2.827.792.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.727.200,00	170.431.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.266.000,00	7.505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.139.600,00	10.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.504.600,00	14.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.780.000,00	4.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.182.000,00	133.184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	55.975.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	9.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	46.588.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.921.920,00	135.647.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.551.320,00	14.654.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.370.600,00	120.992.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.650.080,00	126.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.857.400,00	72.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.135.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.657.680,00	51.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.372.311.600,00	1.299.847.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.097.900,00	21.789.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.097.900,00	21.789.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.343.213.700,00	1.278.058.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.343.213.700,00	1.278.058.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	124.910.600,00	48.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	124.910.600,00	48.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.355.600,00	24.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.555.000,00	23.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.073.800,00	16.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	46.073.800,00	16.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	46.073.800,00	16.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	266.168.800,00	182.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	266.168.800,00	182.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	124.082.000,00	89.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	142.086.800,00	93.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	199.259.600,00	127.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	199.259.600,00	127.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	99.520.000,00	32.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	99.739.600,00	95.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BANDUNG	3.402.994.030,00	3.199.401.488,00	92.953.800,00	43.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.027.971.330,00	2.873.481.588,00	77.273.800,00	27.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.578.820.000,00	2.454.090.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.578.820.000,00	2.454.090.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.577.324,00	164.410.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.056.400,00	28.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.256.924,00	2.930.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.444.000,00	24.223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.820.000,00	108.403.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	77.273.800,00	27.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	77.273.800,00	27.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.837.706,00	206.850.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.220.400,00	25.346.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.617.306,00	181.503.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.736.300,00	48.130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.382.000,00	36.312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.740.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.614.300,00	8.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	114.005.800,00	87.288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.564.300,00	16.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.564.300,00	16.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	97.441.500,00	70.943.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	97.441.500,00	70.943.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.001.200,00	57.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64.001.200,00	57.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.374.300,00	11.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52.626.900,00	45.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	150.911.900,00	139.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	150.911.900,00	139.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45.863.300,00	45.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	105.048.600,00	93.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.103.800,00	42.331.000,00	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.103.800,00	42.331.000,00	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46.103.800,00	42.331.000,00	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN BAROS	5.227.942.086,00	4.489.256.113,00	66.281.000,00	55.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.663.175.390,00	3.239.787.813,00	66.281.000,00	55.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.127.913.000,00	2.835.518.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.127.913.000,00	2.835.518.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.930.640,00	159.974.300,00	66.281.000,00	55.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	66.281.000,00	55.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.753.300,00	23.708.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.624.140,00	3.363.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.953.200,00	129.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.880.850,00	186.360.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.994.000,00	21.046.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.886.850,00	165.314.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.450.900,00	57.934.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.390.900,00	43.119.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.060.000,00	14.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.253.579.296,00	969.204.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.900.000,00	8.439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.900.000,00	8.439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.243.679.296,00	960.765.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.243.679.296,00	960.765.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.967.300,00	84.080.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85.967.300,00	84.080.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.877.600,00	22.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	62.089.700,00	61.256.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.963.800,00	17.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.963.800,00	17.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.106.900,00	9.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.856.900,00	8.824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	150.292.500,00	146.557.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	150.292.500,00	146.557.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40.238.400,00	39.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	110.054.100,00	106.746.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56.963.800,00	31.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56.963.800,00	31.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	56.963.800,00	31.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BINUANG	3.360.936.352,00	2.905.642.109,00	14.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.878.628.752,00	2.667.719.209,00	14.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.423.932.000,00	2.277.076.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.423.932.000,00	2.277.076.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.914.600,00	96.929.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.776.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.776.000,00	16.189.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.731.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.790.400,00	76.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	14.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	14.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.629.952,00	257.983.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.952.744,00	18.155.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	247.677.208,00	239.827.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.152.200,00	35.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.122.800,00	21.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.669.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.160.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.200.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	136.972.700,00	59.042.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.216.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.216.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	118.756.000,00	59.042.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	118.756.000,00	59.042.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79.625.400,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.625.400,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.190.500,00	11.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9.956.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.478.900,00	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.970.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.970.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17.970.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	144.889.500,00	105.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	144.889.500,00	105.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	56.464.500,00	33.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	88.425.000,00	71.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	102.850.000,00	28.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	102.850.000,00	28.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	102.850.000,00	28.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BOJONEGARA	3.615.562.073,00	3.280.615.620,00	43.344.000,00	42.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.092.654.173,00	2.828.335.820,00	43.344.000,00	42.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.767.856.000,00	2.585.710.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.767.856.000,00	2.585.710.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.066.920,00	101.415.628,00	43.344.000,00	42.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.977.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	43.344.000,00	42.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.933.120,00	27.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	660.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.496.800,00	6.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.000.000,00	64.880.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.100.653,00	108.486.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.492.000,00	17.677.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.608.653,00	90.808.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.630.600,00	32.723.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.600.000,00	4.319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.062.600,00	28.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	167.290.800,00	136.526.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	104.318.300,00	80.989.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	104.318.300,00	80.989.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	62.972.500,00	55.536.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	62.972.500,00	55.536.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.100.000,00	33.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.493.000,00	15.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.493.000,00	15.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29.607.000,00	18.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	29.607.000,00	18.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.262.900,00	51.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.262.900,00	51.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60.262.900,00	51.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	129.730.200,00	121.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	129.730.200,00	121.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	41.919.400,00	41.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	68.610.800,00	65.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.200.000,00	14.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120.524.000,00	109.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120.524.000,00	109.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	91.148.500,00	81.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.375.500,00	28.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN CARENANG	3.497.515.352,00	3.140.457.263,00	33.877.000,00	33.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.098.407.752,00	2.810.941.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.581.835.000,00	2.332.657.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.581.835.000,00	2.332.657.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.259.430,00	166.742.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.300.600,00	13.320.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.948.830,00	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.410.000,00	146.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.679.722,00	207.137.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.410.578,00	20.868.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.269.144,00	186.269.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.633.600,00	104.403.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.585.600,00	56.103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.400.000,00	23.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.648.000,00	24.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	82.540.900,00	72.586.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.500.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.500.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	75.040.900,00	67.856.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	75.040.900,00	67.856.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.117.600,00	44.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.117.600,00	44.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.906.900,00	12.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.210.700,00	31.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.513.800,00	17.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.513.800,00	17.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.513.800,00	17.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	173.502.300,00	148.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	173.502.300,00	148.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	73.388.500,00	65.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.113.800,00	83.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65.433.000,00	46.767.250,00	33.877.000,00	33.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	65.433.000,00	46.767.250,00	33.877.000,00	33.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	65.433.000,00	46.767.250,00	33.877.000,00	33.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN CIKANDE	5.588.786.354,00	5.290.070.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.585.289.908,00	3.400.903.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.031.989.000,00	2.898.429.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.031.989.000,00	2.898.429.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.784.400,00	6.911.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.784.400,00	6.911.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.802.635,00	192.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.130.500,00	7.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.940.635,00	69.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.131.500,00	11.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.000.000,00	100.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.449.073,00	221.972.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.420.000,00	27.059.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.029.073,00	194.912.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.264.800,00	81.530.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.138.500,00	67.914.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.575.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.551.300,00	11.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.596.640.505,00	1.558.540.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	65.350.000,00	55.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	65.350.000,00	55.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.531.290.505,00	1.502.675.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.531.290.505,00	1.502.675.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.960.900,00	75.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78.960.900,00	75.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.156.900,00	15.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	59.804.000,00	59.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.040.500,00	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.040.500,00	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.040.500,00	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	237.504.541,00	200.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	237.504.541,00	200.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	88.767.041,00	83.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	148.737.500,00	116.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	83.350.000,00	48.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.350.000,00	48.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	83.350.000,00	48.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN CIKEUSAL	3.697.729.908,00	3.275.713.963,00	33.399.300,00	32.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.173.400.808,00	2.805.809.563,00	33.399.300,00	32.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.723.388.000,00	2.454.383.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.723.388.000,00	2.454.383.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.470.136,00	158.590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.155.800,00	13.783.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.429.736,00	2.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.284.600,00	140.428.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	33.399.300,00	32.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	11.261.200,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	22.138.100,00	21.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.333.572,00	140.363.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.939.452,00	25.529.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.394.120,00	114.834.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.209.100,00	52.471.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.412.400,00	33.154.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	10.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.796.700,00	8.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	135.441.400,00	110.905.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.391.900,00	13.242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.391.900,00	13.242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	119.049.500,00	97.662.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	119.049.500,00	97.662.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110.974.100,00	103.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.974.100,00	103.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.954.900,00	33.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	77.019.200,00	70.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.940.000,00	13.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.940.000,00	13.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.940.000,00	13.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	206.455.300,00	192.365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	206.455.300,00	192.365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	58.987.500,00	58.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	147.467.800,00	134.092.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	57.518.300,00	48.832.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.518.300,00	48.832.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	57.518.300,00	48.832.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN CINANGKA	5.073.912.101,00	4.480.537.748,00	51.058.000,00	35.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.325.015.193,00	3.123.875.084,00	51.058.000,00	35.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.787.995.000,00	2.670.683.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.787.995.000,00	2.670.683.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.361.800,00	139.396.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.465.800,00	6.452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.740.750,00	24.632.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	6.276.750,00	6.200.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.828.500,00	38.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.050.000,00	63.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	51.058.000,00	35.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	51.058.000,00	35.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.721.193,00	269.438.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.669.176,00	30.858.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.052.017,00	238.579.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.937.200,00	44.356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.664.700,00	32.756.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.743.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.529.500,00	9.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.349.188.708,00	1.027.811.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.349.188.708,00	1.027.811.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.349.188.708,00	1.027.811.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83.416.300,00	65.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	83.416.300,00	65.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.309.300,00	17.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65.107.000,00	48.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.393.200,00	8.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.393.200,00	8.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.393.200,00	8.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	213.173.700,00	180.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	213.173.700,00	180.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	106.113.600,00	75.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	107.060.100,00	105.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90.725.000,00	73.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90.725.000,00	73.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danrnnPeraturan Kepala Desa	6.400.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	71.575.000,00	55.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12.750.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN CIOMAS	4.573.514.985,00	4.085.661.673,00	47.965.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.130.107.720,00	2.853.150.468,00	47.965.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	2.560.902.200,00	2.420.011.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.560.902.200,00	2.420.011.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrtasi Umum Perangkat Daerah	260.880.514,00	187.268.800,00	47.965.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasinrnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.032.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	47.965.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.399.200,00	20.619.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	24.985.264,00	13.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.263.300,00	152.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.431.306,00	177.474.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.984.000,00	16.773.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.447.306,00	160.701.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.893.700,00	68.395.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.242.100,00	31.924.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.272.000,00	4.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	38.379.600,00	31.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	993.483.665,00	857.687.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.282.400,00	12.941.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.282.400,00	12.941.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	975.201.265,00	844.745.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	975.201.265,00	844.745.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.774.200,00	73.636.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85.774.200,00	73.636.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.809.200,00	19.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	64.965.000,00	54.496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.396.800,00	30.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.396.800,00	30.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	35.396.800,00	30.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	255.410.600,00	207.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	255.410.600,00	207.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	54.398.000,00	46.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	201.012.600,00	161.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	73.342.000,00	62.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.342.000,00	62.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	73.342.000,00	62.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN CIRUAS	5.981.882.970,00	5.553.954.461,00	67.703.000,00	45.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.219.790.180,00	3.980.160.359,00	67.703.000,00	45.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.726.064.000,00	3.537.971.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.726.064.000,00	3.537.971.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.826.068,00	130.054.899,00	67.703.000,00	45.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	67.703.000,00	45.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.826.068,00	96.054.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.485.112,00	258.798.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.417.600,00	16.730.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.067.512,00	242.067.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.415.000,00	53.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.850.000,00	4.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.170.000,00	33.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.395.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.451.044.790,00	1.350.098.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatannnn Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95.402.000,00	63.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95.402.000,00	63.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.355.642.790,00	1.286.528.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.355.642.790,00	1.286.528.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.332.000,00	73.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	105.332.000,00	73.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.736.000,00	17.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84.596.000,00	56.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.077.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.077.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.077.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.217.000,00	94.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.217.000,00	94.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunnnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	44.043.000,00	28.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	67.174.000,00	66.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	83.422.000,00	45.594.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.422.000,00	45.594.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	83.422.000,00	45.594.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN GUNUNGSARI	3.546.649.894,00	3.132.660.424,00	41.778.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.123.090.594,00	2.846.567.972,00	41.778.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.638.646.500,00	2.455.516.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.638.646.500,00	2.455.516.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.065.653,00	25.574.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	37.065.653,00	25.574.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.376.576,00	178.862.355,00	41.778.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.500,00	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.865.200,00	2.415.000,00	41.778.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.623.200,00	16.956.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.545.000,00	10.508.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.746.676,00	146.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.584.665,00	159.759.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.972.700,00	9.455.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.611.965,00	150.304.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.417.200,00	26.855.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.452.400,00	15.137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.195.000,00	11.717.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.769.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95.225.900,00	80.575.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.840.500,00	25.017.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27.840.500,00	25.017.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	67.385.400,00	55.558.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	67.385.400,00	55.558.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.191.400,00	63.606.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	136.191.400,00	63.606.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	136.191.400,00	63.606.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	139.832.500,00	126.260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	139.832.500,00	126.260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	58.222.000,00	54.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	81.610.500,00	71.384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41.948.500,00	15.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.948.500,00	15.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	41.948.500,00	15.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN JAWILAN	3.606.093.771,00	3.038.265.257,00	26.900.000,00	24.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.194.611.971,00	2.762.475.657,00	26.900.000,00	24.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.684.915.769,00	2.359.220.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.684.915.769,00	2.359.220.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.633.300,00	143.200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.721.400,00	34.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.830.700,00	30.504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.310.000,00	75.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	26.900.000,00	24.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	26.900.000,00	24.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.754.302,00	238.840.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.246.800,00	17.720.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.507.502,00	221.119.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.308.600,00	21.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.178.600,00	9.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.435.000,00	3.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.695.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	122.791.200,00	87.729.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.500.000,00	23.447.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27.500.000,00	23.447.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	95.291.200,00	64.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	95.291.200,00	64.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	88.628.800,00	46.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	88.628.800,00	46.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	38.496.900,00	29.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.131.900,00	17.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	144.938.000,00	129.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	144.938.000,00	129.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	41.942.200,00	30.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	102.995.800,00	99.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.123.800,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.123.800,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	55.123.800,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN KIBIN	5.702.516.748,00	5.493.792.259,00	19.817.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.542.684.476,00	3.491.083.118,00	19.817.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.085.118.000,00	3.077.060.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.085.118.000,00	3.077.060.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.827.500,00	121.093.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasinListrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.401.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.087.000,00	65.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.312.700,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.425.900,00	47.528.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000,00	0,00	19.817.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000,00	0,00	19.817.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.341.576,00	249.491.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.546.696,00	29.142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.771.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.023.880,00	214.123.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.147.400,00	43.438.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.577.400,00	22.288.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.570.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.574.740.272,00	1.505.650.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	64.532.000,00	42.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64.532.000,00	42.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.510.208.272,00	1.462.718.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.510.208.272,00	1.462.718.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	74.821.800,00	58.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	74.821.800,00	58.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.621.800,00	14.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.200.000,00	43.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	243.040.300,00	201.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	243.040.300,00	201.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	243.040.300,00	201.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	175.385.400,00	147.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	175.385.400,00	147.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	157.085.400,00	129.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	91.844.500,00	89.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.844.500,00	89.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	91.844.500,00	89.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN KOPO	3.600.934.695,00	3.395.020.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.179.068.435,00	2.996.718.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.664.115.000,00	2.528.392.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.664.115.000,00	2.528.392.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.184.235,00	102.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.136.000,00	5.134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.699.000,00	3.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.233.000,00	93.559.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.671.700,00	314.790.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.520.900,00	31.828.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.150.800,00	282.961.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.097.500,00	51.184.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.261.500,00	22.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.316.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.520.000,00	26.906.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	103.999.200,00	95.001.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.175.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.175.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	86.824.200,00	78.501.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	86.824.200,00	78.501.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.984.000,00	64.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64.984.000,00	64.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.284.000,00	13.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.700.000,00	50.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.500.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.500.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.500.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	187.783.060,00	181.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	187.783.060,00	181.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	104.523.060,00	102.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	83.260.000,00	79.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.600.000,00	44.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.600.000,00	44.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	51.600.000,00	44.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN KRAGILAN	6.636.547.967,00	6.108.026.977,00	50.594.000,00	50.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.616.097.957,00	4.244.957.113,00	50.594.000,00	50.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.106.858.000,00	3.840.286.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.106.858.000,00	3.840.286.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.455.056,00	162.296.400,00	50.594.000,00	50.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	3.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	50.594.000,00	50.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.054.356,00	20.687.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.080.200,00	5.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.720.500,00	129.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.417.501,00	204.411.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.802.912,00	39.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.614.589,00	165.314.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.367.400,00	37.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.520.000,00	31.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.570.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.277.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.716.762.618,00	1.659.475.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	82.632.400,00	58.336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.632.400,00	58.336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	79.260.000,00	75.091.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	79.260.000,00	75.091.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.554.870.218,00	1.526.048.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.554.870.218,00	1.526.048.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61.153.000,00	50.248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	61.153.000,00	50.248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.632.400,00	16.608.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.520.600,00	33.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.584.200,00	10.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.584.200,00	10.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.584.200,00	10.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	132.700.992,00	121.643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	132.700.992,00	121.643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	62.764.892,00	52.379.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	69.936.100,00	69.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	99.249.200,00	21.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	99.249.200,00	21.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	99.249.200,00	21.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN KRAMATWATU	6.909.838.589,00	6.543.354.614,00	54.855.331,00	52.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.116.006.475,00	4.832.368.300,00	54.855.331,00	52.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.499.720.040,00	4.277.194.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.499.720.040,00	4.277.194.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.556.860,00	333.347.742,00	54.855.331,00	52.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.320.500,00	2.320.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	54.855.331,00	52.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.159.060,00	7.078.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.473.100,00	18.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.094.200,00	4.074.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	2.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.510.000,00	299.233.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.517.506,00	190.262.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.186.560,00	31.931.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.330.946,00	158.330.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.212.069,00	31.563.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.917.400,00	28.563.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.244.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.342.480.214,00	1.307.827.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.900.000,00	27.205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27.900.000,00	27.205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.314.580.214,00	1.280.621.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.314.580.214,00	1.280.621.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	181.743.200,00	160.543.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	181.743.200,00	160.543.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.709.200,00	24.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	157.034.000,00	136.013.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.675.000,00	49.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49.675.000,00	49.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	49.675.000,00	49.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125.208.700,00	120.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	125.208.700,00	120.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.044.000,00	13.608.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	111.164.700,00	106.932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	94.725.000,00	72.564.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	94.725.000,00	72.564.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	94.725.000,00	72.564.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN LEBAK WANGI	3.656.613.842,00	3.321.470.384,00	67.056.900,00	40.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.289.847.842,00	3.055.019.484,00	67.056.900,00	40.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.804.944.000,00	2.688.197.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.804.944.000,00	2.688.197.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.124.448,00	102.488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.821.600,00	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.082.048,00	9.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.230.000,00	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.040.800,00	6.938.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.950.000,00	82.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	67.056.900,00	40.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	67.056.900,00	40.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.445.094,00	205.040.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.761.876,00	22.357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.683.218,00	182.683.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.334.300,00	59.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.248.600,00	33.573.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.178.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.907.700,00	19.298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	92.334.500,00	49.935.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	82.098.500,00	49.935.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	82.098.500,00	49.935.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67.875.500,00	54.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	67.875.500,00	54.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.174.000,00	14.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52.701.500,00	40.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.706.500,00	5.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.706.500,00	5.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.706.500,00	5.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	148.956.500,00	121.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	148.956.500,00	121.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	47.222.500,00	39.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	101.734.000,00	81.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.893.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.893.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46.893.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN MANCAK	3.793.005.450,00	3.406.361.449,00	27.786.740,00	19.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.424.712.050,00	3.173.242.663,00	20.124.740,00	19.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.788.178.000,00	2.644.446.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.788.178.000,00	2.644.446.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.252.742,00	34.924.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	37.252.742,00	34.924.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.720.780,00	156.347.800,00	277.200,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.487.200,00	1.470.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	842.000,00	714.000,00	277.200,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.939.200,00	21.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.267.980,00	3.551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.684.400,00	123.887.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.752.780,00	3.353.999,00	19.847.540,00	19.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	14.060.000,00	14.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.752.780,00	3.353.999,00	5.787.540,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.871.548,00	285.425.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.009.253,00	103.779.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.514.540,00	30.298.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.347.755,00	151.347.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.936.200,00	48.745.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.020.200,00	34.182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.372.000,00	14.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	67.927.400,00	40.411.900,00	7.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.827.500,00	8.679.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.827.500,00	8.679.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	59.099.900,00	31.732.700,00	7.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	59.099.900,00	31.732.700,00	7.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95.799.300,00	60.883.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	93.173.000,00	60.389.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	93.173.000,00	60.389.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.626.300,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.626.300,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	191.126.700,00	119.682.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	191.126.700,00	119.682.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	59.135.200,00	50.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	131.991.500,00	69.042.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.440.000,00	12.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.440.000,00	12.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.440.000,00	12.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.20.0000	KECAMATAN PABUARAN	4.908.278.247,00	4.117.290.226,00	24.517.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.224.176.228,00	2.716.047.326,00	24.517.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.560.653.000,00	2.153.751.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.560.653.000,00	2.153.751.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.902.068,00	174.159.200,00	23.269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.436.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	23.269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.788.200,00	142.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.733.868,00	9.219.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.344.000,00	18.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.932.416,00	258.757.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.450.000,00	14.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245.482.416,00	244.466.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.688.744,00	129.379.484,00	1.247.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.624.200,00	21.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.988.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.076.544,00	104.454.484,00	1.247.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.326.450.619,00	1.092.354.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannPemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.981.900,00	13.117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.981.900,00	13.117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.309.468.719,00	1.079.236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.309.468.719,00	1.079.236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	97.462.800,00	87.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	97.462.800,00	87.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.557.400,00	17.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.905.400,00	70.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.134.200,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.134.200,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.134.200,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	152.054.400,00	137.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	152.054.400,00	137.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	48.434.000,00	47.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	88.710.400,00	86.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.910.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.000.000,00	83.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.000.000,00	83.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100.000.000,00	83.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN PADARINCANG	4.365.019.240,00	3.292.157.020,00	71.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.852.335.118,00	2.463.547.957,00	71.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.362.200.000,00	2.188.708.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.362.200.000,00	2.188.708.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.450.100,00	98.929.000,00	71.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	71.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.017.800,00	23.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.442.800,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.888.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.600.000,00	26.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.093.018,00	175.910.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.060.000,00	25.399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.033.018,00	150.510.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.054.026.822,00	658.179.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.015.234.822,00	658.179.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.015.234.822,00	658.179.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	158.307.000,00	33.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	158.307.000,00	33.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27.554.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	130.753.000,00	19.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	187.959.300,00	103.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	187.959.300,00	103.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	58.782.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	129.177.300,00	69.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	101.900.000,00	33.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	101.900.000,00	33.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	101.900.000,00	33.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.22.0000	KECAMATAN PAMARAYAN	3.566.612.352,00	3.221.814.184,00	17.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.109.644.352,00	2.821.886.784,00	17.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.636.500.000,00	2.388.242.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.636.500.000,00	2.388.242.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.062.344,00	171.757.438,00	17.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasinListrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.387.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	17.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.545.100,00	17.446.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.693.244,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.265.600,00	8.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.171.000,00	141.815.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.441.608,00	230.115.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.695.200,00	25.355.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.746.408,00	204.760.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.640.400,00	31.770.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.760.400,00	26.890.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	128.152.000,00	101.045.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.000.000,00	16.703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.000.000,00	16.703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	106.152.000,00	84.341.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	106.152.000,00	84.341.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95.452.500,00	82.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	95.452.500,00	82.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26.468.000,00	24.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.984.500,00	58.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.390.000,00	13.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.390.000,00	13.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.390.000,00	13.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	148.116.000,00	132.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	148.116.000,00	132.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.761.000,00	35.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	112.355.000,00	97.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	70.857.500,00	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.857.500,00	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	70.857.500,00	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.23.0000	KECAMATAN PETIR	3.618.146.230,00	3.417.294.362,00	15.803.600,00	15.803.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.212.479.530,00	3.054.510.762,00	15.803.600,00	15.803.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	2.714.643.856,00	2.588.069.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.714.643.856,00	2.588.069.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03	Administarsi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administarsi Umum Perangkat Daerah	209.397.300,00	186.891.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.185.700,00	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.106.900,00	27.924.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.484.700,00	22.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.020.000,00	129.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	15.803.600,00	15.803.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	15.803.600,00	15.803.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.564.374,00	216.416.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.947.068,00	34.799.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.617.306,00	181.617.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.874.000,00	37.133.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.214.000,00	37.133.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	118.878.200,00	100.840.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.060.000,00	8.409.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.060.000,00	8.409.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	99.818.200,00	92.430.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	99.818.200,00	92.430.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	88.516.400,00	68.101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	88.516.400,00	68.101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39.501.300,00	35.522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.015.100,00	32.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.037.550,00	13.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.037.550,00	13.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.037.550,00	13.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	160.397.000,00	156.427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	160.397.000,00	156.427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	51.087.600,00	50.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	109.309.400,00	105.810.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.837.550,00	23.520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.837.550,00	23.520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23.837.550,00	23.520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000	KECAMATAN PONTANG	5.137.733.450,00	4.444.864.708,00	53.257.000,00	42.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.608.443.577,00	3.196.737.616,00	53.257.000,00	42.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.077.643.367,00	2.798.618.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.077.643.367,00	2.798.618.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.563.564,00	106.565.000,00	9.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.625.500,00	4.300.000,00	9.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.469.900,00	26.755.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.740.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.428.000,00	6.652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.100.000,00	66.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	43.816.000,00	42.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	43.816.000,00	42.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.194.546,00	197.442.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.766.955,00	6.515.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.847.591,00	190.926.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.042.100,00	94.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.363.200,00	25.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.678.900,00	56.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.029.090.873,00	940.147.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.212.500,00	5.953.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.212.500,00	5.953.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.005.878.373,00	934.193.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.005.878.373,00	934.193.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	133.315.000,00	95.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	133.315.000,00	95.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	51.915.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.400.000,00	73.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37.200.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.200.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.300.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	177.909.000,00	141.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	177.909.000,00	141.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	81.230.000,00	70.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	96.679.000,00	70.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	151.775.000,00	61.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	151.775.000,00	61.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	151.775.000,00	61.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.25.0000	KECAMATAN PULO AMPEL	3.268.227.030,00	2.862.936.196,00	16.643.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.849.655.372,00	2.589.803.196,00	16.643.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.369.034.316,00	2.229.332.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.369.034.316,00	2.229.332.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.387.600,00	131.640.000,00	16.643.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	16.643.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.055.000,00	9.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.432.600,00	13.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.300.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.429.306,00	204.665.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.600.000,00	34.430.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.829.306,00	170.235.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.804.150,00	24.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.850.900,00	12.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.310.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.643.250,00	3.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.400.000,00	57.583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.400.000,00	10.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.400.000,00	10.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	70.000.000,00	46.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	70.000.000,00	46.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	77.054.500,00	60.482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	77.054.500,00	60.482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.571.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.483.500,00	45.632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.215.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.215.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.240.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.975.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	186.202.158,00	106.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	186.202.158,00	106.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	79.758.312,00	40.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	106.443.846,00	65.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.700.000,00	35.752.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.700.000,00	35.752.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	54.700.000,00	35.752.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000	KECAMATAN TANARA	4.346.547.720,00	3.283.164.716,00	32.860.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.790.899.376,00	2.511.009.690,00	31.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.245.435.000,00	2.130.521.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.245.435.000,00	2.130.521.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.569.600,00	159.006.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.522.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.038.500,00	23.946.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.506.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.906.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.710.000,00	131.460.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	31.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	31.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.915.476,00	192.570.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.249.600,00	9.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.665.876,00	182.628.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.979.300,00	28.911.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.150.700,00	24.296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.604.000,00	4.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.224.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.051.370.240,00	575.591.526,00	1.170.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.250.000,00	12.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.250.000,00	12.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.031.120.240,00	562.859.526,00	1.170.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.031.120.240,00	562.859.526,00	1.170.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	106.852.344,00	35.880.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	106.852.344,00	35.880.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.352.144,00	20.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.500.200,00	15.744.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.364.760,00	10.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.364.760,00	10.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.500.000,00	10.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.864.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	289.689.900,00	146.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	289.689.900,00	146.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	115.368.000,00	76.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	174.321.900,00	70.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90.371.100,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90.371.100,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	90.371.100,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.27.0000	KECAMATAN TIRTAYASA	4.786.162.083,00	4.220.707.909,00	57.217.930,00	51.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.393.288.307,00	3.020.954.296,00	57.217.930,00	51.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.744.149.346,00	2.488.817.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.744.149.346,00	2.488.817.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.858.200,00	229.860.000,00	57.217.930,00	51.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.542.700,00	5.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	57.217.930,00	51.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.971.000,00	23.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.898.500,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.146.000,00	4.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.700.000,00	188.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.943.524,00	242.315.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.770.748,00	33.142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.172.776,00	209.172.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.337.237,00	59.961.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.262.000,00	28.321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.422.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.653.237,00	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	925.945.826,00	777.301.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.759.863,00	12.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.759.863,00	12.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	911.185.963,00	764.669.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	911.185.963,00	764.669.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	124.752.400,00	115.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	124.752.400,00	115.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36.719.200,00	34.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.033.200,00	81.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.433.400,00	41.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	41.433.400,00	41.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41.433.400,00	41.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	219.628.850,00	195.731.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	219.628.850,00	195.731.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	116.828.850,00	108.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	102.800.000,00	86.966.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	81.113.300,00	69.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	81.113.300,00	69.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	81.113.300,00	69.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.28.0000	KECAMATAN TUNJUNG TEJA	3.342.124.033,00	3.124.305.693,00	29.455.400,00	28.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.876.281.133,00	2.731.540.193,00	29.455.400,00	28.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.317.568.000,00	2.218.819.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.317.568.000,00	2.218.819.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.872.600,00	174.573.800,00	29.455.400,00	28.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	29.455.400,00	28.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.898.300,00	12.584.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.634.500,00	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.554.800,00	7.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.785.000,00	152.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.440.533,00	264.643.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.470.044,00	25.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.970.489,00	238.970.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.400.000,00	73.503.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.450.000,00	59.943.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.500.000,00	10.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	147.420.600,00	122.759.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.291.100,00	23.795.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.291.100,00	23.795.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	112.129.500,00	98.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	112.129.500,00	98.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	89.438.600,00	71.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	89.438.600,00	71.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.673.900,00	18.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.764.700,00	52.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.151.900,00	15.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.151.900,00	15.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.151.900,00	15.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	140.512.000,00	129.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	140.512.000,00	129.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.205.000,00	34.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	106.307.000,00	95.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	73.319.800,00	54.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.319.800,00	54.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	73.319.800,00	54.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	KECAMATAN WARINGINKURUNG	4.586.162.428,00	4.113.685.660,00	34.915.700,00	30.723.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.140.100.128,00	2.931.346.860,00	34.915.700,00	30.723.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.430.365.000,00	2.343.825.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.430.365.000,00	2.343.825.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.557.100,00	280.573.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.883.000,00	3.617.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.308.010,00	29.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.993.090,00	18.934.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.773.000,00	225.408.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	34.915.700,00	30.723.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	34.915.700,00	30.723.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.277.628,00	239.611.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.161.228,00	28.196.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.116.400,00	211.415.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.900.400,00	67.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.198.400,00	34.212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.336.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.366.000,00	14.723.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.048.055.700,00	839.384.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatannnPemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.450.000,00	25.565.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27.450.000,00	25.565.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.020.605.700,00	813.818.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.020.605.700,00	813.818.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	74.248.400,00	59.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	74.248.400,00	59.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.425.000,00	9.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	64.823.400,00	50.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.500.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.500.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.500.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	203.808.100,00	187.939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	203.808.100,00	187.939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40.625.500,00	37.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	163.182.600,00	150.171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	104.450.100,00	80.032.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	104.450.100,00	80.032.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	104.450.100,00	80.032.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	66.841.321.494,00	66.096.802.759,00	209.204.500,00	161.839.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	66.841.321.494,00	66.096.802.759,00	209.204.500,00	161.839.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	66.841.321.494,00	66.096.802.759,00	209.204.500,00	161.839.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.027.888.394,00	5.686.423.659,00	86.793.800,00	39.710.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.596.000,00	216.961.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.216.000,00	99.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.500.000,00	110.475.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.481.498.050,00	4.220.698.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.248.461.550,00	3.987.662.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	226.508.500,00	226.508.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.350.000,00	127.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	72.850.000,00	72.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	693.759.640,00	677.120.900,00	86.793.800,00	39.710.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.812.500,00	3.812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	47.007.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.784.000,00	5.241.600,00	39.786.000,00	39.710.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.598.800,00	80.598.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.559.740,00	45.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.295.600,00	13.800.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.109.000,00	340.108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.315.504,00	325.204.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	325.315.504,00	325.204.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.389.200,00	114.108.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.680.000,00	86.011.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.209.200,00	28.096.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.383.650.000,00	1.379.914.000,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.383.650.000,00	1.379.914.000,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000,00	99.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000,00	99.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.183.650.000,00	1.180.714.000,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	57.150.569.500,00	56.893.190.400,00	106.060.700,00	105.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	57.150.569.500,00	56.893.190.400,00	106.060.700,00	105.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.645.081.000,00	2.641.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	51.730.930.000,00	51.679.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.774.558.500,00	2.572.796.400,00	106.060.700,00	105.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	359.213.600,00	304.251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	359.213.600,00	304.251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	77.091.200,00	77.089.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	252.122.400,00	197.162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	585.000.000,00	584.138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	585.000.000,00	584.138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	385.000.000,00	384.138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.335.000.000,00	1.248.884.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.335.000.000,00	1.248.884.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	198.905.200,00	182.427.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	186.094.800,00	155.567.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150.000.000,00	130.177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000,00	780.712.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.709.222.572.109,53	2.561.521.309.939,00	478.168.111.554,47	428.320.239.751,00	5.775.000.000,00	397.087.640,00	577.229.168.033,00	495.056.605.591,00





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2024	2023
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL		32.866.807.668,00	69.969.842.685,00
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun		32.866.807.668,00	69.969.842.685,00
3	SUBTOTAL (1 - 2)		-	-
4				
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.6	30.877.491.772,00	32.866.807.668,00
6				
7	SUBTOTAL (3 + 5)		30.877.491.772,00	32.866.807.668,00
8				
9	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
10	Lain-lain		0,00	0,00
11				
12	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (7 + 9 + 10)		30.877.491.772,00	32.866.807.668,00

BUPATI SERANG,

RATU RACHMATUZAKIYAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref	2024	2023	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN	5.10				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.10.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.10.1.1	589.235.012.053,79	549.975.098.384,81	39.259.913.668,98	7,14
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.10.1.2	332.903.789.921,00	37.329.603.361,00	295.574.186.560,00	791,80
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.10.1.3	25.400.790.422,35	25.259.841.245,50	140.949.176,85	0,56
7	Lain-lain PAD yang sah	5.10.1.4	14.524.685.093,75	288.074.491.603,49	(273.549.806.509,74)	(94,96)
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d. 6)		962.064.277.490,89	900.639.034.594,80	61.425.242.896,09	6,82
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.10.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.10.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak		86.474.428.000,00	130.387.065.000,00	(43.912.637.000,00)	(33,68)
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		3.782.987.000,00	6.847.295.000,00	(3.064.308.000,00)	(44,75)
13	Dana Alokasi Umum		1.125.696.401.999,00	1.066.694.399.940,00	59.002.002.059,00	5,53
14	Dana Alokasi Khusus		604.744.295.130,00	561.447.917.680,00	43.296.377.450,00	7,71
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 14)		1.820.698.112.129,00	1.765.376.677.620,00	55.321.434.509,00	3,13
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.10.2.2				
17	Dana Penyesuaian		360.851.091.000,00	348.945.405.000,00	11.905.686.000,00	3,41
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18)		360.851.091.000,00	348.945.405.000,00	11.905.686.000,00	3,41
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.10.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		266.413.513.945,00	243.969.783.237,00	22.443.730.708,00	9,20
21	Pendapatan Bantuan Keuangan		24.922.517.298,00	29.971.334.965,00	(5.048.817.667,00)	(16,85)
22	Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi (22 s.d. 23)		291.336.031.243,00	273.941.118.202,00	17.394.913.041,00	6,35
23	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15 + 19 + 24)		2.472.885.234.372,00	2.388.263.200.822,00	84.622.033.550,00	3,54
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.10.3				
25	Pendapatan Hibah		107.478.647.046,40	60.209.025.453,11	47.269.621.593,29	78,51
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (28)		107.478.647.046,40	60.209.025.453,11	47.269.621.593,29	78,51
27	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 25 + 29)		3.542.428.158.909,29	3.349.111.260.869,91	193.316.898.039,38	5,77
28	BEBAN	5.11				
29	Beban Pegawai	5.11.1	1.328.456.496.327,00	1.320.065.665.729,00	8.390.830.598,00	0,64
30	Beban Barang dan Jasa	5.11.2	1.060.861.397.601,41	969.784.286.493,56	91.077.111.107,85	9,39
31	Beban Bunga	5.11.3	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Beban Hibah	5.11.4	179.256.016.049,22	152.496.043.939,00	26.759.972.110,22	17,55
33	Beban Bantuan Sosial	5.11.5	6.606.680.600,00	8.231.193.500,00	(1.624.512.900,00)	(19,74)
34	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.11.6	314.054.768.126,68	285.590.980.434,52	28.463.787.692,16	9,97
35	Beban Penyisihan Piutang	5.11.7	(7.087.812.699,73)	8.179.416.265,03	(15.267.228.964,76)	(186,65)
36	Beban Lain-lain	5.11.8	0,00	59.361.646.148,84	(59.361.646.148,84)	(100,00)
37	Beban Transfer	5.11.9	519.581.756.823,00	517.376.015.000,00	2.205.741.823,00	0,43
38	Beban Tidak Terduga	5.11.10	397.087.640,00	119.786.500,00	0,00	0,00
39	JUMLAH BEBAN (33 s.d. 41)		3.402.126.390.467,58	3.321.205.034.009,95	80.921.356.457,63	2,44
40	SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (30 - 42)		140.301.768.441,71	27.906.226.859,96	112.395.541.581,75	402,76
41	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.12				
42	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
44	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
46	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar		1.799.258.212,83	0,00	1.799.258.212,83	0,00
48	JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (47 s.d. 51)		(1.799.258.212,83)	0,00	(1.799.258.212,83)	0,00
49	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (44 + 53)		138.502.510.228,88	27.906.226.859,96	110.596.283.368,92	396,31
50	POS LUAR BIASA	5.13				
51	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
52	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
53	POS LUAR BIASA (57-58)		0,00	0,00	0,00	0,00
54	SURPLUS (DEFISIT) - LO (53 + 59)	5.14	138.502.510.228,88	27.906.226.859,96	110.596.283.368,92	396,31



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR : 5 Tahun 2025
TANGGAL : 19 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref	2024	2023
1	EKUITAS AWAL		4.678.828.762.677,73	4.636.835.508.049,18
2	Surplus / Defisit LO		138.502.510.228,88	27.906.226.859,96
3	Dampak Perubahan Kumulatif atas Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
4	Koreksi Nilai Persediaan	5.16	(31.458.753.789,82)	14.087.027.768,59
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap			
6	Lain-lain		(31.458.753.789,82)	14.087.027.768,59
7	EKUITAS AKHIR		4.785.872.519.116,79	4.678.828.762.677,73


BUPATI SERANG,

RATU RACHMATUZAKIYAH

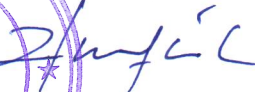


PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
NERACA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	ASET	5.7		
2				
3	ASET LANCAR	5.7.1		
4	Kas di Kas Daerah	5.7.1.1	989.990.483,00	3.045.926.915,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.7.1.2	0,00	4.894.000,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.7.1.3	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	5.7.1.4	28.760.698.178,00	28.111.008.655,00
8	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN		0,00	0,00
9	Kas Dana BOS	5.7.1.5	312.197.540,00	50.732.514,00
10	Kas Lainnya (Dana BOK)	5.7.1.6	835.519.877,00	1.673.801.550,00
11	Setara Kas		0,00	0,00
12	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
13	Piutang Pajak Daerah	5.7.1.7	307.939.220.794,60	305.273.238.586,81
14	Piutang Retribusi Daerah	5.7.1.8	29.513.922.531,00	1.763.627.440,00
15	Piutang Pendapatan Lainnya	5.7.1.9	4.194.117.555,00	34.996.321.035,56
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.7.1.10	362.827.753,00	395.303.713,00
17	Piutang Lancar Lainnya	5.7.1.11	10.128.976.243,00	28.210.662.721,00
18	<i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</i>	5.7.1.12	(236.782.624.768,66)	(243.870.437.468,39)
19	Beban Dibayar Dimuka	5.7.1.13	709.116.345,27	21.838.020.356,11
20	Persediaan	5.7.1.14	62.698.885.822,31	88.522.084.645,88
21	Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 20)		209.662.848.353,52	270.015.184.663,97
22				
23	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.7.2		
24	Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
25	Investasi Permanen		193.271.561.951,21	186.403.448.140,44
26	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		193.271.561.951,21	186.403.448.140,44
27	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
28	Jumlah Investasi Jangka Panjang (24 s.d. 27)		193.271.561.951,21	186.403.448.140,44
29				
30	ASET TETAP	5.7.3		
31	Tanah		1.216.523.986.082,18	1.156.375.526.386,78
32	Peralatan dan Mesin		1.350.752.570.253,95	1.250.335.045.133,99
33	Gedung dan Bangunan		1.936.962.277.538,26	1.761.700.427.814,42
34	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		2.837.404.473.513,33	2.651.268.515.828,30
35	Aset Tetap Lainnya		40.861.374.672,10	35.709.076.532,10
36	Konstruksi dalam Pengerjaan		990.000.000,00	59.172.336.328,00
37	Akumulasi Penyusutan		(3.181.830.240.015,49)	(2.858.656.041.762,40)
38	Jumlah Aset Tetap (31 s.d. 37)		4.201.664.442.044,33	4.055.904.886.261,19
39				
40	DANA CADANGAN			
41	Dana Cadangan		0,00	0,00
42	Jumlah Dana Cadangan (41)		0,00	0,00
43				
44	ASET LAINNYA	5.7.4		
45	Tagihan Jangka Panjang (TGR)		0,00	0,00
46	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		6.034.936.771,00	7.452.459.271,00
47	Aset Tidak Berwujud	5.7.4.1	88.588.985.825,00	58.336.328.114,00
48	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(68.587.324.483,00)	(56.538.078.247,00)
49	Aset Lain - Lain	5.7.4.2	468.888.377.143,58	438.441.913.332,25
50	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(192.115.378.343,18)	(210.227.255.215,12)
51	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.7.4.3	1.518.535.000,00	46.052.897.000,00
52	Jumlah Aset Lainnya (45 s.d. 51)		304.328.131.913,40	283.518.264.255,13
53				
54	PROPERTI INVESTASI	5.7.5		
55	Properti Investasi Tanah		25.149.724.422,00	0,00
56	Properti Investasi Gedung dan Bangunan		159.912.000,00	0,00
57	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi		0,00	0,00
58	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(6.396.480,00)	0,00
59	Jumlah Properti Investasi (55 s.d. 58)		25.303.239.942,00	0,00
60				
61	JUMLAH ASET (21+28+38+42+52+59)		4.934.230.224.204,46	4.795.841.783.320,73
62				

NO	URAIAN	REF	2024	2023
63	KEWAJIBAN	5.8		
64				
65	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
66	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.8.1	20.914.306,00	19.555.966,00
67	Utang Transfer ADD/DD/BHPRD		0,00	0,00
68	Utang Bunga		0,00	0,00
69	Pendapatan Diterima Dimuka	5.8.2	9.712.249.528,69	8.383.602.323,00
70	Utang Belanja	5.8.3	136.731.025.889,98	104.236.325.208,00
71	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.8.4	1.893.515.363,00	4.373.537.146,00
72	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (66 s.d. 71)		148.357.705.087,67	117.013.020.643,00
73				
74	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
75	Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
76	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
77	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (75 s.d. 76)		0,00	0,00
78				
79	JUMLAH KEWAJIBAN (72+77)		148.357.705.087,67	117.013.020.643,00
80				
81	EKUITAS	5.9		
82	Ekuitas		4.785.872.519.116,79	4.678.828.762.677,73
83				
84	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (79+82)		4.934.230.224.204,46	4.795.841.783.320,73


BUPATI SERANG,

RATU RACHMATUZAKIYAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.15		
2	Arus Kas Masuk	5.15.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		573.381.060.252,00	539.805.674.041,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		336.443.197.168,00	35.321.450.150,00
5	Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		19.600.932.217,00	21.844.221.657,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		13.705.912.688,00	281.334.853.841,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		129.122.606.000,00	86.273.208.000,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		5.669.171.000,00	4.908.255.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.125.696.401.999,00	1.066.694.399.940,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		604.748.554.009,00	561.369.332.081,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		360.851.091.000,00	348.945.405.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		284.569.527.143,00	262.181.027.143,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		10.893.241.588,00	10.272.840.346,00
16	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya		24.922.517.298,00	29.971.334.965,00
18	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d. 17)		3.489.604.212.362,00	3.248.922.002.164,00
19	Arus Kas Keluar			
20	Pembayaran Pegawai		1.325.832.224.608,00	1.321.436.650.750,00
21	Pembayaran Barang		1.050.074.683.873,00	948.772.846.825,00
22	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
23	Pembayaran Hibah		179.022.715.458,00	147.121.371.516,00
24	Pembayaran Bantuan Sosial		6.591.686.000,00	8.231.193.500,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan		457.638.698.000,00	464.533.239.000,00
26	Pembayaran Tak Terduga		397.087.640,00	119.786.500,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		30.953.122.353,00	28.922.997.367,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		6.464.785.238,00	2.135.300.000,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
30	Jumlah Arus Kas Keluar (20 s.d. 28)		3.056.975.003.170,00	2.921.273.385.458,00
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 29)		432.629.209.192,00	327.648.616.706,00
32				
33	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.15.2		
34	Arus Kas Masuk			
35	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
36	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.183.840.300,00	626.490.252,00
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
40	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
41	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
42	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
44	Jumlah Arus Kas Masuk (34 s.d. 42)		1.183.840.300,00	626.490.252,00
45	Arus Keluar Kas			
46	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
47	Perolehan Tanah		1.161.432.715,00	748.902.305,00
48	Perolehan Peralatan dan Mesin		132.027.958.530,00	111.613.710.440,00
49	Perolehan Gedung dan Bangunan		93.613.564.317,00	91.356.409.648,00
50	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		188.198.027.641,00	133.901.375.096,00
51	Perolehan Aset Tetap Lainnya		12.970.147.048,00	22.895.922.552,00
52	Perolehan Aset Lainnya		349.109.500,00	295.000.000,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	1.500.000.000,00
54	Pemberian Pinjaman Daerah		2.482.125.637,00	3.066.821.934,00
55	Jumlah Arus Kas Keluar (45 s.d. 53)		435.802.365.388,00	365.378.141.975,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43 - 54)		(434.618.525.088,00)	(364.751.651.723,00)
57				
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.15.3		
59	Arus Kas Masuk			
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
66	Penerimaan Kembali Pinjaman (Pengembalian Dana Revolving)		0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya		0,00	0,00
69	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
70	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
71	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan (59 s.d. 69)		0,00	0,00
72	Arus Keluar Kas			
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Pusat		0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
80	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
81	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
83	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan (72 s.d. 81)		0,00	0,00
84	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (70 - 82)		0,00	0,00

NO	URAIAN	REF	2024	2023
85				
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.15.4		
87	Arus Kas Masuk			
88	Koreksi Saldo Awal Dana BOS		0,00	0,00
89	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		241.158.689.343,45	209.145.119.973,99
	Koreksi Saldo Kas lainnya		0,00	
90	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (87 s.d. 88)		241.158.689.343,45	209.145.119.973,99
91	Arus Kas Keluar			
92	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		241.157.331.003,45	209.205.613.702,99
93	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (91)		241.157.331.003,45	209.205.613.702,99
94	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (89 - 92)		1.358.340,00	(60.493.729,00)
95				
96	Kenaikan/Penurunan Kas	5.15.5	(1.987.957.556,00)	(37.163.528.746,00)
97	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		32.886.363.634,00	70.049.892.380,00
98	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (95 + 96)		30.898.406.078,00	32.886.363.634,00
99	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
100	Saldo Akhir Kas (95 + 96)		30.898.406.078,00	32.886.363.634,00


 BUPATI SERANG,

 RATU RACHMATUZAKIYAH



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GRAFIK.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO	5
2.1. Perkembangan Perekonomian Kabupaten Serang	5
2.2. Kebijakan Keuangan Daerah	15
2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Pokok Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Serang	30
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	33
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	33
3.2. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja	39
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	41
4.1. Entitas Akuntansi.....	42
4.2. Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	43
BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	75
5.1. Pendapatan.....	75
5.2. Belanja	88
5.3. Transfer.....	102
5.4. Pembiayaan.....	104
5.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....	105
5.6. Saldo Anggaran Lebih	105
5.7. Aset.....	106
5.8. Kewajiban.....	158
5.9. Ekuitas	185
5.10. Pendapatan.....	186
5.11. Beban	193
5.12. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional.....	198
5.13. Pos Luar Biasa	198
5.14. Surplus/Defisit LO.....	198
5.15. Laporan Arus Kas.....	198
5.16. Laporan Perubahan Ekuitas	201
BAB VI PENGUNGKAPAN LAIN.....	207
6.1. Gambaran Umum Kabupaten Serang	207



6.2.	Aset Dalam Sengketa.....	207
6.3.	Peningkatan Jalan Desa	209
6.4.	Penggunaan Aplikasi Pada Tahun 2024	210
6.5.	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).....	211
6.6.	Tanah hasil sita tindak pidana korupsi.....	212
6.7.	Pengungkapan aset LKM Ciomas.....	212
6.8.	Pengungkapan PT Serang Berkah Mandiri.....	214

BAB VII	PENUTUP	215
----------------	----------------------	------------





DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk 15 tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Serang, 2019-2023.....	5
Tabel 2	Jumlah Penduduk 15 tahun keatas Menurut Jenis Kelamin Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Serang 2023	5
Tabel 3	Perkembangan Jumlah Fasilitas Pendidikan Dasar dan Jumlah Murid SD dan SMP di Kabupaten Serang	6
Tabel 4	Perkembangan Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Serang	7
Tabel 5	Gini Ratio Kabupaten Serang	8
Tabel 6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Serang	9
Tabel 7	Jumlah Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Serang	12
Tabel 8	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang Tahun 2019-2023.....	13
Tabel 9	Laju Pertumbuhan Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang Tahun 2023-2024.....	14
Tabel 10	APBD setelah Perubahan Kabupaten Serang 2024	30
Tabel 11	Indikator Kinerja Fiskal Daerah TA 2024	31
Tabel 12	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Serang TA 2024.....	33
Tabel 13	Perkembangan PAD dari TA 2020 s.d. 2024.....	34
Tabel 14	Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2020 s.d. 2024.....	35
Tabel 15	Rincian SiLPA TA 2024.....	36
Tabel 16	Utang Belanja Per 31 Desember Tahun 2024.....	37
Tabel 17	Perbandingan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 dan Utang Belanja...37	
Tabel 18	Alokasi Belanja Per SKPD TA 2024.....	38
Tabel 19	Rincian SKPD Kabupaten Serang Tahun 2024	42
Tabel 20	Masa Manfaat Barang Milik Daerah Berupa Aset Tidak Berwujud....	64
Tabel 21	Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2024 dan 2023.....	75
Tabel 22	Mapping Perubahan Nomenklatur Pajak	76
Tabel 23	Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023.....	76
Tabel 24	Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023.....	78
Tabel 25	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023	79
Tabel 26	Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2024 Dan 2023.....	80
Tabel 27	Pendapatan Transfer TA 2024 Dan 2023.....	81
Tabel 28	Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 Dan 2023	82
Tabel 29	Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	82
Tabel 30	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 Dan 2023	83
Tabel 31	Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.....	83
Tabel 32	Dana Alokasi Umum TA 2024.....	84
Tabel 33	Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023.....	84
Tabel 34	Rincian Dana Alokasi Khusus TA 2024.....	84
Tabel 35	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 Dan 2023	85
Tabel 36	Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023	86
Tabel 37	Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten Serang Tahun 2024.....	87
Tabel 38	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024	87
Tabel 39	Rincian Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri.....	88
Tabel 40	Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan SAP TA 2024.....	88
Tabel 41	Realisasi Mandatory Spending Berdasarkan Tahun 2024	89



Tabel 42	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2024 Dan 2023.....	90
Tabel 43	Rincian Anggaran Belanja Pegawai Per SKPD TA 2024 Dan 2023	90
Tabel 44	Rincian Potongan Zakat dan IWP Tahun 2024.....	92
Tabel 45	Realisasi Anggaran Belanja Barang Dan Jasa TA 2024 Dan 2023	93
Tabel 46	Rincian Anggaran Belanja Barang Dan Jasa TA 2024.....	94
Tabel 47	Belanja Hibah	95
Tabel 48	Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024.....	96
Tabel 49	Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal TA 2024.....	97
Tabel 50	Belanja Modal Per Jenis Per SKPD TA 2024.....	97
Tabel 51	Rincian Belanja Modal Tanah Berdasarkan Jenis TA 2024	99
Tabel 52	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Jenis TA 2024	100
Tabel 53	Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi Berdasarkan Jenis TA 2024	101
Tabel 54	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Jenis TA 2024	101
Tabel 55	Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024	102
Tabel 56	Rincian Transfer Tahun 2024	103
Tabel 57	Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	103
Tabel 58	Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	104
Tabel 59	Pembiayaan TA 2024 Dan 2023.....	104
Tabel 60	SiLPA TA 2024	105
Tabel 61	Saldo Akhir Kas 2024.....	105
Tabel 62	Rincian Dana Kegiatan yang dianggarkan kembali perSKPD ditahun 2025	106
Tabel 63	Aset per 31 Desember 2024 dan 2023	106
Tabel 64	Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023	107
Tabel 65	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labrikes per 31 Desember 2024.....	108
Tabel 66	Kas Dana BOS	110
Tabel 67	Kas Dana BOK	110
Tabel 68	Daftar Piutang Pendapatan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023....	111
Tabel 69	Piutang RSUD Jasa Layanan	112
Tabel 70	Daftar Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023.....	113
Tabel 71	Piutang Dinas Kesehatan	114
Tabel 72	Piutang RSUD	114
Tabel 73	Rincian Piutang Denda Pajak	115
Tabel 74	Rincian Mutasi Bagian Lancar TGR.....	116
Tabel 75	Perangkat Daerah Yang Mengalami Kerugian Daerah.....	116
Tabel 76	Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Tahun 2024	117
Tabel 77	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2024 dan 2023....	118
Tabel 78	Aging Schedule Piutang RSUD	118
Tabel 79	Aging Schedule Piutang DPUPR.....	118
Tabel 80	Aging Schedule Piutang Pajak.....	119
Tabel 81	Aging Schedule Piutang Denda Pajak	119
Tabel 82	Aging Schedule Piutang TP TGR.....	120
Tabel 83	Rincian Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023	120
Tabel 84	Ringkasan Kontrak Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2024	120
Tabel 85	Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023.....	122
Tabel 86	Rincian Persediaan Per SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023	123
Tabel 87	Daftar Persediaan Rusak/Kedaluwarsa per SKPD.....	125
Tabel 88	Penerimaan Hibah Obat Ke RSUD.....	126



Tabel 89 Rincian Persediaan atas Barang yang Diserahkan ke Masyarakat.....	127
Tabel 90 Nilai Investasi Jangka Panjang Metode Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023.....	128
Tabel 91 Saldo Aset Tetap tiap KIB per 31 Desember 2024 dan 2023	132
Tabel 92 Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024	132
Tabel 93 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah 2024.....	132
Tabel 94 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2024.....	133
Tabel 95 Rincian Mutasi Ekstrakomtabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	134
Tabel 96 Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan 2024.....	134
Tabel 97 Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 2024.....	135
Tabel 98 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 2024	136
Tabel 99 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 2024	136
Tabel 100 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan 2024.....	137
Tabel 101 Daftar Akumulasi Penyusutan Per SKPD 2024.....	137
Tabel 102 Objek Tanah yang Tersertifikasi pada Tahun 2024.....	139
Tabel 103 Rincian Kendaraan Bermotor Pinjam Pakai Aktif.....	144
Tabel 104 Kendaraan Pinjam Pakai Masa Habis	145
Tabel 105 Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023	146
Tabel 106 Mutasi Aset Lainnya.....	146
Tabel 107 Kemitraan dengan Pihak Ketiga per SKPD 2024.....	147
Tabel 108 Aset Tak Berwujud per SKPD 2024 dan 2023	148
Tabel 109 Amortisasi Aset Tak Berwujud Per SKPD 2024 dan 2023	150
Tabel 110 Aset Lain-Lain Per SKPD 2024 dan 2023.....	152
Tabel 111 Daftar Konsinyasi Tanah Tahun 2024	153
Tabel 112 Aset Lain-Lain Tanah dalam Proses Penghapusan	154
Tabel 113 Aset Lain-Lain Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Proses Penghapusan	155
Tabel 114 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per SKPD.....	155
Tabel 115 Rincian Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF).....	156
Tabel 116 Properti Investasi	157
Tabel 117 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023	158
Tabel 118 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka.....	158
Tabel 119 Rincian Utang Belanja Tahun 2024 per SKPD.....	159
Tabel 120 Rincian Utang dan Dasar Pengakuan/Nomor Kontrak	160
Tabel 121 Rincian Kewajiban LKM Ciomas.....	185
Tabel 122 Pendapatan LO Tahun 2024 dan 2023.....	186
Tabel 123 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024	187
Tabel 124 Rincian Perbandingan Pendapatan Pajak LO dengan Pendapatan Pajak LRA	187
Tabel 125 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024.....	188
Tabel 126 Rincian Perbandingan Pendapatan Retribusi LO dengan Pendapatan Retribusi LRA.....	188
Tabel 127 Rincian Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2024	189
Tabel 128 Rincian Lain-lain PAD yang SAH 2024.....	189
Tabel 129 Rincian Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah LO dengan Lain-lain PAD yang Sah LRA.....	190
Tabel 130 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023.....	190
Tabel 131 Rincian Treasury Deposit Facility	191
Tabel 132 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2024 dan 2023	191
Tabel 133 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dan 2023	192



Tabel 134 Rincian Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA.....	192
Tabel 135 Rincian Pendapatan Hibah LO Tahun 2024	192
Tabel 136 Rincian Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA	192
Tabel 137 Rincian Beban Pegawai Tahun 2024	193
Tabel 138 Rincian Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai	193
Tabel 139 Rincian Barang dan Jasa Tahun 2024.....	194
Tabel 140 Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa	194
Tabel 141 Rincian Beban Hibah Tahun 2024.....	195
Tabel 142 Rincian Perbandingan Beban Hibah dengan Belanja Hibah.....	195
Tabel 143 Rincian Perbandingan Beban Bantuan Sosial.....	196
Tabel 144 Rincian Beban Penyusutan Tahun 2024	196
Tabel 145 Beban Penyisihan Piutang Per SKPD	196
Tabel 146 Rincian Beban Transfer	197
Tabel 147 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi	198
Tabel 148 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi	199
Tabel 149 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	200
Tabel 150 Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD	200
Tabel 151 Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 dan 2023.....	201
Tabel 152 Rincian Per Akun Dampak Kumulatif Lain-lain	201
Tabel 153 Rincian Per Akun Dampak Kumulatif Lain-lain berdasarkan rekening yang dikoreksi.....	203
Tabel 154 Rincian Peningkatan Jalan Desa	210
Tabel 155 Aset Tetap Berupa PSU Yang Belum Terdapat Nilai Asetnya Tahun 2024	211





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Dimensi Angka Harapan Hidup Kabupaten Serang, 2019-2023.....	10
Grafik 2 Dimensi Pendidikan Kabupaten Serang tahun 2019-2023.....	10
Grafik 3 Dimensi Standard Hidup Layak Kabupaten Serang tahun 2019-2023 ...	11
Grafik 4 Jumlah Presentasi Penduduk Miskin, Tahun 2019-2023.....	12
Grafik 5 Garis Kemiskinan Kabupaten Serang, Tahun 2019-2023	13
Grafik 6 Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Serang TA 2023.....	14
Grafik 7 Perkembangan PAD TA 2020 s.d. 2024.....	35
Grafik 8 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 – 2024	35





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang TA 2024 disusun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

1. Penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Cara memperoleh sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah; dan
6. Perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang TA 2024 ini diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif tentang kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Serang secara keseluruhan.

Dalam membaca Laporan Keuangan tersebut diharapkan terdapat pemahaman adanya hubungan yang erat di antara komponen-komponen laporan keuangan. Dalam hal ini Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang merupakan penjelasan atas perubahan posisi keuangan yang tergambar pada Neraca 2024 dan 2023. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan ini memberikan penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang TA 2024 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
23. Peraturan Bupati Serang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Serang Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Bupati Serang Nomor 250 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang;
26. Peraturan Bupati Serang Nomor 251 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang;
27. Peraturan Bupati Serang Nomor 299 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;
28. Peraturan Bupati Serang Nomor 309 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
29. Peraturan Bupati Serang Nomor 316 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Bupati Serang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 316 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Bupati Serang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 316 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang TA 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:



- BAB I PENDAHULUAN, memuat penjelasan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, landasan hukum dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- BAB II EKONOMI MAKRO memuat perkembangan perekonomian Kabupaten Serang, Kebijakan Keuangan Daerah, Indikator Pencapaian Kinerja APBD.
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN SERANG, penjelasan atas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah, hambatan dan kendala dalam mencapai target kinerja.
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI, memuat entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, memuat penjelasan dan penyajian masing-masing pos pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- BAB VI PENGUNGKAPAN LAIN, memuat informasi-informasi non keuangan Pemerintah Daerah.
- BA B VII PENUTUP





BAB II EKONOMI MAKRO

2.1. Perkembangan Perekonomian Kabupaten Serang

2.1.1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, selama tahun 2023 tercatat pencari kerja yang resmi terdaftar sebanyak 12.275 orang, sementara yang berhasil ditempatkan sebanyak 11.499 orang, atau mencakup 93,68 persen dari keseluruhan pencari kerja yang mendaftar.

Tabel 1
Jumlah Penduduk 15 tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Serang, 2019-2023

Uraian		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja		692.076	699.858	709.936	719.645	796.819
	Bekerja	614.320	634.825	643.277	717.583	717.583
	Pengangguran Terbuka	85.538	75.111	76.368	75.111	79.236
Bukan Angkatan Kerja		382.399	402.992	401.717	400.341	463.550
Jumlah PUK		1.074.475	1.102.850	1.111.653	1.119.986	1.260.369

Sumber : BPS, Kabupaten Serang Dalam Angka 2024

Berdasarkan data BPS di atas pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja sebanyak 796.819 orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 463.550 orang, atau dengan kata lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 63,22 persen. Dari total angkatan kerja tersebut, yang bekerja sebesar 717.583 orang dan yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 79.236 orang atau tingkat penganggurannya mencapai 9,94 persen. Bila dipilah berdasarkan gender, TPak laki-laki (81,52 persen), lebih tinggi dari pada TPak perempuan (44,15 persen) pada tahun 2023. Jika dilihat dari perkembangan sejak tahun 2019 sampai dengan 2023, orang yang bekerja dan jumlah pengangguran masih fluktuatif.

Tabel 2
Jumlah Penduduk 15 tahun keatas Menurut Jenis Kelamin Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Serang 2023

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	524.332	272.487	796.819
Bekerja	474.553	243.030	717.583
Pengangguran Terbuka	49.779	29.457	79.236
Bukan Angkatan Kerja	118.890	344.660	463.550
TPAK (%)	81,52	44,15	63,22
Tingkat Pengangguran (%)	9,49	10,81	9,94

Sumber: BPS, Kabupaten Serang Dalam Angka 2024

2.1.2. Pendidikan

Salah satu indikator keberhasilan suatu bangsa adalah dengan melihat perkembangan pendidikan. Pendidikan mempunyai korelasi yang kuat



dengan berbagai aspek sosial ekonomi, seperti kesejahteraan keluarga, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, tidak kalah pentingnya, pada dunia pendidikan penting untuk menjaga rasio guru dan murid. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diterima masyarakat.

Secara umum, untuk keadaan tahun ajaran 2022/2023, jumlah sekolah nampak mengalami peningkatan dibanding tahun ajaran sebelumnya kecuali TK Negeri. Begitu pula untuk jumlah murid, pada umumnya terlihat peningkatan kecuali di level Pendidikan PAUD, SLTP Negeri dan SMA Swasta. Berikut dapat dilihat peningkatan yang terjadi pada tahun ajaran 2022/2023:

Tabel 3
Perkembangan Jumlah Fasilitas Pendidikan Dasar dan Jumlah Murid SD dan SMP di Kabupaten Serang

Uraian	Negeri	Swasta
Fasilitas TK	2	166
Fasilitas Raudatul Athfal	201	
Fasilitas Madrasah Ibtidaiyah	4	139
Fasilitas SD	707	28
Fasilitas Madrasah Tsanawiyah	5	201
Fasilitas SMP	92	114
Fasilitas Madrasah Aliyah	2	88
Fasilitas SMU	27	55
Fasilitas SMK	11	82
Murid TK	132	7.014
Murid Raudatul Athfal	9.833	
Murid Madrasah Ibtidaiyah	2.007	24.080
Murid SD	161.173	7.007
Murid Madrasah Tsanawiyah	3.823	28.256
Murid SMP	5.629	16.490
Murid Madrasah Aliyah	1.105	10.926
Murid SMU	22.925	6.989
Murid SMK	10.663	17.276
Guru TK	13	760
Guru Raudatul Athfal	962	
Guru Madrasah Ibtidaiyah	144	1.426
Guru SD	6.602	426
Guru Madrasah Tsanawiyah	253	2.943
Guru SMP	1.869	942
Guru Madrasah Aliyah	122	1.255
Guru SMU	1.159	605
Guru SMK	543	1.080
Rasio Murid & Guru TK	1.015,38	922,89
Rasio Murid & Guru Raudatul Athfal	1.022,14	
Rasio Murid & Guru Madrasah Ibtidaiyah	1.393,75	1.688,64
Rasio Murid & Guru SD	2.441,28	1.644,84
Rasio Murid & Guru Madrasah Tsanawiyah	1.511,07	960,11
Rasio Murid & Guru SMP	301,18	1.750,53
Rasio Murid & Guru Madrasah Aliyah	905,74	870,60
Rasio Murid & Guru SMU	1.978,00	1.155,21
Rasio Murid & Guru SMK	1.963,72	1.599,63

Sumber : BPS, Kabupaten Serang Dalam Angka 2024



Dilihat berdasarkan tabel sebelumnya, ketersediaan fasilitas untuk jumlah Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Serang pada tahun 2023 sebanyak 143 bangunan dan rasio guru murid untuk negeri dan swasta masing-masing sebesar 1393,75 dan 1688,64. Untuk Madrasah Tsanawiyah, rasio guru murid untuk negeri dan swasta masing-masing sebesar 1511,07 dan 960,11 dengan ketersediaan fasilitas sebanyak 206 bangunan pada tahun 2023. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah, pada tahun 2023, ketersediaan fasilitas sebanyak 90 bangunan dengan rasio guru dan muridnya untuk negeri dan swasta masing-masing adalah 905,74 dan 870,60.

Dilihat berdasarkan ketersediaan fasilitas, jumlah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Serang pada tahun 2023 sebanyak 168 bangunan dengan rasio murid per guru untuk negeri dan swasta masing-masing adalah 1015,38 dan 922,89 murid. Untuk Sekolah Dasar, fasilitas bangunan sebanyak 735 bangunan dengan rasio guru dan murid untuk negeri dan swasta masing-masing sebesar 2441,28 dan 1644,84. Sementara untuk SMP memiliki rasio guru dan muridnya sebesar 301,18 (negeri) dan 1750,53 (swasta) dengan jumlah SMP yang tersedia sebanyak 206 bangunan. Sedangkan untuk ketersediaan fasilitas SMU dan SMK pada tahun 2023 masing-masing sebanyak 82 bangunan dan 93 bangunan.

2.1.3. Kesehatan

Urusan kesehatan di Kabupaten Serang menjadi hal yang wajib ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Daerah memasukkan urusan kesehatan ke dalam urusan wajib dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan didukung oleh indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang serius. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Serang pada tahun 2024 mengalami penurunan apabila dilihat dari beberapa indikator, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4
Perkembangan Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Serang

Fasilitas / Tenaga Kesehatan	2024	2023
Rumah Sakit	8	6
Poliklinik	103	109
Puskesmas	31	41
Pustu	54	36
Puskesmas Keliling	31	0
Apotek	85	48
Praktek Dokter	112	0
Balai Obat	0	0
Posyandu	1.538	2.444
Poskesdes	25	60
Dokter Umum	375	82



Fasilitas / Tenaga Kesehatan	2024	2023
Dokter Gigi	85	26
Paramedis	523	417
Perawat	824	1.316
Bidan	1.070	992

Sumber: Dinas Kesehatan, Kabupaten Serang

Secara umum fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan meningkat. Praktek dokter, balai obat dan apotek makin mudah ditemui. Dengan semakin banyaknya sebaran tenaga kesehatan, apalagi di puskesmas, diharapkan biaya kesehatan lebih mudah terjangkau oleh masyarakat umum.

2.1.4. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Rasio Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan apabila rasio gini sama dengan 1, maka ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Tabel 5
Gini Ratio Kabupaten Serang

Tahun	Gini Ratio
2021	0,264
2022	0,284
2023	0,274

Sumber : BPS Kabupaten Serang 2024

2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini dihitung secara komposit, dengan cara mengukur Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli yang diperoleh dari rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil. Angka IPM menjelaskan kesempatan Masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan pencapaian nilai indeks yang menjadi komponen penyusunnya. Indeks penyusun tersebut adalah indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Masing-masing indeks tersebut pada dasarnya menggambarkan kondisi capaian kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar terkait dengan aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek ekonomi.

Banyaknya komponen besaran indeks yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*) membuat



indeks IPM ini merupakan indeks komposit yang secara sederhana dapat secara cepat memberikan gambaran tentang pencapaian pembangunan manusia yang dicapai oleh suatu wilayah. Indeks ini dapat dikatakan sebagai penyederhanaan dari kenyataan hidup yang sejatinya lebih kompleks.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan Indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan untuk mengakselerasi indikator IPM harus dilakukan terhadap indikator-indikator tunggalnya. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 adalah 67,75 point.

IPM merupakan indeks gabungan dari beberapa indeks yaitu: indeks kesehatan (angka harapan hidup), indeks pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan indeks daya beli (pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan atau daya beli). Ketiga indikator tersebut dianggap dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Penghitungan IPM ini merupakan formula yang digunakan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) untuk mengukur Upaya pembangunan manusia. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun indeks ini mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk.

Berdasarkan kondisi indikator pembentukan IPM sebagaimana telah disampaikan di atas, maka nilai indeks pembangunan manusia Kabupaten Serang dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

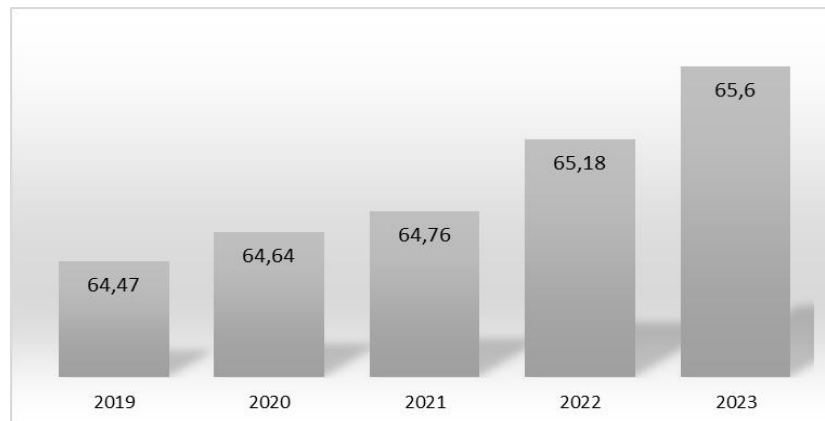
Tabel 6
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Serang

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (AHH)	64,47	64,64	64,76	65,18	65,6
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,43	12,57	12,58	12,78	12,86
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,33	7,5	7,51	7,78	7,79
Pengeluaran (Juta Rp)	10,8	10,67	10,71	10,92	11,32
IPM	66,38	66,7	66,82	67,75	68,39
Rank IPM di Prov. Banten	6	6	6	6	6

Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

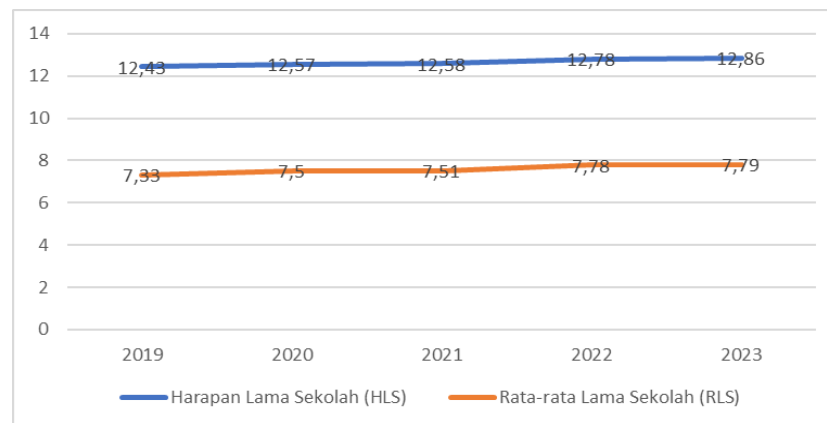


Grafik 1
Dimensi Angka Harapan Hidup Kabupaten Serang, 2019-2023



Dimensi Angka Harapan Hidup (AHH) merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2023, Angka Harapan Hidup telah meningkat sebesar 0,42 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,64% per tahun.

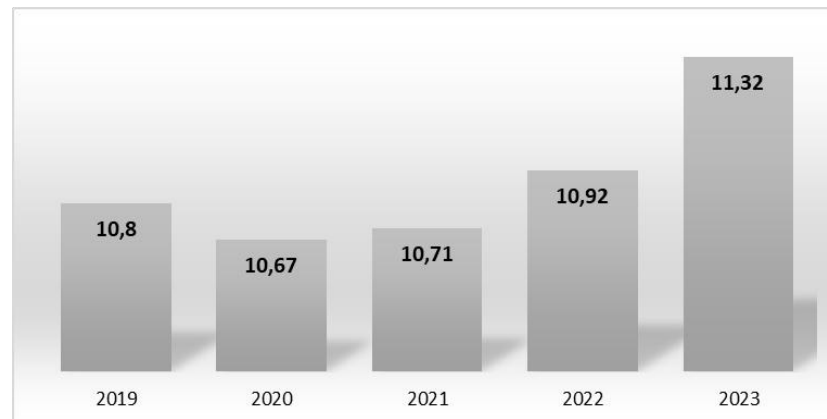
Grafik 2
Dimensi Pendidikan Kabupaten Serang tahun 2019-2023



Dimensi Pendidikan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2023, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Serang telah meningkat sebesar 0,63 persen, sementara Rata-rata Lama Sekolah bertambah 0,13 persen.



Grafik 3
Dimensi Standard Hidup Layak Kabupaten Serang tahun 2019-2023



Sementara, untuk rata-rata pengeluaran riil masyarakat Kabupaten Serang tahun 2023 sebesar Rp11.320.000,- per tahun. Rata-rata pengeluaran ini meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2019 yang sebesar Rp10.800.000,- per tahun. Peningkatan ini tentunya tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam memberikan subsidi dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini harus diikuti dengan pembinaan dan perluasan wawasan serta mengasah kemampuan masyarakat untuk menghasilkan produk barang dan jasa.

2.1.6. Angka Kemiskinan

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah yang sangat kompleks dan akan terus berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat. Hal tersebut muncul disebabkan oleh perubahan-perubahan masyarakat yang selalu menunjukkan perkembangan di segala bidang baik ekonomi, sosial, Budaya dan khususnya teknologi.

Seiring dengan kemajuan yang dicapai maka dampaknya semakin dirasakan, yaitu terjadinya kesenjangan sosial pada beberapa aspek kehidupan. Satu sisi menunjukkan kemajuan dan meningkatkan mutu kehidupan, sedangkan di sisi lain menunjukkan makin tertinggalnya kelompok-kelompok tertentu oleh kemajuan-kemajuan tersebut. Kelompok-kelompok ini dikatakan sebagai bermasalah karena keberadaannya menyebabkan dampak negatif terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan. Berkembangnya kelompok ini merupakan masalah sosial dan lebih lanjut merupakan penghambat pembangunan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, Keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau



perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Deskripsi mengenai perkembangan jumlah penyandang kesejahteraan sosial di Kabupaten Serang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah pada beberapa kriteria PMKS.

Perkembangan jumlah dan presentase penduduk miskin Kabupaten Serang pada tahun 2019 – 2023 cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.

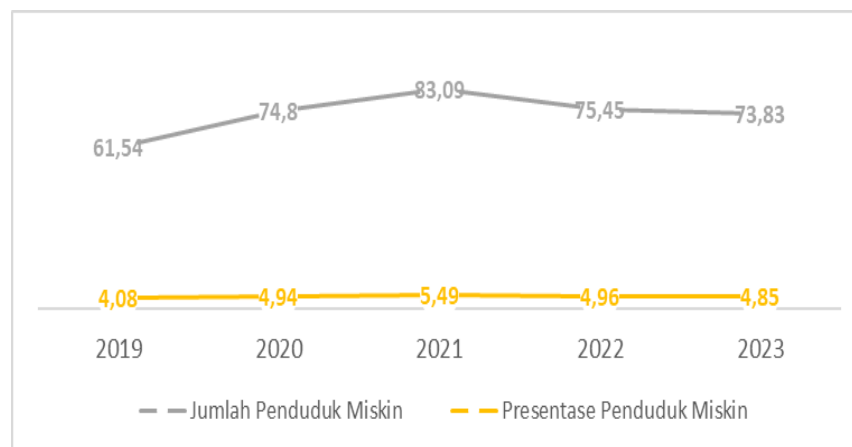
Tabel 7
Jumlah Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Serang

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
2019	309.036	61,54	4,08
2020	341.074	74,8	4,94
2021	362.102	83,09	5,49
2022	385.864	75,45	4,96
2023	425.751	73,83	4,85

Sumber : BPS Kabupaten Serang 2024

Grafik Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Serang pada tahun 2019-2023.

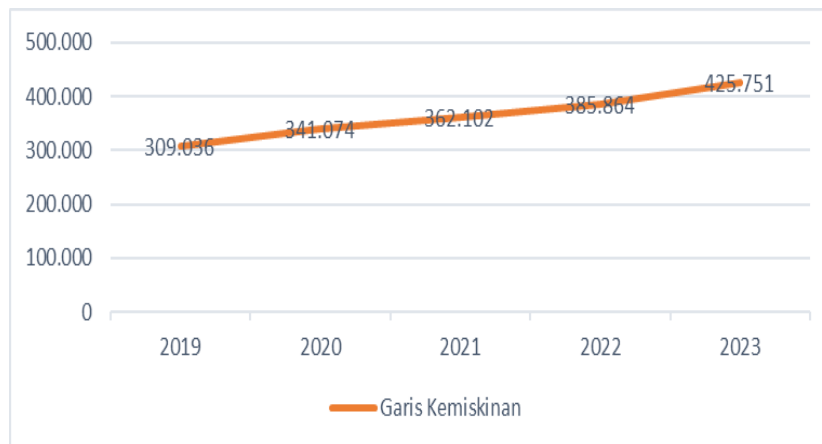
Grafik 4
Jumlah Presentasi Penduduk Miskin, Tahun 2019-2023



Presentase penduduk miskin terendah di Kabupaten Serang terjadi pada maret 2019 yaitu sebesar 4,08% (61,54 ribu orang) dan pada 2021 mencapai puncak tertinggi yaitu 5,49% (83,09 ribu orang).



Grafik 5
Garis Kemiskinan Kabupaten Serang, Tahun 2019-2023



Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (*headcount index-Po*), indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index-P1*), dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index-P2*). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan di Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan sebesar Rp425.751,00 dari tahun sebelumnya.

2.1.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Serang

PDRB Kabupaten Serang pada tahun 2023 sebesar 95,08 triliun rupiah. Sebesar 10,79 persen disumbang oleh sektor pengadaan listrik dan gas, disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 9,32 persen; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,57 persen; sektor transportasi dan pergudangan sebesar 7,94 persen dan sektor konstruksi sebesar 7,31 persen.

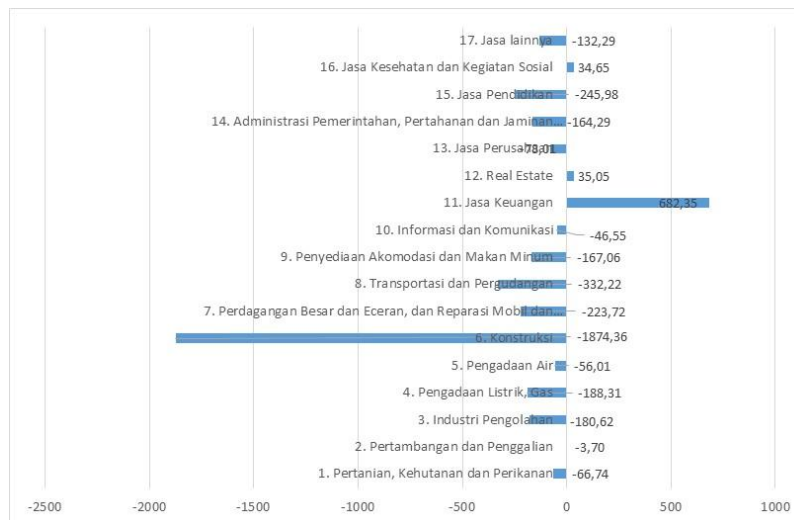
Tabel 8
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Serang Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000/ADHK (dalam Milyar Rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB (dalam Milyar Rupiah)
2019	54.347,49	76.906,40
2020	52.866,43	75.880,72
2021	54.844,65	80.231,26
2022	57.607,11	87.983,13
2023	60.370,56	95.080,43

Sumber: BPS Kabupaten Serang 2024



Grafik 6
Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Serang TA 2023



Semakin maju perekonomian daerah biasanya ditandai dengan kontribusi sektor primer yang cenderung mengalami penurunan, sedangkan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan. Struktur ekonomi biasanya dilihat dengan pendekatan makro sektoral, yaitu berdasarkan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Tingkat perubahan struktural yang tinggi, berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari aktivitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa.

Hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023. Sektor dengan pertumbuhan terpesat adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 10,79 persen. Laju Pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha sebagai berikut :

Tabel 9
Laju Pertumbuhan Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Serang Tahun 2023-2024

Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha (persen)	
	2023	2024
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,33	1,44
2. Pertambangan dan Penggalian	(2,16)	(2,08)
3. Industri Pengolahan	(5,16)	4,16
4. Pengadaan Listrik, Gas	(5,73)	5,06
5. Pengadaan Air	8,57	3,77
6. Konstruksi	(0,39)	6,92
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(1,56)	1,93
8. Transportasi dan Pergudangan	(2,39)	5,55
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(5,13)	3,44
10. Informasi dan Komunikasi	8,98	4,80
11. Jasa Keuangan	0,51	3,99
12. Real Estate	1,94	2,62



Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha (persen)	
	2023	2024
13. Jasa Perusahaan	(1,91)	(0,42)
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0,14)	0,09
15. Jasa Pendidikan	0,87	(1,27)
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,57	7,50
17. Jasa lainnya	(3,84)	1,24

Sumber : BPS, Kabupaten Serang dalam Angka 2024

Struktur Perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB sektoral atas dasar harga berlaku, dapat berubah dari waktu ke waktu. Terjadinya perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perkembangan teknologi, adanya perbedaan investasi yang dilakukan serta perkembangan dan ketersediaan sumber daya atau faktor produksi suatu sektor usaha.

Selain itu, perubahan struktur ekonomi dapat juga disebabkan oleh adanya perbedaan laju pertumbuhan antar sektor ekonomi. Sektor ekonomi yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi akan memiliki kontribusi yang semakin besar, sebaliknya sektor dengan pertumbuhan yang kecil akan mengalami penurunan kontribusi terhadap total nilai tambah wilayah. Akibatnya sektor dengan kontribusi yang semakin menurun pada beberapa tahun terakhir akan menjadi kurang menarik bagi investor dibandingkan sektor ekonomi lain yang pertumbuhan dan kontribusinya semakin besar. Sehingga akan terjadi pergeseran faktor produksi ke sektor-sektor yang semakin berkembang dengan potensi pendapatan yang lebih tinggi.

Selama ini struktur perekonomian Kabupaten Serang belum mengalami perubahan yang cukup berarti. Terdapat lima sektor yang masih mendominasi perekonomian dan memberikan kontribusi jauh di atas sektor-sektor lainnya dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang di tahun 2023. Kategori pengadaan listrik dan gas, kategori industri pengolahan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori transportasi dan pergudangan dan kategori konstruksi.

2.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, peranan keuangan daerah sangatlah penting karena dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pembiayaan keuangan daerah. Untuk itu, perumusan arah kebijakan keuangan harus dilakukan dengan terukur, terarah dan cermat agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian yang mengatur tentang kebijakan anggaran Pemerintah Daerah, dan yang akan menjadi pedoman dalam mengelola pendapatan daerah,



belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang nantinya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya dalam mendukung arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditentukan tersebut, dibuat kebijakan turunannya yaitu arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2024, arah kebijakan belanja daerah tahun 2024 serta arah kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024.

Atas dasar hal tersebut disusun Arah Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Pendapatan

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalian serta peningkatan pendapatan berdasarkan kondisi perekonomian yang terjadi pada Tahun 2023 perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya.

Pendapatan terbesar dari Pemerintah Daerah berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat, namun dana perimbangan tersebut berada diluar kendali Pemerintah Daerah, karena pengalokasiannya ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dana transfer sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula DAU. Maka untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Serang harus berfokus pada upaya pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2024 ini meliputi:

- a. Optimalisasi penguatan pendapatan daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha melalui :
 - 1) Memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan pajak dan redistribusi daerah berbasis *Online*
 - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat
- b. Optimalisasi kinerja BUMD dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
- c. Evaluasi dan reformasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
- d. Melakukan pendekatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Serang untuk membantu peningkatan PAD diluar dana bagi hasil yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat;
- e. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan redistribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;



- f. Revitalisasi, optimalisasi dan inventarisasi aset-aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

Secara rinci, arah kebijakan pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah;

i. Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Penetapan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah, dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, realisasi penerimaan PAD semester 1 tahun 2023, serta target penerimaan PAD Tahun 2022.

ii. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Proyeksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, ditetapkan secara rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal.

iii. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah terdiri atas hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan / atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan dari BLUD.

b) Pendapatan Transfer;

Arah kebijakan pendapatan transfer Kabupaten Serang Tahun 2024, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan pajak dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan maka penganggarnya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2023, dengan memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2022.



Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH Pajak dan bukan pajak 2024 tersebut ditetapkan Setelah Perda APBD ditetapkan, maka akan disesuaikan dalam perubahan APBD 2024.

- 2) Berkaitan dengan target pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat, dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 telah disesuaikan dengan adanya *Treasury Deposite Facility* (TDF) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Serang atas Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Pusat
- 3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah Kabupaten Serang harus menyesuaikan dalam perubahan APBD 2024.
- 4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2024. Sepanjang ketentuan tersebut belum ada, maka dalam RKPD Kabupaten Serang tahun 2024 tidak mencantumkan alokasi DAK, khususnya DAK fisik.
- 5) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan belum ditetapkan, maka penganggaran DID tersebut didasarkan pada alokasi DID Tahun Anggaran 2023, dalam hal Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- 6) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri



Kuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- 7) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Gubernur dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut didasarkan pada alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam hal Peraturan Gubernur diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serang 2024, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Mengingat sampai dirumuskannya Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024 informasi dimaksud belum diterima, maka alokasi Bantuan Keuangan belum dialokasikan dalam pendapatan tahun 2024

a. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah;

Arah kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah



Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Anggaran Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp3.745.528.044.029,00 sedangkan anggaran pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp3.486.555.470.538,00 naik sebesar Rp258.972.573.491,00.

2. Kebijakan Umum Belanja Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, lingkungan yang bersih dan nyaman, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Arah kebijakan ini terdiri dari arah kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Arah kebijakan belanja merupakan arah kebijakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat diukur berdasarkan indikator dan tolok ukur capaian kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (seperti: pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan), menanggulangi masalah-masalah sosial (seperti: kemiskinan dan pengangguran), serta meningkatkan ketersediaan dan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pergerakan roda perekonomian daerah dan masyarakat.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Oleh karena itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpol.



Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Organisasi Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Adapun Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Serang sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja untuk program prioritas pembangunan termasuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan sisanya dialokasikan untuk belanja diluar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
- b. Belanja operasional dialokasikan untuk belanja pegawai (belanja gaji dan tunjangan, serta mempertimbangkan juga tunjangan tambahan penghasilan yang dievaluasi berdasarkan pendapatan daerah), belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Belanja daerah digunakan Pemerintah Daerah untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik.
- d. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- e. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional, Provinsi Banten dan visi misi Bupati Serang. Pada RKPD tahun 2024, Belanja Daerah diarahkan lebih fokus peningkatan infrastruktur wilayah terutama jalan, serta berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, peningkatan serta pemulihan ekonomi dan sosial.
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.



- g. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai PNS dan Pegawai PPPK yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alokasi maksimal 30% dari alokasi belanja daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya serta pemberian gaji pada PPPK yang sudah dialokasikan anggarannya;
 - 2) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - 3) Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah / wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN / PNS Daerah;
 - 4) Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN dan PPPK;
 - 5) Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Serang masih mengalokasikan juga Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi PNS kepada seluruh PNS sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 dan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat / PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - 7) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui usulan DAK Non Fisik.
 - 8) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang



dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- 9) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
- 10) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

h. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan barang dan jasa nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga. Belanja jasa non ASN tetap dianggarkan untuk pemenuhan gaji tenaga kontrak yang direncanakan akan dilaksanakan menggunakan metode *outsourcing* sesuai dengan kebijakan pemerintahan pusat.
- 2) Dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dapat dianggarkan pengadaan barang dan jasa berupa barang yang di jual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- 6) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta



- pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 10) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi dan sewa aset tetap lainnya.
 - 11) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 12) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 13) Penganggaran ketersediaan layanan (*availability payment*) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
 - 14) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: (1) Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah; (2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 15) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 16) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 17) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 18) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Belanja Bunga
- 1) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.
 - 2) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
 - 3) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
 - 4) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan pada BPKAD selaku SKPKD.
 - 5) Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.
- j. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum



Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 3) Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 5) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, antara lain:

- 1) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- 2) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap;



- 3) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- 4) Selain itu juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 5) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 6) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas Belanja modal tanah; Belanja modal peralatan dan mesin; Belanja modal bangunan dan gedung; Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; Belanja modal aset tetap lainnya; dan Belanja modal aset tidak berwujud.
- 7) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah, penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 10) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;
- 11) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu





dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 12) Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2024. Dalam RKPD Tahun 2024, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

m. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 2) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada tahun 2024.

n. Belanja Tidak Terduga



- 1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
 - a) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik,
 - b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - c) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- 3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

Anggaran Belanja Daerah tahun 2024 sebesar Rp3.770.394.851.697,00 sedangkan anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp3.551.958.313.223,00 naik sebesar Rp218.436.538.474,00 dari anggaran tahun sebelumnya.

3. Kebijakan Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Dalam perhitungan anggaran, dimungkinkan akan terjadi surplus atau defisit anggaran. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sedangkan Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

a. Penerimaan pembiayaan;

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Serang pada APBD Tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya (2023) yang direncanakan sebesar Rp192.431.888.900,00, jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun



Anggaran 2024, SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp32.866.807.668,00 menyesuaikan dengan hasil audit BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD tahun 2023, dengan rincian SiLPA yang bersifat non-earmarking sebesar Rp4.894.000,00, dan yang bersifat earmarking sebesar Rp32.861.913.668,00.

b. Pengeluaran pembiayaan;

Pemerintah Daerah pada pengeluaran pembiayaan tahun 2024 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00 yang terdiri atas penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp5.000.000.000,00 serta kewajiban Pemerintah kepada BUMD-LKM Ciomas untuk pembayaran atas Utang Kompensasi Likuidasi PT LKM Ciomas sebesar Rp3.000.000.000,00. Kemudian karena dalam pos pendapatan dan belanja masih terdapat defisit sebesar (Rp24.866.807.668,00), kemudian pembiayaan netto sebesar Rp24.866.807.668,00, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Rancangan Perubahan KUA Tahun 2024 sebesar Rp0,00. (nihil).

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun 2024 terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp32.866.807.668,00 merupakan SiLPA 2023 yang telah diaudit dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8.000.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp5.000.000.000,00 dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp3.000.000.000,00, sehingga pembiayaan neto sebesar Rp24.866.807.668,00.

2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Pokok Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Serang

Berdasarkan Arah Kebijakan Umum APBD TA 2024, ditetapkan APBD setelah Perubahan Kabupaten Serang sebagai berikut:

Tabel 10
APBD setelah Perubahan Kabupaten Serang 2024

Uraian	P.APD TA 2024 (Rp)
PENDAPATAN	3.745.528.044.029,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.178.942.369.555,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.552.116.912.460,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.468.762.014,00
BELANJA	3.770.394.851.697,00
BELANJA OPERASI	2.709.222.572.109,53
BELANJA MODAL	478.168.111.554,47
BELANJA TAK TERDUGA	5.775.000.000,00
BELANJA TRANSFER	577.229.168.033,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(24.866.807.668,00)
PEMBIAYAAN DAERAH	24.866.807.668,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	32.866.807.668,00





Uraian	P.APBD TA 2024 (Rp)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.000.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Serang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam TA 2024. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk TA 2024 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang TA 2024 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 07 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang TA 2024.

Terjadinya perubahan APBD TA 2024 ini lebih disebabkan oleh adanya perubahan asumsi yang mendasari penghitungan target penerimaan Pendapatan Daerah dan alokasi Belanja Daerah. Tabel berikut ini menyajikan indikator Kinerja Fiskal Daerah TA 2024.

Seluruh Pergeseran anggaran APBD di atas pada akhirnya disesuaikan pada APBD Perubahan sehingga anggaran pendapatan sebesar Rp3.445.548.941.832,00 berubah menjadi Rp3.745.528.044.029,00 dan anggaran belanja sebesar Rp3.629.980.830.732,00 menjadi Rp3.770.394.851.697,00.

Tabel 11
Indikator Kinerja Fiskal Daerah TA 2024

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.010.531.276.784,00	1.178.942.369.555,00	168.411.092.771,00	16,67
Pajak Daerah	632.317.796.918,00	789.769.680.391,00	157.451.883.473,00	24,90
Retribusi Daerah	342.009.019.745,00	350.923.371.865,00	8.914.352.120,00	2,61
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.076.527.000,00	19.600.932.217,00	(475.594.783,00)	(2,37)
Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.127.933.121,00	18.648.385.082,00	2.520.451.961,00	15,63
PENDAPATAN TRANSFER	2.424.847.665.048,00	2.552.116.912.460,00	127.269.247.412,00	5,25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.177.182.434.000,00	2.243.493.030.000,00	66.310.596.000,00	3,05
Pendapatan Transfer Antar Daerah	247.665.231.048,00	308.623.882.460,00	60.958.651.412,00	24,61
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.170.000.000,00	14.468.762.014,00	4.298.762.014,00	42,27
Pendapatan Hibah	10.170.000.000,00	14.468.762.014,00	4.298.762.014,00	42,27
Jumlah Pendapatan	3.445.548.941.832,00	3.745.528.044.029,00	299.979.102.197,00	8,71
BELANJA				
BELANJA OPERASI	2.670.223.069.535,00	2.709.222.572.109,53	38.999.502.574,53	1,46
Belanja Pegawai	1.441.106.977.976,00	1.393.436.743.654,94	(47.670.234.321,06)	(3,31)
Belanja Barang dan Jasa	1.041.633.119.577,00	1.124.845.835.636,06	83.212.716.059,06	7,99
Belanja Hibah	180.006.421.982,00	184.331.442.818,53	4.325.020.836,53	2,40
Belanja Bantuan Sosial	7.476.550.000,00	6.608.550.000,00	(868.000.000,00)	(11,61)



Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
BELANJA MODAL	433.362.421.197,00	478.168.111.554,47	44.805.690.357,47	10,34
Belanja Modal Tanah	667.000.000,00	24.961.855.650,00	24.294.855.650,00	3.642,41
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.911.741.285,00	137.776.035.310,00	(11.135.705.975,00)	(7,48)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.368.372.496,00	103.445.430.905,47	28.077.058.409,47	37,25
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	196.156.487.565,00	198.367.819.941,00	2.211.332.376,00	1,13
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.839.819.851,00	13.016.980.248,00	1.177.160.397,00	9,94
Belanja Modal Aset Lainnya	419.000.000,00	599.989.500,00	180.989.500,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.775.000.000,00	5.775.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000,00	5.775.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER	520.620.340.000,00	577.229.168.033,00	56.608.828.033,00	10,87
Belanja Bagi Hasil	69.341.634.000,00	119.439.270.033,00	50.097.636.033,00	72,25
Belanja Bantuan Keuangan	451.278.706.000,00	457.789.898.000,00	6.511.192.000,00	1,44
Jumlah Belanja	3.629.980.830.732,00	3.770.394.851.697,00	140.414.020.965,00	3,87
SURPLUS / (DEFISIT)	(92.792.491.503,00)	(24.866.807.668,00)	67.925.683.835,00	(73,20)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	192.431.888.900,00	32.866.807.668,00	(159.565.081.232,00)	(82,92)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya	192.431.888.900,00	32.866.807.668,00	(159.565.081.232,00)	(82,92)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETO	184.431.888.900,00	24.866.807.668,00	(159.565.081.232,00)	(86,52)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00





BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

KABUPATEN SERANG

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Kabupaten Serang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Pada TA 2024 pos Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang ditetapkan sebesar Rp3.770.394.851.697,00 yang terbagi kedalam Belanja Operasi sebesar Rp2.709.222.572.109,53, Belanja Modal sebesar Rp478.168.111.554,47, Belanja Tak Terduga sebesar Rp5.775.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp577.229.168.033,00. Direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan sebesar Rp3.745.528.044.029,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.178.942.369.555,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.552.116.912.460,00 serta dari Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp14.468.762.014,00.

Sehingga perbandingan antara jumlah anggaran pendapatan dengan jumlah anggaran belanja menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp24.866.807.668,00. Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp24.866.807.668,00.

Pembiayaan Netto tersebut merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tahun 2024 berasal dari SILPA TA 2023 sebesar Rp32.866.807.668,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan berasal dari penyertaan modal BUMD sebesar Rp5.000.000.000,00 dan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00. Sehingga total pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8.000.000.000,00.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Serang selama TA 2024 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah
Kabupaten Serang TA 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Bertambah/ (Berkurang)
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.178.942.369.555,00	944.314.942.625,00	80,10	(234.627.426.930,00)
PENDAPATAN TRANSFER	2.552.116.912.460,00	2.535.579.868.449,00	99,35	(16.537.044.011,00)
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.468.762.014,00	10.893.241.588,00	75,29	(3.575.520.426,00)





Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Bertambah/ (Berkurang)
JUMLAH PENDAPATAN	3.745.528.044.029,00	3.490.788.052.662,00	93,20	(254.739.991.367,00)
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	2.709.222.572.109,53	2.561.521.309.939,00	94,55	(147.701.262.170,53)
BELANJA MODAL	478.168.111.554,47	428.320.239.751,00	89,58	(49.847.871.803,47)
BELANJA TAK TERDUGA	5.775.000.000,00	397.087.640,00	6,88	(5.377.912.360,00)
BELANJA TRANSFER	577.229.168.033,00	495.056.605.591,00	85,76	(82.172.562.442,00)
JUMLAH BELANJA	3.770.394.851.697,00	3.485.295.242.921,00	92,44	(285.099.608.776,00)
SURPLUS / (DEFISIT)	(24.866.807.668,00)	5.492.809.741,00	(22,09)	30.359.617.409,00
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.866.807.668,00	32.866.807.668,00	100,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00	7.482.125.637,00	93,53	(517.874.363,00)
PEMBIAYAAN NETTO	24.866.807.668,00	25.384.682.031,00	102,08	517.874.363,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	30.877.491.772,00	0,00	30.877.491.772,00

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.490.788.052.662,00 atau 93,20% di bawah target anggaran sebesar Rp3.745.528.044.029,00. Tidak tercapainya realisasi pendapatan sebesar Rp254.739.991.367,00 atau 6,80%. Hal tersebut terjadi karena:

- Pada realisasi pos PAD per 31 Desember 2024 tidak mencapai target sebesar Rp234.627.426.930,00 atau 19,90%.
- Pada realisasi pos Pendapatan Transfer per 31 Desember 2024 tidak mencapai target sebesar Rp16.537.044.011,00 atau 0,65%.
- Dan pada realisasi pos pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah pada per 31 Desember 2024 tidak mencapai target sebesar Rp3.575.520.426,00 atau 24,71%.

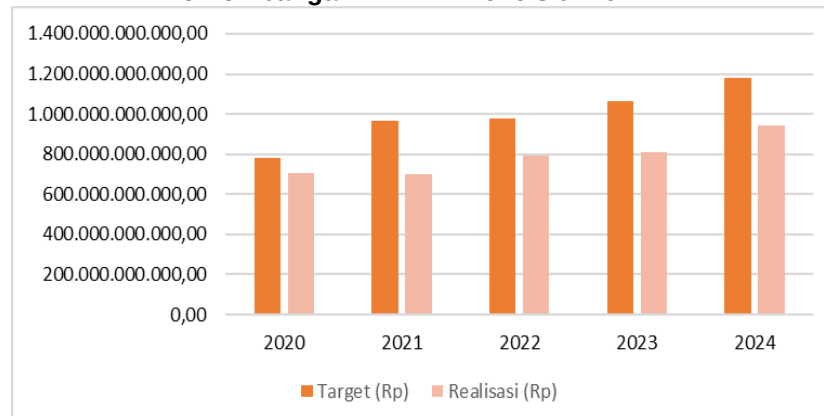
Apabila dijelaskan lebih lanjut perkembangan target dan realisasi pos penerimaan PAD dari tahun 2020 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut ini:

Tabel 13
Perkembangan PAD dari TA 2020 s.d. 2024

No	TA	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	778.800.551.009,00	705.281.901.421,00
2	2021	964.246.077.181,00	701.215.210.764,00
3	2022	976.125.245.938,00	791.086.613.633,00
4	2023	1.061.558.897.765,00	808.234.793.841,00
5	2024	1.178.942.369.555,00	944.314.942.625,00



Grafik 7
Perkembangan PAD TA 2020 s.d. 2024



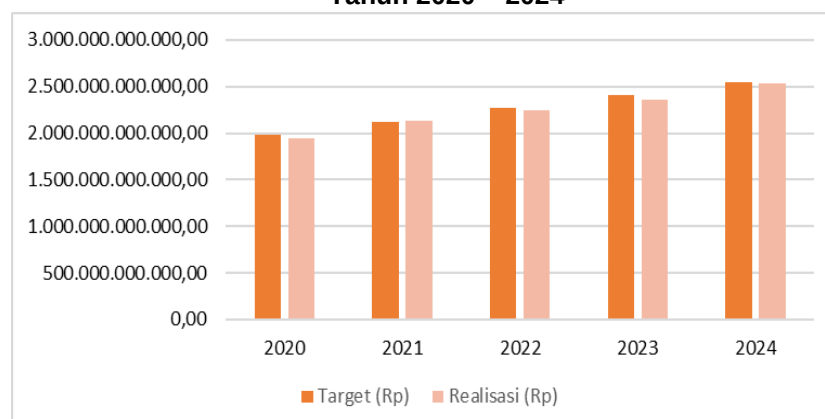
Berdasarkan data PAD sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 diatas, dapat dilihat realisasi PAD tidak ada memenuhi target yang ditetapkan namun bila dibandingkan tahun sebelumnya realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 terus meningkat, peningkatan realisasi PAD tahun 2023 ke 2024 sebesar 14,41% lebih besar dibandingkan peningkatan realisasi PAD tahun 2022 ke 2023 sebesar 2,12%.

Untuk Pendapatan Transfer realisasi penerimaan sebesar Rp2.535.392.002.194,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.552.116.912.460,00 tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp16.724.910.266,00 atau 0,66%. Berikut ini data perkembangan pendapatan transfer dari tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Tabel 14
Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2020 s.d. 2024

No	TA	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	1.987.315.113.202,00	1.940.567.149.150,00
2	2021	2.125.508.693.218,00	2.126.698.078.829,00
3	2022	2.271.922.777.570,00	2.243.660.752.897,00
4	2023	2.411.653.094.773,00	2.360.342.962.129,00
5	2024	2.552.116.912.460,00	2.535.392.002.194,00

Grafik 8
Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 – 2024





Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer Tahun 2023, realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp175.049.040.065,00 atau 7,42%. Peningkatan ini terjadi akibat bertambahnya transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2024 dari target penerimaan sebesar Rp14.468.762.014,00 dapat direalisasikan sebesar Rp10.893.241.588,00 atau 75,29%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023, terjadi peningkatan sebesar Rp620.401.242,00 atau 6,04%.

Per 31 Desember 2024 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3.770.394.851.697,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.485.295.242.921,00 atau 92,44%.

Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta pembagian jenis belanja menurut Permendagri Nomor 77 tahun 2020 yang terbagi menjadi anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Per 31 Desember 2024 Anggaran belanja operasi sebesar Rp2.709.222.572.109,53 atau 71,86%, Anggaran belanja modal sebesar Rp478.168.111.554,47 atau 12,68%, Anggaran belanja tak terduga sebesar Rp5.775.000.000,00 atau 0,15% dan Anggaran belanja transfer sebesar Rp577.229.168.033,00 atau 15,31% dari total belanja dan transfer.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, pagu Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp32.866.807.668,00 dapat direalisasikan sebesar Rp32.866.807.668,00 atau 100,00%, realisasi penerimaan ini berasal dari SiLPA TA 2023 sebesar Rp32.866.807.668,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.482.125.637,00 merupakan penyertaan modal daerah dan pembayaran pokok pinjaman daerah.

Capaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan TA 2024 dengan nilai Saldo Anggaran Lebih pada Awal Tahun 2024 sebesar Rp32.866.807.668,00, Sedangkan pada akhir tahun 2024 Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp30.877.491.772,00. Bila dibandingkan dengan saldo kas pada Neraca sebesar Rp30.898.406.078,00 maka terdapat selisih sebesar Rp20.914.306,00 yang merupakan saldo utang PFK dari Kas Dana BOS.

Tabel 15
Rincian SiLPA TA 2024

Uraian	Saldo
Kas di Kas Daerah	989.990.483,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di BLUD	28.760.698.178,00
Kas Dana BOS	312.197.540,00
Kas Dana BOK	835.519.877,00
Setara Kas	0,00
Jumlah	30.898.406.078,00



Dalam pencapaian Saldo Anggaran Lebih TA 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang juga memiliki kewajiban daerah berupa utang belanja yang tercatat per 31 Desember 2024 sebesar Rp136.731.025.889,98 terdiri dari:

Tabel 16
Utang Belanja Per 31 Desember Tahun 2024

Uraian	Perangkat Daerah	BLUD	Total Utang
Utang Beban Pegawai	7.443.937.617,00	1.437.443.167,00	8.881.380.784,00
Utang Beban Barang dan Jasa	21.485.869.644,00	10.219.108.351,00	31.704.977.995,00
Utang Belanja Hibah	1.936.439.627,22	0,00	1.936.439.627,22
Utang Belanja Modal	19.585.440.218,76	0,00	19.585.440.218,76
Utang Transfer, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	74.622.787.265,00	0,00	74.622.787.265,00
Jumlah	125.074.474.371,98	11.656.551.518,00	136.731.025.889,98

Sehingga jika jumlah Saldo Anggaran Lebih pada Akhir tahun 2024 diperbandingkan dengan jumlah kewajiban daerah yang berupa utang belanja per 31 Desember 2024 menimbulkan defisit keuangan yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang. Berikut ini perbandingan jumlah Saldo Anggaran Lebih pada Akhir tahun 2024 dengan kewajiban daerah yang berupa utang belanja per 31 Desember 2024:

Tabel 17
Perbandingan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 dan Utang Belanja Per 31 Desember TA 2024

Uraian	Saldo	Utang Belanja	Selisih
Kas di Kas Daerah	989.990.483,00	125.074.474.371,98	(124.084.483.888,98)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	28.760.698.178,00	11.656.551.518,00	17.104.146.660,00
Kas Dana BOS	312.197.540,00	0,00	312.197.540,00
Kas Dana BOK	835.519.877,00	0,00	835.519.877,00
Jumlah	30.898.406.078,00	136.731.025.889,98	(105.832.619.811,98)

3.1.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program pada SKPD

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan maupun sub kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan/sub kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan/sub kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran. Pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang pada TA 2024. Alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.186.479.679.924,00 atau 31,74% dari total anggaran belanja sebesar Rp3.770.394.851.697,00, dan dapat terealisasi sebesar Rp1.145.927.724.949,00. Tabel di bawah ini





menggambarkan secara rinci alokasi Belanja untuk setiap organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 18
Alokasi Belanja Per SKPD TA 2024

Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
DISDIK	9	19	48	1.186.479.679.924,00	1.145.927.724.949,00
DINKES	5	22	2	313.097.631.291,00	294.433.431.714,00
RSUD	2	5	21	336.691.414.375,00	326.222.385.321,00
DPUPR	13	24	5	436.089.956.418,00	399.730.096.419,00
DPRKP	5	15	57	25.921.928.480,00	24.490.195.419,00
SATPOL PP	2	9	20	13.812.126.354,00	13.336.761.167,00
BPBD	3	13	80	15.631.240.493,00	14.863.028.698,00
DINSOS	7	14	58	11.521.393.303,00	10.298.385.750,00
DISNAKERTRANS	6	20	89	11.600.778.060,00	10.869.059.651,00
DKPP	4	24	72	40.568.766.530,00	37.337.584.025,00
DLH	10	18	33	27.526.264.391,00	25.877.430.833,00
DISDUKCAPIL	5	11	14	20.179.288.182,00	18.137.771.925,00
DPMD	5	9	8	18.260.017.718,00	15.982.002.372,00
DKBP3A	10	26	57	29.697.432.860,00	28.057.795.505,00
DISHUB	5	22	13	37.986.330.007,00	37.143.816.729,00
DISKOMINFO	5	12	120	20.950.039.412,00	18.857.812.071,00
DISKOPERINDAG	17	27	92	17.183.468.874,00	14.662.027.077,00
DPMPTSP	6	12	34	18.396.612.386,00	15.338.318.734,00
DISPORAPAR	8	21	36	15.876.931.241,00	15.189.611.185,00
DPKD	4	11	60	8.922.014.912,00	8.459.572.012,00
DISKAN	5	16	6	13.949.550.855,00	13.031.247.918,00
SETDA	9	18	21	86.518.478.088,00	80.738.812.510,00
SETWAN	2	15	37	110.706.741.238,00	101.601.829.107,00
BAPPEDALITBANG	4	17	81	20.534.941.876,00	18.150.615.388,00
BAPENDA	2	6	32	43.147.611.245,00	39.280.946.520,00
BPKAD	3	13	29	636.183.332.461,00	524.038.802.701,00
BKPSDM	3	12	193	29.823.426.707,00	27.993.995.773,00
Inspektorat	3	10	36	25.985.983.941,00	23.075.469.419,00
Kec. Anyar	6	11	5	5.608.568.600,00	4.965.816.804,00
Kec. Bandung	5	10	7	3.495.947.830,00	3.242.701.488,00
Kec. Baros	6	10	31	5.294.223.086,00	4.544.901.113,00
Kec. Binuang	6	11	24	3.375.389.352,00	2.905.642.109,00
Kec. Bojonegara	6	11	19	3.658.906.073,00	3.323.315.620,00
Kec. Carenang	6	10	21	3.531.392.352,00	3.174.247.263,00
Kec. Cikande	6	11	23	5.588.786.354,00	5.290.070.609,00
Kec. Cikeusal	6	11	22	3.731.129.208,00	3.308.473.963,00
Kec. Cinangka	6	10	18	5.124.970.101,00	4.515.867.748,00
Kec. Ciomas	6	10	20	4.621.479.985,00	4.126.661.673,00
Kec. Ciruas	6	10	20	6.049.585.970,00	5.599.340.461,00
Kec. Gunungsari	6	11	21	3.588.428.694,00	3.132.660.424,00



Nama SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Kec. Jawilan	5	10	20	3.632.993.771,00	3.062.345.257,00
Kec. Kibin	6	11	17	5.722.333.748,00	5.513.592.259,00
Kec. Kopo	6	11	20	3.600.934.695,00	3.395.020.581,00
Kec. Kragilan	6	11	19	6.687.141.967,00	6.158.476.977,00
Kec. Kramatwatu	6	10	20	6.964.693.920,00	6.595.404.614,00
Kec. Lebak Wangi	6	11	19	3.723.670.742,00	3.362.070.384,00
Kec. Mancak	6	13	21	3.820.792.190,00	3.426.136.449,00
Kec. Pabuaran	6	10	21	4.932.795.447,00	4.117.290.226,00
Kec. Padarincang	6	10	20	4.437.006.240,00	3.292.157.020,00
Kec. Pamarayan	6	10	27	3.584.517.352,00	3.221.814.184,00
Kec. Petir	6	12	21	3.633.949.830,00	3.433.097.962,00
Kec. Pontang	6	12	19	5.190.990.450,00	4.487.320.708,00
Kec. Pulo Ampel	6	10	21	3.284.870.830,00	2.862.936.196,00
Kec. Tanara	6	11	22	4.379.407.720,00	3.283.739.716,00
Kec. Tirtayasa	6	10	24	4.843.380.013,00	4.271.857.909,00
Kec. Tunjung Teja	6	10	20	3.371.579.433,00	3.152.700.693,00
Kec. Waringinkurung	6	11	24	4.621.078.128,00	4.144.409.360,00
Kesbangpol	6	12	6	67.050.525.994,00	66.258.642.259,00
Jumlah	340	762	1946	3.770.394.851.697,00	3.485.295.242.921,00

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pelayanan masyarakat, pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, gedung sekolah, puskesmas, pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat laboratorium baik untuk kebutuhan puskesmas maupun sekolah.

3.2. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
2. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten; dan
3. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dalam hal ini menggunakan aplikasi SIMOLEK yang dikelola oleh Bagian Bina Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Selain faktor pendukung juga tentunya terdapat faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja program, antara lain:



1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah pusat tidak berjalan sesuai yang diharapkan sehingga proses pelaksanaan APBD tahun 2024 mengalami kendala.
2. Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen Pemerintah Daerah.
3. Belum optimalnya ketatalaksanaan dan kelembagaan Pemerintah Daerah.
4. Sistem Pengelola Keuangan Daerah belum terintegrasi dengan SIRUP, ATISISBADA, Pelaporan Pertanggungjawaban dan Kinerja Pemerintah Daerah
5. Masih terdapat fungsi akuntansi pada beberapa perangkat daerah yang tidak memiliki pengetahuan dasar dan keahlian dibidang akuntansi.





BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang yang disusun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Serang Nomor 250 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang TA 2024, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan TA 2024 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama TA 2024. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Operasional digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Serang tahun berjalan. Neraca digunakan untuk melihat dan membandingkan antara Total Aset dengan Kewajiban (Utang) dan Ekuitas.

Laporan Keuangan TA 2024 diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif tentang Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Sisa lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan, Beban, Surplus Defisit LO, Posisi Kas dan setara Kas, Piutang, Investasi, Aset Tetap dan kewajiban (Utang) serta Ekuitas secara bersamaan. Dengan informasi yang komprehensif tersebut diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan oleh pembaca/pengguna Laporan Keuangan, yaitu:

- a. Masyarakat;
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah.



4.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi di Kabupaten Serang TA 2024 seluruhnya sebanyak 58 unit SKPD, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 tidak terjadi perubahan jumlah SKPD. Untuk lebih jelasnya berikut adalah rincian SKPD Pemerintah Kabupaten Serang tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian SKPD Kabupaten Serang Tahun 2024

No	Nama SKPD 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Dr.Dradjat Prawiranegara
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
21	Dinas Perikanan
22	Sekretariat Daerah
23	Sekretariat DPRD
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
25	Badan Pendapatan Daerah
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28	Inspektorat Daerah
29	Kecamatan Anyar
30	Kecamatan Bandung
31	Kecamatan Baros
32	Kecamatan Binuang
33	Kecamatan Bojonegara
34	Kecamatan Carenang
35	Kecamatan Cikande
36	Kecamatan Cikeusai



No	Nama SKPD 2024
37	Kecamatan Cinangka
38	Kecamatan Ciomas
39	Kecamatan Ciruas
40	Kecamatan Gunungsari
41	Kecamatan Jawilan
42	Kecamatan Kibin
43	Kecamatan Kopo
44	Kecamatan Kragilan
45	Kecamatan Kramatwatu
46	Kecamatan Lebak Wangi
47	Kecamatan Mancak
48	Kecamatan Pabuaran
49	Kecamatan Padarincang
50	Kecamatan Pamarayan
51	Kecamatan Petir
52	Kecamatan Pontang
53	Kecamatan Pulo Ampel
54	Kecamatan Tanara
55	Kecamatan Tirtayasa
56	Kecamatan Tunjung Teja
57	Kecamatan Waringinkurung
58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2. Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan dan Beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas masih digunakan untuk mencatat pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Serang tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Pengukuran yang dipergunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Serang Nomor 250 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang.

4.2.1. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Pengungkapan kas dan setara kas dijelaskan, diperinci dan diberikan analisa dalam CaLK. Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain:



1. Penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai pemerintah;
2. Penjelasan dari sisa saldo kas yang didalamnya terdapat utang PFK;
3. Pengungkapan informasi penting lainnya terutama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.

4.2.2. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek dalam bentuk Deposito Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Investasi Jangka Pendek dalam bentuk Surat Berharga, misalnya Obligasi Jangka Pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai Penerimaan Kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan maupun penerimaan pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi di dalam Laporan Operasional.

4.2.3. Pengukuran Piutang

Piutang Pemerintah Kabupaten Serang secara umum dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

1. Piutang Pajak

Piutang pajak dicatat berdasarkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Dalam penyusunan Neraca, penerbitan Surat Ketetapan Pajak dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Jika sampai tanggal Laporan Keuangan terdapat ketetapan pajak yang belum dilunasi, pencatatan piutang dapat didasarkan pada surat/daftar rekapitulasi tagihan piutang pajak.

Informasi mengenai surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dan belum dilunasi dan surat/daftar rekapitulasi tagihan piutang pajak dapat diperoleh dari Satuan Kerja Pemungut Pajak Daerah.

2. Piutang Retribusi



Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

3. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD

Bagian lancar pinjaman kepada BUMD merupakan reklasifikasi piutang pinjaman kepada BUMD yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Bagian lancar pinjaman kepada BUMD dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo tahun berikutnya.

4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

5. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

6. Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD/BUMN, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak semua piutang dapat direalisasikan karena belum tentu semua wajib bayar (debitur) dapat melunasi kewajibannya kepada Pemerintah



Kabupaten Serang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dengan membuat penyisihan atas piutang tidak tertagih.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Jenis-jenis piutang

Jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan piutang, meliputi:

- a. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah, antara lain:
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi; dan
 - 3) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah.
- b. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain:
 - 1) Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya; dan
 - 3) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.
- c. Piutang dari Perikatan antar Lain:
 - 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya; dan
 - 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga hasil penagihan piutang yang telah disisihkan dapat direalisasikan, yaitu:

- a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:



- 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - 2) Upaya penagihan.
- b. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
- 1) Kualitas Lancar;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar;
 - 3) Kualitas Diragukan; dan
 - 4) Kualitas Macet.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

- c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

- 1) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- (c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- (e) Wajib pajak likuid; dan/atau
- (f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- (2) Kualitas Kurang Lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- (e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

- (3) Kualitas diragukan Dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau





- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau





- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

2) Piutang Retribusi

Penggolongan piutang retribusi sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar

- (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar

- (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan

- (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

- (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.





3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Piutang yang berdasarkan pendapatan transfer tidak dilakukan penyisihan piutang karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan pengakuan serta kebijakan pembayaran sangat bergantung kepada kebijakan pemberi dana transfer.

Pengaturan kualitas piutang yang berasal dari dana BLUD diatur pada kebijakan akuntansi BLUD.

d. Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) Kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

e. Penghapusan Piutang Daerah

Piutang Daerah dapat dihapuskan dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Serang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.





- a. Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - 1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
 - 2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
- b. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang
 - 1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a) Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
 - b) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - c) Debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - d) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - e) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - f) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - g) Debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - (1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - (2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan Bupati; dan/atau
 - i) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
 - 2) Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 3) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 4) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang
- 1) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit;
 - e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
 - f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia dan industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
 - g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
 - 2) Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan:

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup *ekstrakomtabel* dan tidak melakukan



penjurnalan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.4. Pengukuran Beban Bayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan hasil perhitungan beban yang belum dimanfaatkan/dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.2.5. Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampas

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Persediaan dinilai menggunakan metode FIFO. Penilaian persediaan pada BLUD diatur dalam kebijakan akuntansi BLUD.

4.2.6. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Pengukuran untuk investasi jangka panjang terdapat tiga metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun ketiga metode itu adalah:

1. Metode Biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Metode biaya diterapkan untuk:

- a. Investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Serang kurang dari 20% (dua puluh persen). Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/hukum yang



terkait. Pada metode ini, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Serang dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah.

- b. Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
- c. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Serang, seperti Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

2. Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Serang 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan berlaku juga pada kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen). Perhitungan metode ekuitas dapat dilakukan dalam dua cara yaitu:

Pertama, dibuat perhitungan *restated* setiap tahun berdasarkan nilai total modal BUMD yang terdapat pada laporan neraca dan laporan perubahan modal yang dikalikan dengan persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah atas BUMD yang bersangkutan.

Kedua, dihitung berdasarkan perhitungan *restated* tahun N-1 (seperti cara pertama) sehingga menghasilkan nilai *restated* tahun N-1, nilai tersebut digunakan sebagai saldo awal untuk perhitungan. Kemudian saldo awal tersebut ditambahkan dengan nilai penyertaan modal tahun N kemudian ditambahkan lagi dengan jumlah perkalian antara persentase saham dan total laba BUMD tahun N yang terdapat pada laporan laba rugi kemudian hasil penjumlahan tersebut dikurangi dengan nilai dividen yang diperoleh pada tahun N. Hasil pengurangan tersebut adalah nilai investasi Pemerintah Daerah pada BUMD yang bersangkutan berdasarkan metode ekuitas.

- a. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Pemerintah Kabupaten Serang mengakui adanya kenaikan/penurunan nilai investasi sehubungan dengan adanya





laba/rugi perusahaan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya.

- b. Laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Serang dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah.
- c. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Serang, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Serang bersifat non permanen. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Serang adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi dan pada neraca dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang dihasilkan antara tanggal perolehan investasi dan pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.

4.2.7. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset Tetap yang tidak diketahui nilai perolehannya dapat juga menggunakan Nilai Jual Objek Pajak untuk tanah dan gedung/bangunan, serta standar



satuan harga/analisa standar belanja dan harga pasar untuk peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya.

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

Aset tetap yang perolehannya menggunakan dana yang tidak melalui RKUD (Dana BOS, Dana BLUD dan yang sejenisnya) dinilai berdasarkan nilai nominal dari dokumen pengesahan belanja dari BUD.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut.

a. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/distribusikan secara langsung dengan aset adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya Perencanaan;
- 2) Biaya Jasa Penilaian;
- 3) Biaya Persiapan Tempat;
- 4) Biaya Pengiriman Awal (*Initial Delivery*) dan Biaya Simpan dan Bongkar Muat (*Handling Cost*);
- 5) Biaya Pemasangan (*Installation Cost*);
- 6) Biaya Profesional Seperti Arsitek Dan Insinyur;
- 7) Biaya Konstruksi;
- 8) Biaya Pengawasan;
- 9) Biaya Pengujian Aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*); dan
- 10) Biaya Kepanitiaan.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Untuk Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua



biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Jika nilai perolehan aset di bawah batasan minimal kapitalisasi maka atas aset tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Catatan Laporan Barang Milik Daerah.

b. Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan/Pemeliharaan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi;
- 2) Pengeluaran tersebut menambah masa manfaat;
- 3) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas, kualitas dan volume aset;
- 4) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
- 5) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi.

Terkait dengan penambahan masa manfaat Aset Tetap akibat pengeluaran setelah tanggal perolehan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran VIII Peraturan Bupati Serang tentang Kebijakan Akuntansi.

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.

c. Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.



Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat aset tersebut dan tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan di mana suatu aset dilepas dan ditukar dengan kepemilikan aset yang serupa.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Aset Tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

d. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Seluruh Aset Tetap kecuali Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa

- 1) Peralatan dan mesin;
- 2) Gedung dan bangunan;
- 3) Jalan, irigasi, dan jaringan; dan
- 4) Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi Dan Alat Musik Modern.

Oleh karena itu, Aset Tetap Lainnya berupa Hewan, Tanaman, Buku Perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Perhitungan dan pembebanan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan, dimana penyusutan dihitung satu tahun penuh pada tanggal pelaporan (baik interim maupun tahunan) meskipun baru diperoleh di bulan januari tahun pelaporan atau pun diperoleh pada Bulan Desember tahun pelaporan. Contoh perolehan aset kendaraan pada bulan Maret 2023 maka pada akhir Bulan Desember 2023, aset ini telah dihitung penyusutannya tetap setahun penuh.





Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku akhir tahun, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai perolehan aset tetap.

Metode penyusutan diterapkan Pemerintah Daerah adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*). Metode Garis Lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keunggulan Metode Garis Lurus adalah bahwa perhitungannya mudah. Metode ini berlaku untuk seluruh aset yang disusutkan. Secara lebih lengkap mengenai masa manfaat untuk berbagai aset tetap dapat dilihat pada tabel manfaat di Lampiran VII Peraturan Bupati Serang tentang Kebijakan Akuntansi.

e. Penghentian dan Pelepasan

Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan tidak memenuhi definisi Aset Tetap harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pemindahan aset tetap ke aset lainnya berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang sedangkan penghentian dan pelepasan aset tetap berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan/Pemusnahan Barang Milik Daerah.

Penghentian suatu Aset Tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

- 1) Rusak berat terkena bencana alam/*force majeure*;
- 2) Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);
- 3) Terkena planologi kota;
- 4) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- 5) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
- 6) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis;
- 7) Hankam;
- 8) Pertimbangan teknis; dan
- 9) Pertimbangan ekonomis.





Salah satu cara untuk melakukan penghentian aset tetap adalah dengan menjual atau menukar aset tetap tersebut. Jika penjualan atau penukaran aset tetap terjadi ketika belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai surplus defisit non operasional dari pertukaran aset pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

f. Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

4.2.8. Pengukuran Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dicatat sebesar nilai SP2D (LS) atas pemindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan.

Pencairan Dana cadangan dicatat sebesar nilai yang terealisasi berupa jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit (rekening koran bank) sesuai dengan proses penganalasan.

Penerimaan hasil jasa giro atau bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio diukur sebesar nilai nominal.

4.2.9. Pengukuran Aset Lainnya

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara/daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKTJM dan SKP2K atau Dokumen yang dipersamakan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara/pegawai yang bersangkutan yang bersangkutan ke kas umum daerah.



1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- b. Dana yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Serang dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Serang setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tak Berwujud

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran pada saat perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

a. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal

1) Pembelian

Harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB akan mencerminkan kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Dengan kata lain, entitas pemerintah mengharapkan adanya manfaat ekonomi ataupun jasa potensial yang mengalir masuk ke dalam entitas.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset keuangan lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:



- Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya *advertising* dan promosi);
- Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

2) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

3) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

4) Donasi/hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat





andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

b. Pengembangan secara internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkan ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana telah dijelaskan pada pengakuan ATB mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

c. Aset budaya/bersejarah tak berwujud (*intangible heritage assets*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

2. Pengukuran Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB sebesar biaya yang dikeluarkan sesuai dalam kriteria pengakuan ATB.

3. Amortisasi

Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu aset tidak berwujud terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban



amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Metode Amortisasi

Metode amortisasi yang digunakan yaitu dengan metode garis lurus. Pendekatan amortisasi yang dipakai dalam metode ini adalah tahunan. Dengan pendekatan tahun penggunaan ini maka waktu amortisasi ditentukan berdasarkan tahun saat aset tersebut digunakan. Misalkan ada perolehan aset tetap pada bulan oktober, maka beban amortisasi tersebut dihitung satu tahun penuh. Metode garis lurus menghitung penurunan nilai aset dengan rumus:

Beban amortisasi $\frac{\text{harga perolehan} - \text{estimasi nilai sisa}}{\text{estimasi masa manfaat}}$

Masa manfaat aset tidak berwujud yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat untuk menghitung tarif amortisasi untuk masing-masing kelompok aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Masa Manfaat Barang Milik Daerah
Berupa Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun
Software Komputer	4
Kajian Akademis (Non DED)	5
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
Hak Paten Sederhana	10
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Paten Biasa	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25



Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merk dagang, waralaba dengan kehidupan yang terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.

Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

4. Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penghentian, Pelepasan, dan Penghapusan

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB berupa pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk ATB dengan cara:

- Dijual;
- Dipertukarkan;
- Dihilangkan; atau
- Dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang



bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Dalam hal penghapusan DED dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

DED yang menjadi aset dalam jangka waktu kurang dari lima tahun diatribusikan pada aset yang dihasilkan;

DED yang menjadi aset dalam jangka waktu lebih dari lima tahun diatribusikan pada aset yang dihasilkan; dan

DED yang tidak menjadi aset dalam waktu lima tahun dihapus dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghentian, pelepasan dan penghapusan ATB diungkapkan dalam CaLK.

Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

TDF diakui sebesar nilai yang disalurkan dari RKUN ke rekening TDF.

4.2.10. Investasi

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Apabila properti investasi diperoleh dari reklasifikasi aset tetap, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai buku aset tetap tersebut.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:



- a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.

Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- a. Konfigurasi (risiko, waktu dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
- b. Nilai khusus pemerintah daerah dari bagian operasi pemerintah daerah dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
- c. Selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus pemerintah daerah dari porsi (bagian) operasi pemerintah daerah dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa pemerintah daerah menyajikan perhitungan yang rinci.

Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:



- a. Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
- b. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan. Maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti investasi, kecuali tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam Laporan Keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, suatu pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber termasuk:





- a. Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda) disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
- b. Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan
- c. Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.

Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- d. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalnya, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.

Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika pemerintah daerah memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.

Pemerintah daerah dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai



properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

Karena pemerintah daerah menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Jika pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

4.2.11. Kewajiban

Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Serang berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan



dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Ketika Pemerintah Kabupaten Serang menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

2. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Serang dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

5. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Kabupaten Serang juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *WorldBank*.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan *diskonto* atau *premium* yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga *diskonto*, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu jika sekuritas dijual dengan harga *premium*, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.



4.2.12. Ekuitas

Pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

4.2.13. Pendapatan LRA

Akuntansi Pendapatan-LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat. Sebagai contoh, pendapatan non kapitasi yang ditransfer oleh BPJS kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diterima sebesar tagihan dikurangi biaya transfer.

Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.2.14. Pengukuran Belanja dan Transfer

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan azas bruto. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.2.15. Pengukuran Pembiayaan

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.



Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.2.16. Pengukuran Pendapatan LO

Secara umum akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, Perpres SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya.

Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.2.17. Pengukuran Beban

Beban-beban yang merupakan pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran dan/atau dokumen pengakuan yang sah.

Nilai nominal bruto yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS dan bukti-bukti pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU.

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas (non-kas), seperti beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang terkait.

Dokumen yang menjadi dasar pencatatan beban non-kas, seperti beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih antara lain berupa bukti memorial.

4.2.18. Pengukuran Surplus/Defisit Non Operasional

Surplus/defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO diukur sebesar selisih lebih/kurang antara nilai buku aset non lancar dengan



kompensasi yang diterima dari penjualan/ pertukaran/ pelepasan aset non lancar.

Surplus/defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang diukur sebesar selisih lebih/kurang antara nilai buku kewajiban jangka panjang dengan nilai yang harus dibayarkan dari penyelesaian kewajiban jangka panjang.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya atas penurunan nilai investasi yang menggunakan metode ekuitas diukur sebesar selisih kurang dari nilai awal dengan nilai akhir buku investasi non permanen.

4.2.19. Pengukuran Transitoris

Transaksi transitoris diukur sebesar nilai nominal atas transaksi transitoris tersebut.





BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024 mencapai Rp3.490.788.052.662,00 atau 93,20% dari target anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp3.745.528.044.029,00 jika dibandingkan realisasi pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.249.548.492.416,00 terjadi peningkatan sebesar Rp241.239.560.246,00 atau 7,42%.

Apabila diuraikan berdasarkan kelompok pendapatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, realisasi pendapatan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 21
Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
PENDAPATAN	3.745.528.044.029,00	3.490.788.052.662,00	93,20	3.249.548.492.416,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.178.942.369.555,00	944.314.942.625,00	80,10	878.932.689.941,00
Pendapatan Pajak Daerah	789.769.680.391,00	573.381.060.252,00	72,60	539.805.674.041,00
Pendapatan Retribusi Daerah	350.923.371.865,00	336.443.197.168,00	95,87	35.321.450.150,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.600.932.217,00	19.600.932.217,00	100,00	21.844.221.657,00
Lain-lain PAD Yang Sah	18.648.385.082,00	14.889.752.988,00	79,84	281.961.344.093,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.552.116.912.460,00	2.535.579.868.449,00	99,35	2.360.342.962.129,00
Transfer Pemerintah Pusat	2.243.493.030.000,00	2.226.087.824.008,00	99,22	2.068.190.600.021,00
Dana Perimbangan	1.882.641.939.000,00	1.865.236.733.008,00	99,08	1.719.245.195.021,00
Bagi Hasil Pajak	129.165.319.000,00	129.122.606.000,00	99,97	86.273.208.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.669.171.000,00	5.669.171.000,00	100,00	4.908.255.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.123.499.246.000,00	1.125.696.401.999,00	100,20	1.066.694.399.940,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	122.155.411.000,00	117.577.815.239,00	96,25	87.132.804.322,00
Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	502.152.792.000,00	487.170.738.770,00	97,02	474.236.527.759,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	360.851.091.000,00	360.851.091.000,00	100,00	348.945.405.000,00
Dana Penyesuaian	360.851.091.000,00	360.851.091.000,00	100,00	348.945.405.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	308.623.882.460,00	309.492.044.441,00	100,28	292.152.362.108,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	283.623.882.460,00	284.569.527.143,00	100,33	262.181.027.143,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	25.000.000.000,00	24.922.517.298,00	99,69	29.971.334.965,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.468.762.014,00	10.893.241.588,00	75,29	10.272.840.346,00
Pendapatan Hibah	14.468.762.014,00	10.893.241.588,00	75,29	10.272.840.346,00

Dari uraian realisasi pendapatan tahun 2024, dapat dijelaskan atas masing-masing jenis pendapatan sebagai berikut:



5.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp944.314.942.625,00 atau 80,10% dari anggaran sebesar Rp1.178.942.369.555,00. Walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan, jika dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp878.932.689.941,00 terjadi peningkatan sebesar Rp65.382.252.684,00 atau 7,44%. Adapun rincian per jenis Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pajak yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Pada perubahan APBD TA 2024 dilakukan perubahan pada nomenklatur pajak daerah yang menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan tersebut mengklasifikasikan beberapa pajak daerah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 22
Mapping Perubahan Nomenklatur Pajak

Perda Nomor 8 Tahun 2018	Perda Nomor 7 Tahun 2023
Pajak Hotel	PBJT-Perhotelan
Pajak Restoran	PBJT-Makanan dan/atau Minuman
Pajak Hiburan	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
Pajak Penerangan Jalan	PBJT- Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri
Pajak Parkir	PBJT-Jasa Parkir

Berdasarkan mapping perubahan nomenklatur pajak diatas, jumlah Pajak Daerah yang dapat dikelola serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 23
Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
Pendapatan Pajak Daerah	789.769.680.391,00	573.381.060.252,00	72,60	539.805.674.041,00
Pajak Reklame	3.528.699.000,00	3.875.689.678,00	109,83	3.323.411.379,00
Pajak Air Tanah	3.483.245.425,00	2.646.963.521,00	75,99	3.190.384.847,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	92.007.661.000,00	46.367.527.613,00	50,40	16.017.183.470,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	125.000.000.000,00	127.896.663.315,00	102,32	121.371.253.563,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	296.818.235.455,00	119.730.327.218,00	40,34	166.899.742.269,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	16.452.191.000,00	17.260.610.361,00	104,91	15.739.337.390,00
PBJT- Tenaga Listrik	226.622.562.000,00	228.893.945.978,00	101,00	187.713.350.673,00
PBJT- Jasa Perhotelan	23.138.705.000,00	24.053.552.385,00	103,95	23.241.219.214,00





Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
PBJT- Jasa Parkir	574.259.000,00	611.463.351,00	106,48	879.794.334,00
PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan	2.144.122.511,00	2.044.316.832,00	95,35	1.429.996.902,00

Dapat dijelaskan pada tabel diatas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp573.381.060.252,00 atau 72,60% dari anggaran sebesar Rp789.769.680.391,00. Selisih antara realisasi dengan anggaran sebesar Rp216.388.620.139,00 atau 27,40%.

Realisasi Penerimaan Pajak sebagian besar tidak mencapai target, pendapatan pajak yang mencapai target yaitu Pajak Reklame sebesar 109,83%, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 102,32%, PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar 104,91%, PBJT-Tenaga Listrik sebesar 101,00%, PBJT- Jasa Perhotelan sebesar 103,95% dan PBJT- Jasa Parkir sebesar 106,48.

Pendapatan Pajak yang tidak mencapai target adalah Pajak Air Tanah sebesar 75,99%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 50,40%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 40,34% dan PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 95,35%,

Walaupun Realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2024 tidak mencapai target, namun bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp539.805.674.041,00 meningkat sebesar Rp33.575.386.211,00 atau 6,22%. Peningkatan terjadi pada sebagian besar pajak. Secara nominal peningkatan terbesar terjadi pada Pajak Reklame yang meningkat sebesar Rp552.278.299,00 atau 16,62% dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meningkat sebesar Rp30.350.344.143,00 atau 189,49%, Pajak PBB yang meningkat sebesar Rp6.525.409.752,00 atau 5,38 %.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 mencapai Rp336.443.197.168,00 atau 95,87% dari anggaran sebesar Rp350.923.371.865,00. Target anggaran Retribusi Daerah yang tidak tercapai adalah Rp14.480.174.697,00 atau 4,13%. Apabila dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2023 sebesar Rp35.321.450.150,00 terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp301.121.747.018,00 atau 852,52%. Peningkatan retribusi yang cukup signifikan diakibatkan perubahan klasifikasi anggaran pelayanan kesehatan yang dikelola BLUD dimana sebelumnya dianggarkan pada lain-lain PAD yang Sah menjadi retribusi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan retribusi daerah dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :





Tabel 24
Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
Pendapatan Retribusi Daerah	350.923.371.865,00	336.443.197.168,00	95,87	35.321.450.150,00
Retribusi Jasa Umum	278.213.023.446,00	293.492.071.233,00	105,49	7.173.448.880,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	274.708.502.890,00	291.867.066.633,00	106,25	5.100.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.292.300.000,00	637.164.600,00	49,30	1.126.510.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	115.500.000,00	115.565.000,00	100,06	73.980.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.096.720.556,00	872.275.000,00	41,60	1.062.781.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.100.349.120,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	192.671.780,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	3.612.056.980,00
Retribusi Jasa Usaha	1.112.940.000,00	1.057.893.045,00	95,05	981.686.640,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	335.500.000,00	298.229.000,00	88,89	361.560.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	98.200.000,00	98.389.665,00	100,19	97.176.825,00
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	20.690.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	571.200.000,00	570.106.920,00	99,81	411.443.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	6.000.000,00	5.752.960,00	95,88	6.091.815,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	62.040.000,00	51.414.500,00	82,87	53.220.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000,00	34.000.000,00	85,00	31.505.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	71.597.408.419,00	41.893.232.890,00	58,51	27.166.314.630,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	12.500.000.000,00	14.196.698.500,00	113,57	10.760.458.931,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	59.097.408.419,00	27.696.534.390,00	46,87	16.405.855.699,00

Dilihat dari tabel diatas sebagian besar retribusi tidak mencapai target, terdapat 4 pendapatan retribusi yang mencapai target yaitu Retribusi Kesehatan sebesar 106,25%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 100,06%, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar 100,19% dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar 113,57%,.

Terdapat 3 pendapatan retribusi terbesar pada tahun 2024 yaitu Retribusi Kesehatan sebesar Rp291.867.066.633,00, Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp27.696.534.390,00, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp14.196.698.500,00.

Retribusi tidak mencapai target yang ditetapkan dibawah 50% adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar 49,30%, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 41,60% dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 46,87%.

Di dalam retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD sudah termasuk pencatatan uang kas tunai yang masih terdapat pada loket di RSUD sebesar Rp19.616.000,00. Didalam kas tunai tersebut masih terdapat



uang kelebihan pembayaran pelayanan kesehatan yang menjadi hak pasien sebesar Rp2.103.854,00 dan sudah dicatat pada utang lainnya.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi daerah. Anggaran ditetapkan sebesar Rp19.600.932.217,00 dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2024 sebesar Rp19.600.932.217,00 atau 100,00%. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp21.844.221.657,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.243.289.440,00 atau 10,27%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023

BUMD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
PT. BPR Serang	3.157.542.332,00	3.157.542.332,00	100,00	4.065.670.905,00
PDAM	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	901.629.000,00
Bank BJB	15.343.389.885,00	15.343.389.885,00	100,00	16.876.921.752,00
Jumlah	19.600.932.217,00	19.600.932.217,00	100,00	21.844.221.657,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 merupakan penerimaan Dividen yang diterima atas penyertaan modal/investasi pada PT. BPR Serang sebesar Rp3.157.542.332,00 berdasarkan hasil RUPS tanggal 18 Maret 2024, Dividen yang diterima atas penyertaan modal/investasi pada PDAM sebesar Rp1.100.000.000,00 berdasarkan hasil RUPS tanggal 26 Agustus 2024 dan Dividen yang diterima atas penyertaan modal/investasi pada Bank BJB sebesar Rp15.343.389.885,00 berdasarkan hasil RUPS tanggal April 2023.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan kelompok pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2024 mencapai Rp14.889.752.988,00 atau 79,84% dari anggaran sebesar Rp18.648.385.082,00, jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp281.961.344.093,00 terjadi penurunan sebesar Rp267.071.591.105,00 atau 94,72%. Penurunan ini diakibatkan oleh perubahan klasifikasi anggaran pendapatan BLUD sebagaimana telah dijelaskan pada bagian retribusi.

Adapun rincian penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:



Tabel 26
Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
Lain-lain PAD yang Sah	18.648.385.082,00	14.889.752.988,00	79,84	281.961.344.093,00
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	993.760.100,00	1.183.840.300,00	119,13	626.490.252,00
Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Di Pisahkan	417.000.000,00	416.789.825,00	99,95	527.864.825,00
Penerimaan Jasa Giro	6.209.671.502,00	3.562.733.922,00	57,37	3.643.996.083,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.747.671.630,00	3.878.609.478,00	221,93	2.008.841.791,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	12.000.000,00	28.380.310,00	236,50	219.938.239,00
Pendapatan Denda Pajak	5.000.000.000,00	1.706.884.034,00	34,14	1.309.089.184,00
Pendapatan Denda Retribusi	200.000.000,00	52.059.016,00	26,03	66.627.238,00
Pendapatan dari Pengembalian	147.450.000,00	309.667.840,00	210,02	1.284.982.450,00
Pendapatan BLUD	3.920.831.850,00	3.750.788.263,00	95,66	272.273.514.031,00

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 terdiri dari:

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.183.840.300,00 merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin.
- b. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak DiPisahkan sebesar Rp416.789.825,00 merupakan hasil sewa BMD oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berupa setoran sewa lahan tanah fasum dari Yayasan Pandu Pertiwi sebesar Rp71.009.825,00, serta setoran atas sewa tanah Batu Kuwung dari PT. Pemandian Air Panas Batu Kuwung periode tahun 2018 s/d 2022 sebesar Rp252.900.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp92.880.000,00.
- c. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp3.562.733.922,00 merupakan jasa giro atas seluruh rekening SKPD dan rekening Kas Daerah.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp3.878.609.478,00 merupakan pendapatan atas temuan kerugian uang maupun kerugian barang karena hasil pemeriksaan oleh aparat APIP maupun Auditor BPK.
- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp28.380.310,00 merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2023 sebesar Rp17.505.624,00 dan tahun 2024 sebesar Rp 10.874.686,00.
- f. Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp1.706.884.034,00 merupakan pendapatan atas Denda Pajak Daerah.
- g. Pendapatan Denda Retribusi merupakan pendapatan atas Denda Retribusi Daerah sebesar Rp52.059.016,00 antara lain:
 - 1) Penerimaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dari pelayanan



- Pasar Kios Anyer sebesar Rp3.900.000,00 dan penyediaan fasilitas pasar yang dikontrakkan sebesar Rp13.625.200,00.
- 2) Penerimaan pada Dinas PUPR dari pelayanan pemaknaan kekayaan daerah sebesar Rp84.750,00 dan persetujuan bangunan gedung sebesar Rp28.868.738,00.
 - 3) Penerimaan pada Dinas Perhubungan dari pelayanan kepelabuhan sebesar Rp2.488,00.
 - 4) Penerimaan pada DPMPTSP dari penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp5.577.840,00.
- e. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp309.667.840,00 merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan serta pengembalian lain-lain atas transaksi belanja sebelum Tahun 2023.
- f. Pendapatan BLUD sebesar Rp3.750.788.263,00 merupakan pendapatan BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp42.989.621,00 dan RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebesar Rp3.707.798.642,00. Pendapatan ini merupakan pendapatan BLUD hasil dari kerjasama dengan pihak ketiga sehingga tidak masuk kategori pelayanan kesehatan yang diklasifikasikan menjadi pendapatan retribusi.

5.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp2.535.579.868.449,00 atau 99,35% dari anggaran sebesar Rp2.552.116.912.460,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.360.342.962.129,00, terjadi peningkatan sebesar Rp175.236.906.320,00 atau 7,42%. Pendapatan Transfer dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 27
Pendapatan Transfer TA 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
PENDAPATAN TRANSFER	2.552.116.912.460,00	2.535.579.868.449,00	99,35	2.360.342.962.129,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.243.493.030.000,00	2.226.087.824.008,00	99,22	2.068.190.600.021,00
Dana Perimbangan	1.882.641.939.000,00	1.865.236.733.008,00	99,08	1.719.245.195.021,00
Dana Bagi Hasil Pajak	129.165.319.000,00	129.122.606.000,00	99,97	86.273.208.000,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.669.171.000,00	5.669.171.000,00	100,00	4.908.255.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.123.499.246.000,00	1.125.696.401.999,00	100,20	1.066.694.399.940,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	122.155.411.000,00	117.577.815.239,00	96,25	87.132.804.322,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	502.152.792.000,00	487.170.738.770,00	97,02	474.236.527.759,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	360.851.091.000,00	360.851.091.000,00	100,00	348.945.405.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	308.623.882.460,00	309.492.044.441,00	100,28	292.152.362.108,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	283.623.882.460,00	284.569.527.143,00	100,33	262.181.027.143,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	25.000.000.000,00	24.922.517.298,00	99,69	29.971.334.965,00



1. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan tahun 2024 mencapai Rp1.865.236.733.008,00 atau 99,08% dari anggaran Rp1.882.641.939.000,00. Apabila dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.719.245.195.021,00 terjadi peningkatan sebesar Rp145.991.537.987,00 atau 8,49%. masing-masing dengan rincian obyek sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2024 mencapai Rp129.122.606.000,00 atau 99,97% dari anggaran Rp129.165.319.000,00. Apabila dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2023 sebesar Rp86.273.208.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp42.849.398.000,00 atau 49,67%. Penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak terdiri dari:

Tabel 28
Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
Dana Bagi Hasil Pajak	129.165.319.000,00	129.122.606.000,00	99,97	86.273.208.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	3.939.978.000,00	4.747.925.000,00	120,51	2.443.248.000,00
DBH PPh Pasal 21	120.753.158.492,00	121.907.061.000,00	100,96	81.447.013.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	4.427.072.508,00	2.465.223.000,00	55,69	2.380.797.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	45.110.000,00	2.397.000,00	5,31	2.150.000,00

Pada pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak ini terdapat Dana Bagi Hasil Pajak yang belum diterima dikarenakan masih tercatat dalam rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) atas nama Kabupaten Serang pada akhir tahun 2024 sebesar Rp1.465.679.000,00 Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 29
Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Jumlah
Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	1.049.102.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	305.170.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	111.401.000,00
DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	5.000,00
DBH PBB Bagi Rata	1.000,00
Jumlah	1.465.679.000,00



**b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)**

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) tahun 2024 mencapai Rp5.669.171.000,00 atau 100% dari anggaran Rp5.669.171.000,00,00. Apabila dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2023 sebesar Rp4.908.255.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp760.916.000,00 atau 15,50%. Untuk TA 2024 penerimaan pendapatan ini terdiri dari:

Tabel 30
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.669.171.000,00	5.669.171.000,00	100,00	4.908.255.000,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	1.428.708.000,00	1.428.708.000,00	100,00	639.556.000,00
Bagi Hasil dari Mineral - Batubara (Royalti)	1.215.676.000,00	1.215.676.000,00	100,00	794.576.000,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	142.695.000,00	142.695.000,00	100,00	227.431.000,00
Bagi Hasil Kehutanan-Dana Reboisasi	0,00	500.000.000,00	0,00	1.097.089.000,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.882.092.000,00	1.882.092.000,00	100,00	2.149.603.000,00
Bagi Hasil Sawit	1.000.000.000,00	500.000.000,00	50,00	0,00

Pada pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ini terdapat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang belum diterima di rekening kas daerah dikarenakan masih tercatat dalam rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) atas nama Kabupaten Serang pada akhir tahun 2024 sebesar Rp52.856.000,00 Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31
Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Uraian	Jumlah
Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	10.249.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Royalti	1.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	42.603.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	2.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan – PSDH	1.000,00
Jumlah	52.856.000,00

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) pada TA 2024 mencapai Rp1.125.696.401.999,00 atau 100,20% dari anggaran Rp1.123.499.246.000,00. Apabila dibandingkan dengan angka



realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.066.694.399.940,00 terjadi peningkatan sebesar Rp59.002.002.059,00 atau 5,53%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 32
Dana Alokasi Umum TA 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Alokasi Umum	1.123.499.246.000,00	1.125.696.401.999,00	100,20	1.066.694.399.940
DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	818.766.262.000,00	818.766.262.000,00	100,00	1.038.132.125.940
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	17.029.476.000,00	19.226.631.999,00	112,90	28.562.274.000
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	187.286.515.000,00	187.286.515.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	95.513.917.000,00	95.513.917.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	4.903.076.000,00	4.903.076.000,00	100,00	0,00

DAU dengan anggaran sebesar Rp818.766.262.000,00 merupakan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, sedangkan Dana Alokasi Umum dengan anggaran sebesar Rp1.123.499.246.000,00 adalah akumulasi dari DAU, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.

d. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada TA 2024 mencapai Rp604.748.554.009,00 atau 96,87% dari anggaran Rp624.308.203.000,00. Apabila dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp561.369.332.081,00 terjadi peningkatan sebesar Rp43.379.221.928,00 atau 7,73%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33
Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
Dana Alokasi Khusus	624.308.203.000,00	604.748.554.009,00	96,87	561.369.332.081,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	122.155.411.000,00	117.577.815.239,00	96,25	87.132.804.322,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	502.152.792.000,00	487.170.738.770,00	97,02	474.236.527.759,00

Tabel 34
Rincian Dana Alokasi Khusus TA 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
--------	---------------	----------------	-----



Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
Dana Alokasi Khusus Fisik	122.155.411.000,00	117.577.815.239,00	96,25
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	867.629.000,00	839.395.550,00	96,75
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.202.038.000,00	11.694.737.079,00	95,84
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	27.035.736.000,00	25.842.416.004,00	95,59
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.796.238.000,00	3.147.620.500,00	175,23
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.575.661.000,00	22.867.704.525,00	97,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.937.531.000,00	13.836.250.371,00	92,63
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.325.748.000,00	8.325.748.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.478.658.000,00	3.583.553.147,00	65,41
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	16.058.292.000,00	15.960.864.640,00	99,39
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	11.877.880.000,00	11.479.525.423,00	96,65
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	502.152.792.000,00	487.170.738.770,00	97,02
DAK Non Fisik-BOS Reguler	209.836.000.000,00	214.849.524.471,00	102,39
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.720.000.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	189.519.633.000,00	182.371.271.530,00	96,23
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.968.379.000,00	1.632.608.450,00	55,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	24.251.400.000,00	24.271.002.000,00	100,08
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	16.316.900.000,00	16.169.500.000,00	99,10
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.135.976.000,00	13.417.414.804,00	110,56
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	500.131.000,00	2.282.171.900,00	456,31
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	15.046.783.000,00	7.523.391.500,00	50,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	630.644.000,00	568.226.665,00	90,10
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	768.075.000,00	735.558.000,00	95,77
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	120.000.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	315.000.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	24.617.871.000,00	22.944.069.450,00	93,20
Jumlah	624.308.203.000,00	604.748.554.009,00	96,87

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada TA 2024 mencapai Rp360.851.091.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp360.851.091.000,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp348.945.405.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp11.905.686.000,00 atau 3,41%. Secara rinci tergambar sebagai berikut:

Tabel 35
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	360.851.091.000,00	360.851.091.000,00	100,00	348.945.405.000,00



Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	24.535.866.000,00
Dana Desa (DD)	334.511.418.000,00	334.511.418.000,00	100,00	324.409.539.000,00
Insentif Fiskal	26.339.673.000,00	26.339.673.000,00	100,00	0,00

Dana Desa (DD) merupakan dana dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Serang yang ditransfer langsung ke Rekening desa tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Serang yang dialokasikan untuk desa guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2024 sebesar Rp334.511.418.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp334.511.418.000,00.

Insentif fiskal merupakan dana dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Serang sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Insentif fiskal tahun 2024 sebesar Rp26.339.673.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp26.339.673.000,00.

3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan akun untuk menampung transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 mencapai Rp284.569.527.143,00 atau 100,33% dari anggaran sebesar Rp283.623.882.460,0. Apabila dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp262.181.027.143,00, terjadi peningkatan sebesar Rp22.388.500.000,00 atau 8,54%. Secara rinci tergambar sebagai berikut :

Tabel 36
Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	283.623.882.460,00	284.569.527.143,00	100,33	262.181.027.143,00
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	71.146.667.096,00	63.301.221.093,00	88,97	60.627.304.347,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	52.136.928.990,00	54.641.307.300,00	104,80	51.252.473.795,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	65.661.066.572,00	69.411.927.097,00	105,71	69.427.109.437,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	6.979.488.357,00	6.894.550.850,00	98,78	6.554.829.354,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	87.699.731.445,00	90.320.520.803,00	102,99	74.319.310.210,00



4. Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya

Transfer Pemerintah Provinsi – Lainnya merupakan akun untuk menampung Dana transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi. Realisasi anggaran Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp24.922.517.298,00 atau 99,69% dari anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp29.971.334.965,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.048.817.667,00 atau 16,85%. Secara rinci tergambarkan sebagai berikut :

Tabel 37
Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten Serang Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi Pendapatan	Realisasi Penyerapan	Sisa Dana	Realisasi 2023
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	29.971.334.965,00
1	Pencairan Tahap I	0,00	0,00	0,00	0,00	15.986.301.966,00
2	Pencairan Tahap II	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985.032.999,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	29.971.334.965,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	25.000.000.000,00	24.922.518.269,00	24.922.517.298,00	971,00	0,00
1	Pembangunan Gedung Disdukcapi	18.000.000.000,00	17.922.667.924,00	17.922.666.999,00	925,00	0,00
2	Pembangunan Gedung DKBP3A	7.000.000.000,00	6.999.850.345,00	6.999.850.299,00	46,00	0,00
	Jumlah	25.000.000.000,00	24.922.518.269,00	24.922.517.298,00	971,00	0,00
	Pengembalian Sisa Dana		(971,00)		(971,00)	
	Total	25.000.000.000,00	24.922.517.298,00	24.922.517.298,00	0,00	29.971.334.965,00

5.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi atas Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2024 sebesar Rp10.893.241.588,00 atau 75,29% dari anggaran sebesar Rp14.468.762.014,00, jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp10.272.840.346,00 terjadi peningkatan sebesar Rp620.401.242,00 atau 6,04%. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.468.762.014,00	10.893.241.588,00	75,29	10.272.840.346,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	48.275.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	14.468.762.014,00	10.893.241.588,00	75,29	10.224.565.346,00

Pendapatan hibah TA 2024 terdapat pada Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri merupakan Dana Partisipasi Air Bersih dan Program Asuransi Kecelakaan Diri Diluar Jam



Kerja dan Hubungan Kerja yang diberikan kepada Pemerintah Daerah oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan air bersih dan Asuransi yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (MOU) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39
**Rincian Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/
Organisasi Swasta Dalam Negeri**

No	Nama Perusahaan	Realisasi 2024	No. MOU
1	PT. Krakatau Tirta Industri	5.000.004.104,00	No. 970/MOU.22-Huk/2019
2	PT. Sauh Bahtera Samudra	1.372.742.584,00	No. 690/Perj.05-Huk/2011
3	PT. Sarana Catur Tirta Kelola	1.715.640.361,00	No. 690/Perj.24-Huk/2016
4	PT. Modern Industrial Estate	454.400.753,00	No. 690/Perj.993-Huk/2018
5	PT Asuransi Umum Bumiputra Muda	2.350.453.786,00	No.678/Perj.15-Huk/2019
	Jumlah	10.893.241.588,00	

5.2. Belanja

Secara keseluruhan realisasi Belanja Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.485.295.242.921,00 atau 92,44% dari anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp3.770.394.851.697,00 sehingga selisih kurang antara anggaran dan realisasi sebesar Rp285.099.608.776,00 meningkat sebesar Rp203.210.537.422,00 atau 6,19% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.282.084.705.499,00.

Apabila diuraikan berdasarkan kelompok belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga, realisasi anggarannya sebagai berikut:

Tabel 40
Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan SAP TA 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
BELANJA	3.770.394.851.697,00	3.485.295.242.921,00	92,44	3.282.084.705.499,00
BELANJA OPERASI	2.709.222.572.109,53	2.561.521.309.939,00	94,55	2.425.562.062.591,00
Belanja Pegawai	1.393.436.743.654,94	1.325.832.224.608,00	95,15	1.321.436.650.750,00
Belanja Barang dan Jasa	1.124.845.835.636,06	1.050.074.683.873,00	93,35	948.772.846.825,00
Belanja Hibah	184.331.442.818,53	179.022.715.458,00	97,12	147.121.371.516,00
Belanja Bantuan Sosial	6.608.550.000,00	6.591.686.000,00	99,74	8.231.193.500,00
BELANJA MODAL	478.168.111.554,47	428.320.239.751,00	89,58	360.811.320.041,00
Belanja Modal Tanah	24.961.855.650,00	1.161.432.715,00	4,65	748.902.305,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.776.035.310,00	132.027.958.530,00	95,83	111.613.710.440,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.445.430.905,47	93.613.564.317,00	90,50	91.356.409.648,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	198.367.819.941,00	188.198.027.641,00	94,87	133.901.375.096,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.016.980.248,00	12.970.147.048,00	99,64	22.895.922.552,00
Belanja Modal Aset Lainnya	599.989.500,00	349.109.500,00	58,19	295.000.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.775.000.000,00	397.087.640,00	6,88	119.786.500,00
Belanja Tak Terduga	5.775.000.000,00	397.087.640,00	6,88	119.786.500,00
BELANJA TRANSFER	577.229.168.033,00	495.056.605.591,00	85,76	495.591.536.367,00



Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
Belanja Bagi Hasil	119.439.270.033,00	37.417.907.591,00	31,33	31.058.297.367,00
Belanja Bantuan Keuangan	457.789.898.000,00	457.638.698.000,00	99,97	464.533.239.000,00

Dari total belanja daerah tersebut berikut adalah informasi mengenai *mandatory spending* berdasarkan realisasi belanja tahun 2024:

Tabel 41
Realisasi Mandatory Spending Berdasarkan Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi
1	a. Realisasi Anggaran Pendidikan	1.167.169.539.681,00
	b. Total Realisasi Belanja Daerah	3.485.295.242.921,00
	c. Persentase Belanja Pendidikan (a : b)*100%	33,49%
2	a. Realisasi Anggaran Kesehatan	620.655.817.035,00
	b. Total Realisasi Belanja Daerah	3.485.295.242.921,00
	c. Persentase Belanja Kesehatan (a : b)*100%	17,81%
3	a. Belanja Daerah dikurangi Belanja Transfer	2.990.238.637.330,00
	b. Total belanja Infrastruktur Daerah	669.307.333.380,00
	c. Persentase Belanja Infrastruktur Daerah (a : b)*100%	22,38%
4	a. Belanja Pegawai diluar BP TKD	1.141.828.344.628,00
	b. Total Belanja Dalam APBD	3.485.295.242.921,00
	c. Persentase Belanja Pegawai (a : b)*100%	32,76%
5	a. Total Bantuan Keuangan Kepada Desa	455.638.698.000,00
	b.. Total Belanja Dalam APBD	3.485.295.242.921,00
	c. Persentase Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (a : b)*100%	13,07%
6	a. Total Belanja Pengawasan (Inspektorat)	23.075.469.419,00
	b. Total Realisasi Belanja Daerah	3.485.295.242.921,00
	c. Persentase Pengawasan (Inspektorat) (a : b)*100%	0,66%
7	a. Total Belanja SDM (BKPSDM)	27.993.995.773,00
	b. Total Realisasi Belanja Daerah	3.485.295.242.921,00
	c. Persentase Belanja SDM (a : b)*100%	0,80%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja pendidikan Pemerintah Kabupaten Serang telah memenuhi *mandatory spending* yaitu sebesar 33,49% lebih tinggi 13,49% dari batas minimal yang ditetapkan peraturan yaitu 20,00%. Sedangkan belanja dibidang kesehatan sebesar 17,81% dari total belanja daerah. Belanja Infrastuktur Pelayanan Publik mencapai 22,38% masih belum sesuai dengan target sebesar 40,00%.

Atas realisasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:



5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran Kas Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasi terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk pembayaran gaji PNS dan Tunjangan PNS serta Tambahan Penghasilan PNS (TP-PNS). Secara keseluruhan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.325.832.224.608,00 atau 95,15% dibandingkan anggaran sebesar Rp1.393.436.743.654,94. meningkat sebesar Rp4.395.573.858,00 atau 0,33% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.321.436.650.750,00, Rincian Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	757.484.609.258,59	728.160.179.740,00	96,13	684.631.126.729,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	342.039.344.210,35	318.652.775.700,00	93,16	300.238.925.122,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	220.201.106.880,00	212.159.628.463,00	96,35	210.654.567.443,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	44.353.203.000,00	43.544.745.299,00	98,18	42.515.181.279,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	941.415.201,00	522.567.550,00	55,51	158.351.992,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.119.700.000,00	1.703.157.000,00	80,35	1.587.128.000,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	60.997.358.456,00
Belanja Pegawai BLUD	26.297.365.105,00	21.089.170.856,00	80,19	20.654.011.729,00
Jumlah	1.393.436.743.654,94	1.325.832.224.608,00	95,15	1.321.436.650.750,00

Tabel 43
Rincian Anggaran Belanja Pegawai Per SKPD TA 2024 Dan 2023

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	DISDIK	740.776.992.114,00	716.162.122.373,00	96,68	756.133.735.907,00
2	DINKES	109.374.539.745,00	106.368.718.824,00	97,25	96.928.356.290,00
3	RSUD	102.260.987.625,00	93.421.590.496,00	91,36	87.865.667.051,00
4	DPUPR	30.915.558.000,00	28.149.690.409,00	91,05	26.884.055.057,00
5	DPRKP	6.375.000.000,00	5.851.593.013,00	91,79	5.545.395.264,00
6	SATPOL PP	8.514.529.000,00	8.176.906.409,00	96,03	8.007.510.174,00
7	BPBD	7.773.515.474,00	7.225.779.143,00	92,95	7.554.701.835,00
8	DINSOS	6.183.979.000,00	5.730.297.665,00	92,66	5.739.623.969,00
9	DISNAKERTRANS	6.398.123.000,00	5.988.231.055,00	93,59	5.705.323.667,00
10	DKPP	23.284.228.803,00	22.373.842.403,00	96,09	21.315.498.054,00
11	DLH	11.686.649.000,00	10.882.118.485,00	93,12	10.452.629.912,00
12	DISDUKCAPIL	12.646.438.000,00	11.522.601.296,00	91,11	11.202.324.613,00
13	DPMD	6.765.306.000,00	6.130.121.254,00	90,61	5.531.233.150,00



No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
14	DKBP3A	7.343.868.077,00	6.882.535.947,00	93,72	6.389.956.132,00
15	DISHUB	10.231.272.999,94	9.897.497.531,00	96,74	9.585.284.384,00
16	DISKOMINFO	5.405.328.000,00	5.045.472.623,00	93,34	4.602.973.774,00
17	DISKOPERINDAG	9.722.632.000,00	8.512.091.991,00	87,55	8.610.961.928,00
18	DPMPTSP	8.104.100.307,00	7.813.301.647,00	96,41	7.093.492.971,00
19	DISPORAPAR	4.808.180.000,00	4.446.972.349,00	92,49	4.395.915.843,00
20	DPKD	4.342.921.000,00	4.098.267.169,00	94,37	3.984.078.648,00
21	DINAS PERIKANAN	7.059.091.001,00	6.496.562.102,00	92,03	6.620.964.873,00
22	SETDA	30.948.089.464,00	27.649.698.688,00	89,34	25.995.459.136,00
23	SETWAN	50.499.653.204,00	49.306.500.982,00	97,64	48.228.667.115,00
24	BAPPEDA LITBANG	9.339.000.000,00	8.536.813.656,00	91,41	7.931.904.226,00
25	BAPENDA	32.369.765.712,00	29.210.873.013,00	90,24	31.927.342.393,00
26	BPKAD	12.845.754.184,00	10.380.966.905,00	80,81	9.662.080.178,00
27	BKPSDM	22.221.629.001,00	21.579.445.644,00	97,11	5.266.834.305,00
28	Inspektorat	18.936.200.000,00	17.310.602.725,00	91,42	14.849.365.063,00
29	Kec. Anyar	3.006.570.000,00	2.827.792.169,00	94,05	2.627.667.376,00
30	Kec. Bandung	2.578.820.000,00	2.454.090.102,00	95,16	2.388.736.208,00
31	Kec. Baros	3.127.913.000,00	2.835.518.588,00	90,65	2.810.576.154,00
32	Kec. Binuang	2.423.932.000,00	2.277.076.425,00	93,94	2.106.949.110,00
33	Kec. Bojonegara	2.767.856.000,00	2.585.710.535,00	93,42	2.515.210.244,00
34	Kec. Carenang	2.581.835.000,00	2.332.657.377,00	90,35	2.289.000.943,00
35	Kec. Cikande	3.031.989.000,00	2.898.429.245,00	95,59	2.660.732.548,00
36	Kec. Cikeusal	2.723.388.000,00	2.454.383.660,00	90,12	2.500.469.829,00
37	Kec. Cinangka	2.787.995.000,00	2.670.683.012,00	95,79	2.386.444.114,00
38	Kec. Ciomas	2.567.902.200,00	2.420.011.176,00	94,24	2.185.514.064,00
39	Kec. Ciruas	3.726.064.000,00	3.537.971.384,00	94,95	3.460.575.103,00
40	Kec. Gunungsari	2.638.646.500,00	2.455.516.926,00	93,06	2.412.839.032,00
41	Kec. Jawilan	2.684.915.769,00	2.359.220.077,00	87,87	2.286.843.231,00
42	Kec. Kibin	3.085.118.000,00	3.077.060.388,00	99,74	3.069.960.450,00
43	Kec. Kopo	2.664.115.000,00	2.528.392.882,00	94,91	2.355.908.367,00
44	Kec. Kragilan	4.106.858.000,00	3.840.286.576,00	93,51	3.646.953.225,00
45	Kec. Kramatwatu	4.499.720.040,00	4.277.194.923,00	95,05	4.017.610.603,00
46	Kec. Lebak Wangi	2.804.944.000,00	2.688.197.766,00	95,84	2.483.221.380,00
47	Kec. Mancak	2.788.178.000,00	2.644.446.403,00	94,84	2.367.911.742,00
48	Kec. Pabuaran	2.560.653.000,00	2.153.751.524,00	84,11	2.066.307.777,00
49	Kec. Padarincang	2.362.200.000,00	2.188.708.660,00	92,66	2.133.711.377,00
50	Kec. Pamarayan	2.636.500.000,00	2.388.242.654,00	90,58	2.344.306.565,00
51	Kec. Petir	2.714.643.856,00	2.588.069.892,00	95,34	2.420.813.598,00
52	Kec. Pontang	3.077.643.367,00	2.798.618.446,00	90,93	2.664.206.496,00
53	Kec. Pulo Ampel	2.369.034.316,00	2.229.332.458,00	94,10	2.183.525.294,00
54	Kec. Tanara	2.245.435.000,00	2.130.521.076,00	94,88	2.020.172.517,00
55	Kec. Tirtayasa	2.744.149.346,00	2.488.817.720,00	90,70	2.368.384.139,00
56	Kec. Tunjung Teja	2.317.568.000,00	2.218.819.104,00	95,74	2.105.753.171,00
57	Kec.	2.430.365.000,00	2.343.825.654,00	96,44	2.204.642.706,00



No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
	Waringinkurung				
58	Kesbangpol	4.248.461.550,00	3.987.662.009,00	93,86	4.340.367.475,00
Jumlah		1.393.436.743.654,94	1.325.832.224.608,00	95,15	1.321.436.650.750,00

Didalam belanja gaji diatas terdapat potongan terdapat potongan zakat dan IWP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Potongan Zakat dan IWP Tahun 2024

NO	SKPD	ZAKAT	PIWP1	PIWP8
1	DISDIK	7.535.681.773,00	3.477.599.622,00	22.056.643.315,00
2	DINKES	1.792.963.028,00	514.299.974,00	3.695.028.815,00
3	RSUD	506.009.444,00	374.973.190,00	2.665.022.142,00
4	DPUPR	545.822.039,00	106.709.467,00	791.290.083,00
5	DPRKP	40.756.973,00	19.723.688,00	142.242.259,00
6	SATPOL PP	100.533.629,00	32.026.908,00	234.462.091,00
7	BPBD	140.831.760,00	26.116.778,00	191.155.615,00
8	DINSOS	75.693.839,00	18.061.632,00	128.579.715,00
9	DISNAKERTRANS	117.264.750,00	19.800.968,00	141.782.994,00
10	DKPP	12.960.453,00	93.298.540,00	613.226.982,00
11	DLH	17.990.000,00	40.627.528,00	298.381.851,00
12	DISDUKCAPIL	126.244.249,00	36.717.236,00	263.263.447,00
13	DPMD	119.609.239,00	19.359.836,00	138.629.913,00
14	DKBP3A	140.855.184,00	22.347.072,00	160.087.148,00
15	DISHUB	87.872.685,00	36.468.689,00	267.779.195,00
16	DISKOMINFO	119.994.735,00	15.549.059,00	110.164.035,00
17	DISKOPERINDAG	104.189.745,00	29.367.291,00	209.970.608,00
18	DPMPTSP	58.366.955,00	23.994.437,00	173.393.554,00
19	DISPORAPAR	83.605.332,00	13.679.837,00	96.880.100,00
20	DPKD	78.544.636,00	12.660.976,00	89.004.393,00
21	DINAS PERIKANAN	94.834.647,00	21.357.632,00	154.354.544,00
22	SETDA	400.694.868,00	74.273.461,00	531.706.958,00
23	SETWAN	4.736.880,00	15.092.358,00	106.984.910,00
24	BAPPEDA LITBANG	161.103.853,00	24.274.777,00	173.674.539,00
25	BAPENDA	199.173.157,00	37.646.846,00	276.243.030,00
26	BPKAD	54.020.404,00	68.974.462,00	168.640.293,00
27	BKPSDM	132.049.666,00	23.775.960,00	171.994.654,00
28	Inspektorat	332.930.362,00	45.883.514,00	313.815.203,00
29	Kec. Anyar	52.011.348,00	12.328.960,00	87.073.709,00
30	Kec. Bandung	54.754.617,00	10.026.664,00	72.964.455,00
31	Kec. Baros	45.302.515,00	8.294.045,00	59.840.328,00
32	Kec. Binuang	268.646.933,50	9.753.804,00	70.207.118,00
33	Kec. Bojonegara	35.819.264,00	7.258.702,00	51.549.287,00



NO	SKPD	ZAKAT	PIWP1	PIWP8
34	Kec. Carenang	17.300.000,00	8.837.493,00	63.634.003,00
35	Kec. Cikande	46.638.037,00	7.625.855,00	54.884.652,00
36	Kec. Cikeusal	19.091.750,00	10.479.156,00	75.820.717,00
37	Kec. Cinangka	45.782.275,00	8.019.390,00	57.204.432,00
38	Kec. Ciomas	50.781.251,00	9.200.430,00	66.287.752,00
39	Kec. Ciruas	46.299.960,00	7.943.323,00	57.097.329,00
40	Kec. Gunungsari	69.120.954,00	13.214.097,00	96.591.056,00
41	Kec. Jawilan	12.815.724,00	7.936.277,00	56.552.730,00
42	Kec. Kibin	17.368.985,00	8.049.917,00	58.611.398,00
43	Kec. Kopo	56.423.692,00	11.726.943,00	85.851.497,00
44	Kec. Kragilan	29.663.370,00	8.465.084,00	60.656.604,00
45	Kec. Kramatwatu	35.874.671,00	14.769.209,00	108.857.932,00
46	Kec. Lebak Wangi	35.193.475,00	16.874.633,00	124.463.867,00
47	Kec. Mancak	21.564.000,00	9.515.632,00	69.208.072,00
48	Kec. Pabuaran	12.814.898,00	8.970.903,00	64.419.221,00
49	Kec. Padarincang	25.939.474,00	6.568.370,00	46.223.345,00
50	Kec. Pamarayan	25.939.474,00	7.783.366,00	55.955.666,00
51	Kec. Petir	2.120.249,00	7.336.380,00	52.238.905,00
52	Kec. Pontang	37.941.679,00	8.894.628,00	63.923.271,00
53	Kec. Pulo Ampel	28.240.800,00	10.195.563,00	73.874.979,00
54	Kec. Tanara	26.445.028,00	7.095.272,00	50.124.702,00
55	Kec. Tirtayasa	34.461.830,00	6.531.884,00	45.794.039,00
56	Kec. Tunjung Teja	16.801.104,00	8.414.412,00	60.911.637,00
57	Kec. Waringinkurung	26.927.807,00	6.841.129,00	48.522.572,00
58	Kesbangpol	41.582.783,00	7.551.699,00	53.643.018,00
	TOTAL	14.425.002.232,50	5.521.164.958,00	36.357.390.679,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Realisasi Belanja Barang Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.050.074.683.873,00 atau 93,35% dari anggaran sebesar Rp1.124.845.835.636,06 meningkat sebesar Rp101.301.837.048,00 atau 10,68% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp948.772.846.825,00.

Adapun realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tiap obyek mata anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 45
Realisasi Anggaran Belanja Barang Dan Jasa TA 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
Belanja Barang	136.147.267.399,69	122.773.943.277,00	90,18	145.028.576.366,00
Belanja Jasa	371.506.490.908,46	335.813.416.289,00	90,39	317.777.398.107,00



Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
Belanja Pemeliharaan	61.447.156.333,53	55.258.236.171,00	89,93	55.522.310.837,00
Belana Perjalanan Dinas	95.366.149.858,38	82.994.555.704,00	87,03	86.327.864.726,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.779.464.000,00	7.429.166.000,00	95,50	7.587.541.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	155.733.538.527,00	155.701.221.160,00	99,98	93.816.691.852,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.968.267.000,00	22.133.011.824,00	96,36	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	273.897.501.609,00	267.971.133.448,00	97,84	242.712.463.937,00
Jumlah	1.124.845.835.636,06	1.050.074.683.873,00	93,35	948.772.846.825,00

Tabel 46
Rincian Anggaran Belanja Barang Dan Jasa TA 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
Belanja Barang dan Jasa	1.124.845.835.636,06	1.050.074.683.873,00	93,35
Belanja Barang Pakai Habis	135.096.939.549,69	121.740.511.277,00	90,11
Belanja Barang Tak Habis Pakai	65.362.850,00	63.748.000,00	97,53
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	984.965.000,00	969.684.000,00	98,45
Belanja Jasa Kantor	214.056.870.113,46	195.250.130.437,00	91,21
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	60.173.846.844,00	58.268.581.457,00	96,83
Belanja Sewa Tanah	2.046.552.500,00	1.619.950.000,00	79,16
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.013.661.622,00	9.953.593.843,00	90,37
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.925.381.528,00	14.073.048.356,00	88,37
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	695.150.000,00	664.168.500,00	95,54
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	40.947.933.961,00	32.912.982.929,00	80,38
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.781.881.500,00	7.825.253.512,00	80,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	115.000.000,00	114.456.000,00	99,53
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.710.158.840,00	15.105.668.500,00	90,40
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	40.054.000,00	25.582.755,00	63,87
Belanja Pemeliharaan Tanah	8.233.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.095.403.145,00	10.501.733.427,00	80,19
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.473.972.089,53	41.257.683.318,00	92,77
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.669.548.099,00	3.315.777.676,00	90,36
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	183.041.750,00	91,52
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	95.166.149.858,38	82.994.555.704,00	87,21
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.757.464.000,00	7.427.266.000,00	95,74
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.000.000,00	1.900.000,00	8,64
Belanja Barang dan Jasa BOS	155.733.538.527,00	155.701.221.160,00	99,98
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.968.267.000,00	22.133.011.824,00	96,36
Belanja Barang dan Jasa BLUD	273.897.501.609,00	267.971.133.448,00	97,84

3. Belanja Bunga



Realisasi Belanja Bunga pada per 31 Desember 2024 adalah nihil.

4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp179.022.715.458,00 atau 97,12% dari anggaran sebesar Rp184.331.442.818,53 meningkat sebesar Rp31.901.343.942,00 atau 21,68%, jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp147.121.371.516,00. Belanja Hibah tersebut dialokasikan untuk Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp2.734.486.180,00, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp109.151.387.406,00, Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp24.496.428.872,00, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.544.491.000,00 dan Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp2.544.491.000,00.

Tabel 47
Belanja Hibah

Uraian/Lembaga Penerima	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.828.255.582,00	2.734.486.180,00	96,68
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	59.380.930.000,00	59.328.436.200,00	99,91
KNPI Kabupaten Serang		300.000.000,00	
KONI Kabupaten Serang		6.200.000.000,00	
PMI Kabupaten Serang		499.173.200,00	
NPCI Kabupaten Serang		200.000.000,00	
PRAMUKA Kabupaten Serang		250.000.000,00	
FKUB Kabupaten Serang		200.000.000,00	
KPU Kabupaten Serang		51.679.263.000,00	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	39.503.143.487,53	36.066.255.745,00	91,30
DAK Fisik – PAUD		837.974.049,00	
DAK Fisik – SMP		1.129.287.800,00	
SPAM dan Instalasi Pembangunan Air		9.369.740.545,00	
Sanitasi dan air minum		16.271.900.00,00	
Pekerjaan Pembangunan/ Penyediaan		8.457.353.351,00	
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.500.000.000,00	500.000.000,00	33,33
Karang Taruna		500.000.000,00	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.249.222.749,00	4.066.695.461,00	95,70
Pondok Pesantren		3.735.873.629,00	
Yayasan		89.894.407,00	
PAUD		47.420.000,00	
Majlis Ta'lim		193.507.425,00	
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	9.190.000.000,00	9.190.000.000,00	100,00





Uraian/Lembaga Penerima	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Kemasyarakatan			
BAZNAS Kab Serang		4.500.000.000,00	
MUI Kab. Serang		985.000.000,00	
PCNU		130.000.000,00	
IPHI		35.000.000,00	
Lembaga Keagamaan		2.060.000.000,00	
Majlis Ta'lim		35.000.000,00	
LPTQ Kab.Serang		525.000.000,00	
PHD (Petugas Haji Daerah)		920.000.000,00	
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	24.519.200.000,00	24.496.428.872,00	99,91
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.544.491.000,00	2.544.491.000,00	100,00
HANURA		61.500.000,00	
PPP		162.874.000,00	
PDIP		197.543.000,00	
PKB		216.401.000,00	
NASDEM		175.200.000,00	
GOLKAR		458.894.000,00	
PBB		54.472.000,00	
DEMOKRAT		216.612.000,00	
GERINDRA		399.618.000,00	
PKS		275.848.000,00	
BERKARYA		109.312.000,00	
PAN		216.217.000,00	
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	24.276.000.000,00	24.175.602.000,00	99,59
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	16.340.200.000,00	15.920.320.000,00	97,43
Total	184.331.442.818,53	179.022.715.458,00	97,12

5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.591.686.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp6.608.550.000,00 menurun sebesar Rp1.639.507.500,00 atau 19,92%, jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp8.231.193.500,00. Berikut ini rincian belanja bantuan sosial:

Tabel 48
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Lebih/Kurang
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	958.506.000,00	44.986.000,00	913.520.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	633.180.000,00	686.207.500,00	(53.027.500,00)
Jumlah	6.591.686.000,00	8.231.193.500,00	(1.639.507.500,00)



5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pos belanja daerah yang ditujukan untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp428.320.239.751,00 atau 89,58% dari anggaran sebesar Rp478.168.111.554,47 meningkat sebesar Rp67.508.919.710,00 atau 18,71%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp360.811.320.041,00. Rincian Belanja Modal TA 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 49
Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
BELANJA MODAL	478.168.111.554,47	428.320.239.751,00	89,58	360.811.320.041,00
Belanja Modal Tanah	24.961.855.650,00	1.161.432.715,00	4,65	748.902.305,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.776.035.310,00	132.027.958.530,00	95,83	111.613.710.440,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.445.430.905,47	93.613.564.317,00	90,50	91.356.409.648,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	198.367.819.941,00	188.198.027.641,00	94,87	133.901.375.096,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.016.980.248,00	12.970.147.048,00	99,64	22.895.922.552,00
Belanja Modal Aset Lainnya	599.989.500,00	349.109.500,00	58,19	295.000.000,00

Tabel 50
Belanja Modal Per Jenis Per SKPD TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)
5.2.2	Belanja Modal	478.168.111.554,47	428.320.239.751,00	(49.847.871.803,47)
5.2.2.1.	Belanja Modal Tanah	24.961.855.650,00	1.161.432.715,00	(23.800.422.935,00)
1	DPUPR	4.588.221.175,00	437.747.592,00	(4.150.473.583,00)
2	BPKAD	20.373.634.475,00	723.685.123,00	(19.649.949.352,00)
5.2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.776.035.310,00	132.027.958.530,00	(5.748.076.780,00)
1	DISDIK	81.425.025.630,00	81.146.101.705,00	(278.923.925,00)
2	DINKES	11.936.813.144,00	10.223.310.232,00	(1.713.502.912,00)
3	RSUD	19.766.247.180,00	19.376.084.922,00	(390.162.258,00)
4	DPUPR	5.812.242.103,00	5.716.396.700,00	(95.845.403,00)
5	DPRKP	299.436.400,00	289.505.000,00	(9.931.400,00)
6	BPBD	58.175.000,00	55.725.000,00	(2.450.000,00)
7	DINSOS	80.082.000,00	17.100.000,00	(62.982.000,00)
8	DISNAKERTRANS	722.181.500,00	703.139.385,00	(19.042.115,00)
9	DKPP	1.227.201.200,00	250.764.000,00	(976.437.200,00)
10	DLH	47.698.600,00	15.860.000,00	(31.838.600,00)
11	DISDUKCAPIL	1.732.956.500,00	1.320.622.000,00	(412.334.500,00)
12	DPMD	74.602.000,00	74.252.000,00	(350.000,00)
13	DKBP3A	321.584.800,00	266.122.000,00	(55.462.800,00)
14	DISHUB	688.393.500,00	684.800.000,00	(3.593.500,00)
15	DISKOMINFO	2.948.950.482,00	2.782.044.250,00	(166.906.232,00)
16	DISKOPERINDAG	555.527.400,00	19.005.600,00	(536.521.800,00)
17	DPMPTSP	2.764.842.650,00	2.680.811.000,00	(84.031.650,00)





No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)
18	DISPORAPAR	56.827.000,00	56.600.000,00	(227.000,00)
19	DPKD	1.395.050.190,00	1.338.825.000,00	(56.225.190,00)
20	DISKAN	86.920.000,00	84.430.000,00	(2.490.000,00)
21	SETDA	650.716.800,00	537.212.500,00	(113.504.300,00)
22	SETWAN	666.398.400,00	664.279.000,00	(2.119.400,00)
23	BAPPEDALITBANG	433.614.100,00	396.460.000,00	(37.154.100,00)
24	BAPENDA	296.676.000,00	288.350.000,00	(8.326.000,00)
25	BPKAD	1.251.264.130,00	1.068.448.000,00	(182.816.130,00)
26	BKPSDM	1.111.402.600,00	1.067.301.436,00	(44.101.164,00)
27	Inspektorat	5.641.000,00	5.600.000,00	(41.000,00)
28	Kec. Anyar	55.975.000,00	31.200.000,00	(24.775.000,00)
29	Kec. Bandung	92.953.800,00	43.300.000,00	(49.653.800,00)
30	Kec. Baros	66.281.000,00	55.645.000,00	(10.636.000,00)
31	Kec. Binuang	14.453.000,00	0,00	(14.453.000,00)
32	Kec. Bojonegara	43.344.000,00	42.700.000,00	(644.000,00)
33	Kec. Carenang	33.877.000,00	33.790.000,00	(87.000,00)
34	Kec. Cikeusal	33.399.300,00	32.760.000,00	(639.300,00)
35	Kec. Cinangka	51.058.000,00	35.330.000,00	(15.728.000,00)
36	Kec. Ciomas	47.965.000,00	41.000.000,00	(6.965.000,00)
37	Kec. Ciruas	67.703.000,00	45.386.000,00	(22.317.000,00)
38	Kec. Gunungsari	41.778.800,00	0,00	(41.778.800,00)
39	Kec. Jawilan	26.900.000,00	24.080.000,00	(2.820.000,00)
40	Kec. Kibin	19.817.000,00	19.800.000,00	(17.000,00)
41	Kec. Kragilan	50.594.000,00	50.450.000,00	(144.000,00)
42	Kec. Kramatwatu	54.855.331,00	52.050.000,00	(2.805.331,00)
43	Kec. Lebak Wangi	67.056.900,00	40.600.000,00	(26.456.900,00)
44	Kec. Mancak	27.786.740,00	19.775.000,00	(8.011.740,00)
45	Kec. Pabuaran	24.517.200,00	0,00	(24.517.200,00)
46	Kec. Padarincang	71.987.000,00	0,00	(71.987.000,00)
47	Kec. Pamarayan	17.905.000,00	0,00	(17.905.000,00)
48	Kec. Petir	15.803.600,00	15.803.600,00	0,00
49	Kec. Pontang	53.257.000,00	42.456.000,00	(10.801.000,00)
50	Kec. Pulo Ampel	16.643.800,00	0,00	(16.643.800,00)
51	Kec. Tanara	32.860.000,00	575.000,00	(32.285.000,00)
52	Kec. Tirtayasa	57.217.930,00	51.150.000,00	(6.067.930,00)
53	Kec. Tunjung Teja	29.455.400,00	28.395.000,00	(1.060.400,00)
54	Kec. Waringinkurung	34.915.700,00	30.723.700,00	(4.192.000,00)
55	Kesbangpol	209.204.500,00	161.839.500,00	(47.365.000,00)
5.2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.445.430.905,47	93.613.564.317,00	(9.831.866.588,47)
1	DISDIK	10.830.368.059,00	10.019.307.526,00	(811.060.533,00)
2	DINKES	9.182.880.000,00	6.374.647.900,00	(2.808.232.100,00)
3	RSUD	5.803.200.000,00	5.741.329.269,00	(61.870.731,00)
4	DPUPR	76.832.967.041,47	70.713.956.590,00	(6.119.010.451,47)





No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)
5	DPRKP	400.000.000,00	378.574.050,00	(21.425.950,00)
6	DKPP	7.490.000,00	0,00	(7.490.000,00)
7	DISKAN	99.294.000,00	99.123.400,00	(170.600,00)
8	BAPENDA	91.531.805,00	90.138.000,00	(1.393.805,00)
9	BPKAD	197.700.000,00	196.487.582,00	(1.212.418,00)
5.2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.367.819.941,00	188.198.027.641,00	(10.169.792.300,00)
1	DINKES	387.179.000,00	330.280.400,00	(56.898.600,00)
2	RSUD	1.868.296.605,00	1.812.800.000,00	(55.496.605,00)
3	DPUPR	191.937.168.336,00	181.886.451.241,00	(10.050.717.095,00)
4	DISHUB	4.175.176.000,00	4.168.496.000,00	(6.680.000,00)
5.2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.016.980.248,00	12.970.147.048,00	(46.833.200,00)
1	DISDIK	12.754.558.648,00	12.708.847.048,00	(45.711.600,00)
2	DPKD	261.870.000,00	261.300.000,00	(570.000,00)
3	SETWAN	551.600,00	0,00	(551.600,00)
5.2.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	599.989.500,00	349.109.500,00	(250.880.000,00)
1	DISKOMINFO	254.989.500,00	254.489.500,00	(500.000,00)
2	SETWAN	325.000.000,00	74.640.000,00	(250.360.000,00)
3	BKPSDM	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)

Belanja modal tersebut tidak seluruhnya menjadi aset tetap karena menurut Kebijakan Akuntansi Kabupaten Serang, aset tetap yang nilainya di bawah batas nilai kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00 tidak dicatat sebagai aset tetap pada Neraca Pemerintah Daerah melainkan dicatat sebagai ekstrakomptabel.

5.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.161.432.715,00 atau 4,65% dari anggaran sebesar Rp24.961.855.650,00 meningkat sebesar Rp412.530.410,00 atau 55,08% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp748.902.305,00.

Tabel 51
Rincian Belanja Modal Tanah Berdasarkan Jenis TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Tanah Persil	21.855.874.475,00	726.771.123,00	3,33	662.970.480,00
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	3.105.981.175,00	434.661.592,00	13,99	85.931.825,00
Jumlah		24.961.855.650,00	1.161.432.715,00	4,65	748.902.305,00

5.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp132.027.958.530,00 atau 95,83% dari anggaran sebesar Rp137.776.035.310,00 meningkat sebesar Rp20.414.248.090,00 atau 18,29%, jika dibandingkan tahun 2023



sebesar Rp111.613.710.440,00. Berikut rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

Tabel 52
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Jenis TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.139.410.000,00	3.128.335.000,00	99,65	21.970.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	47.053.000,00	46.575.000,00	98,98	9.362.700,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.163.404.000,00	3.963.300.000,00	95,19	1.817.190.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	14.394.000,00	14.200.000,00	98,65	0,00
5	Belanja Modal Alat Ukur	49.967.500,00	45.720.000,00	91,50	37.629.000,00
6	Belanja Modal Alat Pengolahan	107.286.800,00	97.634.000,00	91,00	2.531.783.300,00
7	Belanja Modal Alat Kantor	3.521.690.505,00	3.220.963.000,00	91,46	1.944.282.200,00
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	64.247.365.493,00	61.443.011.571,00	95,64	41.723.135.650,00
9	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	407.944.882,00	388.800.000,00	95,31	169.764.000,00
10	Belanja Modal Alat Studio	3.134.342.130,00	2.962.881.000,00	94,53	274.820.000,00
11	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.876.500,00	0,00	0,00	24.720.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran	17.034.931.580,00	16.663.256.085,00	97,82	13.311.206.719,00
14	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	33.017.400,00	30.418.400,00	92,13	64.166.000,00
15	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	72.807.800,00	40.933.200,00	56,22	3.146.163.000,00
16	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	50.049.000,00	49.849.000,00	99,60	1.244.114.000,00
17	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.021.500.000,00	2.013.960.000,00	99,63	1.312.800.000,00
18	Belanja Modal Komputer Unit	5.866.541.248,00	5.109.818.300,00	87,10	2.048.020.400,00
19	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.085.026.761,00	2.735.616.600,00	88,67	981.657.000,00
20	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	1.150.000.000,00	1.149.500.000,00	99,96	0,00
21	Belanja Modal Alat Pelindung	46.344.000,00	39.400.000,00	85,02	0,00
22	Belanja Modal Alat SAR	8.792.000,00	8.785.000,00	99,92	0,00
23	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	93.626.950,00
24	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	639.621.500,00	636.590.000,00	99,53	220.491.000,00
25	Belanja Modal Peralatan Olahraga	42.240.000,00	42.150.000,00	99,79	0,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.731.742.133,00	5.730.198.133,00	99,97	11.491.669.886,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	16.697.889.397,00	16.588.983.572,00	99,35	0,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.457.797.681,00	5.877.080.669,00	91,01	7.032.108.635,00
Jumlah		137.776.035.310,00	132.027.958.530,00	95,83	111.613.710.440,00

5.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp93.613.564.317,00 atau 90,50% dari anggaran sebesar Rp103.445.430.905,47 meningkat sebesar Rp2.257.154.669,00 atau 2,47%, jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp91.356.409.648,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan



Bangunan Tahun 2024 merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp 93.303.642.297,00 dan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp309.922.020,00.

5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp188.198.027.641,00 atau 94,87% dari anggaran sebesar Rp198.367.819.941,00 meningkat sebesar Rp54.296.652.545,00 atau 40,55%, jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp133.901.375.096,00. Berikut rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi :

Tabel 53
Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi
Berdasarkan Jenis TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Jalan	172.613.105.237,00	163.835.992.087,00	94,92	108.770.711.091,00
2	Belanja Modal Jembatan	9.422.327.228,00	8.927.220.727,00	94,75	5.187.010.272,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.293.781.556,00	5.701.896.618,00	90,60	5.775.675.749,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	96.566.665,00	96.566.665,00	100,00	1.834.766.635,00
5	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	3.511.387.650,00	3.324.775.144,00	94,69	5.279.827.349,00
6	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	299.500.000,00	299.500.000,00	100,00	59.900.000,00
7	Belanja Modal Instalasi Gas	1.868.296.605,00	1.812.800.000,00	97,03	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
9	Belanja Modal Jaringan Listrik	4.175.176.000,00	4.168.496.000,00	99,84	6.913.484.000,00
10	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	87.679.000,00	30.780.400,00	35,11	0,00
Jumlah		198.367.819.941,00	188.198.027.641,00	94,87	133.901.375.096,00

5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.970.147.048,00 atau 99,64% dari anggaran sebesar Rp13.016.980.248,00 menurun sebesar Rp9.925.775.504,00 atau 43,35%, jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp22.895.922.552,00. Berikut rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

Tabel 54
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Jenis TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	383.801.600,00	343.181.000,00	89,42	0,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan	210.000.000,00	209.800.000,00	99,90	0,00





	Bentuk Mikro				
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	527.933.624,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.042.168.688,00	3.040.264.688,00	99,94	22.367.988.928,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	9.381.009.960,00	9.376.901.360,00	99,96	0,00
Jumlah		13.016.980.248,00	12.970.147.048,00	99,64	22.895.922.552,00

5.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Per 31 Desember 2024 Belanja Modal Aset Lainnya terdapat pada Aset Tidak Berwujud yang terealisasi sebesar Rp349.109.500,00 atau 58,19% dari anggaran sebesar Rp599.989.500,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 55
Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	205.650.000,00	205.150.000,00	99,76
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	120.000.000,00	19.980.000,00	16,65
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	274.339.500,00	123.979.500,00	45,19
Jumlah		599.989.500,00	349.109.500,00	58,19

5.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang.

Realisasi Belanja Tak Terduga per 31 Desember 2024 sebesar Rp397.087.640,00 atau 6,88% dari anggaran sebesar Rp5.775.000.000,00, meningkat sebesar Rp277.301.140,00 atau 231,50%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp119.786.500,00. Belanja Tak Terduga TA 2024 digunakan untuk Pembayaran Restitusi Pajak BPHTB An. PT Primera Dwima, pembayaran restitusi pajak BPHTB a.n Ny. Rosyiah yang telah dikuasakan kepada rasam dan Permohonan Pembayaran Restitusi PBB-P2 atas nama Gadot B Rangid yang dikuasakan kepada Waryono Tahun 2023.

5.3. Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp495.056.605.591,00 atau 85,76% dari anggaran sebesar Rp577.229.168.033,00 menurun sebesar



Rp534.930.776,00 atau 0,11%, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp495.591.536.367,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56
Rincian Transfer Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
TRANSFER	577.229.168.033,00	495.056.605.591,00	85,76	495.591.536.367,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	119.439.270.033,00	37.417.907.591,00	31,33	31.058.297.367,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	109.883.606.933,00	30.953.122.353,00	28,17	28.922.997.367,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	9.555.663.100,00	6.464.785.238,00	67,65	2.135.300.000,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	457.789.898.000,00	457.638.698.000,00	99,97	464.533.239.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	457.789.898.000,00	457.638.698.000,00	99,97	464.533.239.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	455.553.239.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	457.789.898.000,00	457.638.698.000,00	99,97	8.980.000.000,00

Realisasi transfer tersebut terbagi atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp30.953.122.353,00, Transfer Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp6.464.785.238,00. Transfer Bagi Hasil tersebut merupakan pembayaran atas utang transfer bagi hasil pajak tahun 2022 sebesar Rp11.194.078.700,00 dan utang transfer bagi hasil retribusi tahun 2022 sebesar Rp831.300.000,00 serta pembayaran belanja transfer bagi hasil pajak tahun 2024 sebesar Rp19.759.043.653 dan belanja transfer bagi hasil retribusi tahun 2024 sebesar Rp5.633.485.238.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yaitu merupakan Bantuan keuangan khusus ke desa yang sebesar Rp457.638.698.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota kepada Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	334.511.418.000,00	334.511.418.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	121.278.480.000,00	121.127.280.000,00
Jumlah	457.789.898.000,00	457.638.698.000,00

Bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp2.000.000.000,00 merupakan bantuan yang digunakan untuk rehabilitasi/pembangunan kantor desa pada 10 desa dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 58
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa

No	Kecamatan	Desa	Besaran Bantuan
1	Waringinkurung	Sukabares	200.000.000,00
2	Kragilan	Cisait	200.000.000,00
3	Binuang	Binuang	200.000.000,00
4	Binuang	Cakung	200.000.000,00
5	Tunjung Teja	Bojong Menteng	200.000.000,00
6	Pamarayan	Sangiang	200.000.000,00
7	Kopo	Carenang Udik	200.000.000,00
8	Pabuaran	Talaga Warna	200.000.000,00
9	Padarincang	Curug Goong	200.000.000,00
10	Gunung Sari	Tamiang	200.000.000,00
Jumlah			2.000.000.000,00

Pada tahun 2024 ini seluruh bantuan keuangan ke desa dianggarkan pada bantuan keuangan khusus tidak lagi pada bantuan keuangan umum karena bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa peruntukannya sudah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

5.4. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran pendapatan daerah terhadap anggaran belanja daerah. Pembiayaan dipergunakan untuk menampung rekening sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun yang lalu, Penerimaan Piutang Daerah, Pinjaman Daerah dan Penyertaan Modal/Investasi Daerah serta pembayaran pokok pinjaman daerah.

Tabel 59
Pembiayaan TA 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.866.807.668,00	32.866.807.668,00	100,00	69.969.842.685,00
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	32.866.807.668,00	32.866.807.668,00	100,00	69.969.842.685,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00	7.482.125.637,00	93,53	4.566.821.934,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	2.482.125.637,00	82,74	3.066.821.934,00
PEMBIAYAAN NETTO	24.866.807.668,00	25.384.682.031,00	102,08	65.403.020.751,00

Pagu Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp32.866.807.668,00, direalisasikan sebesar Rp32.866.807.668,00 atau 100,00%. Realisasi penerimaan ini berasal dari SiLPA tahun 2023 sebesar Rp32.866.807.668,00.

Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.482.125.637,00. Realisasi tersebut merupakan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Al-Bantani sebesar Rp5.000.000.000,00 dan kewajiban Pemerintah untuk pembayaran atas Utang Kompensasi Likuidasi PT. LKM Ciomas sebesar Rp2.482.125.637,00.





Adapun Pembiayaan TA 2024 tertuang dalam PERDA No 13 Tahun 2020 yang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serang Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Al-Bantani, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat, Perseroan Terbatas Serang Berkah Mandiri, Dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas.

5.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA merupakan selisih antara Surplus/(Defisit) dan Pembiayaan Neto. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.877.491.772,00 menurun sebesar Rp1.989.315.896,00 atau 6,05%, jika dibandingkan dengan SiLPA tahun 2023 sebesar Rp32.866.807.668,00. SiLPA Tahun 2024 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 60
SiLPA TA 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
SURPLUS / DEFISIT	(24.866.807.668,00)	5.492.809.741,00	(22,09)	(32.536.213.083,00)
PEMBIAYAAN NETTO	24.866.807.668,00	25.384.682.031,00	102,08	65.403.020.751,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	0,00	30.877.491.772,00	0,00	32.866.807.668,00

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

5.6. Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2024 sebesar Rp32.866.807.668,00 merupakan Saldo Anggaran Lebih akhir TA 2023. SAL Awal dikurangi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp32.866.807.668,00 terdapat selisih Rp0,00. Selanjutnya ditambah SiLPA dengan TA 2024 sebesar Rp30.877.491.772,00 sehingga menghasilkan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp 30.877.491.772,00. Bila dibandingkan dengan saldo kas pada Neraca sebesar Rp30.898.406.078,00 maka terdapat selisih sebesar Rp20.914.306,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya utang PFK pada Kas Dana BOS. Rincian saldo kas pada neraca sebagai berikut:

Tabel 61
Saldo Akhir Kas 2024

Uraian	Saldo
Kas di Kas Daerah	989.990.483,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di BLUD	28.760.698.178,00
Kas Dana BOS	312.197.540,00
Kas Dana BOK	835.519.877,00
Jumlah	30.898.406.078,00





Dalam Kas di Kas Daerah sebesar Rp989.990.483,00, terdapat dana untuk kegiatan yang dianggarkan kembali di tahun 2025 sebesar Rp84.872.220.477,28 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 62
Rincian Dana Kegiatan yang dianggarkan kembali perSKPD ditahun 2025

No	OPD	Hasil Verifikasi
1	DISDIK	10.007.149.521,00
2	DINKES	4.098.663.355,00
3	DPUPR	22.211.723.660,98
4	DPRKP	592.217.334,00
5	BPBD	7.044.000,00
6	DINSOS	238.919.600,00
7	DKPP	1.264.951.240,00
8	DLH	108.835.630,00
9	DISDUKCAPIL	702.573.950,00
10	DPMD	243.007.600,00
11	DKBP3A	116.582.455,00
12	DISHUB	198.634.500,00
13	DISKOMINFOSATIK	1.315.484.640,00
14	DISKOPERINDAG	515.014.468,00
15	DPMTSP	15.796.000,00
16	DISPORAPAR	34.800.000,00
17	Dinas Perikanan	210.939.791,00
18	SETDA	247.339.500,00
19	BPKAD	42.550.529.932,30
20	Kec. Padarincang	3.800.000,00
21	KESBANGPOL	188.213.300,00
Jumlah		84.872.220.477,28

PENJELASAN POS-POS AKUN NERACA

5.7. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berikut adalah penjabaran aset Pemerintah Kabupaten Serang selama tahun 2024:

Tabel 63
Aset per 31 Desember 2024 dan 2023





No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah / Berkurang	%
1	Aset Lancar	209.662.848.353,52	270.015.184.663,97	(60.352.336.310,45)	(22,35)
2	Investasi Jangka Panjang	193.271.561.951,21	186.403.448.140,44	6.868.113.810,77	3,68
3	Aset Tetap	4.201.664.442.044,33	4.055.904.886.261,19	145.759.555.783,14	3,59
4	Aset Lainnya	304.328.131.913,40	283.518.264.255,13	20.809.867.658,27	7,34
5	Properti Investasi	25.303.239.942,00	0,00	25.303.239.942,00	0,00
Jumlah		4.934.230.224.204,46	4.795.841.783.320,73	138.388.440.883,73	2,89

Berdasarkan rincian Aset sebelumnya terlihat bahwa terjadi peningkatan aset sebesar Rp138.388.440.883,73 atau 2,89%, jika dibandingkan dengan aset sebelumnya yang mengalami peningkatan paling tinggi diantara yang lain adalah Aset Lainnya sebesar 7,34% yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

5.7.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Serang pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 64
Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	989.990.483,00	3.045.926.915,00	(2.055.936.432,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.894.000,00	(4.894.000,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	28.760.698.178,00	28.111.008.655,00	649.689.523,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya (Dana BOS)	312.197.540,00	50.732.514,00	261.465.026,00
Kas Lainnya (Dana BOK)	835.519.877,00	1.673.801.550,00	(838.281.673,00)
Piutang Pajak Daerah	307.939.220.794,60	305.273.238.586,81	2.665.982.207,79
Piutang Retribusi Daerah	29.513.922.531,00	1.763.627.440,00	27.750.295.091,00
Piutang Pendapatan Lainnya	4.194.117.555,00	34.996.321.035,56	(30.802.203.480,56)
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	362.827.753,00	395.303.713,00	(32.475.960,00)
Piutang Lancar Lainnya	10.128.976.243,00	28.210.662.721,00	(18.081.686.478,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(236.782.624.768,66)	(243.870.437.468,39)	7.087.812.699,73
Beban Dibayar Dimuka	709.116.345,27	21.838.020.356,11	(21.128.904.010,84)
Persediaan	62.698.885.822,31	88.522.084.645,88	(25.823.198.823,57)
Jumlah	209.662.848.353,52	270.015.184.663,97	(60.352.336.310,45)

1. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp989.990.483,00 Apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Kas



Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.045.926.915,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.055.936.432,00. Saldo tersebut berada pada rekening kas umum pada bank BJB Nomor 0070030042013.

Sisa Kas di Kas Daerah seharusnya sebesar Rp8.995.558.922 yang terdiri dari Sisa Kas DAK Fisik sebesar Rp4.075.203.692,00 dan Sisa Kas DAK Non Fisik sebesar Rp4.920.355.230,00, namun ada penggunaan untuk realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp8.005.568.439 yang berasal dari Sisa Kas DAK Non Fisik sebesar Rp4.920.355.230,00 dan sisa kas DAK Fisik sebesar Rp3.085.213.209,00 yang digunakan untuk pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Aparatur Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW) untuk 326 Desa, sehingga saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp989.990.483,00.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah nihil.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah nihil.

4. Kas di BLUD

Saldo di BLUD Tahun 2024 senilai Rp28.760.698.178,00 terdiri dari saldo Kas pada BLUD RSUD sebesar Rp25.813.672.237,00 dan Saldo Kas pada BLUD Dinas Kesehatan senilai Rp2.947.025.941,00.

Kas Di BLUD RSUD tahun 2024 sebesar Rp25.813.672.237,00 turun sebesar Rp71.150.685,00 jika dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD RSUD Tahun 2023 sebesar Rp25.884.822.922,00.

Dalam Saldo Kas di BLUD RSUD terdiri dari Kas di Rekening Bendahara Umum RSUD sebesar Rp25.794.056.237,00 dan kas tunai sebesar Rp19.616.000,00. Kas tunai tersebut merupakan uang simpanan sementara pasien yang belum disetorkan ke Rekening Bendahara Umum RSUD sampai akhir tahun 2024. Penyetoran baru dilakukan pada tanggal 22 April 2025 melalui dokumen Bukti Setor dan tidak melalui dokumen Bukti Bank Masuk.

Kas di BLUD Puskesmas dan Labriskes Tahun 2024 sebesar Rp2.947.025.941,00 naik sebesar Rp720.840.208,00 jika dibandingkan dengan saldo Kas Di BLUD Puskesmas dan Labriskes Tahun 2023 sebesar Rp2.226.185.733,00.

Kas BLUD Puskesmas dan Labriskes mencakup saldo akhir kas dari 31 BLUD Puskesmas dan 1 BLUD Labrikes. Rincian saldo masing-masing BLUD dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 65
Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labrikes per 31 Desember 2024

No	BLUD	Saldo Awal	Pendapatan (Rp)	Belanja	Saldo Akhir
----	------	------------	-----------------	---------	-------------



No	BLUD	Saldo Awal	Pendapatan (Rp)	Belanja	Saldo Akhir
1	Puskesmas Anyar	4.332.759,00	2.422.620.079,00	2.348.605.026,00	78.347.812,00
2	Puskesmas Bandung	117.153.834,00	1.552.402.447,00	1.514.546.038,00	155.010.243,00
3	Puskesmas Baros	31.655.645,00	2.460.436.399,00	2.469.319.745,00	22.772.299,00
4	Puskesmas Binuang	45.270.700,00	1.188.245.790,00	1.210.417.276,00	23.099.214,00
5	Puskesmas Bojonegara	98.839.549,00	2.188.379.752,00	2.101.468.942,00	185.750.359,00
6	Puskesmas Carenang	39.863.531,00	2.344.497.212,00	2.378.137.511,00	6.223.232,00
7	Puskesmas Cikande	171.214.887,00	3.074.577.172,00	3.041.892.284,00	203.899.775,00
8	Puskesmas Cikeusal	53.855.540,00	3.564.863.521,00	3.575.204.530,00	43.514.531,00
9	Puskesmas Cinangka	179.212.765,00	2.666.966.096,00	2.631.994.520,00	214.184.341,00
10	Puskesmas Ciomas	53.124.648,00	2.972.139.057,00	2.788.933.615,00	236.330.090,00
11	Puskesmas Ciruas	79.847.870,00	3.402.311.597,00	3.431.346.287,00	50.813.180,00
12	Puskesmas Gunung Sari	33.882.979,00	968.317.652,00	995.031.589,00	7.169.042,00
13	Puskesmas Jawilan	75.922.998,00	2.818.679.352,00	2.795.373.422,00	99.228.928,00
14	Puskesmas Kibin	17.915.345,00	1.216.176.569,00	1.144.818.184,00	89.273.730,00
15	Puskesmas Kopo	31.423.295,00	1.343.867.220,00	1.310.005.796,00	65.284.719,00
16	Puskesmas Kragilan	108.060.189,00	1.663.093.202,00	1.679.323.101,00	91.830.290,00
17	Puskesmas Kramatwatu	76.299.112,00	3.446.005.988,00	3.472.688.491,00	49.616.609,00
18	Puskesmas Lebak Wangi	92.281.807,00	1.482.764.047,00	1.421.735.823,00	153.310.031,00
19	Puskesmas Mancak	11.570.890,00	1.963.814.044,00	1.915.314.429,00	60.070.505,00
20	Puskesmas Nyompok	34.646.989,00	1.109.159.410,00	1.127.339.057,00	16.467.342,00
21	Puskesmas Pabuaran	64.565.106,00	1.629.858.404,00	1.610.234.635,00	84.188.875,00
22	Puskesmas Padarincang	16.683.642,00	2.875.028.837,00	2.723.172.265,00	168.540.214,00
23	Puskesmas Pamarayan	142.170.193,00	3.669.959.664,00	3.629.543.888,00	182.585.969,00
24	Puskesmas Pematang	6.441.166,00	745.304.476,00	728.379.938,00	23.365.704,00
25	Puskesmas Petir	45.449.358,00	2.786.841.752,00	2.756.987.238,00	75.303.872,00
26	Puskesmas Pontang	22.835.398,00	3.203.370.324,00	3.212.089.397,00	14.116.325,00
27	Puskesmas Puloampel	79.144.774,00	1.437.709.141,00	1.438.404.249,00	78.449.666,00
28	Puskesmas Tanara	39.783.578,00	2.233.518.489,00	2.218.148.488,00	55.153.579,00
29	Puskesmas Tunjungteja	141.140.266,00	2.308.088.811,00	2.341.013.737,00	108.215.340,00
30	Puskesmas Tirtayasa	128.345.248,00	2.554.695.748,00	2.495.634.886,00	187.406.110,00
31	Puskesmas Waringinkurung	64.634.581,00	2.082.081.752,00	2.042.888.188,00	103.828.145,00
32	Laboratorium Kesehatan	118.617.091,00	895.539.711,00	1.000.480.932,00	13.675.870,00
Jumlah		2.226.185.733,00	70.271.313.715,00	69.550.473.507,00	2.947.025.941,00

5. Kas Lainnya – Dana BOS

Kas Dana BOS merupakan Kas yang dikelola langsung oleh sekolah. Dana tersebut merupakan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat langsung kepada pihak sekolah. Sisa nilai kas dana BOS per 31 Desember 2024 yang masih berada di sekolah senilai Rp312.197.540,00. Nilai Kas Dana BOS tahun 2024 naik sebesar Rp261.465.026,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31



Desember 2023 senilai Rp50.732.514,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66
Kas Dana BOS

No	Uraian	Jumlah
1	SD	243.134.060,00
2	SMP	69.050.900,00
3	Kesetaraan	12.580,00
Total		312.197.540,00

6. Kas Lainnya - Dana BOK

Saldo Dana BOK per 31 Desember 2024 sebesar Rp835.519.877,00 merupakan Dana BOK yang disalurkan langsung ke rekening operasional pengelolaan Dana BOK pada masing-masing Puskesmas. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 67
Kas Dana BOK

No	PKM	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Sisa Saldo
1	Anyar	103.349.160,00	532.718.840,00	1.136.586.999,00	(500.518.999,00)
2	Bandung	49.639.768,00	646.600.232,00	684.161.000,00	12.079.000,00
3	Binuang	42.745.327,00	577.529.673,00	518.469.126,00	101.805.874,00
4	Bojonegara	66.829.800,00	639.080.200,00	802.183.640,00	(96.273.640,00)
5	Baros	28.006.008,00	547.627.992,00	830.982.000,00	(255.348.000,00)
6	Cikande	55.630.414,00	777.398.586,00	1.074.329.000,00	(241.300.000,00)
7	Carenang	28.196.801,00	577.694.199,00	719.358.000,00	(113.467.000,00)
8	Cikeusal	21.432.949,00	1.067.097.051,00	1.258.727.215,00	(170.197.215,00)
9	Cinangka	128.816.570,00	1.151.484.430,00	629.611.940,00	650.689.060,00
10	Ciomas	51.299.476,00	741.290.524,00	614.672.857,00	177.917.143,00
11	Ciruas	42.474.374,00	643.774.626,00	960.368.000,00	(274.119.000,00)
12	Gunungsari	52.904.701,00	529.545.299,00	573.574.000,00	8.876.000,00
13	Jawilan	17.200.375,00	410.996.625,00	580.097.281,00	(151.900.281,00)
14	Kibin	39.490.290,00	503.051.710,00	635.069.212,00	(92.527.212,00)
15	Kragilan	58.256.858,00	1.018.135.142,00	564.882.000,00	511.510.000,00
16	Kramatwatu	79.603.264,00	557.727.736,00	1.092.367.609,00	(455.036.609,00)
17	Kopo	18.178.773,00	564.051.227,00	539.957.000,00	42.273.000,00
18	Lebakwangi	20.717.761,00	533.570.239,00	739.380.000,00	(185.092.000,00)
19	Mancak	196.184.010,00	484.448.990,00	1.003.079.000,00	(322.446.000,00)
20	Nyompok	35.413.983,00	1.082.856.017,00	426.100.276,00	692.169.724,00
21	Pabuaran	23.568.216,00	1.267.850.784,00	703.884.000,00	587.535.000,00
22	Padarincang	64.284.834,00	742.335.166,00	694.046.000,00	112.574.000,00
23	Pamarayan	49.994.486,00	587.020.514,00	789.854.999,00	(152.839.999,00)
24	Petir	58.690.705,00	1.223.850.295,00	530.056.875,00	752.484.125,00
25	Pematang	112.001.275,00	855.650.725,00	550.803.000,00	416.849.000,00



No	PKM	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Sisa Saldo
26	Pontang	33.268.077,00	1.065.479.923,00	1.095.762.000,00	2.986.000,00
27	Pulo ampel	46.597.474,00	696.224.526,00	602.068.000,00	140.754.000,00
28	Tanara	38.643.723,00	684.548.277,00	865.914.000,00	(142.722.000,00)
29	Tirtayasa	32.176.855,00	498.356.145,00	857.144.000,00	(326.611.000,00)
30	Tunjungteja	37.569.190,00	821.592.810,00	1.031.262.000,00	(172.100.000,00)
31	Waringinkurung	40.636.053,00	914.480.947,00	677.600.094,00	277.516.906,00
Jumlah		1.673.801.550,00	22.944.069.450,00	23.782.351.123,00	835.519.877,00

7. Piutang Pajak

Piutang Pajak merupakan saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah untuk masa pajak daerah sampai dengan TA 2024. Pencatatan, penatausahaan dan pengelolaan Piutang Pajak Daerah merupakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Saldo Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp307.939.220.794,60 meningkat sebesar Rp2.665.982.207,79 atau 0,87%, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp305.273.238.586,81.

Pada TA 2024 menyesuaikan dengan klasifikasi pada penganggaran dilakukan juga reklasifikasi pada piutang pajak sebagaimana telah dijelaskan pada bagian realisasi pajak sehingga rincian piutang pajak pada TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 68
Daftar Piutang Pendapatan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)
Piutang Pajak			
Piutang Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	703.018.324,00	217.812.300,00	485.206.024,00
Piutang Pajak Parkir	3.165.913,00	30.964.800,00	(27.798.887,00)
Piutang Pajak Air Tanah	596.132.732,60	603.819.884,80	(7.687.152,20)
Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.740.924.909,80	1.308.953.030,81	2.431.971.878,99
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	299.173.919.767,00	284.283.324.873,00	14.890.594.894,00
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	238.704.880,00	0,00	238.704.880,00
Piutang PBJT-Restoran	604.605.472,00	606.536.797,00	(1.931.325,00)
Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	179.887.488,00	16.834.460.343,20	(16.654.572.855,20)
Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri	144.121.381,20	0,00	144.121.381,20
Piutang PBJT-Hotel	2.099.161.138,00	1.039.727.058,00	1.059.434.080,00
Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	39.317.463,00	0,00	39.317.463,00



Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)
Piutang PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	416.261.326,00	347.639.500,00	68.621.826,00
Jumlah	307.939.220.794,60	305.273.238.586,81	2.665.982.207,79

8. Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.513.922.531,00 berupa Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebesar Rp29.007.352.568,00 dan piutang retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp506.569.963,00. Piutang ini merupakan reklasifikasi dari piutang lain-lain PAD yang Sah dari RSUD dikarenakan reklasifikasi pendapatan BLUD menjadi pendapatan retribusi sesuai Undang-Undang HKPD, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 69
Piutang RSUD Jasa Layanan

No	Nama Perusahaan	Tahun 2024
1	ABS Industri Indonesia, PT	351.550,00
2	Adhi Karya	580.676,00
3	Arbe Indonesia, PT	21.958.429,00
4	Asuransi Bumi Asih	82.316.609,00
5	Asuransi Bumida AKDHK	33.521.404,00
6	Asuransi Bumida DPRD	2.330.987,00
7	Bapelkes Krakatau Steel	11.778.190,00
8	BKD Provinsi Banten	788.800,00
9	BNI Life Insurance	188.300,00
10	BPJS Kesehatan	15.778.279.400,00
11	BPJS Ketenagakerjaan	1.211.881.689,00
12	Dinkes Kab. Pandeglang/Difteri	1.389.050,00
13	Dinkes Kab. Serang/Difteri	63.995.728,00
14	Dinkes Kota Serang/Difteri	5.443.600,00
15	Dinkes Provinsi Banten/Difteri	3.921.725,00
16	Dinkes Provinsi Banten/HIV	50.400.000,00
17	Dinkes Provinsi Banten/TBMDR	549.395.510,00
18	DKBPPPA Kab. Serang	1.042.000,00
19	Gama Prima Karya, PT	1.058.416,00
20	Gema Jobker Infocom, PT	19.633.196,00
21	Indah Kiat Pulp & Paper	175.861.728,00
22	Inhealth, PT	1.781.316,00
23	Jasa Raharja	811.919.252,00
24	JMCC	77.487.698,00
25	Kementerian Kesehatan Ri (Covid 19)	68.999.000,00
26	Nikomas Gemilang, PT	1.924.890.711,00





No	Nama Perusahaan	Tahun 2024
27	Nur Sahara Pratama	51.080.698,00
28	Obat Askes Sukarela	405.310,00
29	Parkland Word Indonesia, PT	18.442.346,00
30	Pasien Umum	7.766.184.015,00
31	Perawatan Askes Sukarela	18.372.110,00
32	Perawatan Askes Wajib	1.945.000,00
33	Polda Banten	3.466.026,00
34	Polyprima	42.726.799,00
35	RS Bethsaida Serang	357.000,00
36	RS Bhayangkara Polda Banten	5.371.800,00
37	RS Budi Asih	6.525.400,00
38	RS Hermina	510.000,00
39	RS Kencana	103.971.000,00
40	RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara / Pelkes Karyawan	637.000,00
41	RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara/ Pelkes Masyarakat	63.134.200,00
42	RSUD Kota Serang	6.298.000,00
43	Taspen, PT	16.730.900,00
Jumlah		29.007.352.568,00

9. Piutang Pendapatan Lainnya

Saldo Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.194.117.555,00 menurun sebesar Rp30.802.203.480,56 atau 88,02%, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.996.321.035,56. Penurunan saldo tersebut sebagian besar disebabkan oleh reklasifikasi pendapatan BLUD RSUD menjadi pendapatan retribusi sesuai dengan UU HKPD. Berikut rincian saldo Piutang Pendapatan Lainnya per SKPD :

Tabel 70
Daftar Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)
DINKES	259.788.100,00	281.586.800,00	(21.798.700,00)
RSUD	1.335.935.517,00	31.631.954.611,00	(30.296.019.094,00)
DISKOPERINDAG	756.973.552,00	771.098.752,00	(14.125.200,00)
SETDA	386.000.000,00	386.000.000,00	0,00
BPKAD	0,00	78.585.599,00	(78.585.599,00)
BAPENDA	1.455.420.386,00	1.500.758.748,56	(45.338.362,56)
DISPAPORA	0,00	346.336.525,00	(346.336.525,00)
Jumlah	4.194.117.555,00	34.996.321.035,56	(30.802.203.480,56)

9.1 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Dinas Kesehatan

Saldo piutang Dinkes per 31 Desember 2024 sebesar Rp259.788.100,00 merupakan saldo piutang kepada BPJS pada BLUD Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 71
Piutang Dinas Kesehatan

No	Nama Puskesmas	Piutang Tahun 2024
1	Puskesmas Anyar	17.421.000,00
2	Puskesmas Bandung	10.249.000,00
3	Puskesmas Binuang	7.567.000,00
4	Puskesmas Cikeusal	53.660.000,00
5	Puskesmas Cinangka	34.024.000,00
6	Puskesmas Ciruas	3.840.000,00
7	Puskesmas Gunung Sari	5.160.000,00
8	Puskesmas Kibin	9.889.000,00
9	Puskesmas Kopo	1.289.000,00
10	Puskesmas Kragilan	18.005.000,00
11	Puskesmas Kramatwatu	25.762.100,00
12	Puskesmas Nyompok	24.921.500,00
13	Puskesmas Padarincang	21.429.500,00
14	Puskesmas Puloampel	4.370.000,00
15	Laboratorium Kesehatan	22.201.000,00
	Total	259.788.100,00

9.2 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Rumah Sakit Umum Dradjat Prawiranegara

Piutang pendapatan RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.335.935.517,00 merupakan piutang dari piutang non jasa layanan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72
Piutang RSUD

Perusahaan	2024	2023
Koperasi Bina Sejahtera RSUD dr. Dradjat Prawiranegara	102.690.000,00	34.230.000,00
PT. Sadena Fortuna	136.000.000,00	136.000.000,00
PT. Pelangi Anugerah Solusindo	248.350.000,00	248.350.000,00
PT. Perimeter Ruang Kali Waktu	660.000.000,00	580.000.000,00
PT. Sadena Fortuna	6.800.000,00	6.800.000,00
PT. Pelangi Anugerah Solusindo	38.810.000,00	38.810.000,00
PT. Perimeter Ruang Kali Waktu	108.000.000,00	94.160.000,00
PT. Solusi Kreatif Kompis	1.545.378,00	1.545.378,00
Kios eks Koperasi Dinkes Kab. Serang (Kerjasama Perorangan)	25.000.000,00	7.500.000,00
Queen Putri, CV	8.740.139,00	3.574.665,00
Universitas Faletahan	0,00	176.252.500,00
Universitas Tirtayasa	0,00	10.850.000,00
Jumlah	1.335.935.517,00	1.338.072.543,00





9.3 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Piutang Diskoperindag per 31 Desember 2024 sebesar Rp756.973.552,00 merupakan piutang hasil penjualan bangunan gedung.

9.4 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Sekretariat Daerah

Piutang pada Setda per 31 Desember 2024 sebesar Rp386.000.000,00 terdiri dari piutang Baitul Maal Watamwil sebesar Rp186.000.000,00 dan piutang PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebesar Rp200.000.000,00. Piutang Baitul Maal Watamwil yang merupakan piutang yang disalurkan kepada 14 BMT di Kabupaten Serang sebelum tahun 2006 yang sampai saat ini tidak dapat ditagihkan dikarenakan BMT sudah tidak beroperasi atau tidak dapat ditelusuri kembali.

Piutang PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada Sekretariat Daerah merupakan pencatatan atas penyertaan modal pemerintah pada BMI yang tercatat dalam piutang lainnya sejak pembentukan Neraca awal tahun 2006.

9.5 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Badan Pendapatan Daerah

Piutang pada Bapenda per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.455.420.386,00 merupakan piutang denda pajak akibat keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Berikut rincian piutang denda pajak tahun 2024:

Tabel 73
Rincian Piutang Denda Pajak

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	246.012.574,16	246.012.574,16	0,00
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	92.798.071,56	92.798.071,56	0,00
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	166.704.720,00	166.704.720,00	0,00
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	74.508.413,00	75.172.770,34	(664.357,34)
5	Piutang Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	86.327.316,58	86.327.316,58	0,00
6	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	10.713.944,00	10.713.944,00	0,00
7	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	203.802.225,00	244.536.621,73	(40.734.396,73)
8	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	562.146.711,00	578.492.730,19	(16.346.019,19)
9	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	(42.253.046,56)	0,00	(42.253.046,56)
10	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	9.687,42	0,00	9.687,42
11	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	52.889.917,84	0,00	52.889.917,84





No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
12	Piutang Pendapatan Denda PBJT- Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.724.062,00	0,00	1.724.062,00
13	Piutang Pendapatan Denda PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan- Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	35.790,00	0,00	35.790,00
Jumlah		1.455.420.386,00	1.500.758.748,56	(45.338.362,56)

10. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 sebesar Rp362.827.753,00, menurun sebesar Rp32.475.960,00 jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp395.303.713,00. Berikut rincian mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2024 :

Tabel 74
Rincian Mutasi Bagian Lancar TGR

Uraian	Jumlah
Saldo Awal	395.303.713,00
Penambahan	
Pembebanan Baru	41.115.000,00
Pembayaran Di Bawah Tahun 2024	1.400,00
Jumlah	41.116.400,00
Pengurangan	
Pembayaran Tahun 2024	73.591.660,00
Koreksi Kurang catat	700,00
Jumlah	73.592.360,00
Saldo Akhir	362.827.753,00

Terdapat 16 perangkat daerah yang mengalami kerugian, sebagai berikut:

Tabel 75
Perangkat Daerah Yang Mengalami Kerugian Daerah

No	Uraian	Jumlah
1	DISPORA	9.090.000,00
2	BKBPP	155.057.432,00
3	DISDIK	10.000.000,00
4	DINKES	4.565.000,00
5	DINSOS	2.624.300,00
6	DLH	14.498.350,00
7	KPTSP	4.352.500,00
8	KANTOR ULP	85.004.200,00
9	BKPSDM	12.250.000,00
10	KEC. LEBAKWANGI	9.548.573,00
11	DPUPR	34.173.000,00



No	Uraian	Jumlah
12	DPKPTB	11.348.000,00
13	SETDA/ULP	2.001.398,00
14	DISHUB	4.000.000,00
15	KEC. PONTANG	1.850.000,00
16	DINAS PERIKANAN	2.465.000,00
Jumlah		362.827.753,00

11. Piutang Lancar Lainnya

Saldo Piutang Lancar Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.128.976.243,00 menurun sebesar Rp18.081.686.478,00 atau 64,10%, jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp28.210.662.721,00, piutang ini terdiri dari piutang DAK non fisik reguler pada satuan pendidikan di Kabupaten Serang yang merupakan Dana BOS sebesar Rp74.326.720,00 dan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Banten yang belum disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Serang sampai dengan akhir 2024 sebesar Rp10.054.649.523,00. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 76
Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Tahun 2024

No	Uraian	Kurang Salur Desember 2024	Pelampauan 2024	Jumlah
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	4.008.475.500,00	4.008.475.500,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.907.563.050,00	0,00	1.907.563.050,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	241.551.950,00	283.313.000,00	524.864.950,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	3.613.746.023,00	0,00	3.613.746.023,00
Jumlah		5.762.861.023,00	4.291.788.500,00	10.054.649.523,00

12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

Per 31 Desember 2024 penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp236.782.624.768,66 dan per 31 Desember 2023 penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp243.870.437.468,39.





Tabel 77
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	2024	2023
1	RSUD	(12.403.703.691,88)	(11.394.941.302,00)
2	DPUPR	(2.532.850,01)	(8.820.170,00)
3	SETDA	(386.000.000,00)	(386.000.000,00)
4	BAPENDA	(223.653.751.858,77)	(231.742.481.822,09)
5	BPKAD	(336.636.368,00)	(336.465.274,30)
6	DISPAPORA	0,00	(1.728.900,00)
Jumlah		(236.782.624.768,66)	(243.870.437.468,39)

Penyisihan Piutang pada RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.403.703.691,88 dengan perhitungan *aging schedule* sebagai berikut :

Tabel 78
Aging Schedule Piutang RSUD

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	(1 Bulan)	(1 - 3 Bulan)	(3-12 Bulan)	(Lebih dari 12 Bulan)	
Piutang Retribusi RSUD	17.032.983.877,00	638.957.163,00	696.977.839,00	10.638.433.689,00	29.007.352.568,00
Piutang Lainnya RSUD			136.430.139,00	1.199.505.378,00	1.335.935.517,00
Total	17.032.983.877,00	638.957.163,00	833.407.978,00	11.837.939.067,00	30.343.288.085,00
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Penyisihan Piutang 2023	85.164.919,58	63.895.716,30	416.703.989,00	11.837.939.067,00	12.403.703.691,88

Penyisihan Piutang pada DPUPR senilai Rp2.532.850,01 dengan perhitungan *aging schedule* sebagai berikut:

Tabel 79
Aging Schedule Piutang DPUPR

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	(1 Bulan)	(1 - 3 Bulan)	(3-12 Bulan)	(Lebih dari 12 Bulan)	
Piutang Retribusi DPUPR	506.569.963,00	0,00	0,00	0,00	506.569.963,00
Total	506.569.963,00	0,00	0,00	0,00	506.569.963,00
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Penyisihan Piutang 2023	2.532.850,01	0,00	0,00	0,00	2.532.850,01

Penyisihan piutang pada SETDA tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp386.000.000,00.

Penyisihan Piutang pada BAPENDA senilai Rp223.653.751.858,77 merupakan penyisihan piutang pajak daerah sebesar Rp222.636.180.787,77 dan penyisihan piutang denda pajak sebesar



Rp1.017.571.071,00. Dengan perhitungan *aging schedule* sebagai berikut:

Tabel 80
Aging Schedule Piutang Pajak

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	(< 1 Tahun)	(1 - 2 Tahun)	(2-5 Tahun)	(> 5Tahun)	
PBB dan BPHTB	24.919.665.004,00	29.261.616.961,00	55.663.043.954,00	189.568.298.728,00	299.412.624.647,00
Pajak Hotel	1.353.508.792,00	358.075.179,00	67.617.167,00	319.960.000,00	2.099.161.138,00
Pajak Restoran	515.175.655,00	17.022.870,00	61.026.947,00	11.380.000,00	604.605.472,00
Pajak Hiburan	68.828.826,00	157.500,00	347.275.000,00	0,00	416.261.326,00
Pajak Reklame	520.029.837,00	85.262.964,00	94.538.578,00	3.186.945,00	703.018.324,00
PPJ non PLN	38.912,00	0,00	0,00	179.848.576,00	179.887.488,00
PPJ PLN	144.121.381,20	0,00	0,00	0,00	144.121.381,20
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.602.398.131,80	110.708.664,00	0,00	1.027.818.114,00	3.740.924.909,80
Pajak Parkir	12.318.576,00	10.594.400,00	0,00	19.570.400,00	42.483.376,00
Pajak Air Tanah	116.783.005,60	113.070.491,20	247.654.550,80	118.624.685,00	596.132.732,60
Total Piutang	30.252.868.120,60	29.956.509.029,20	56.481.156.196,80	191.248.687.448,00	307.939.220.794,60
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Nilai Penyisihan Piutang	151.264.340,60	2.995.650.900,49	28.240.578.098,40	191.248.687.448,00	222.636.180.787,77

Tabel 81
Aging Schedule Piutang Denda Pajak

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	(< 1 Tahun)	(1 - 2 Tahun)	(2-5 Tahun)	(> 5Tahun)	
Piutang Denda Pajak Hotel	64.832.567,00	46.432.885,00	32.456.240,00	155.180.800,00	298.902.492,00
Piutang Denda Pajak Restoran	12.937.825,00	2.893.865,00	29.292.935,00	5.420.400,00	50.545.025,00
Piutang Denda Pajak Hiburan	45.360,00	3.150,00	166.692.000,00	0,00	166.740.510,00
Piutang Denda Pajak Reklame	0,00	27.600.162,00	45.378.517,00	1.529.734,00	74.508.413,00
Piutang Denda Pajak PJU	9.687,00	0,00	0,00	86.327.317,00	86.337.004,00
Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	46.435.733,00	22.358.284,00	0,00	493.352.694,00	562.146.711,00
Piutang Denda Pajak Parkir	1.740.562,00	1.303.652,00	0,00	9.393.792,00	12.438.006,00
Piutang Denda Pajak Air Tanah	4.231.493,00	23.763.909,00	118.874.184,00	56.932.638,00	203.802.225,00
Total Piutang	130.233.227,00	124.355.907,00	392.693.876,00	808.137.375,00	1.455.420.386,00
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Nilai Penyisihan Piutang	651.167,30	12.435.590,70	196.346.938,00	808.137.375,00	1.017.571.071,00

Penyisihan Piutang pada BPKAD senilai Rp336.636.368,00 merupakan penyisihan piutang TP TGR dengan perhitungan *aging schedule* sebagai berikut:



Tabel 82
Aging Schedule Piutang TP TGR

Uraian	Kualitas Piutang				
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Piutang TP TGR	26.323.000,00	0,00	0,00	336.504.753,00	362.827.753,00
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Penyisihan Piutang 2023	131.615,00	0,00	0,00	336.504.753,00	336.636.368,00

13. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Per 31 Desember 2024 Beban dibayar dimuka sebesar Rp709.116.345,27 menurun sebesar Rp21.128.904.010,84 atau 96,75%, jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp21.838.020.356,11, penurunan ini disebabkan oleh reklasifikasi biaya pengadaan tanah yang dikonsinyasikan kepada Pengadilan Negeri Serang ke aset lain-lain. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2024 tersebar pada dua SKPD sebagai berikut:

Tabel 83
Rincian Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	DISNAKERTRAN			
	Beban Jasa Asuransi Dibayar Dimuka	1.134.555,30	1.084.430,63	(50.124,67)
2	DKBP3A			
	Beban Jasa Sewa Dibayar Dimuka	72.804.644,81	22.945.205,48	(49.859.439,33)
3	BPKAD	0,00	21.813.990.720,00	21.813.990.720,00
4	KESBANGPOL			
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.561.274,51	0,00	(10.561.274,51)
5	SETDA			
	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	114.495.056,99	0,00	(114.495.056,99)
6	DISKOPERINDAG			
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	35.382.513,66	0,00	(35.382.513,66)
7	DLH			
	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	474.738.300,00	0,00	(474.738.300,00)
	Jumlah	709.116.345,27	21.838.020.356,11	21.128.904.010,84

Tabel 84
Ringkasan Kontrak Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2024

No	SKPD	Uraian	No Kontrak	Tanggal Kontrak	Nama Aset	Nilai Kontak	Periode		Nilai Beban Dibayar Dimuka
							Tanggal Awal	Tanggal Akhir	
1	DISNAKE RTRANS	Asuransi Barang Milik Daerah	027/0145/SP/PP K	1 Maret 2024	Asuransi Kendaraan Dinas	6.197.720,00	8 Mar 2024	8 Mar 2025	1.134.555,30



No	SKPD	Uraian	No Kontrak	Tanggal Kontrak	Nama Aset	Nilai Kontak	Periode		Nilai Beban Dibayar Dimuka
							Tanggal Awal	Tanggal Akhir	
2	DKBP3A	Sewa Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Cikande	027/01/SP/DKB PPPA/2024	17 Januari 2024	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (BALAI PENYULUH KB KEC. CIKANDE)	25.000.000,00	1 Feb 2024	31 Jan 2025	2.117.486,34
3	DKBP3A	Sewa Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Pamaraan	027/06/SP/DKB PPPA/2024	18 Januari 2024	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya(BALAI PENYULUH KB KEC. PAMARAYAN)	25.000.000,00	1 Feb 2024	31 Jan 2025	2.117.486,34
4	DKBP3A	Sewa Gedung UPT PPA	BAHPL/03-JL47048074/PP-PDL/DKBPPPA/2024	10 Desember 2024	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya(Gedung Operasional UPT PPA Kab. Serang)	49.500.000,00	12 Dec 2024	12 Dec 2025	46.795.081,97
5	DKBP3A	Sewa Gedung RUMAH AMAN/PERLINDUNGAN	027/1466/SPPB J/DKBPPPA/2024	7 Juni 2024	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya(RUMAH AMAN/PERLINDUNGAN)	49.500.000,00	10 Jun 2024	10 Jun 2025	21.774.590,16
7	KESBAN GPOL	Sewa Kendaraan Opsional	053/SP/KESBAN GPOL/III/2024	28 Maret 2024	Kendaraan Dinas (Ertiga GX Matic 2023)	104.250.000,00	1 Apr 2024	31 Jan 2025	10.561.274,51
8	SETDA	Belanja asuransi barang milik daerah (kendaraan)	027 /27 /SPK/KPA/Umu m-Setda/2024	1 Maret 2024	Asuransi Kendaraan Dinas	34.229.975,00	1 Mar 2024	1 Mar 2025	5.611.471,31
9	SETDA	Belanja asuransi barang milik daerah (gedung)	027 / 285 /SPK/KPA/Umu m-Setda/2024	17 September 2024	Asuransi Gedung tempat kerja	55.396.663,00	17 Sep 2024	17 Sep 2025	39.352.820,71
10	SETDA	Belanja asuransi barang milik daerah (kendaraan)	027/269 /SPK/KPA/Umu m-Setda/2024	1 September 2024	Asuransi Kendaraan Dinas	97.877.923,00	17 Sep 2024	17 Sep 2025	69.530.764,97
11	DISKOPE RINDAG	Sewa Bangunan Polsek Baros	027/984/SPK-Diskoumperindag/2024	724 Juni 2024	Bangunan Gedung Tempat Kerja	74.000.000,00	24 Jun 2024	24 Jun 2025	35.382.513,66
12	DLH	Pemanfaatan tempat pemrosesan akhir (TPA) Kabupaten Pandeglang untuk pemrosesan sampah yang berasal dari Kabupaten Serang	660.1/PKS.60-TAPEM-DLH/IX/2024 007/PKS/PDPB M/IX/2024	2 September 2024	Pemanfaatan tempat pemrosesan akhir (TPA) Bangkonol Kabupaten Pandeglang	2.623.999.500,00	2 Sep 2024	31 Dec 2024	474.738.300,00
Total									709.116.345,27

Beban dibayar dimuka pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp474.738.300,00 merupakan beban atas pemanfaatan tempat pemrosesan akhir (TPA) Bangkonol di Kabupaten Pandeglang untuk pemrosesan sampah yang berasal dari Kabupaten Serang dan perjanjian berakhir pada 31 Desember 2024 berdasarkan perjanjian Nomor 660.1/PKS.60-TAPEM-DLH/IX/2024 dan 007/PKS/PDPB M/IX/2024 tanggal 2 September 2024. Saldo beban dibayar dimuka atau sisa deposit pembayaran tersebut akan digunakan Dinas Lingkungan Hidup pada pengiriman sampah di tahun 2025.



14. Persediaan

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Serang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.698.885.822,31 turun sebesar Rp25.823.198.823,57 atau 29,17%, jika dibandingkan Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebanyak Rp88.522.084.645,88. Rincian Persediaan TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 85
Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.678.200,00	17.210.000,00	(6.531.800,00)
2	Bahan Kimia	2.778.121.408,00	124.192.554,00	2.653.928.854,00
3	Bahan Baku	180.070.048,00	3.079.265.670,25	(2.899.195.622,25)
4	Bahan/Bibit Tanaman	80.127.400,00	149.709.703,99	(69.582.303,99)
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	71.691.000,00	149.406.000,00	(77.715.000,00)
6	Bahan Lainnya	5.755.579.422,00	4.860.871.853,00	894.707.569,00
7	Bahan Makanan	358.879.734,00	213.100.431,00	145.779.303,00
8	Suku Cadang Alat Kedokteran	72.984.145,00	104.909.374,00	(31.925.229,00)
9	Suku Cadang Alat Laboratorium	30.613.248,00	15.324.745,00	15.288.503,00
10	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.668.000,00	0,00	3.668.000,00
11	Suku Cadang Alat Bengkel	3.180.000,00	4.014.000,00	(834.000,00)
12	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	5.264.000,00	0,00	5.264.000,00
13	Suku Cadang Lainnya	6.532.405,00	1.932.255,00	4.600.150,00
14	Alat Tulis Kantor	1.308.037.774,33	794.675.412,48	513.362.361,85
15	Kertas dan Cover	119.602.659,00	109.384.510,00	10.218.149,00
16	Bahan Cetak	738.481.329,00	1.184.654.659,60	(446.173.330,60)
17	Benda Pos	6.680.200,00	3.988.000,00	2.692.200,00
18	Bahan Komputer	377.286.990,00	188.185.190,96	189.101.799,04
19	Perabot Kantor	63.078.438,00	59.692.716,82	3.385.721,18
20	Alat Listrik	180.744.466,00	376.166.158,00	(195.421.692,00)
21	Perlengkapan Dinas	333.000,00	0,00	333.000,00
22	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	17.142.800,00	(17.142.800,00)
23	Suvenir / Cendera Mata	8.570.000,00	0,00	8.570.000,00
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	428.363.004,00	222.197.148,00	206.165.856,00
25	Obat	14.162.027.390,85	26.981.884.110,78	(12.819.856.719,93)
26	Obat-obatan Lainnya	13.031.378.187,13	91.786.825,00	12.939.591.362,13
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	22.497.859.124,00	49.675.745.528,00	(27.177.886.404,00)
28	Natura	314.434.250,00	4.475.000,00	309.959.250,00
29	Persediaan Penelitian Biologi	104.620.000,00	92.170.000,00	12.450.000,00
Jumlah		62.698.885.822,31	88.522.084.645,88	(25.823.198.823,57)



Tabel 86
Rincian Persediaan Per SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
1	DISDIK	67.369.500,00	110.115.797,00	(42.746.297,00)
2	DINKES	81.288.935,00	272.833.438,00	(191.544.503,00)
3	Gudang Farmasi	12.977.391.787,13	14.010.310.868,17	(1.032.919.081,04)
4	Labkesda	380.412.408,00	185.232.879,00	195.179.529,00
5	Puskesmas Anyar	185.093.467,70	179.773.839,50	5.319.628,20
6	Puskesmas Bandung	215.933.366,00	210.346.776,20	5.586.589,80
7	Puskesmas Baros	384.584.279,00	313.445.915,00	71.138.364,00
8	Puskesmas Binuang	209.923.931,00	210.433.921,00	(509.990,00)
9	Puskesmas Bojonegara	288.203.632,00	312.620.156,00	(24.416.524,00)
10	Puskesmas Carenang	625.020.675,00	629.521.330,60	(4.500.655,60)
11	Puskesmas Cikande	230.082.675,00	115.920.062,00	114.162.613,00
12	Puskesmas Cikeusal	192.774.050,00	135.101.638,00	57.672.412,00
13	Puskesmas Cinangka	364.014.769,60	291.661.816,33	72.352.953,27
14	Puskesmas Ciomas	478.230.387,00	257.713.655,50	220.516.731,50
15	Puskesmas Ciruas	1.125.827.858,89	777.060.793,05	348.767.065,84
16	Puskesmas Gunung Sari	180.210.524,00	156.274.698,00	23.935.826,00
17	Puskesmas Jawilan	433.124.497,80	381.963.518,57	51.160.979,23
18	Puskesmas Kibin	864.456.034,00	517.598.275,00	346.857.759,00
19	Puskesmas Kopo	257.049.056,00	219.231.940,40	37.817.115,60
20	Puskesmas Kragilan	324.242.829,00	374.675.237,00	(50.432.408,00)
21	Puskesmas Kramatwatu	442.797.902,57	869.177.968,24	(426.380.065,67)
22	Puskesmas Lebak Wangi	347.569.638,00	269.638.559,00	77.931.079,00
23	Puskesmas Mancak	506.012.482,75	371.453.968,20	134.558.514,55
24	Puskesmas Nyompok	251.449.676,00	192.314.714,00	59.134.962,00
25	Puskesmas Pabuaran	244.301.492,00	152.921.900,00	91.379.592,00
26	Puskesmas Padarincang	240.033.740,00	379.081.838,50	(139.048.098,50)
27	Puskesmas Pamarayan	269.914.427,00	258.460.195,00	11.454.232,00
28	Puskesmas Pematang	282.315.888,00	164.515.417,00	117.800.471,00
29	Puskesmas Petir	280.748.771,00	215.207.881,00	65.540.890,00
30	Puskesmas Pontang	328.137.655,00	273.425.298,00	54.712.357,00
31	Puskesmas Puloampel	591.291.252,20	640.145.605,30	(48.854.353,10)
32	Puskesmas Tanara	401.174.506,00	360.111.758,80	41.062.747,20
33	Puskesmas Tunjungteja	217.927.925,00	179.709.366,00	38.218.559,00
34	Puskesmas Tirtayasa	436.000.198,00	231.601.837,00	204.398.361,00
35	Puskesmas Waringinkurung	461.439.376,00	404.343.195,00	57.096.181,00
36	RSUD	12.600.198.751,57	11.778.702.712,67	821.496.038,90
37	DPUPR	18.364.780.867,00	46.186.250.069,00	(27.821.469.202,00)
38	UPT Pemeliharaan Jalan dan SDA Wilayah Kramatwatu DPUPR	4.585.000,00	0,00	4.585.000,00
39	UPT Pemeliharaan Jalan dan SDA Wilayah Anyar DPUPR	4.552.000,00	0,00	4.552.000,00
40	UPT Pemeliharaan Jalan dan SDA	4.552.000,00	0,00	4.552.000,00



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
	Wilayah Petir DPUPR			
41	UPT Pemeliharaan Jalan dan SDA Wilayah Kibin DPUPR	4.519.500,00	0,00	4.519.500,00
42	UPT Pemeliharaan Jalan dan SDA Wilayah Ciruas DPUPR	4.479.815,00	0,00	4.479.815,00
43	UPT Pemeliharaan Jalan dan SDA Wilayah Cikande DPUPR	4.552.000,00	0,00	4.552.000,00
44	UPT Peralatan dan Perbengkelan DPUPR	97.190.000,00	0,00	97.190.000,00
45	UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi DPUPR	22.599.450,00	0,00	22.599.450,00
46	UPT Pengelolaan air limbah domestik	89.798.500,00	0,00	89.798.500,00
47	DPKP	28.061.885,00	26.870.246,68	1.191.638,32
48	SATPOL PP	926.100,00	2.825.000,00	(1.898.900,00)
49	BPBD	110.154.600,00	40.267.287,00	69.887.313,00
50	DINSOS	281.003.250,78	375.202.626,24	(94.199.375,46)
51	DISNAKERTRANS	0,00	1.361.000,00	(1.361.000,00)
52	DKPP	4.311.474.350,00	3.524.885.803,99	786.588.546,01
53	DLH	78.248.498,00	74.471.395,00	3.777.103,00
54	DISDUKCAPIL	608.074.683,00	849.954.078,56	(241.879.395,56)
55	DPMD	2.223.000,00	3.526.500,00	(1.303.500,00)
56	DKBP3A	301.267.741,76	291.389.319,00	9.878.422,76
57	DISHUB	198.340.200,00	275.037.630,00	(76.697.430,00)
58	DISKOMINFO	607.000,00	677.300,00	(70.300,00)
59	DISKOPERINDAG	2.877.800,00	70.349.400,00	(67.471.600,00)
60	DISPORAPAR	11.274.800,00	5.765.400,00	5.509.400,00
61	DPKD	1.777.500,00	0,00	1.777.500,00
62	DISKAN	81.928.550,00	156.338.400,00	(74.409.850,00)
63	SETDA	(4.850.324.951,44)	150.279.848,83	(5.000.604.800,27)
64	Bagian fasilitas Pimpinan	1.968.577.600,00	0,00	1.968.577.600,00
65	Bagian Perekonomian	25.001.550,00	0,00	25.001.550,00
66	Bagian Organisasi	24.105.500,00	0,00	24.105.500,00
67	Bagian Tata Pemerintahan	48.118.650,00	0,00	48.118.650,00
68	Bagian Umum dan Perlengkapan	1.829.713.000,00	0,00	1.829.713.000,00
69	Bagian Hukum	140.078.100,00	0,00	140.078.100,00
70	Bagian Keuangan	192.099.000,00	0,00	192.099.000,00
71	Bagian Kesejahteraan Rakyat	287.795.200,00	0,00	287.795.200,00
72	Bagian Administrasi Pembangunan	240.841.550,00	0,00	240.841.550,00
73	Bagian Layanan Pengadaan	219.747.000,00	0,00	219.747.000,00
74	SETWAN	80.346.800,00	56.226.183,55	24.120.616,45
75	BAPPEDA LITBANG	5.559.600,00	2.373.000,00	3.186.600,00
76	BAPENDA	64.210.150,00	17.785.000,00	46.425.150,00
77	BPKAD	142.500,00	670.000,00	(527.500,00)
78	BKPSDM	13.606.300,00	3.766.000,00	9.840.300,00
79	Inspektorat	5.644.600,00	2.280.200,00	3.364.400,00
80	Kec. Carenang	310.000,00	25.900,00	284.100,00



No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
81	Kec. Mancak	7.812.000,00	0,00	7.812.000,00
82	Kec. Pontang	230.000,00	0,00	230.000,00
83	Kec. Pulo Ampel	0,00	858.290,00	(858.290,00)
84	Kec. Tanara	6.441.200,00	0,00	6.441.200,00
85	Kec. Tirtayasa	1.235.500,00	0,00	1.235.500,00
86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.197.540,00	0,00	1.197.540,00
Jumlah		62.698.885.822,31	88.522.084.645,88	(25.823.198.823,57)

Persediaan yang terdapat pada RSUD dan Dinkes PKM dinilai menggunakan metode penilaian persediaan harga pembelian terakhir.

Pada Persediaan di SKPD terdapat persediaan rusak/kedaluwarsa sebesar Rp1.345.570.380,30, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 87
Daftar Persediaan Rusak/Kedaluwarsa per SKPD

No	SKPD	Nilai Persediaan Rusak/ Kedaluwarsa
RSUD dr. Dradjat Prawiranegara		
1	Apotek 1/Rawat Jalan	1.515.227,00
2	Apotek 2/Rawat Inap	1.809.691,00
3	Apotek 4/IGD	8.148.702,00
4	Depo Cathlab	111.000,00
5	Gudang Farmasi	193.051.927,00
6	Depo HIV	129.200,00
7	Depo TB	6.629.255,00
Jumlah RSUD		211.395.002,00
Dinas Kesehatan		
1	Puskesmas Anyar	2.037.693,00
2	Puskesmas Bandung	12.298.787,00
3	Puskesmas Baros	11.860.583,00
4	Puskesmas Binuang	2.715.008,00
5	Puskesmas Bojonegara	4.831.920,00
6	Puskesmas Carenang	133.150,00
7	Puskesmas Cikande	17.422.111,00
8	Puskesmas Cinangka	11.284.771,00
9	Puskesmas Ciomas	11.010.783,00
10	Puskesmas Ciruas	25.254.780,00
11	Puskesmas Gunung Sari	7.093.620,00
12	Puskesmas Jawilan	1.283.290,00
13	Puskesmas Kibin	7.738.240,00
14	Puskesmas Kopo	11.183.227,00
15	Puskesmas Kragilan	11.991.989,00
16	Puskesmas Kramatwatu	263.249.162,00
17	Puskesmas Lebak Wangi	1.251.070,00



No	SKPD	Nilai Persediaan Rusak/ Kedaluwarsa
18	Puskesmas Mancak	13.667.938,30
19	Puskesmas Nyompok	4.237.526,00
20	Puskesmas Pabuaran	9.282.886,00
21	Puskesmas Padarincang	22.886.327,00
22	Puskesmas Pamarayan	293.866,00
23	Puskesmas Pematang	2.608.936,00
24	Puskesmas Petir	4.966.630,00
25	Puskesmas Pontang	7.287.093,00
26	Puskesmas Puloampel	28.143.948,00
27	Puskesmas Tanara	15.490.948,00
28	Puskesmas Tunjungteja	20.908.505,00
29	Puskesmas Tirtayasa	6.183.806,00
30	Puskesmas Waringinkurung	8.672.089,00
31	Gudang Farmasi	449.541.353,00
Jumlah Dinkes		996.812.035,30
1	Diskoumperindag	134.364.900,00
Jumlah Diskoumperindag		134.364.900,00
1	DPUPR	2.998.443,00
Jumlah DPUPR		2.998.443,00
Total		1.345.570.380,30

Persediaan kadaluarsa pada RSUD maupun persediaan rusak pada DPUPR masih tercatat dalam nilai persediaan disebabkan belum adanya pemusnahan sampai dengan akhir tahun 2024.

Pada TA 2024 terdapat penerimaan hibah berupa obat dari DINKES Provinsi, DINKES Kabupaten Serang dan Puskesmas ke RSUD dengan total yang tercatat sebesar Rp1.599.390.903,00 namun terdapat penerimaan tanpa nominal harga, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 88
Penerimaan Hibah Obat Ke RSUD

Nama Institusi	Tanggal	Nama Barang	Satuan	Jumlah
Dinas Kesehatan Kabupaten Serang	02/01/2024	DHP-FRIMAL TABLET (BK)	TABLET	9
Dinas Kesehatan Kabupaten Serang	02/01/2024	SULTRIMMIX DS 960 MG KAPLET (B)	CAPLET	400
Dinas Kesehatan Kabupaten Serang	10/07/2024	ZIDOVUDINE 100 MG KAPSUL (BP)	KAPSUL	600
Dinas Kesehatan Kabupaten Serang	03/09/2024	DHP-FRIMAL TABLET (BK)	TABLET	36
Dinas Kesehatan Provinsi Banten	23/07/2024	VAKSIN BERIRAB P 2 ML (300 IU)	VIAL	4
Dinas Kesehatan Provinsi Banten	23/07/2024	VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKS	VIAL	4
Puskesmas Ciruas	01/03/2024	VAKSIN BCG (BK)	VIAL	5
Puskesmas Ciruas	01/03/2024	VAKSIN DPT-HB (BK)	VIAL	5
Puskesmas Ciruas	01/03/2024	VAKSIN MR (BK)	AMP	5
Puskesmas Ciruas	17/05/2024	VAKSIN BCG (BK)	VIAL	3
Puskesmas Ciruas	17/05/2024	VAKSIN MR (BK)	AMP	5
Puskesmas Ciruas	21/10/2024	VAKSIN BCG (BK)	VIAL	3



Nama Institusi	Tanggal	Nama Barang	Satuan	Jumlah
Puskesmas Ciruas	21/10/2024	VAKSIN DPT-HB (BK)	VIAL	5
Puskesmas Ciruas	21/10/2024	VAKSIN POLIO (BOPV) (BK)	VIAL	5
Puskesmas Ciruas	21/10/2024	VAKSIN MR (BK)	AMP	3
Puskesmas Ciruas	21/10/2024	VAKSIN PREVENAR 13 (PCV) (BK)	VIAL	5
Puskesmas Ciruas	21/10/2024	VAKSIN ROTAVIRUS (BK)	VIAL	3
Puskesmas Ciruas	11/12/2024	VAKSIN POLIO (BOPV) (BK)	VIAL	5
Puskesmas Ciruas	11/12/2024	VAKSIN POLIO (IPV) (BK)	VIAL	5
Puskesmas Ciruas	11/12/2024	VAKSIN ROTAVIRUS (BK)	VIAL	5
Puskesmas Kramatwatu	04/05/2024	VAKSIN RABIVAX-S 2,5 IU INJEKS	VIAL	10
Puskesmas Kramatwatu	19/08/2024	VAKSIN BCG (BK)	VIAL	1

Pada TA 2024 terdapat Persediaan atas Barang yang Diserahkan ke Masyarakat pada DPUPR, BPBD, DINSOS, DKPP dengan total yang tercatat sebesar Rp22.497.859.124,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 89
Rincian Persediaan atas Barang yang Diserahkan ke Masyarakat

No.	OPD	Uraian	Nilai	Sumber Dana	Pihak yang Akan Menerima
1	DPUPR	Rekonstruksi Jalan Desa	9.525.457.066,00	APBD	Desa di wilayah Kabupaten Serang dan daerah sekitar wilayah Puspemkab
		TPT Jalan Desa	1.714.400.000,00		
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.045.826.833,40		
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase	564.284.029,60		
		Pembangunan Drainase	171.632.126,00		
		Pembangunan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Evakuasi Jalan	167.015.000,00		
		Pembangunan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Evakuasi Jembatan	198.671.867,00		
		Pembangunan Perkuatan Tebing Saluran/Sungai	3.943.018.806,00		
		Drainase Pendukung Wilayah Puspemkab	1.254.794.496,00		
Subtotal DPUPR			18.585.100.224,00		
2	BPBD	Selimut	43.560.000,00	Hibah dari BPBD Provinsi Banten	Korban bencana alam dan bencana nonalam
		Sarden	6.210.100,00	Hibah dari PT. Multimas Nabati Asahan	
		Mie Instan	8.914.500,00		
		Beras	12.600.000,00		
Subtotal BPBD			71.284.600,00		
3	DINSOS	Beras	145.071.250,00	APBD	Korban bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial
		Sandal Jepit	80.000,00		
		Sarden	18.648.450,00		
		Celana Dalam	414.000,00		
		Daster	630.000,00		
		Handuk	312.000,00		
		Mukena	1.780.000,00		



No.	OPD	Uraian	Nilai	Sumber Dana	Pihak yang Akan Menerima
		Sajadah	490.000,00		
		Sarung Laki-Laki	747.000,00		
Subtotal Dinsos			168.172.700,00		
4	DKPP	Bibit Tanaman	45.068.850,00	DAK Non Fisik	Kelompok Tani
		Beras	3.628.232.750,00	APBD	Masyarakat (sebagai cadangan pangan)
Subtotal DKPP			3.673.301.600,00		
TOTAL			22.497.859.124,00		

5.7.2. Investasi Jangka Panjang

Akun Investasi Jangka Panjang adalah akun untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Per 31 Desember 2024 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp193.271.561.951,21 meningkat sebesar Rp6.868.113.810,77 atau 3,68% jika dibandingkan Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebanyak Rp186.403.448.140,44.

Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Serang dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Perhitungan Investasi Jangka Panjang/Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menurut SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang adalah:

- Kepemilikan saham kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

Kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Serang pada BUMD PDAM, PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciomas, PD. BPR Serang (Bank Serang) dan PT Serang Berkah Mandiri (SBM) lebih dari 50%, sehingga perhitungan nilai investasi jangka panjangnya menggunakan metode ekuitas sedangkan kepemilikan saham pada PT.Bank Jabar – Banten dibawah 50% menggunakan metode biaya. Penjelasan mutasi Investasi Jangka Panjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 90
Nilai Investasi Jangka Panjang Metode Ekuitas
per 31 Desember 2024 dan 2023

BUMD	Saham Aktual 2023	2023	Penyertaan Modal	Dividen	Laba/ (Rugi) 2024	Koreksi	2024
METODE EKUITAS							
PDAM "Tirta Al-Bantani"	100,00%	63.969.118.026,66	4.620.655.923,00	-1.100.000.000,00	3.925.847.592,00	546.776.209,34	71.962.397.751,00
PD/BPR Bank Serang	54,11%	55.405.145.061,51		-3.157.542.332,00	6.510.897.022,34	(546.776.209,34)	58.211.723.542,51

BUMD	Saham Aktual 2023	2023	Penyertaan Modal	Dividen	Labar/ (Rugi) 2024	Koreksi	2024
PD. PK. Ciomas	94,80%	3.931.744.394,57				(3.931.744.394,57)	0,00
PT. Serang Berkah Madiri	99,55%	135.627.642,70					135.627.642,70
Jumlah Investasi dengan metode Ekuitas		123.441.635.125,44	4.620.655.923,00	(4.257.542.332,00)	10.436.744.614,34	(3.931.744.394,57)	130.309.748.936,21
METODE BIAYA							
Bank Jabar-Banten	1,54%	62.961.813.015,00		15.343.389.885,00			62.961.813.015,00
Jumlah Investasi dengan metode biaya dan metode ekuitas		186.403.448.140,44	4.620.655.923,00	11.085.847.553,00	10.436.744.614,34	(3.931.744.394,57)	193.271.561.951,21

Perhitungan laba pada PDAM sebagaimana pada tabel 90 dihitung berdasarkan Laporan Keuangan PDAM tahun 2024 yang sudah diaudit oleh KAP Drs. Bambang Sudaryono dan Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Begitu juga dengan perhitungan laba BPR berdasarkan Laporan Keuangan BPR tahun 2024 yang sudah diaudit oleh KAP Roni Pupung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perhitungan laba/rugi pada SBM tahun 2024 belum dapat dilakukan dikarenakan sampai dengan Laporan Keuangan ini diterbitkan SBM belum menyerahkan Laporan Keuangan tahun 2024. SBM baru melakukan perikatan dengan KAP Roni Pupung untuk melakukan audit Laporan Keuangan SBM tahun 2022, 2023, dan 2024 pada 28 April 2025 berdasarkan Nomor Surat Perikatan Kerja (SPK) Nomor: 180/RP/SBMP/SP/RB/IV/2025. Jangka waktu pelaksanaan audit ini maksimal 60 hari kalender dimulai sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan 27 Juni 2025.

Terkait dengan investasi pada PT. LKM Ciomas pada tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat Nomor S-3/NB123/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Ijin Usaha Bersyarat Batal dan tidak berlaku di mana dalam surat tersebut PT.LKM Ciomas dinyatakan belum melengkapi dokumen persyaratan Izin Usaha LKM secara lengkap dan benar sehingga OJK melarang PT.LKM Ciomas menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha sebagai LKM dan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RPUS-LB) PT. LKM Ciomas Nomor 584.3/066/IV-21/PT. LKM.CMS. Pada tanggal 12 April 2021, telah diadakan RUPS-LB yang dihadiri para pemegang saham dengan hasil :

- Membubarkan PT. LKM CIOMAS
- Susunan tim Likuidasi :
 - Direksi PT. LKM Ciomas 2 orang
 - Bag. Perekonomian SETDA 1 orang



3. Bag. Hukum SETDA 1 orang
4. Unsur PT. Bank BJB 1 orang
- c. Membentuk Tim Likudasi, dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 1. Menyelesaikan Dana Pihak Ketiga yaitu Tabungan dan Deposito masyarakat.
 2. Melaksanakan tagihan kepada Debitur PT LKM Ciomas.
 3. Memohon kepada Pemda untuk bekerja sama dengan Bank BJB dalam menanggulangi pembayaran kepada nasabah, selanjutnya Pemda akan membayar kepada Bank BJB melalui APBD.
 4. Melakukan konsultasi terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri, mengingat pembayaran melalui beban APBD.
 5. Tim likuidasi agar mengajukan permohonan ke Kejaksaan Serang untuk melakukan penyitaan aset para terpidana dan menjual aset dimaksud yang hasilnya disetorkan ke kas daerah.
- d. Biaya operasional tim likuidasi dibebankan pada PT. LKM Ciomas yang kemudian dihitung menjadi kewajiban pemegang saham.
- e. Per tanggal 12 April 2021 seluruh karyawan LKM Ciomas dinonaktifkan.
- f. Tim likuidasi menyelesaikan seluruh kewajiban PT LKM Ciomas.

Pada tanggal 25 Mei 2021, telah ada Penetapan Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang No.100/Pdt.P/2021/PM.Srg tanggal 25 Mei 2021 yang dimohonkan oleh Akhmad Syarifudin (Dirut. PT. LKM Ciomas) pada tanggal 3 Mei 2021, dengan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberikan izin dan kewenangan kepada Tim Likuidasi untuk menjalankan tugas-tugas sebagai Tim Likuidator sesuai dengan Keputusan BA RUPS-LB.
- c. Memerintahkan kepada Pemohon selaku Ketua tim likuidasi untuk berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Serang agar segera menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Negara berupa pajak, tunggakan BPJS kesehatan, tunggakan BPJS ketenagakerjaan, dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito masyarakat, hak para karyawan PT LKM Ciomas, serta pinjaman kepada Bank lainnya diantaranya pinjaman kepada BPR Serang dan PT Bank BJB Cabang khusus Banten, yang sumber pembayarannya dibiayakan dari APBD Kabupaten Serang sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pengesahan BA RUPS-LB LKM Ciomas.

SK tim likuidasi dibentuk tanggal 26 Mei 2021 oleh Keputusan Bupati Serang Nomor: 900/Kep.286-Huk/2021 untuk melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri Serang dan tindak lanjut atas RUPS-LB PT LKM Ciomas.

Dan selanjutnya tim likuidasi melakukan inventarisasi terhadap aset dan kewajiban PT LKM Ciomas dengan hasil sebagai berikut:



Pada tanggal 27 Juli 2021, diadakan Rapat Tim Likuidasi yang menyimpulkan tentang besaran kewajiban PT. LKM Ciomas sebagai berikut:

- a. Total seluruh Kewajiban PT.LKM Ciomas (Hasil Pemutahiran data) Rp.11.443.082.990,00
- b. Honorarium Tim Likuidasi (selama 2 tahun) Rp.509.000.000,00
- c. Biaya operasional (selama 2 tahun) Rp.466.932.052,00
- d. Total Biaya sebesar Rp. 12.419.015.042,00

Pada tanggal 12 Agustus 2021, Penerbitan surat permohonan penganggaran untuk kewajiban PT. LKM Ciomas, Nomor : 580/2145/Pe-Setda/2021.

Sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Serang telah membayarkan kewajiban PT.LKM Ciomas sebesar Rp8.548.947.571,00 yang terdiri dari pembayaran tahun 2024 sebesar Rp2.482.125.637,00, pembayaran tahun 2023 sebesar Rp3.066.821.934,00 dan pembayaran tahun 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00. Pembayaran ini dilakukan melalui anggaran pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman.

Kewajiban kepada Penabung dan Deposan PT.LKM Ciomas sudah dibayarkan sepenuhnya kepada deposan dan penabung sebesar Rp9.035.594.365,00 dengan sumber dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang sebesar Rp8.548.947.571,00 dan sumber dana melalui hasil penagihan kredit sebesar Rp486.646.794,00. Sejak pembubaran PT.LKM Ciomas bulan April 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2024 Tim Likuidasi Ciomas melakukan Penagihan Kredit dan memperoleh hasil sebesar Rp848.468.795,00 dari penagihan kredit tersebut Tim Likuidasi membayarkan kepada nasabah penabung dan deposan sebesar Rp486.646.794,00 dan pengeluaran biaya operasional sebesar Rp361.822.001,00.

Tim Likuidasi melakukan Verifikasi data Kewajiban sebesar Rp1.891.411.509,00 pada tanggal per 31 Desember 2024 terdiri dari kewajiban kepada bank BJB sebesar Rp809.912.131,00 dan kewajiban kepada PT. BPR(Bank Serang) sebesar Rp1.081.499.378,00. Kewajiban ini dianggarkan pada APBD Murni tahun 2025 pada belanja tidak terduga.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Serang menghapus nilai investasi pada LKM Ciomas sebesar Rp3.931.744.394,57 berdasarkan peraturan daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Pembubaran PT. LKM Ciomas Kabupaten Serang.

5.7.3. Aset Tetap

Nilai bersih Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Serang per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.201.664.442.044,33 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.055.904.886.261,19 naik sebesar Rp145.759.555.783,14. Posisi aset tetap per KIB disajikan sebagai berikut:



Tabel 91
Saldo Aset Tetap tiap KIB per 31 Desember 2024 dan 2023

KIB	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)
A	Tanah	1.216.523.986.082,18	1.156.375.526.386,78	60.148.459.695,40
B	Peralatan dan Mesin	1.350.752.570.253,95	1.250.335.045.133,99	100.417.525.119,96
C	Gedung dan Bangunan	1.936.962.277.538,26	1.761.700.427.814,42	175.261.849.723,84
D	Jalan, Irigasi & Jaringan	2.837.404.473.513,33	2.651.268.515.828,30	186.135.957.685,03
E	Aset Tetap Lainnya	40.861.374.672,10	35.709.076.532,10	5.152.298.140,00
F	Konstruksi Dalam Pengerjaan	990.000.000,00	59.172.336.328,00	(58.182.336.328,00)
G	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.181.830.240.015,49)	(2.858.656.041.762,40)	(323.174.198.253,09)
Jumlah		4.201.664.442.044,33	4.055.904.886.261,19	145.759.555.783,14

Adapun rincian dari mutasi Aset Tetap pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 92
Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024

Uraian	Nominal	
Saldo Awal Nilai Bersih		4.055.904.886.261,19
Mutasi Debet:		
Belanja Modal	427.971.130.251,00	
Kapitalisasi	33.253.212.693,00	
Hibah	89.926.274.479,40	
Pindah Antar SKPD	210.241.648.489,74	
Koreksi Pembukuan	322.592.164.526,45	
Utang	3.788.357.680,00	
Reklas	132.346.244.086,01	
Jumlah Mutasi Debet	1.220.119.032.205,60	
Mutasi Kredit:		
Ekstra Komptabel	41.341.804.746,00	
Hibah	561.812.500,00	
Pindah Antar SKPD	210.241.648.489,74	
Beban Penyusutan	301.980.852.140,68	
Koreksi Pembukuan	336.273.048.296,57	
Reklas	183.960.310.249,47	
Jumlah Mutasi Kredit	1.074.359.476.422,46	
Kenaikan/(Penurunan)		145.759.555.783,14
Saldo Akhir Nilai Bersih		4.201.664.442.044,33

1. Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.216.523.986.082,18 meningkat sebesar Rp60.148.459.695,40 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.156.375.526.386,78 . dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 93
Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah 2024

Uraian	Nominal	
Saldo Awal Nilai Bersih		1.156.375.526.386,78
Mutasi Debet:		



Uraian	Nominal	
Belanja Modal	1.161.432.715,00	
Kapitalisasi	330.439.688,00	
Hibah	85.347.928.006,40	
Pindah Antar SKPD	108.444.698.667,43	
Koreksi Pembukuan	56.397.358.631,30	
Reklas	2.577.925.820,00	
Jumlah Mutasi Debet	254.259.783.528,13	
Mutasi Kredit:		
Pindah Antar SKPD	108.444.698.667,43	
Koreksi Pembukuan	56.853.098.615,30	
Reklas	28.813.526.550,00	
Jumlah Mutasi Kredit	194.111.323.832,73	
Kenaikan/(Penurunan)		60.148.459.695,40
Saldo Akhir Nilai Bersih		1.216.523.986.082,18

Mutasi debet berupa Koreksi Pembukuan sebesar Rp56.397.358.631,30 terdapat pada 2 SKPD yaitu BPKAD sebesar Rp42.880.845.273,30 dan DPUPR sebesar Rp13.516.813.342,00. Sebagian besar reklas kredit tanah merupakan reklas ke properti investasi berupa tanah.

Didalam aset Tanah sebesar Rp Rp1.216.523.986.082,18, belum termasuk Tanah hasil sita tindak pidana korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst atas tindak pidana korupsi tanggal 17 Januari 2023 yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara seluas 120.000 m².

2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.350.752.570.253,95 meningkat sebesar Rp100.417.525.119,96 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.250.335.045.133,99. Dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 94
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2024

Uraian	Nominal	
Saldo Awal Nilai Bersih		1.250.335.045.133,99
Mutasi Debet:		
Belanja Modal	132.027.958.530,00	
Kapitalisasi	456.365.000,00	
Hibah	2.076.293.073,00	
Pindah Antar SKPD	31.892.133.101,86	
Koreksi Pembukuan	2.001.415.350,00	
Utang	1.203.777.457,00	
Reklas	8.425.636.653,16	
Jumlah Mutasi Debet	178.083.579.165,02	
Mutasi Kredit:		
Ekstra Komptabel	28.927.377.818,00	
Hibah	561.812.500,00	
Pindah Antar SKPD	31.892.133.101,86	
Koreksi Pembukuan	4.750.771.800,00	



Uraian	Nominal	
Reklas	11.533.958.825,20	
Jumlah Mutasi Kredit	77.666.054.045,06	
Kenaikan/(Penurunan)		100.417.525.119,96
Saldo Akhir Nilai Bersih		1.350.752.570.253,95

Mutasi berupa Ekstrakomptabel sebesar Rp28.927.377.818,00 terdapat di 24 SKPD, diantaranya :

Tabel 95
Rincian Mutasi Ekstrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

SKPD	Jumlah
DISDIK	28.057.788.305,00
DINKES	241.295.245,00
RSUD	155.960.350,00
DPUPR	11.421.000,00
DPRKP	17.575.000,00
DISNAKERTRANS	34.553.308,00
DKPP	930.000,00
DLH	8.410.000,00
DISDUKCAPIL	15.694.000,00
DISHUB	78.170.000,00
DISKOMINFO	300.000,00
DISKOPERINDAG	77.218.000,00
DPMPTSP	956.000,00
DPKD	3.800.000,00
SETDA	21.362.000,00
SETWAN	28.520.000,00
BAPPEDALITBANG	40.308.000,00
BAPENDA	2.824.000,00
BKPSDM	96.021.110,00
Kec. Mancak	220.000,00
Kec. Tanara	575.000,00
Kec. Tirtayasa	14.000.000,00
Kec. Waringinkurung	14.600.000,00
KESBANGPOL	4.876.500,00
Jumlah	28.927.377.818,00

3. Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.936.962.277.538,26 meningkat sebesar Rp175.261.849.723,84 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.761.700.427.814,42 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 96
Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan 2024

Uraian	Nominal	
Saldo Awal Nilai Bersih		1.761.700.427.814,42





Uraian	Nominal	
Mutasi Debet:		
Belanja Modal	93.613.564.317,00	
Kapitalisasi	27.222.752.881,00	
Pindah Antar SKPD	52.378.854.323,14	
Koreksi Pembukuan	57.258.188.017,00	
Utang	2.584.580.223,00	
Reklas	60.684.747.791,00	
Jumlah Mutasi Debet	293.742.687.552,14	
Mutasi Kredit:		
Pindah Antar SKPD	52.378.854.323,14	
Koreksi Pembukuan	53.895.845.653,00	
Reklas	12.206.137.852,16	
Jumlah Mutasi Kredit	118.480.837.828,30	
Kenaikan/(Penurunan)		175.261.849.723,84
Saldo Akhir Nilai Bersih		1.936.962.277.538,26

Mutasi debit berupa utang sebesar Rp2.584.580.223,00 merupakan Perolehan Gedung dan Bangunan yang masih terutang pada 2 SKPD yakni DINKES sebesar Rp2.386.016.623,00 dan DPUPR sebesar Rp198.563.600,00. Mutasi debit berupa kapitalisasi sebesar Rp27.222.752.881,00 terdiri dari kapitalisasi pada Disdik sebesar Rp20.537.493.582,00, RSUD sebesar Rp1.733.216.976,00, DPUPR sebesar Rp140.726.454,00, DPRKP sebesar Rp73.478.000,00, DKPP sebesar Rp4.312.174.869,00 dan DISKAN sebesar Rp425.663.000,00.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo aset tetap jalan, irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.837.404.473.513,33 meningkat sebesar Rp186.135.957.685,03 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp2.651.268.515.828,30, dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 97
Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 2024

Uraian	Nominal	
Saldo Awal Nilai Bersih		2.651.268.515.828,30
Mutasi Debet:		
Belanja Modal	188.198.027.641,00	
Kapitalisasi	4.256.461.100,00	
Hibah	2.352.178.400,00	
Pindah Antar SKPD	5.557.712.999,00	
Koreksi Pembukuan	106.606.068.247,51	
Reklas	42.946.305.127,05	
Jumlah Mutasi Debet	349.916.753.514,56	
Mutasi Kredit:		
Pindah Antar SKPD	5.557.712.999,00	
Koreksi Pembukuan	105.096.902.856,75	
Reklas	53.126.179.973,78	
Jumlah Mutasi Kredit	163.780.795.829,53	
Kenaikan/(Penurunan)		186.135.957.685,03
Saldo Akhir Nilai Bersih		2.837.404.473.513,33



Mutasi berupa hibah sebesar Rp2.352.178.400,00 terdapat di DPRKP.

Mutasi berupa belanja modal sebesar Rp188.198.027.641,00 terdapat di 4 SKPD yakni DINKES sebesar Rp330.280.400,00, RSUD sebesar Rp1.812.800.000,00, DPUPR sebesar Rp181.886.451.241,00 dan DISHUB sebesar Rp4.168.496.000,00.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.861.374.672,10 meningkat sebesar Rp5.152.298.140,00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp35.709.076.532,10, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 2024

Uraian	Nominal	
Saldo Awal Nilai Bersih		35.709.076.532,10
Mutasi Debet:		
Belanja Modal	12.970.147.048,00	
Kapitalisasi	987.194.024,00	
Koreksi Pembukuan	37.230.000,00	
Reklas	3.729.641.000,00	
Jumlah Mutasi Debet	17.724.212.072,00	
Mutasi Kredit:		
Ekstra Komptabel	12.414.426.928,00	
Koreksi Pembukuan	157.487.004,00	
Jumlah Mutasi Kredit	12.571.913.932,00	
Kenaikan/(Penurunan)		5.152.298.140,00
Saldo Akhir Nilai Bersih		40.861.374.672,10

Mutasi Debet berupa Ekstrakomptabel sebesar Rp12.414.426.928,00 terdapat di 2 SKPD yakni DISDIK sebesar Rp12.362.926.928,00 dan DPKD sebesar Rp51.500.000,00. Mutasi debet reklas sebesar Rp3.729.641.000,00 terdiri dari reklas di DPUPR sebesar Rp3.720.301.000,00 yang merupakan aset tetap renovasi dari jalan dan jembatan dan BKPSDM sebesar Rp9.340.000,00 yang merupakan reklas dari aset lain-lain.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp990.000.000,00 turun sebesar Rp58.182.336.328,00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp59.172.336.328,00, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 99
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 2024

Uraian	Nominal	
Saldo Awal Nilai Bersih		59.172.336.328,00
Mutasi Debet:		



Uraian	Nominal	
Reklas	990.000.000,00	
Jumlah Mutasi Debet	990.000.000,00	
Mutasi Kredit:		
Reklas	59.172.336.328,00	
Jumlah Mutasi Kredit	59.172.336.328,00	
Kenaikan/(Penurunan)		(58.182.336.328,00)
Saldo Akhir Nilai Bersih		990.000.000,00

7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.181.830.240.015,49 meningkat sebesar Rp323.174.198.253,09 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp2.858.656.041.762,40 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 100
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan 2024

Uraian	Nominal	
Saldo Awal Nilai Bersih		(2.858.656.041.762,40)
Mutasi Debet:		
Hibah	149.875.000,00	
Pindah Antar SKPD	11.968.249.398,31	
Koreksi Pembukuan	100.291.904.280,64	
Reklas	12.991.987.694,80	
Jumlah Mutasi Debet	125.402.016.373,75	
Mutasi Kredit:		
Pindah Antar SKPD	11.968.249.398,31	
Beban Penyusutan	301.980.852.140,68	
Koreksi Pembukuan	115.518.942.367,52	
Reklas	19.108.170.720,33	
Jumlah Mutasi Kredit	448.576.214.626,84	
Kenaikan/(Penurunan)		(323.174.198.253,09)
Saldo Akhir Nilai Bersih		(3.181.830.240.015,49)

Sementara untuk daftar akumulasi penyusutan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 101
Daftar Akumulasi Penyusutan Per SKPD 2024

No	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
1	DISDIK	(869.692.956.054,63)	(816.744.449.613,08)	(52.948.506.441,55)
2	DINKES	(175.434.716.539,34)	(160.748.175.451,73)	(14.686.541.087,61)
3	RSUD	(252.322.050.669,76)	(229.755.657.363,24)	(22.566.393.306,52)
4	DPUPR	(1.389.895.876.843,70)	(1.192.933.516.850,98)	(196.962.359.992,72)
5	DPRKP	(39.069.206.196,49)	(34.921.479.796,04)	(4.147.726.400,45)
6	SATPOL PP	(3.768.615.741,32)	(3.591.706.707,89)	(176.909.033,43)
7	BPBD	(22.247.162.662,02)	(21.517.604.695,49)	(729.557.966,53)



No	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
8	DINSOS	(9.656.144.570,36)	(9.017.265.684,41)	(638.878.885,95)
9	DISNAKERTRANS	(7.523.779.241,41)	(5.275.778.283,72)	(2.248.000.957,69)
10	DKPP	(32.871.166.603,31)	(29.602.126.480,01)	(3.269.040.123,30)
11	DLH	(29.043.465.608,45)	(21.575.138.932,94)	(7.468.326.675,51)
12	DISDUKCAPIL	(12.193.230.174,30)	(11.210.874.404,67)	(982.355.769,63)
13	DPMD	(3.353.246.296,75)	(3.276.989.050,56)	(76.257.246,19)
14	DKBP3A	(11.976.514.888,10)	(11.357.302.440,97)	(619.212.447,13)
15	DISHUB	(63.177.369.986,41)	(60.120.682.334,76)	(3.056.687.651,65)
16	DISKOMINFO	(5.457.108.840,11)	(4.889.025.936,52)	(568.082.903,59)
17	DISKOPERINDAG	(22.799.754.364,92)	(19.497.906.708,07)	(3.301.847.656,85)
18	DPMPTSP	(8.814.259.884,68)	(7.999.506.404,86)	(814.753.479,82)
19	DISPORAPAR	(4.462.547.074,44)	(4.175.481.487,86)	(287.065.586,58)
20	DPKD	(5.285.360.956,15)	(4.646.472.563,74)	(638.888.392,41)
21	DISKAN	(26.979.494.847,11)	(26.119.234.838,25)	(860.260.008,86)
22	SEKDA	(58.097.034.632,76)	(57.548.077.015,29)	(548.957.617,47)
23	SETWAN	(15.860.089.493,52)	(16.477.287.808,53)	617.198.315,01
24	BAPPEDA LITBANG	(4.646.366.428,00)	(4.387.994.885,24)	(258.371.542,76)
25	BAPENDA	(17.264.030.484,51)	(16.488.234.211,03)	(775.796.273,48)
26	BPKAD	(8.985.585.549,23)	(8.781.707.463,36)	(203.878.085,87)
27	BKPSDM	(7.156.126.873,20)	(6.060.669.156,76)	(1.095.457.716,44)
28	Inspektorat daerah	(7.516.999.214,17)	(7.205.565.793,30)	(311.433.420,87)
29	Kec. Anyar	(3.295.784.890,14)	(3.012.838.275,98)	(282.946.614,16)
30	Kec. Bandung	(1.469.837.708,84)	(1.371.941.799,20)	(97.895.909,64)
31	Kec. Baros	(1.724.219.709,92)	(1.661.246.983,91)	(62.972.726,01)
32	Kec. Binuang	(1.786.399.900,36)	(1.732.628.486,66)	(53.771.413,70)
33	Kec. Bojonegara	(1.511.342.072,80)	(1.435.579.514,86)	(75.762.557,94)
34	Kec. Carenang	(1.464.551.135,34)	(1.401.605.454,04)	(62.945.681,30)
35	Kec. Cikande	(4.525.229.442,36)	(4.309.895.460,10)	(215.333.982,26)
36	Kec. Cikeusal	(2.138.111.582,06)	(1.819.700.402,74)	(318.411.179,32)
37	Kec. Cinangka	(2.236.664.408,73)	(2.132.470.499,75)	(104.193.908,98)
38	Kec. Ciomas	(1.907.235.514,48)	(1.703.751.912,82)	(203.483.601,66)
39	Kec. Ciruas	(3.124.531.128,50)	(3.066.031.756,53)	(58.499.371,97)
40	Kec. Gunungsari	(2.013.898.867,47)	(1.926.979.361,41)	(86.919.506,06)
41	Kec. Jawilan	(1.825.698.975,57)	(1.757.743.137,70)	(67.955.837,87)
42	Kec. Kibin	(3.199.784.371,07)	(3.152.986.087,02)	(46.798.284,05)
43	Kec. Kopo	(1.604.903.240,74)	(1.532.063.241,67)	(72.839.999,07)
44	Kec. Kragilan	(3.346.576.237,92)	(3.108.923.062,87)	(237.653.175,05)
45	Kec. Kramatwatu	(4.381.665.362,33)	(4.188.283.380,87)	(193.381.981,46)
46	Kec. Lebak Wangi	(1.456.639.337,71)	(1.409.050.592,57)	(47.588.745,14)
47	Kec. Mancak	(1.293.870.862,80)	(1.186.600.669,20)	(107.270.193,60)
48	Kec. Pabuaran	(2.454.291.398,44)	(2.223.818.777,41)	(230.472.621,03)
49	Kec. Padarincang	(2.113.226.044,87)	(1.864.472.954,96)	(248.753.089,91)
50	Kec. Pamarayan	(1.967.821.018,16)	(1.903.546.122,06)	(64.274.896,10)



No	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
51	Kec. Petir	(1.424.779.689,29)	(1.393.494.584,41)	(31.285.104,88)
52	Kec. Pontang	(3.409.882.920,25)	(3.279.920.835,37)	(129.962.084,88)
53	Kec. Pulo ampel	(1.902.793.678,36)	(1.867.550.047,16)	(35.243.631,20)
54	Kec. Tanara	(1.827.873.252,00)	(1.631.202.721,18)	(196.670.530,82)
55	Kec. Tirtayasa	(1.747.121.252,41)	(1.543.987.812,06)	(203.133.440,35)
56	Kec. Tunjung Teja	(1.911.044.355,11)	(1.803.371.745,26)	(107.672.609,85)
57	Kec. Waringinkurung	(2.133.883.842,64)	(1.896.345.078,33)	(237.538.764,31)
58	KESBANGPOL	(1.080.317.095,67)	(1.412.098.641,00)	331.781.545,33
Jumlah		(3.181.830.240.015,49)	(2.858.656.041.762,40)	(323.174.198.253,09)

8. Penjelasan Tambahan Terkait Aset Tetap

Penjelasan terkait aset tetap tanah yang telah dilakukan sertifikasi tahun 2024 dapat terlihat pada daftar berikut:

Tabel 102
Objek Tanah yang Tersertifikasi pada Tahun 2024

No	Letak Tanah		Hak Pakai No	Nomor Seri Blangko	Luas (M ²)	Penggunaan	Nilai Perolehan
	Desa	Kelurahan					
1	Desa Mancak	Mancak	12	A7026578	343	Rumah Dinas Paramedis & Bidan Puskesmas Mancak	10.530.000,00
2	Desa Batukuda	Batukuda	11	A3067114	143	Polindes Batukuda	240.000,00
3	Desa Singarajan	Singarajan	3	AB0390045	936	Aula (Eks Puskesmas Lama/Eks Pustu Pontang)	9.295.000,00
4	Desa Tirtayasa	Tirtayasa	10	A3066886	1.741	Puskesmas Tirtayasa	9.967.100,00
5	Desa Argawana	Argawana	3	AB0390048	1130	SDN Cikubang	32.860.000,00
6	Desa Sumuranja	Sumuranja	8	A0971327	1.044	SDN Sumuranja 1	9.632.000,00
7	Desa Mangunreja	Mangunreja	4	AB0390046	640	SDN Cibaga 2	2.740.000,00
8	Desa Pulo Panjang	Pulo Panjang	11	A3067331	6.570	SDN Pulo Panjang 1	12.250.000,00
9	Desa Gosara	Gosara	3	AB0390062	1.335	SDN Gosara	7.030.000,00
10	Desa Kadikaran	Kadikaran	9	A0973039	1.222	SDN Kadikaran	22.680.000,00
11	Desa Kepandean	Kepandean	10	A3066893	2.190	SDN Kepandean	19.662.500,00
12	Desa Beberan	Beberan	1	AB0390079	1.521	SDN Beberan 2	45.420.000,00
13	Desa Ranjeng	Ranjeng	10	A3066883	3.147	SDN Ciruas 4	12.584.000,00
14	Desa Kepandean	Kepandean	11	A3067110	1.694	SDN Pacet	8.900.000,00
15	Desa Cigelam	Cigelam	10	A3066894	1.480	SDN Kesampangan	13.813.800,00
16	Desa Ciruas	Ciruas	10	A3062288	1.562	SDN Cembah	8.750.000,00
17	Desa Serdang	Serdang	10	A3066890	2.113	SDN Serdang 1	160.474.000,00
18	Desa Toyomerto	Toyomerto	8	A0969799	1036	SDN Toyomerto 1	21.000.000,00
19	Desa Serdang	Serdang	10	A3066888	1.830	SDN Serdang 2	105.600.000,00
20	Desa Toyomerto	Toyomerto	11	A3067113	1.693	SDN Krapyak	14.300.000,00
21	Desa Tonjong	Tonjong	3	AB0390030	1608	SDN Tonjong	17.875.000,00
22	Desa Pejaten	Pejaten	8	A0969892	1.909	SDN Giripada	72.000.000,00
23	Desa Melati	Melati	9	A0973041	1.095	SDN Melati 1	12.640.000,00
24	Desa Suka Dalem	Sukadalem	3	AB0390033	1.946	SDN Sukadalem 1	77.640.000,00



No	Letak Tanah		Hak Pakai No	Nomor Seri Blangko	Luas (M ²)	Penggunaan	Nilai Perolehan
	Desa	Kelurahan					
25	Desa Sasahan	Sasahan	10	A3066889	1.570	SDN Sasahan 2	41.100.000,00
26	Desa Suka Dalem	Sukadalem	12	A7026584	2.019	SDN Bojong	48.450.000,00
27	Desa Melati	Melati	12	A7026585	1680	SDN Melati 4	69.750.000,00
28	Desa Sukabares	Sukabares	11	A3067104	1.659	SDN Sukabares	28.500.000,00
29	Desa Suka Dalem	Sukadalem	11	A3067101	1674	SDN Gegeneng	27.075.000,00
30	Desa Bojonegara	Bojonegara	12	A7026403	1.596	SDN Bojonegara 1	29.760.000,00
31	Desa Bojonegara	Bojonegara	12	A7026395	1422	SDN Bojonegara 3	12.100.000,00
32	Desa Margagiri	Margagiri	12	A7025489	1506	SDN Baketor	16.040.000,00
33	Desa Margagiri	Margagiri	12	A7026401	1269	SDN Solor	24.000.000,00
34	Desa Ukirsari	Ukirsari	12	A7025487	917	SDN Dukuhmalang	19.080.000,00
35	Desa Pakuncen	Pakuncen	12	A7025493	1.287	SDN Kalilanang 1	6.670.000,00
36	Desa Pangarengan	Pengarengan	12	A7025494	1321	SDN Pangarengan	3.675.000,00
37	Desa Kragilan	Kragilan	4	AB0390040	3126	SDN Kragilan 1	630.400.000,00
38	Desa Kragilan	Kragilan	4	AB0390061	1206	SDN Kragilan 2	60.000.000,00
39	Desa Sukajadi	Sukajadi	12	A7026571	992	SDN Silebu 1	15.300.000,00
40	Desa Jeruk Tipis	Jeruk Tipis	12	A7026573	1240	SDN Jeruk Tipis 2	7.891.098,00
41	Desa Pontang	Pontang	11	A3067330	1140	SDN Serandakan	49.320.000,00
42	Desa Singarajan	Singarajan	5	A0969001	2224	SDN Pontang 1	36.069.397,59
43	Desa Domas	Domas	11	A3067118	1.493	SDN Cerocoh	7.500.000,00
44	Desa Kaserangan	Kaserangan	11	A3067119	1108	SDN Kalopian 1	11.440.000,00
45	Desa Kaserangan	Kaserangan	10	A3066915	1.314	SDN Pecakur	40.500.000,00
46	Desa Kubang Puji	Kubang Puji	11	A3067117	667	SDN Kubangbahad	6.256.250,00
47	Desa Lontar	Lontar	10	A3066887	543	SDN Lontar 1	5.960.000,00
48	Desa Sujung	Sujung	3	AB0390053	794	SDN Sujung 1	2.324.000,00
49	Desa Lontar	Lontar	3	AB0390035	1.198	SDN Lontar 2	4.860.000,00
50	Desa Laban	Laban	3	AB0390052	1.659	SDN Tirtayasa 2	8.475.000,00
51	Desa Susukan	Susukan	12	A7026576	1.831	SDN Sampang	115.929.450,00
52	Desa Susukan	Susukan	3	AB0390026	2.225	SDN Eretan	88.200.000,00
53	Desa Pedaleman	Pedaleman	1	AB0390050	825	SDN Tanara 1	1.545.000,00
54	Desa Sukamanah	Sukamanah	12	A7026574	1.128	SDN Sukamaneh 1	8.250.000,00
55	Desa Pedaleman	Pedaleman	10	A3066881	1.557	SDN Pesisir	2.000.000,00
56	Desa Sukamanah	Sukamanah	12	A7026575	1.643	SDN Sukamaneh 2	10.000.000,00
57	Desa Lempuyang	Lempuyang	9	A0973042	1.033	SDN Gusguntur	3.000.000,00
58	Desa Parigi	Parigi	12	A7026393	1.818	SDN Kukun	31.666.350,00
59	Desa Koper	Koper	11	A3067103	1.693	SDN Koper 1	15.399.997,00
60	Desa Koper	Koper	11	A3067375	1.867	SDN Koper 2	45.900.000,00
61	Desa Leuwi Limus	Leuwi Limus	3	AB0390086	2.050	SDN Sumurhejo	13.350.000,00
62	Desa Siturate	Siturate	9	A0973043	1.242	SDN Siturate	8.844.550,00
63	Desa Nambo Udik	Nambo Udik	3	AB0390042	1.149	SDN Namboudik 1	7.545.450,00
64	Desa Nambo Udik	Nambo Udik	3	AB0390041	942	SDN Namboudik 2	2.100.000,00
65	Desa Songgomjaya	Songgom Jaya	12	A7026405	1293	SDN Songgom Jaya	1.250.000,00
66	Desa Koper	Koper	12	A1026392	2.042	SDN Keramatjati	19.517.020,00
67	Desa Gembor Udik	Gembor Udik	12	A7026402	1155	SDN Kibabang	4.151.781,00



No	Letak Tanah		Hak Pakai No	Nomor Seri Blangko	Luas (M ²)	Penggunaan	Nilai Perolehan
	Desa	Kelurahan					
68	Desa Sukatani	Sukatani	3	AB0390075	1597	SDN Kalutuk	45.000.000,00
69	Desa Sukamaju	Sukamaju	3	AB0390018	2104	SDN Sukamaju	2.400.000,00
70	Desa Barengkok	Barengkok	1	ABM465253	1065	SDN Nambo Ilir	11.500.000,00
71	Desa Nagara	Nagara	3	AB0390017	2223	SDN Patapan	1.800.000,00
72	Desa Nambo Ilir	Nambo Ilir	1	ABM465252	1645	SDN Panebong	13.500.000,00
73	Desa Mekarsari	Mekarsari	11	A3067333	2163	SDN Carenang 2	5.880.000,00
74	Desa Teras	Teras	8	A0971333	2149	SDN Teras 1	12.407.500,00
75	Desa Teras	Teras	1	AB0390087 dan AB0390088	1122	SDN Teras 2	1.100.000,00
76	Desa Ragasmasigit	Ragas Masigit	8	A0969798	1490	SDN Ragas 1	3.780.000,00
77	Desa Ragasmasigit	Ragas Masigit	8	A0971328	1340	SDN Ragas 3	43.200.000,00
78	Desa Cakung	Cakung	12	A7026581	1805	SDN Cakung	6.200.180,00
79	Desa Bojong Nangka	Bojong Nangka	11	A3067111	2619	SDN Sanding 1	13.000.000,00
80	Desa Panunggulan	Panunggulan	11	A3067116	925	SDN Panunggulan 1	5.145.000,00
81	Desa Sukasari	Sukasari	1	AB0390043	1644	SDN Sukamanah	63.840.000,00
82	Desa Bojong Menteng	Bojong Menteng	1	AB0390068	2045	SDN Bojongkondang	2.940.000,00
83	Desa Kemuning	Kemuning	3	AB0390027	779	SDN Caringin	4.370.000,00
84	Desa Bojong Pandan	Bojong Pandan	1	AB0390028	1580	SDN Bojong Pandan	241.476.959,00
85	Desa Sukasari	Sukasari	8	A0969866	1509	SDN Panunggulan 3	6.000.000,00
86	Desa Malanggah	Malanggah	11	A3067120	669	SDN Malanggah 2	1.225.000,00
87	Desa Bojong Menteng	Bojong Menteng	9	A0971723	1062	SDN Cilandak	9.702.000,00
88	Desa Panunggulan	Panunggulan	11	A3067102	1450	SDN Pabuaran	3.185.000,00
89	Desa Kemuning	Kemuning	11	A3067109	2089	SDN Kamuning	12.500.000,00
90	Desa Bojong Pandan	Bojong Pandan	1	AB0390069	1638	SDN Kemang	4.410.000,00
91	Desa Sinarmukti	Sinarmukti	11	A7067332	1694	SDN Parung Sentul	7.175.000,00
92	Desa Sukaratu	Sukaratu	12	A7026583	3521	SDN Cikeusal 1	77.880.000,00
93	Desa Panyabrangan	Panyabrangan	12	A7025488	1875	SDN Panyabrangan	22.450.000,00
94	Desa Sukarame	Sukarame	11	A3067337	1414	SDN Cimaung 4	3.150.000,00
95	Desa Cilayang	Cilayang	10	A3066895	1997	SDN Cibogo	7.472.500,00
96	Desa Cimaung	Cimaung	10	A3066891	1490	SDN Pabuaran	600.000,00
97	Desa Pudar	Pudar	10	A3066884	2774	SDN Lameta	2.100.000,00
98	Desa Wirana	Wirana	9	A0971722	2979	SDN Wirana Pasir	4.554.000,00
99	Desa Nyompok	Nyompok	8	A0969896	953	SDN Nyompok 2	4.705.000,00
100	Desa Carenang Udik	Carenang Udik	8	A0969867	1560	SDN Bojongneros	8.400.000,00
101	Desa Garut	Garut	12	A7025495	908	SDN Garut 1	5.130.000,00
102	Desa Rancasumur	Rancasumur	12	A7026396	1590	SDN Garut 2	5.292.000,00
103	Desa Cidahu	Cidahu	5	AB0390020	1812	SDN Cidahu 2	14.314.300,00
104	Desa Nanggung	Nanggung	12	A7026397	2963	SDN Nanggung 2	12.800.000,00
105	Desa Gabus	Gabus	10	A3066882	1764	SDN Gabus 3	16.100.000,00
106	Desa Kopo	Kopo	8	A0969895	1437	SDN Rancondo	10.000.000,00
107	Desa Garut	Garut	12	A7026398	1365	SDN Rancagoong	8.589.400,00
108	Desa Pasirbuyut	Pasirbuyut	9	A0973040	1301	SDN Pasirbuyut 1	8.580.000,00
109	Desa Parakan	Parakan	4	AB0390080	2248	SDN Parodot	19.166.000,00
110	Desa Siketug	Siketug	11	A3067334	480	SDN Siketug 1	15.000.000,00



No	Letak Tanah		Hak Pakai No	Nomor Seri Blangko	Luas (M ²)	Penggunaan	Nilai Perolehan
	Desa	Kelurahan					
111	Desa Pondok Kaharu	Pondok Kahuru	1	AB0394550	791	SDN Pancur	4.795.000,00
112	Desa Citaman	Citaman	3	AB0390081	982	SDN Gunung Sumbul	4.576.000,00
113	Desa Siketug	Siketug	12	A7025491	1703	SDN Siketug 2	7.000.000,00
114	Desa Citaman	Citaman	3	AB0390082	1832	SDN Pondok Kahuru	6.545.000,00
115	Desa Kadubeureum	Kadu Beureum	3	AB0390057	1639	SDN Kadubeureum 2	12.097.800,00
116	Desa Sindangsari	Sindangsari	3	AB0390059	1615	SDN Rancalutung	14.786.200,00
117	Desa Pasanggrahan	Pasanggrahan	3	AB0390058	1606	SDN Pasanggrahan	4.200.000,00
118	Desa Tanjungsari	Tanjungsari	8	A0971332	1379	SDN Kadukacapi	7.875.000,00
119	Desa Tanjungsari	Tanjung Sari	12	A7025496	1424	SDN Tanjung Kulon	9.500.000,00
120	Desa Citasuk	Citasuk	10	A3066885	755	SDN Sukamaju	2.026.500,00
121	Desa Barugbug	Barugbug	4	AB00390056	1180	SDN Kubangingas	4.186.000,00
122	Desa Citasuk	Citasuk	12	A7026586	1559	SDN Cilengo	12.297.600,00
123	Desa Batu Kuwung	Batu Kuwung	5	AB0390054	1274	SDN Suarna	33.040.000,00
124	Desa Cipayung	Cipayung	10	A3066892	1101	SDN Anyar	27.540.000,00
125	Desa Cibojong	Cibojong	11	A3067336	1599	SDN Cibawang	6.300.000,00
126	Desa Mekarsari	Mekarsari	12	A7026399	400	Kantor UPTD Pendidikan Kec. Anyar	13.176.000,00
127	Desa Anyar	Anyar	1	ABM465240	1604	SDN Anyar 1	247.050.000,00
128	Desa Anyar	Anyar	1	ABM465241	1448	SDN Anyar 2	202.000.000,00
129	Desa Cikoneng	Cikoneng	4	AB0390077	2100	SDN Tegal	15.435.000,00
130	Desa Bandulu	Bandulu	11	A3067874	1017	SDN Cirunten	46.095.000,00
131	Desa Sindangkarya	Sindang Karya	1	AB0394551	799	SDN Siring	27.860.000,00
132	Desa Cikoneng	Cikoneng	1	ABM465242	1986	SDN Cisiram	52.500.000,00
133	Desa Tanjung Manis	Tanjung Manis	5	ABM465239	1273	SDN Pematang Waringin	6.510.000,00
134	Desa Kosambironyok	Kosambironyok	1	ABM465238	2459	SDN Pasarsore	87.500.000,00
135	Desa Winong	Winong	3	AB0390070	538	SDN Winong	752.150,00
136	Desa Mancak	Mancak	3	AB0390067	2372	SDN Saraga	7.350.000,00
137	Desa Talaga	Talaga	3	AB0390078	1105	SDN Talun 2	1.960.000,00
138	Desa Waringin	Waringin	8	A0971330	1137	SDN Cingeunah	2.834.650,00
139	Desa Kamasan	Kamasan	3	AB0390073	1263	SDN Pematang Warung	6.950.000,00
140	Desa Umbul Tanjung	Umbul Tanjung	1	ABM465247	1223	SDN Cikokol	2.790.550,00
141	Desa Bantar Wangi	Bantar Wangi	1	ABM465244	1051	SDN Bantarwaru	6.050.000,00
142	Desa Kubang Baros	Kubang Baros	8	A0969894	1412	SDN Cibawang	1.387.200,00
143	Desa Mekarsari	Mekarsari	3	AB0390074	1495	SDN Kamboja	5.282.400,00
144	Desa Baros Jaya	Baros Jaya	8	A0969893	890	SDN Mendong	1.397.088,00
145	Desa Cinangka	Cinangka	1	ABM465243	1009	SDN Cinangka 3	4.500.000,00
146	Desa Karang Suraga	Karang Suraga	1	ABM465245	1961	SDN Kosambi	36.316.000,00
147	Desa Bulakan	Bulakan	9	A0971724	1901	SDN Cikondang	10.755.000,00
148	Desa Bantar Waru	Bantarwaru	11	A3067872	2135	SDN Dangdeur	7.500.000,00
149	Desa Blokan	Blokan	3	AB0390093	1407	SDN Blokan	7.210.000,00
150	Desa Babakan	Babakan	3	AB0390092	2839	SDN Palamakan 2	15.329.600,00
151	Desa Pringwulung	Palamakan	1	AB0390091	621	SDN Palamakan 1	2.625.000,00
152	Desa Gunungsari	Gunungsari	3	NIBEL 28.01.000000002.0	1922	SDN Gunungsari 1	19.140.000,00



No	Letak Tanah		Hak Pakai No	Nomor Seri Blangko	Luas (M ²)	Penggunaan	Nilai Perolehan
	Desa	Kelurahan					
153	Desa Tamiang	Tamiang	12	A7025490	1058	SDN Sukalaba 2	7.500.000,00
154	Desa Luwuk	Luwuk	12	A7025336	1710	SDN Luwuk	2.500.000,00
155	Desa Kendayakan	Kendayakan	12	A7026572	8266	SMPN 3 KRAGILAN	310.000.000,00
156	Desa Kubang Puji	Kubang Puji	8	A0970333	8399	SMPN 2 PONTANG	50.000.000,00
157	Desa Tirtayasa	Tirtayasa	3	AB0390034	8065	SMPN 1 TIRTAYASA	287.560.000,00
158	Desa Mander	Mander	3	ABM465255	8712	SMPN 1 BANDUNG	50.000.000,00
159	Desa Sukaratu	Sukaratu	12	A7026394	6149	SMPN 1 CIKEUSAL	28.500.000,00
160	Desa Wanakarta	Wanakarta	3	AB0390089	6761	SMPN 2 BOJONEGARA	120.250.000,00
161	Desa Garut	Garut	11	A3067873	5862	SMPN 1 KOPO	21.000.000,00
162	Desa Siketug	Siketug	12	A7026579	6140	SMPN 2 CIOMAS	282.800.000,00
163	Desa Malabar	Malabar	11	A3067875	9486	SMPN 2 BANDUNG	550.000.000,00
164	Desa Teras Bendung	Teras Bendung	11	A3067112	1449	SDN Teras Bendung 3	10.000.000,00
165	Desa Panyaungan Jaya	Panyaungan Jaya	12	A7025492	2074	Kantor Camat Ciomas	9.000.000,00
166	Desa Lebak Wangi	Lebakwangi	2	AB0394549	11920	Kantor Camat Lebak Wangi	1.577.601.455,00
167	Desa Kubang Baros	Kubang Baros	8	A0969891	6021	SMPN 2 CINANGKA	18.000.000,00
168	Desa Tejamari	Tejamari	12	A7026577	1202	SDN Pasir	3.206.115,00
169	Desa Mekarsari	Mekarsari	12	A7026582	393	SDN Careng 1	2.475.000,00
170	Desa Sindangmandi	Sindangmandi	10	A3062289	437	Pustu Sindang Mandi	2.145.000,00
171	Desa Lamaran	Lamaran	12	A7026580	200	Poskesdes Lamaran	13.000.000,00
172	Desa Kamasan	Cinangka	8	A0971331	486	Pustu Sirih	5.260.000,00
173	Desa Pasauran	Pasauran	1	ABM465251	361	Pustu Pasauran	56.000.000,00
174	Desa Cinangka	Cinangka	8	A0971329	163	Poskesdes Cinangka	8.250.000,00
175	Desa Wirana	Wirana	8	A0970329	291	Pustu Wirana	1.500.000,00
176	Desa Tambiluk	Tambiluk	10	A3060175	124	Poskesdes Tambiluk	16.988.000,00
177	Desa Kencana Harapan	Kencana Harapan	4	AB0390071	500	Pustu Kencana Harapan	2.145.000,00
178	Desa Sasahan	Sasahan	11	A3067105	169	Pustu Sasahan	1.470.000,00
179	Desa Melati	Melati	10	A3060174	276	Pustu Melati	1.500.000,00
180	Desa Gunungsari	Gunungsari	1	ABO394348	14060	FASOS FASUM Kec. Gunung Sari	2.960.382.000,00
181	Desa Kramatwatu	Kramatwatu	11	A3067871	79	Rumah Dinas SDN Kramatwatu 1	2.922.221,00
182	Desa Dukuh	Dukuh	1	ABO390021	690	SDN Dukuh 1 (Bidang 1)	1.580.858,00
183	Desa Lontar	Lontar	3	AB0390025	653	SDN Lontar 3 (Bidang 2)	3.186.473,00
184	Desa Lontar	Lontar	3	AB0390024	443	SDN Lontar 3 (Bidang 1)	2.161.727,00
185	Desa Kramatwatu	Kramatwatu	8	A0970331	1613	SDN Gempol	58.617.000,00
186	Desa Kramatwatu	Kramatwatu	3	AB0390044	129	Rumah Dinas SDN Gempol	3.483.000,00
187	Desa Kubang Jaya	Kubang Jaya	9	A0973038	676	SDN Ciburuy (Bidang 1)	6.714.238,00
188	Desa Kubang Jaya	Kubang Jaya	5	AB0390065	686	SDN Ciburuy (Bidang 2)	6.813.562,00
189	Desa Salira	Salira	12	A7026404	264	SDN Sumurlubang (Bidang 2)	2.514.000,00
190	Desa Cikolelet	Cikolelet	8	A0970330	431	SDN Cikolelet (Bidang 1)	14.965.278,00
191	Desa Cikolelet	Cikolelet	3	AB0390084	289	SDN Cikolelet (Bidang 2)	10.034.722,00



No	Letak Tanah		Hak Pakai No	Nomor Seri Blangko	Luas (M ²)	Penggunaan	Nilai Perolehan
	Desa	Kelurahan					
192	Desa Pagintungan	Pagintungan	8	A0969567	546	SDN Pagintungan (Bidang 1)	7.350.000,00
193	Desa Kubang Puji	Kubang Puji	10	A3066896	407	SDN Kubangpuji 1 (Bidang 1)	2.768.100,00
194	Desa Kubang Puji	Kubang Puji	8	A0970332	75	SDN Kubangpuji 1 (Bidang 2)	1.050.000,00
195	Desa Kebonratu	Kebonratu	12	A7026400	491	Rumah Dinas SDN Warakas	3.985.000,00
196	Desa Lebak	Lebak	11	A3067115	501	SDN Peundeuy (Bidang 2)	1.500.000,00
197	Desa Cilayang	Cilayang	11	A3067106	114	Rumah Dinas SDN Cilayang 2	1.034.500,00
198	Desa Mongpok	Mongpok	11	A3067107	1400	SDN Mongpok 3	14.957.500,00
199	Desa Mongpok	Mongpok	11	A3067108	239	Rumah Dinas SDN Mongpok 3	2.560.000,00
200	Desa Margasari	Margasari	9	A0973044	1780	SDN Margasari (Bidang 1)	30.700.000,00

Secara keseluruhan dari total tanah sebanyak 1.890 bidang yang telah tersertifikasi sampai dengan tahun 2024, sedangkan yang belum tersertifikasi sebanyak 1.067 bidang. Upaya Pemerintah Kabupaten Serang percepatan proses sertifikasi ini dengan menjalin kesepakatan dengan Nomor 02/SKB/V/2019 dan Nomor 170/MOU.07-HUK/2019 antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tentang Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pertanahan di Kabupaten Serang. Yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 024/35/BPKAD/2019 dan Nomor 253/SKB-36.04/V/2019 antara BPKAD dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tentang Percepatan Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serang.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di atas dibentuk tim Percepatan Proses Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Serang tahun 2024 dengan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 590/Kep.110-Huk.BPKAD/2024.

Tabel 103
Rincian Kendaraan Bermotor Pinjam Pakai Aktif

No	Nama Barang	Merk/ Tipe	Uraian	Tgl. Akhir Pemanfaatan
1	Mobil Ambulance	Daihatsu Gran Max MB 1.3 FF FH	Pinjam Pakai Kendaraan Ambulance Ke Desa Kemuning Kecamatan Tunjung Teja	04/06/2027
2	Jeep	Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4X2 A/T	Pinjam Pakai KDO TA. 2024	19-11-2029
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	New Kijang Innova 2.0 G A/T Vin 2020	Pinjam pakai dengan Kantor Kementrian Agama Kab. Serang	03/11/2025
4	Sport Utility Vehicle (SUV)	Mitsubishi Pajero Sport 2.4L DAKAR -H (4X2) 8 A/T VIN 2018	Pinjam Pakai Ke KEJARI Serang	27-12-2028
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	JL. Ki Tapa No. 33 Serang Kota Serang	Pinjam Pakai Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Serang	24-09-2026
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Ki Tapa No. 33 Cimuncang Kota Serang	Pinjam Pakai Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Serang	24-09-2026
7	Bangunan Gudang	JL. Samaun Bakri Lopang	Pinjam Pakai Bangunan	24-09-2026



No	Nama Barang	Merk/ Tipe	Uraian	Tgl. Akhir Pemanfaatan
	Tertutup Permanen	Kota Serang	Milik Pemerintah Kabupaten Serang	
8		JL. Ki Tapa No. 33 Serang Kota Serang	Pinjam Pakai Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Serang	24-09-2026

Tabel 104
Kendaraan Pinjam Pakai Masa Habis

No	Nama Barang	Merk/ Tipe	Uraian	Tgl. Akhir Pemanfaatan
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Innova E M/T	Pinjam Pakai Ke Kementrian Agama	01/02/2023
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	-	Pinjam Pakai Ke Kominda	12/03/2023
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	-	Pinjam Pakai ke PTUN	12/03/2023
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daihatsu / Xenia F650RV-GMDFJ (4X2) M/T	Pinjam Pakai Ke KPU	12/03/2023
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	-	Pinjam Pakai KE PMI	12/03/2023
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	-	Pinjam Pakai Ke Kominda	12/03/2023
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Avanza	Pinjam Pakai dengan BAKORINDA	12/03/2023
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	-	Pinjam Pakai Ke PMI	12/03/2023
9	Pick Up	NISSAN NEW NAVARA 2.5 Mid (4x4) M/T	Pinjam Pakai dengan SATBRIMOBDA	12/03/2023
10	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA / Kijang LGX Grand Long KF 83	Pinjam Pakai Ke Kejaksaan Negeri Serang	12/04/2023
11	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	-	Pinjam Pakai ke Kodim 0622 Serang	14-12-2023
12	Station Wagon	-	Pinjam Pakai Ke Kapolres Serang Kota	14-11-2023
13	Station Wagon	-	Pinjam Pakai Ke Polres Kab. Serang	11/01/2023
14	Sport Utility Vehicle (SUV)	-	Pinjam Pakai KODIM 0623 Cilegon	14-11-2023
15	Sepeda Motor	-	Pinjam Pakai Ke KPU Kab.Serang	27-12-2023
16	Sepeda Motor	-	Pinjam Pakai Ke KPU Kab.Serang	27-12-2023
17	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER VIN 2018	Pinjam Pakai Ke Kapolres Serang Cilegon	11/01/2023
18	Station Wagon	Toyota Kijang / Super Long/KF 83 Bensin	Pinjam Pakai Ke IPI	12/03/2023
19	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	-	Pinjam Pakai ke KEMENAG	26-02-2020

Pinjam pakai kendaraan habis masa tersebut dalam proses perpanjangan kontrak dengan pihak terkait.

5.7.4. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan jenis aset selain aset lancar dan aset tetap, yang termasuk dalam aset ini antara lain tuntutan perbendaharaan, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain, angka tahun 2024 sebesar Rp304.328.131.913,40 naik sebesar Rp20.809.867.658,27 jika dibandingkan pada tahun 2023 sebesar Rp283.518.264.255,13.



Tabel 105
Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.034.936.771,00	7.452.459.271,00	(1.417.522.500,00)
3	Aset Tak Berwujud	88.588.985.825,00	58.336.328.114,00	30.252.657.711,00
4	Akumulasi Amortisasi ATB	(68.587.324.483,00)	(56.538.078.247,00)	(12.049.246.236,00)
5	Jumlah ATB (3+4)	20.001.661.342,00	1.798.249.867,00	18.203.411.475,00
6	Aset Lain-lain	468.888.377.143,58	438.441.913.332,25	30.446.463.811,33
7	Akumulasi Penyusutan (Reklas)	(192.115.378.343,18)	(210.227.255.215,12)	18.111.876.871,94
8	Jumlah Aset Lain-lain (6+7)	276.772.998.800,40	228.214.658.117,13	48.558.340.683,27
9	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.518.535.000,00	46.052.897.000,00	(44.534.362.000,00)
10	Jumlah(2+5+8)	304.328.131.913,40	283.518.264.255,13	20.809.867.658,27

Adapun rincian dari mutasi bersih aset lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 106
Mutasi Aset Lainnya

Uraian	Nominal	
Saldo Awal Nilai Bersih		283.518.264.255,13
Mutasi Debet:		
Belanja Modal	349.109.500,00	
Kapitalisasi	30.078.867.211,00	
Penghapusan	9.880.337.848,77	
Hibah	561.812.500,00	
Koreksi Pembukuan	2.668.400.864,20	
Reklas	104.223.776.131,58	
Jumlah Mutasi Debet	147.762.304.055,55	
Mutasi Kredit:		
Ekstra Komptabel	74.640.000,00	
Penghapusan	11.711.124.061,60	
Hibah	149.875.000,00	
Beban Penyusutan	12.073.915.986,00	
Koreksi Pembukuan	48.415.028.216,00	
Reklas	54.527.853.133,68	
Jumlah Mutasi Kredit	126.952.436.397,28	
Kenaikan/(Penurunan)		20.809.867.658,27
Saldo Akhir Nilai Bersih		304.328.131.913,40

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah nihil.



2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.034.936.771,00 mengalami turun sebesar Rp1.417.522.500,00 jika dibandingkan dengan nilai pada 31 Desember 2023 sebesar Rp7.452.459.271,00, nilai penurunan tersebut disebabkan adanya reklasifikasi kemitraan ke Properti Investasi. Adapun rincian dari kemitraan dengan pihak ketiga per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 107
Kemitraan dengan Pihak Ketiga per SKPD 2024

No	Instansi	Nama Barang	Merk/ Tipe/ Alamat	Bentuk Pemanfaatan	Mitra	Surat Perjanjian/Kontrak		Nilai
						Nomor	Tgl Akhir Pemanfaatan	
1	RSUD	Tanah Lapangan Parkir Konstruksi Beton	Jl. Rumah Sakit No. 01 Kel/Desa. Kota Baru Kec. Serang KOTA SERANG	kerjasama operasi	PT HBM	14/PKS/KSO-RSDP-I/2024	17/01/2029	227.892.896,00
2	SETDA	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Kijang Innova E M/T	Pinjam Pakai	PTUN Serang	024/Perj-50-Huk/2022	27/06/2027	218.690.430,00
3	SETDA	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	New Kijang Innova G MT	Pinjam Pakai	PMI Kab Serang	032/565/BPKAD/2017	16/08/2022	256.449.580,00
4	SETDA	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Avanza	Pinjam Pakai	Bakorinda	024/1013/ASET/2016	11/04/2021	168.210.000,00
5	DINKES	Mobil Ambulance	Daihatsu Gran Max MB 1.3 FF FH	Pinjam Pakai	Desa Kemuning	870/1412/Dinkes/2022	06/04/2027	199.460.000,00
6	SETDA	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daihatsu / Xenia	Pinjam Pakai	PMI Kab Serang	024/1876/ASET/2016	02/08/2021	131.307.100,00
7	SETDA	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daihatsu / Xenia F650RV-GMDFJ M/T	Pinjam Pakai	Bawaslu	032/PPP.03/TAPEM-BPKAD/2023	17/04/2025	129.340.000,00
8	SETDA	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Avanza 1300 G Manual	Pinjam Pakai	Kominda	024/2047/ASET/2016	27/07/2021	136.621.680,00
9	BPKAD	Sepeda Motor	VIAR CROSS X 150 VIN 2018	Pinjam Pakai	KPU Kab Serang	024/378/ASET-BPKAD/2018	27/12/2023	21.573.202,00
10	BPKAD	Sepeda Motor	VIAR CROSS X 150 VIN 2018	Pinjam Pakai	KPU Kab Serang	024/378/ASET-BPKAD/2018	27/12/2023	21.573.202,00
11	BPKAD	Sport Utility Vehicle (SUV)	MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR -H (4X2) 8 A/T VIN 2018	Pinjam Pakai	Kejari Serang	032/PPP.37/TAPEM-BPKAD/2023	27/12/2028	515.069.500,00
12	BPKAD	Sport Utility Vehicle (SUV)	Nissan Navara VL 2.5 A/T Double Cabin	Pinjam Pakai	Kodim 0602	024/Perj-1003-Huk/2018	14/11/2023	468.022.500,00
13	BPKAD	Sport Utility Vehicle (SUV)	Nissan Navara VL 2.5 A/T Double Cabin	Pinjam Pakai	Kodim 0623	024/Perj-1004-Huk/2018	14/11/2023	468.022.500,00
14	BPKAD	Sport Utility Vehicle (SUV)	Nissan Navara VL 2.5 A/T Double Cabin	Pinjam Pakai	Polres SerangKota	024/Perj.1002-Huk/2018	14/11/2023	468.022.500,00
15	BPKAD	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / AVANZA	Pinjam Pakai	Kominda	024/1013/ASET/2016	11/04/2021	118.168.150,00
16	BPKAD	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Ki Tapa No. 33 Serang Kec. KOTA SERANG KOTA SERANG	Pinjam Pakai	KPU Kab Serang	593/Perj.161-Huk/2021	24/09/2026	82.044.100,00
17	BPKAD	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Jl. Samaun Bakri Kp/Komp. Lopang Kel/Desa. Lopang Kec. Serang KOTA SERANG	Pinjam Pakai	KPU Kab Serang	593/Perj.161-Huk/2021	24/09/2026	77.250.500,00
18	BPKAD	Gedung Pos Jaga Permanen	Jl. Ki Tapa No. 33 Serang Kec. KOTA SERANG KOTA SERANG	Pinjam Pakai	KPU Kab Serang	593/Perj.161-Huk/2021	24/09/2026	1.106.400,00
19	BPKAD	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Ki Tapa No. 33 Kel/Desa. Cimuncang Kec. KOTA SERANG KOTA SERANG	Pinjam Pakai	KPU Kab Serang	593/Perj.161-Huk/2021	24/09/2026	133.842.917,00
20	BPKAD	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Daihatsu / Xenia F650RV-GMDFJ (4X2) M/T	Pinjam Pakai	KPU Kab Serang	024/Perj.160-Huk/2021	24/09/2026	131.307.100,00
21	BPKAD	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Innova E M/T	Pinjam Pakai	Kemenag Kab Serang	024/196/BPKAD/2025	15/02/2029	162.597.715,00
22	BPKAD	Pick Up	NISSAN NEW NAVARA 2.5 Mid (4x4) M/T	Pinjam Pakai	Satbrimo b Polda Banten	B/78//2016.Satbrimo b dan 024/1012/2016	20/12/2021	390.727.299,00



No	Instansi	Nama Barang	Merk/ Tipe/ Alamat	Bentuk Pemanfaatan	Mitra	Surat Perjanjian/Kontrak		Nilai
						Nomor	Tgl Akhir Pemanfaatan	
23	BPKAD	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	New Kijang Innova 2.0 G A/T Vin 2020	Pinjam Pakai	Kemenag Kab Serang	024/197/BPKAD/2025	11/03/2030	328.000.000,00
24	BPKAD	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA / Kijang LGX Grand Long KF 83	Pinjam Pakai	Kejari Serang	024/Perj.1008-Huk/2018	01/11/2023	150.600.000,00
25	BPKAD	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER VIN 2018	Pinjam Pakai	Polres Serang	024/Perj.998-Huk/2018	01/11/2023	411.937.500,00
26	BPKAD	Jeep	Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4X2 A/T	Pinjam Pakai	Polres Serang	032/.../TAPEM-BPKAD/2024	18/11/2029	617.100.000,00
Jumlah								6.034.936.771,00

Adanya perpindahan aset ke properti investasi diantaranya berupa tanah lapangan parkir konstruksi aspal senilai Rp687.360.000,00, tanah bangunan pendidikan dan latihan senilai Rp425.856.000,00 dan tanah bangunan rumah sakit senilai Rp359.594.000,00.

3. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang nilainya tidak diukur dari wujud fisiknya. Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten per 31 Desember 2024 sebesar Rp88.588.985.825,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 108
Aset Tak Berwujud per SKPD 2024 dan 2023

No	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
1	DISDIK	6.477.568.604,00	846.825.865,00	5.630.742.739,00
	Software	629.012.865,00	629.012.865,00	0,00
	Kajian	217.813.000,00	217.813.000,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.630.742.739,00	0,00	5.630.742.739,00
2	DINKES	1.251.338.300,00	641.720.000,00	609.618.300,00
	Software	403.180.000,00	403.180.000,00	0,00
	Kajian	238.540.000,00	238.540.000,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	609.618.300,00	0,00	609.618.300,00
3	RSUD	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00
	Software	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00
4	DPUPR	43.371.026.701,00	20.323.816.719,00	23.047.209.982,00
	Software	91.696.000,00	91.696.000,00	0,00
	Kajian	43.279.330.701,00	20.232.120.719,00	23.047.209.982,00
5	DPRKP	11.546.804.000,00	11.468.201.000,00	78.603.000,00
	Kajian	11.546.804.000,00	11.468.201.000,00	78.603.000,00
6	SATPOL PP	250.205.000,00	250.205.000,00	0,00
	Software	198.810.000,00	198.810.000,00	0,00
	Kajian	51.395.000,00	51.395.000,00	0,00
7	BPBD	869.000.000,00	869.000.000,00	0,00
	Software	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00
	Kajian	819.500.000,00	819.500.000,00	0,00
8	DINSOS	29.782.000,00	29.782.000,00	0,00
	Software	29.782.000,00	29.782.000,00	0,00



No	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
9	DISNAKERTRANS	46.264.500,00	46.264.500,00	0,00
	Software	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Kajian	31.264.500,00	31.264.500,00	0,00
10	DKPP	359.427.090,00	21.192.600,00	338.234.490,00
	Software	21.192.600,00	21.192.600,00	0,00
	Kajian	338.234.490,00	0,00	338.234.490,00
11	DLH	539.652.700,00	365.194.000,00	174.458.700,00
	Software	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
	Kajian	348.194.000,00	348.194.000,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	174.458.700,00	0,00	174.458.700,00
12	DISDUKCAPIL	842.400.989,00	842.400.989,00	0,00
	Software	842.400.989,00	842.400.989,00	0,00
13	DPMD	99.440.000,00	99.440.000,00	0,00
	Software	99.440.000,00	99.440.000,00	0,00
14	DKBP3A	442.184.600,00	442.184.600,00	0,00
	Software	200.207.600,00	200.207.600,00	0,00
	Kajian	241.977.000,00	241.977.000,00	0,00
15	DISHUB	1.711.207.000,00	1.711.207.000,00	0,00
	Software	1.264.585.000,00	1.264.585.000,00	0,00
	Kajian	446.622.000,00	446.622.000,00	0,00
16	DISKOMINFO	228.483.667,00	74.673.167,00	153.810.500,00
	Lisensi Dan Frenchise	214.240.043,00	11.090.043,00	203.150.000,00
	Hak Cipta	14.243.624,00	14.243.624,00	0,00
	Kajian	0,00	49.339.500,00	(49.339.500,00)
17	DISKOPERINDAG	702.882.500,00	702.882.500,00	0,00
	Software	49.922.500,00	49.922.500,00	0,00
	Kajian	652.960.000,00	652.960.000,00	0,00
18	DPMPTSP	212.173.000,00	212.173.000,00	0,00
	Kajian	212.173.000,00	212.173.000,00	0,00
19	DISPORAPAR	162.547.500,00	162.547.500,00	0,00
	Kajian	162.547.500,00	162.547.500,00	0,00
20	DPKD	59.851.944,00	59.851.944,00	0,00
	Software	59.851.944,00	59.851.944,00	0,00
21	DINAS PERIKANAN	850.000.000,00	650.000.000,00	200.000.000,00
	Kajian	850.000.000,00	650.000.000,00	200.000.000,00
22	SETDA	1.327.378.550,00	1.327.378.550,00	0,00
	Software	882.023.550,00	882.023.550,00	0,00
	Kajian	445.355.000,00	445.355.000,00	0,00
23	SETWAN	1.709.872.500,00	1.709.872.500,00	0,00
	Software	324.972.500,00	324.972.500,00	0,00
	Kajian	1.105.000.000,00	1.204.900.000,00	(99.900.000,00)
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00
	Goodwill	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
24	BAPPEDA LITBANG	8.209.453.690,00	8.209.453.690,00	0,00



No	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
	Software	196.909.000,00	196.909.000,00	0,00
	Kajian	7.937.544.690,00	8.012.544.690,00	(75.000.000,00)
	Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/ Budaya	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
25	BPKAD	2.492.690.000,00	2.492.690.000,00	0,00
	Software	2.443.740.000,00	2.443.740.000,00	0,00
	Kajian	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00
26	BKPSDM	59.940.000,00	39.960.000,00	19.980.000,00
	Software	59.940.000,00	39.960.000,00	19.980.000,00
27	BAPENDA	4.579.735.690,00	4.579.735.690,00	0,00
	Software	3.805.027.530,00	3.805.027.530,00	0,00
	Kajian	774.708.160,00	774.708.160,00	0,00
28	Inspektorat Daerah	143.375.300,00	143.375.300,00	0,00
	Software	143.375.300,00	143.375.300,00	0,00
Jumlah		88.588.985.825,00	58.336.328.114,00	30.252.657.711,00

4. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp68.587.324.483,00 meningkat sebesar Rp12.049.246.236,00 jika dibandingkan pada tahun 2023 sebesar Rp56.538.078.247,00. Rincian tiap SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 109
Amortisasi Aset Tak Berwujud Per SKPD 2024 dan 2023

No	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
1	DISDIK	(844.325.865,00)	(843.075.865,00)	(1.250.000,00)
	Software	(241.963.150,00)	(240.713.150,00)	(1.250.000,00)
	Kajian	(602.362.715,00)	(602.362.715,00)	0,00
2	DINKES	(638.595.000,00)	(635.470.000,00)	(3.125.000,00)
	Software	(400.055.000,00)	(396.930.000,00)	(3.125.000,00)
	Kajian	(238.540.000,00)	(238.540.000,00)	0,00
3	RSUD	(14.300.000,00)	(14.300.000,00)	0,00
	Software	(14.300.000,00)	(14.300.000,00)	0,00
4	DPUPR	(31.847.421.710,00)	(20.323.816.719,00)	(11.523.604.991,00)
	Software	(91.696.000,00)	(91.696.000,00)	0,00
	Kajian	(31.755.725.710,00)	(20.232.120.719,00)	(11.523.604.991,00)
5	DPRKP	(11.507.502.500,00)	(11.468.201.000,00)	(39.301.500,00)
	Kajian	(11.507.502.500,00)	(11.468.201.000,00)	(39.301.500,00)
6	SATPOL PP	(250.205.000,00)	(250.205.000,00)	0,00
	Software	(198.810.000,00)	(198.810.000,00)	0,00
	Kajian	(51.395.000,00)	(51.395.000,00)	0,00
7	BPBD	(869.000.000,00)	(869.000.000,00)	0,00
	Software	(49.500.000,00)	(49.500.000,00)	0,00
	Kajian	(819.500.000,00)	(819.500.000,00)	0,00





No	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
8	DINSOS	(29.782.000,00)	(29.782.000,00)	0,00
	Software	(29.782.000,00)	(29.782.000,00)	0,00
9	DISNAKERTRANS	(46.264.500,00)	(46.264.500,00)	0,00
	Software	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)	0,00
	Kajian	(31.264.500,00)	(31.264.500,00)	0,00
10	DKPP	(190.309.845,00)	(21.192.600,00)	(169.117.245,00)
	Software	(21.192.600,00)	(21.192.600,00)	0,00
	Kajian	(169.117.245,00)	0,00	(169.117.245,00)
11	DLH	(365.194.000,00)	(365.194.000,00)	0,00
	Software	(17.000.000,00)	(17.000.000,00)	0,00
	Kajian	(348.194.000,00)	(348.194.000,00)	0,00
12	DISDUKCAPIL	(842.400.989,00)	(841.150.989,00)	(1.250.000,00)
	Software	(842.400.989,00)	(841.150.989,00)	(1.250.000,00)
13	DPMD	(99.440.000,00)	(99.440.000,00)	0,00
	Software	(99.440.000,00)	(99.440.000,00)	0,00
14	DKBP3A	(442.184.600,00)	(419.759.850,00)	(22.424.750,00)
	Software	(200.207.600,00)	(200.207.600,00)	0,00
	Kajian	(241.977.000,00)	(219.552.250,00)	(22.424.750,00)
15	DISHUB	(1.711.207.000,00)	(1.711.207.000,00)	0,00
	Software	(1.264.585.000,00)	(1.264.585.000,00)	0,00
	Kajian	(446.622.000,00)	(446.622.000,00)	0,00
16	DISKOMINFOSATIK	0,00	(24.669.750,00)	24.669.750,00
	Kajian	0,00	(24.669.750,00)	24.669.750,00
17	DISKOPERINDAG	(702.882.500,00)	(702.882.500,00)	0,00
	Software	(49.922.500,00)	(49.922.500,00)	0,00
	Kajian	(652.960.000,00)	(652.960.000,00)	0,00
18	DPMP TSP	(212.173.000,00)	(212.173.000,00)	0,00
	Kajian	(212.173.000,00)	(212.173.000,00)	0,00
19	DISPORAPAR	(162.547.500,00)	(162.547.500,00)	0,00
	Kajian	(162.547.500,00)	(162.547.500,00)	0,00
20	DPKD	(59.851.944,00)	(59.851.944,00)	0,00
	Software	(59.851.944,00)	(59.851.944,00)	0,00
21	DINAS PERIKANAN	(750.000.000,00)	(650.000.000,00)	(100.000.000,00)
	Kajian	(750.000.000,00)	(650.000.000,00)	(100.000.000,00)
22	SETDA	(1.327.378.550,00)	(1.312.678.550,00)	(14.700.000,00)
	Software	(882.023.550,00)	(867.323.550,00)	(14.700.000,00)
	Kajian	(445.355.000,00)	(445.355.000,00)	0,00
23	SETWAN	(1.591.972.500,00)	(1.573.972.500,00)	(18.000.000,00)
	Lisensi Dan Frenchise	(162.000.000,00)	(144.000.000,00)	(18.000.000,00)
	Software	(324.972.500,00)	(324.972.500,00)	0,00
	Kajian	(1.105.000.000,00)	(1.105.000.000,00)	0,00
24	BAPPEDA LITBANG	(8.134.453.690,00)	(8.134.453.690,00)	0,00
	Software	(196.909.000,00)	0,00	(196.909.000,00)
	Kajian	(7.937.544.690,00)	(8.134.453.690,00)	196.909.000,00



No	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
25	BPKAD	(1.717.700.000,00)	(1.643.950.000,00)	(73.750.000,00)
	Software	(1.668.750.000,00)	(1.595.000.000,00)	(73.750.000,00)
	Kajian	(48.950.000,00)	(48.950.000,00)	0,00
26	BAPENDA	(4.061.881.490,00)	(3.969.473.990,00)	(92.407.500,00)
	Software	(3.287.173.330,00)	(3.194.765.830,00)	(92.407.500,00)
	Kajian	(774.708.160,00)	(774.708.160,00)	0,00
27	BKPSDM	(24.975.000,00)	(9.990.000,00)	(14.985.000,00)
	Software	(24.975.000,00)	(9.990.000,00)	(14.985.000,00)
28	Inspektorat Daerah	(143.375.300,00)	(143.375.300,00)	0,00
	Kajian	(143.375.300,00)	(143.375.300,00)	0,00
Jumlah		(68.587.324.483,00)	(56.538.078.247,00)	(12.049.246.236,00)

5. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp468.888.377.143,58 meningkat sebesar Rp30.446.463.811,33 jika dibandingkan pada tahun 2023 sebesar Rp438.441.913.332,25. Rincian tiap SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 110
Aset Lain-Lain Per SKPD 2024 dan 2023

No	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
1	DISDIK	21.228.344.559,00	21.158.344.559,00	70.000.000,00
2	DINKES	5.169.174.205,00	5.223.749.205,00	(54.575.000,00)
3	RSUD	2.349.889.650,00	2.569.579.650,40	(219.690.000,40)
4	DPUPR	294.514.013.318,58	284.837.026.238,85	9.676.987.079,73
5	DPRKP	101.408.617.619,00	101.478.237.619,00	(69.620.000,00)
6	SATPOL PP	12.909.675,00	12.909.675,00	0,00
7	BPBD	417.281.742,00	417.281.742,00	0,00
8	DINSOS	218.861.500,00	547.286.500,00	(328.425.000,00)
9	DISNAKERTRANS	151.754.000,00	162.629.000,00	(10.875.000,00)
10	DKPP	938.095.111,00	938.095.111,00	0,00
11	DLH	748.250.000,00	1.551.225.000,00	(802.975.000,00)
12	DISDUKCAPIL	16.637.610,00	39.137.610,00	(22.500.000,00)
13	DKBP3A	31.975.000,00	31.975.000,00	0,00
14	DISHUB	262.536.400,00	287.386.775,00	(24.850.375,00)
15	DISKOMINFO	504.443.313,00	29.901.497,00	474.541.816,00
16	DISKOPERINDAG	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00
17	DPMTSP	0,00	170.978.300,00	(170.978.300,00)
18	DISPORAPAR	679.000.001,00	679.000.001,00	0,00
19	DPKD	131.940.000,00	131.940.000,00	0,00
20	DINAS PERIKANAN	0,00	160.273.100,00	(160.273.100,00)
21	SETDA	15.822.252.914,00	15.563.544.981,00	258.707.933,00
22	SETWAN	1.677.052.145,00	1.677.052.145,00	0,00
23	BAPPEDA	5.100.000,00	20.012.610,00	(14.912.610,00)





No	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
24	BPKAD	22.116.989.596,00	260.498.228,00	21.856.491.368,00
25	BKPSDM	0,00	20.240.000,00	(20.240.000,00)
26	Kec. Anyar	19.305.000,00	19.305.000,00	0,00
27	Kec. Bandung	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
28	Kec. Binuang	14.615.000,00	14.615.000,00	0,00
29	Kec. Bojonegara	31.889.000,00	31.889.000,00	0,00
30	Kec. Carenang	25.886.000,00	16.236.000,00	9.650.000,00
31	Kec. Cikeusl	9.554.000,00	9.554.000,00	0,00
32	Kec. Cinangka	38.514.000,00	38.514.000,00	0,00
33	Kec. Ciruas	9.554.000,00	9.554.000,00	0,00
34	Kec. Gunungsari	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00
35	Kec. Jawilan	9.655.000,00	9.655.000,00	0,00
36	Kec. Kopo	3.486.785,00	3.486.785,00	0,00
37	Kec. Kramatwatu	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00
38	Kec. Lebak Wangi	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00
39	Kec. Mancak	28.854.000,00	28.854.000,00	0,00
40	Kec. Pabuaran	9.554.000,00	9.554.000,00	0,00
41	Kec. Padarincang	12.685.000,00	12.685.000,00	0,00
42	Kec. Pamarayan	45.628.000,00	45.628.000,00	0,00
43	Kec. Petir	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00
44	Kec. Pontang	35.185.000,00	35.185.000,00	0,00
45	Kec. Pulo Ampel	32.025.000,00	32.025.000,00	0,00
46	Kec. Tirtayasa	36.854.000,00	36.854.000,00	0,00
47	Kec. Tunjungteja	18.965.000,00	18.965.000,00	0,00
Jumlah		468.888.377.143,58	438.441.913.332,25	30.446.463.811,33

Sebagian Aset lain-lain pada BPKAD sebesar Rp21.776.916.557,00 timbul dari pembayaran atas pengadaan tanah yang dikonsinyasikan kepada Pengadilan Negeri Serang dan sudah ada penetapan konsinyasinya namun sampai dengan akhir tahun 2024 belum ada surat pelepasan hak atas kepemilikan tanah dari BPN Kabupaten Serang sehingga aset tanah tersebut belum dapat diakui oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

Tabel 111
Daftar Konsinyasi Tanah Tahun 2024

No	Tahun Konsinyasi	Bidang	Luas	Hasil Penilaian Kjpp Tahun 2018	Harga Per Meter	Keterangan
1	2022	20	1.977	516.584.489	261.297	belum putusan PN (estimasi)
2	2022	21	678	159.618.123	235.425	belum putusan PN (estimasi)
3	2022	22	907	215.759.426	237.882	belum putusan PN (estimasi)
4	2022	33	13.158	4.521.786.039	343.653	belum putusan PN (estimasi)
5	2022	35	1.846	583.642.266	316.166	belum putusan PN (estimasi)
6	2022	36	2.428	757.363.348	311.929	belum putusan PN (estimasi)
7	2022	37	937	252.227.014	269.186	belum putusan PN (estimasi)
8	2022	39	2.825	803.625.533	284.469	belum putusan PN (estimasi)



No	Tahun Konsinyasi	Bidang	Luas	Hasil Penilaian Kjpp Tahun 2018	Harga Per Meter	Keterangan
9	2022	43	1.918	563.306.478	293.695	belum putusan PN (estimasi)
10	2022	45	2.718	810.898.310	298.344	belum putusan PN (estimasi)
11	2022	46	1.183	284.214.048	240.249	belum putusan PN (estimasi)
12	2022	47	5.062	1.295.843.351	255.994	belum putusan PN (estimasi)
13	2022	52	4.085	1.054.882.206	258.233	belum putusan PN (estimasi)
14	2022	53	1.841	450.874.698	244.907	belum putusan PN (estimasi)
15	2022	54	877	201.231.767	229.455	belum putusan PN (estimasi)
16	2022	56	920	218.964.366	238.005	belum putusan PN (estimasi)
17	2022	57	2.333	677.257.747	290.295	belum putusan PN (estimasi)
18	2022	59	1.063	287.225.488	270.203	belum putusan PN (estimasi)
19	2022	61	2.598	585.409.440	225.331	belum putusan PN (estimasi)
20	2022	62	1.589	411.323.015	258.857	belum putusan PN (estimasi)
21	2022	65	2.701	830.136.536	307.344	belum putusan PN (estimasi)
22	2022	66	772	232.924.444	301.716	belum putusan PN (estimasi)
23	2022	67	2.811	865.753.020	307.988	belum putusan PN (estimasi)
24	2022	68	1.572	508.333.059	323.367	belum putusan PN (estimasi)
25	2022	69	1.343	365.541.653	272.183	belum putusan PN (estimasi)
26	2022	71	2.890	847.934.225	293.403	belum putusan PN (estimasi)
27	2022	72	452	112.071.155	247.945	belum putusan PN (estimasi)
28	2022	73	3.288	834.661.104	253.851	belum putusan PN (estimasi)
29	2022	74	910	262.256.036	288.193	belum putusan PN (estimasi)
30	2022	75	647	194.275.037	300.271	belum putusan PN (estimasi)
31	2022	76	1.055	300.369.626	284.711	belum putusan PN (estimasi)
32	2022	77	461	117.848.923	255.638	belum putusan PN (estimasi)
33	2022	79	3.428	898.612.637	262.139	belum putusan PN (estimasi)
34	2022	81	1.782	460.796.425	258.584	belum putusan PN (estimasi)
35	2023	-	-	293.365.525,00	-	Kapitalisasi dari biaya umum
Jumlah			75.055	21.776.916.557,00		

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan status ruas jalan melalui SK Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-Huk/2023 tanggal 18 Januari 2023 diketahui bahwa terdapat lima ruas jalan kewenangan kabupaten serang menjadi kewenangan Provinsi Banten.

Berdasarkan SK Gubernur tersebut Pemerintah Kabupaten Serang menetapkan ruas jalan melalui Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 620/Kep.301-Huk.DPUPR/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten dan Peta Jaringan Jalan Kabupaten 2023 sebesar Rp6.771.151.800,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan TA 2023 aset tanah ini direklasifikasi ke aset lain-lain dan sampai akhir TA 2024 masih dalam proses penghapusan, rincian aset tersebut sebagai berikut :

Tabel 112
Aset Lain-Lain Tanah dalam Proses Penghapusan

No.	Ruas Jalan	NIBar	Nilai Perolehan	No. BAST
1	Jalan Warung Selikur –	10658551	1.027.615.400,00	620/85/PEN.TNH.JL/DPUPR/2018/



No.	Ruas Jalan	NIBar	Nilai Perolehan	No. BAST
	Pemanuk			
2	Jalan Cikande - Garut -Kopo	10658521	2.080.323.000,00	Non Dokumen
3	Jalan Baros – Petir	7988319	1.125.588.800,00	620/2035/SK.PEN-TNH-JLN/DPUPR/2017
4	Jalan Gunungsari – Tanjung	10658522	445.285.400,00	Non Dokumen
5	Jalan Sentul – Selibu	10658576	2.092.339.200,00	620/85/PEN.TNH.JL/DPUPR/2018
			6.771.151.800,00	

Selain itu reklasifikasi dilakukan juga terhadap aset tetap jalan irigasi dan jaringan ke aset lain-lain. Pada TA 2024 aset ini juga masih dalam proses penghapusan sehingga masih tercatat dalam aset lain-lain sebesar Rp163.497.272.875,33, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 113
Aset Lain-Lain Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Proses Penghapusan

No.	Ruas Jalan	NIBar	Nilai Perolehan	No. BAST
1	Jalan Warung Selikur – Pemanuk	3347284	17.990.793.150,61	Non Dokumen
2	Jalan Cikande - Garut -Kopo	3347369	60.637.535.766,82	Non Dokumen
3	Jalan Baros – Petir	3347072	22.031.371.750,64	Non Dokumen
4	Jalan Gunungsari – Tanjung	3347192	23.446.300.513,79	Non Dokumen
5	Jalan Sentul – Selibu	3347343	39.391.271.693,47	Non Dokumen
			163.497.272.875,33	

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp192.115.378.343,18 turun sebesar Rp18.111.876.871,94 jika dibandingkan pada tahun 2023 sebesar Rp210.227.255.215,12. Rincian tiap SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 114
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per SKPD

No	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
1	DISDIK	(6.875.890.975,77)	(6.805.890.975,77)	(70.000.000,00)
2	DINKES	(3.737.603.407,72)	(3.769.578.407,72)	31.975.000,00
3	RSUD	(2.349.889.650,00)	(2.565.657.150,40)	215.767.500,40
4	DPUPR	(171.926.543.426,94)	(188.131.003.095,42)	16.204.459.668,48
5	DPRKP	(764.815.699,98)	(784.707.128,54)	19.891.428,56
6	SATPOL PP	(12.909.675,00)	(12.909.675,00)	0,00
7	BPBD	(409.281.742,00)	(409.281.742,00)	0,00
8	DINSOS	(169.221.500,00)	(482.143.642,86)	312.922.142,86
9	DISNAKERTRANS	0,00	(10.875.000,00)	10.875.000,00
10	DKPP	(938.095.111,00)	(938.095.111,00)	0,00
11	DLH	0,00	(141.260.714,20)	141.260.714,20
12	DISDUKCAPIL	(16.637.610,00)	(39.137.610,00)	22.500.000,00
13	DISHUB	(155.464.500,00)	(180.314.875,00)	24.850.375,00



No	SKPD	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
14	DISKOMINFO	(492.803.673,25)	(18.261.857,25)	(474.541.816,00)
15	DPMPTSP	0,00	(170.978.300,00)	170.978.300,00
16	SETDA	(1.244.780.974,58)	(2.586.073.041,58)	1.341.292.067,00
17	SETWAN	(1.677.052.145,00)	(1.677.052.145,00)	0,00
18	BAPPEDA	0,00	(8.521.491,44)	8.521.491,44
19	BPKAD	(936.284.466,94)	(1.086.159.466,94)	149.875.000,00
20	BKPSDM	0,00	(10.900.000,00)	10.900.000,00
21	Kec. Anyar	(19.305.000,00)	(19.305.000,00)	0,00
22	Kec. Bandung	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)	0,00
23	Kec. Binuang	(14.615.000,00)	(14.615.000,00)	0,00
24	Kec. Bojonegara	(31.889.000,00)	(31.889.000,00)	0,00
25	Kec. Carenang	(25.886.000,00)	(16.236.000,00)	(9.650.000,00)
26	Kec. Cikeusal	(9.554.000,00)	(9.554.000,00)	0,00
27	Kec. Cinangka	(38.514.000,00)	(38.514.000,00)	0,00
28	Kec. Ciruas	(9.554.000,00)	(9.554.000,00)	0,00
29	Kec. Gunungsari	(9.650.000,00)	(9.650.000,00)	0,00
30	Kec. Kopo	(3.486.785,00)	(3.486.785,00)	0,00
31	Kec. Kramatwatu	(19.300.000,00)	(19.300.000,00)	0,00
32	Kec. Lebak Wangi	(17.950.000,00)	(17.950.000,00)	0,00
33	Kec. Mancak	(28.854.000,00)	(28.854.000,00)	0,00
34	Kec. Pabuaran	(9.554.000,00)	(9.554.000,00)	0,00
35	Kec. Padarincang	(12.685.000,00)	(12.685.000,00)	0,00
36	Kec. Pamarayan	(45.628.000,00)	(45.628.000,00)	0,00
37	Kec. Petir	(9.650.000,00)	(9.650.000,00)	0,00
38	Kec. Pontang	(12.685.000,00)	(12.685.000,00)	0,00
39	Kec. Pulo Ampel	(32.025.000,00)	(32.025.000,00)	0,00
40	Kec. Tirtayasa	(36.854.000,00)	(36.854.000,00)	0,00
41	Kec. Tunjungteja	(18.965.000,00)	(18.965.000,00)	0,00
Jumlah		(192.115.378.343,18)	(210.227.255.215,12)	18.111.876.871,94

7. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.518.535.000,00 merupakan Dana Bagi Hasil yang telah dicairkan oleh Pemerintah Pusat melalui Rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) atas nama Kabupaten Serang pada akhir tahun 2024. Pencatatan ini mengacu kepada surat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten Nomor : S-158/KPN.1101/2024 perihal Penyampaian Informasi Realisasi Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Tambahan Alokasi DBH ke Rekening TDF Tahun Anggaran 2024. Adapun rincian dana tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 115
Rincian Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Uraian	Jumlah
Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	1.049.102.000,00



Uraian	Jumlah
Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	305.170.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	111.401.000,00
DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	5.000,00
DBH PBB Bagi Rata	1.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	10.249.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Royalti	1.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	42.603.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	2.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan – PSDH	1.000,00
Jumlah	1.518.535.000,00

5.7.5. Properti Investasi

Properti Investasi merupakan aset berwujud yang dikelompokkan dalam akun investasi. Properti investasi disajikan sebagai aset tidak lancar karena akan digunakan lebih dari satu tahun setelah akhir periode pelaporan. Properti yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Properti investasi dapat berupa tanah, bangunan, atau bagian dari bangunan.

Pada TA 2024 nilai Properti Investasi sebesar Rp25.303.239.942,00 terdiri dari properti investasi tanah sebesar Rp25.149.724.422,00, properti investasi bangunan gedung sebesar Rp159.912.000,00 dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung sebesar Rp6.396.480,00. Berikut ini adalah Properti Investasi per SKPD:

Tabel 116
Properti Investasi

No	Uraian	OPD	Nilai
1	Properti Investasi Tanah	DISDIK	594.450.000
		RSUD	1.046.954.000
		DPUPR	115.804.000
		DPRKP	1.750.000.000
		BPBD	404.650.000
		DISNAKERTRANS	3.731.827.022
		DKPP	3.344.697.400
		DISPORAPAR	1.539.040.000
		DINAS PERIKANAN	492.240.000
		SETDA	250.000.000
		BPKAD	11.880.062.000
2	Properti Investasi Bangunan Gedung	RSUD	159.912.000
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	RSUD	(6.396.480)
Jumlah			25.303.239.942





5.8. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Serang. Pemerintah Kabupaten Serang mempunyai Kewajiban Jangka Pendek yang akan dibayar dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp148.357.705.087,67 naik sebesar Rp31.344.684.444,67 jika dibandingkan pada tahun 2023 sebesar Rp117.013.020.643,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 117
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	20.914.306,00	19.555.966,00	1.358.340,00
2	Pendapatan Diterima di Muka	9.712.249.528,69	8.383.602.323,00	1.328.647.205,69
3	Utang Belanja	136.731.025.889,98	104.236.325.208,00	32.494.700.681,98
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.893.515.363,00	4.373.537.146,00	(2.480.021.783,00)
Jumlah		148.357.705.087,67	117.013.020.643,00	31.344.684.444,67

5.8.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.914.306,00 merupakan Utang PPN Pusat pada bendahara Dana BOS.

5.8.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.712.249.528,69 meningkat sebesar Rp1.328.647.205,69 atau 15,85% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp8.383.602.323,00. Pendapatan diterima dimuka merupakan Pendapatan Pajak Daerah pada Bapenda sebesar Rp1.759.358.936,00, Pendapatan sewa pada RSUD sebesar Rp270.000.000,00, Pendapatan Sewa pada BPKAD sebesar Rp203.028.960,69 dan Pendapatan Retribusi perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada DPMPTSP sebesar Rp7.479.861.632,00. rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 118
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	SKPD	SKPD	2024	2023
1	BANK BJB - Sewa Lahan Jangka Waktu 64 Bulan	RSUD	270.000.000,00	360.000.000,00
2	Yayasan Pandu Pertiwi	BPKAD	48.115.946,99	48.247.771,51
3	Kantor Kas Bank BJB	BPKAD	68.983.150,68	65.150.753,42
4	BANK BJB - Sewa Lahan ATM	BPKAD	85.929.863,02	91.924.315,07
5	Pendapatan Retribusi perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	DPMPTSP	7.479.861.632,00	6.359.383.907,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	BAPENDA	1.759.358.936,00	1.458.895.576,00
Jumlah			9.712.249.528,69	8.383.602.323,00



**5.8.3. Utang Belanja**

Utang belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp136.731.025.889,98 naik sebesar Rp32.494.700.681,98 atau 31,17% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp104.236.325.208,00. Utang Belanja merupakan utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja modal, utang belanja hibah, belanja bansos dan belanja transfer. Rincian utang belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 119
Rincian Utang Belanja Tahun 2024 per SKPD

SKPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal	Utang Hibah	Utang Transfer	Jumlah Utang
DISDIK	1.758.353.680,00	7.890.551.322,00	307.566.209,00	199.275.648,00	0,00	10.155.746.859,00
DINKES	0,00	841.775.127,00	3.452.194.080,00	0,00	0,00	4.293.969.207,00
RSUD	1.437.443.167,00	10.219.108.351,00	0,00	0,00	0,00	11.656.551.518,00
DPUPR	0,00	6.841.689.989,00	13.827.347.633,76	1.578.129.179,22	0,00	22.247.166.801,98
DPRKP	0,00	443.790.744,00	19.924.950,00	159.034.800,00	0,00	622.750.494,00
SATPOL PP	0,00	3.987.404,00	0,00	0,00	0,00	3.987.404,00
BPBD	0,00	23.431.749,00	0,00	0,00	0,00	23.431.749,00
DINSOS	0,00	244.529.068,00	0,00	0,00	0,00	244.529.068,00
DISNAKERTRANS	0,00	13.755.174,00	0,00	0,00	0,00	13.755.174,00
DKPP	0,00	343.366.922,00	937.213.928,00	0,00	0,00	1.280.580.850,00
DLH	0,00	1.007.894.319,00	19.000.000,00	0,00	0,00	1.026.894.319,00
DISDUKCAPIL	0,00	362.053.426,00	353.891.150,00	0,00	0,00	715.944.576,00
DPMD	0,00	247.698.133,00	0,00	0,00	0,00	247.698.133,00
DKBP3A	0,00	122.566.804,00	0,00	0,00	0,00	122.566.804,00
DISHUB	0,00	938.621.407,00	0,00	0,00	0,00	938.621.407,00
DISKOMINFOSATIK	0,00	1.187.703.144,00	137.600.000,00	0,00	0,00	1.325.303.144,00
DISKOPERINDAG	0,00	49.539.082,00	483.694.468,00	0,00	0,00	533.233.550,00
DPMPTSP	0,00	40.699.545,00	0,00	0,00	0,00	40.699.545,00
DISPORAPAR	0,00	40.432.903,00	0,00	0,00	0,00	40.432.903,00
DPKD	0,00	6.263.940,00	0,00	0,00	0,00	6.263.940,00
DINAS PERIKANAN	0,00	211.974.212,00	0,00	0,00	0,00	211.974.212,00
SETDA	0,00	351.190.360,00	0,00	0,00	0,00	351.190.360,00
SETWAN	0,00	18.397.409,00	0,00	0,00	0,00	18.397.409,00
BAPPEDA LITBANG	0,00	40.855,00	0,00	0,00	0,00	40.855,00
BAPENDA	5.685.583.937,00	41.493.356,00	0,00	0,00	0,00	5.727.077.293,00
BPKAD	0,00	8.248.684,00	0,00	0,00	74.622.787.265,00	74.631.035.949,00
BKPSDM	0,00	12.279.676,00	0,00	0,00	0,00	12.279.676,00
Inspektorat	0,00	9.335.262,00	0,00	0,00	0,00	9.335.262,00
Kec. Anyar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Bandung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Baros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Binuang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SKPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal	Utang Hibah	Utang Transfer	Jumlah Utang
Kec. Carenang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Cikande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Cikeusal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Cinangka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Ciomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Ciruas	0,00	35.052.700,00	0,00	0,00	0,00	35.052.700,00
Kec. Gunungsari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Jawilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Lebak Wangi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Mancak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Kibin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Kopo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Kragilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Kramatwatu	0,00	2.501.428,00	0,00	0,00	0,00	2.501.428,00
Kec. Pabuaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Pamarayan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Padarincang	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
Kec. Pulo Ampel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Petir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Pontang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Tirtayasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Tanara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Tunjung Teja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Waringin Kurung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kesbangpol	0,00	141.205.500,00	47.007.800,00	0,00	0,00	188.213.300,00
Jumlah	8.881.380.784,00	31.704.977.995,00	19.585.440.218,76	1.936.439.627,22	74.622.787.265,00	136.731.025.889,98

Tabel 120
Rincian Utang dan Dasar Pengakuan/Nomor Kontrak

Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Utang Belanja Pegawai	8.881.380.784,00		
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.758.353.680,00	Tunjangan Profesi Guru TW IV, Susulan TW I, Susulan TW II, Susulan TW IV	DISDIK
Utang Belanja Pegawai BLUD	1.437.443.167,00	Rekapitulasi Honorarium Kontrak, TKK, PPTK dan Jaga Libur Bulan Desember 2024	RSUD
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	98.800.422,00	900/Kep.153-Huk.Bapenda/2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024	BAPENDA
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	94.982.200,00		BAPENDA
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.326.811.179,00		BAPENDA



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.164.990.136,00		BAPENDA
Utang Utang Belanja Barang dan Jasa	31.704.977.995,00		DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	9.347.000,00	090/2305.1-Disdikbud/2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.100.000,00	027/505.23/Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Sewa Hotel	81.000.000,00	027 / 52825735 /KPA-SD / Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.948.000,00	027 / 52825735 /KPA-SD / Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.800.000,00	027/505.25/Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	33.000.000,00	027 / 52825897 / KPA / SD - Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.960.000,00	027 / 52825897 / KPA / SD - Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	027/505.30/DISDIKBUD.2024	DISDIK
Utang Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.000.000,00	027/52983003/KPA-SD/Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.960.000,00	027/52826926.2/KPA/Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	02752826926.2/KPA/Disdikbud.2024	DISDIK
Sewa Gedung / Ruang Pertemuan	16.500.000,00	027/528269.2/KPA/Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.480.000,00	027/52826926.6/KPA/Disdikbud.2024	DISDIK
Sewa Gedung / Ruang Pertemuan	22.000.000,00	027.52826926.2/KPA/Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.160.000,00	027 / 52828188 / KPA-SD / Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.337.000,00	027 / 52828188 / KPA-SD / Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.737.000,00	027 / 52828188 / KPA-SD / Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.100.000,00	027/505.26.1/Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	55.000.000,00	027/01-PK.8109245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.659.043,00	027/01-PK.8414245/SPK/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.705.732,00	027/01-PK.8114245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	24.415.950,00	027/01-PK.8107245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.213.023,00	027/01-PK.8108245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.746.403,00	027/01-PK.8115245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	24.415.950,00	027/01-PK.8110245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.176.987,00	027/01-PK.8117245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.833.494,00	027/01-PK.8113245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.198.512,00	027/01-PK.8116245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.198.512,00	027/01-PK.8111245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23.789.900,00	027/01-PK.PL&-P2409-10450693/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.150.000,00	027/01-PK.8106245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.853.036,00	027/01-PK.8120245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	45.030.494,00	027/01-PK.8118245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	53.104.691,00	027/01-PK.8119245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	34.777.077,00	027/01.JKK-8562245/SPK/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	73.235.025,00	027/01.JKK-8563245/SPK/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	73.248.900,00	027/01.JKK-8564245/SPK/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	73.231.140,00	027/01-JKP.8476245/SPK/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.430.000,00	027/01-JKK.8475245/SPK/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	75.346.260,00	642/02-PK.8125245/SP/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	37.563.000,00	642/02-PK.8126245/SP/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.781.500,00	642/02-PK.8127245/SP/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	19.763.157,00	642/02-PK.8128245/SP/SARPRAS/2024	DISDIK





Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	37.563.000,00	642/02-PK.8129245/SP/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	39.202.456,00	642/02-PK.8130245/SP/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	29.470.300,00	642/02-PK.8131245/SP/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.781.500,00	642/02-PK.8132245/SP/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27.729.900,00	642/02-PK.8133245/SP/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	37.563.000,00	642/02-PK.8555245/SPK/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.803.727,00	642/02-PK.8134245/SP/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	19.720.575,00	642/02-PK.8135245/SP/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	28.931.150,00	056/02-JPS.10000641000/SPK/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	99.821.190,00	027/1677.08-KDP/SPK/KPA/Disdikbud/2024	DISDIK
Utang Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	57.200.000,00	027/1970.08-KDP/SPK/KPA/Disdikbud/2024	DISDIK
Utang Belanja Sewa Hotel	42.000.000,00	027/NPD/Disdikbud/2314/IV/2024	DISDIK
Utang Belanja Beasiswa Peserta Didik PAUD	20.000.000,00	027/JL/SP/52891167/DISDIKBUD-BPBJ/2024	DISDIK
Utang Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000,00	005/1885.1-Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Sosialisasi -Uang Saku Non PNS Peserta Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.700.000,00	027/JL/SP/52891589/DISDIKBUD-BPBJ/2024	DISDIK
Utang Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan	22.000.000,00	027/JL/SP/52891589/DISDIKBUD-BPBJ/2024	DISDIK
Utang Belanja Tenaga Ahli	45.950.000,00	420/2021.1-Disdikbud-2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.446.200.000,00	420/Kep.244-Huk.Disdikbud/2024	DISDIK
Utang Belanja Sewa Hotel	27.600.000,00	027/505.22/Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	027/505.28/Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Sewa Hotel	27.900.000,00	027 / 47907747 / KPA - SD / Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.234.000,00	027 / 47907747 / KPA - SD / Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	027/505.26/Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	26.126.000,00	027/505.26/Disdikbud.2024	DISDIK
Utang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.533.150.000,00	900/Kep.242-Huk.Disdikbud/2024	DISDIK
Utang Belanja Tagihan Listrik	16.607.738,00	0043/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DISDIK
Utang Belanja Pemeliharaan alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	61.140.000,00	870/3983/UMUM-DINKES/2024	DINKES



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	98.948.175,00	641/18-JKK.8421245/SPK/PNGWSN PKM.KIBIN/KPA-SDK/DINKES/2024	DINKES
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	82.189.950,00	641/46-JKK.10000707000/SPK/PRCN.PUSTU/KPA-SDK/DINKES/2024	DINKES
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	95.670.900,00	641/54-JKK.10000923000/SPK/PRCN.PKT.5/KPA-SDK/DINKES/2024	DINKES
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	82.090.050,00	641/62-JKK.10000769000/SPK/PRCN.REHAB.R D/KPA-SDK/DINKES/2024	DINKES
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	98.379.300,00	641/70-JKK.10000980000/SPK/PENDT.PUSTU/KPA-SDK/DINKES/2024	DINKES
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	48.290.550,00	641/25-JKK.10000258000/SPK/PNGWSN REHAB PKM/KPA-SDK/DINKES/2024	DINKES
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.155.350,00	641/32-JKK.10000259000/SPK/PNGWSN REHAB PKM/KPA-SDK/DINKES/2024	DINKES
Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	3.350.000,00	027/231/PSC-SP/VII/2024	DINKES
Utang Belanja Makanan dan Minuman rapat	9.600.000,00	443.2/389/XI/P2PMTM/2025	DINKES
Utang Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.080.000,00	870/4677/PJK-Dinkes/2024	DINKES
Utang Belanja Makanan dan Minuman rapat	10.575.000,00	441.9/677.a/Yankes/IX/2024	DINKES
Utang Belanja Tagihan Telepon	1.620.796,00	Surat Tagihan No.035/KU-01/KOPRG/II/2025	DINKES
Utang Belanja Tagihan Air	5.924.500,00	Tagihan Nomor 070500100604-202504-2025	DINKES
Utang Belanja Tagihan Listrik	159.963.473,00	Surat Tagihan No. 0069 /AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DINKES
Utang Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	27.797.083,00	045.SP.PPOB/KKBTS/II/2025	DINKES
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	132.586.725,00	No. Faktur 1258,1259 dan 1260	RSUD
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	493.355.667,00	No Faktur 7788,7791	RSUD
		No Faktur 7767	
		No Faktur 7766	
		No Faktur 0502	
		No Faktur 0503	
		No Faktur 3588,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98	
		No Faktur 001276	
		No Faktur 7087	
		No Faktur 7224	
		No Faktur 2428,2429,2430	
		No Faktur 2179,2180	
		No Faktur 317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327	
		No Faktur 241	
		No Faktur 12510	
Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.949.573.011,00	Rekapitulasi Jaspel, Honorarium PNS dan Non PNS bulan Desember 2024	RSUD
Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.091.086.500,00	SURAT TAGIHAN NO. KW-1450/BIO-SRG/II/2025	RSUD



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
		Rekapitulasi Jasa Pelayanan Tim UPBJ Bulan Desember 2024	
		SURAT TAGIHAN NO. 4202/21/60/210	
		SURAT TAGIHAN 021/KEU/1/2025	
		INVOICE NO. 038/NLTI/INV/II/2025 JASA KSO BULAN DESEMBER 2024	
		INVOICE NO. 036/NLTI/INV/II/2025 JASA KSO BULAN OKTOBER 2024	
		INVOICE NO. 039/NLTI/INV/II/202 JASA KSO BULAN DESEMBER 2024	
		INVOICE NO. /NLTI/INV/II/202 JASA KSO BULAN NOVEMBER 2024	
Utang Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	280.799.361,00	INVOICE NO. 0000317/BVK/XII/2024	RSUD
Utang Belanja Tagihan Telepon	5.615.112,00	SURAT PENGAKUAN HUTANG NO. C. TEL.01/KU.370/DGS-B30002000/2025 INVOICE NO. 059/TTL/TI-Ckr/I/2025	RSUD
Utang Belanja Tagihan Listrik	266.091.975,00	SURAT TAGIHAN NO. 0177/AGA.01.02/ULP.SRG/2025 SURAT TAGIHAN NO. 0139/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	RSUD
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	61.438.500,00	690/06-JKK-WP.6573245/SPK/SPV-MKJY-01/KPA-SAM/DPUPR/2023	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	96.192.600,00	690/06-JKK.WP.8577245/SPK/PGWSN.WSKL/KP A-SAM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	96.320.250,00	690/06-JKK.WP.7190245/SPK/PGWSN.CPT/KPA-SAM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	96.237.000,00	690/06-JKK.WP.7189245/SPK/PGWSN.SPWC/K PA-SAM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	96.103.800,00	690/06-JKK.WP.7191245/SPK/PGWSN.UTPB/KP A-SAM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	83.438.700,00	690/07-JKK.WP.6313245/SPK/SPV.BAT/KPA-SAM/DPUPR/2023	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	69.042.000,00	19-Juli-2022 760/15-JKK.5687245/SPK/PPK-PERKIMKES/DPKPTB/2022	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	500.000.000,00	3-Juni-2024 690/788/SAM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	300.000.000,00	3-Juni-2024 690/787/SAM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.975.000,00	660/06-JKKP.WP.10000351000/SPK/SPV.MCK.C URUG/KPA-SAM/DPUPR/2024 tanggal 29 Oktober 2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	99.789.000,00	660/06-JKK.WP.8578245/SPK/PGWSN.TPSTKIBI N/KPA-SAM/DPUPR/2024, tanggal 02 Oktober 2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	162.287.550,00	620/06-JKK.WP.6959245/SPK/SPV.RKN.JLN-PKT.8/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	98.459.775,00	630/06-JKK.WP.7289245/SPK/SPV.PLB.JBT/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	98.459.775,00	620/06-JKK.WP.7286245/SPK/SPV.PMB.DRNS-PKT.2/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	98.462.550,00	620/06-JKK.WP.7281245/SPK/SPV.JLN.DS.PKT.7/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	183.266.550,00	620/06-JKK.WP.7281245/SPK/SPV.JLN.DS.PKT.7/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	134.873.325,00	620/06-JKK.WP.7281245/SPK/SPV.JLN.DS.PKT.7/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	161.114.280,00	620/06-JKK.WP.7281245/SPK/SPV.JLN.DS.PKT.7/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	129.515.910,00	630/06-PK.HS.6970245/SPK/SPV.PMB.JBT.KP.KMSN.KBGSN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	98.457.000,00	620/06-JKK.WP.7287245/SPK/SPV.RHB.JBT-PKT.1/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	130.247.733,00	620/06-PK.HS.6966245/SPK/SPV.RHB.JLN.PKT.2/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	129.567.636,00	620/06-JKK.WP.6974245/SPK/SPV.RKN.JLN-PKT.6/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	161.114.280,00	620/06-JKK.WP.6960245/SPK/SPV.RKN.JLN-PKT.12/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	165.040.350,00	620/06-JKK.WP.6961245/SPK/SPV.RKN.JLN-PKT.13/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	129.170.700,00	620/06-JKK.WP.6953245/SPK/SPV.RKN.JLN-PKT.15/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	132.722.700,00	620/06-JKK.WP.6954245/SPK/SPV.RKN.JLN-PKT.21/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	162.287.550,00	620/06-JKK.WP.6838245/SPK/SPV.RKN.JLN-PKT.22/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	191.402.850,00	620/06-PK.HS.6806245/SPK/SPV.RKN.JL.BJG.NGK-ST/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	128.718.375,00	620/06-PK.HS.6839245/SPK/SPV.RKN.JL.KBG.JY-KDGNP-CTK/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	62.561.376,00	620/06-PK.HS.6804245/SPK/SPV.RKN.JL.MCK-PMKSR.LBK/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	99.600.300,00	641/006-JKK.WP.10000920000/SPK/SPV.PMTNG N.LHN.SGNE.PSMPKB-1/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	132.978.000,00	641/JKK.WP.6947245/SPK/PGWSN-PLZ.ASPRS-1/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.427.300,00	641/006-JKK.WP.8428245/SPK/SPV.GDNG.OPD-1.B3/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	95.894.010,00	641/006-JKK.WP.10000918000/SPK/SPV.HLMN.OPD-B3.PMTNG.BPBD/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	237.273.600,00	641/06-JKK.WP/7042245/SPK/PGWSN-OPD.3/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	151.859.100,00	641/06-JKK.WP.7-42245/SPK/PGWSN-OPD.4/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.493.900,00	641/006-JKK.WP.7143245/SPK/SPV.GDNG.PLSB SKTR.GNGSR/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	98.259.975,00	641/006-JKK.LS.8553245/SPK/BSC.RUMDIN.BPT-WKL/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	82.167.750,00	641/006-JKK.LS.7292245/SPK/UPDATING.MP/KP A-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	98.224.455,00	641/006-JKK.LS.10004738000/SPK/DED.OPD.5/K PA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	98.324.355,00	641/006-JKK.LS.10004728000/SPK/DED.OPD.6/K PA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	81.436.260,00	641/006-JKK.LS.10002735000/SPK/PEMATANGA N.E4/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	98.351.550,00	641/006-JKK.LS.10000502000/SPK/DED.PRKR.K MRSL.1/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	98.290.500,00	641/006-JKK.LS.10000507000/SPK/DED.PRKR.K MRSL.2/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	82.128.900,00	641/006-JKK.LS.8547245/SPK/PRC.TMNKOT.CR S/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	98.170.758,00	641/006-JKK.LS.10004747000/SPK/REVW.RTH-H2/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	98.170.620,00	641/006-JKK.LS.10002519000/SPK/DED.KORAMI L/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	98.135.100,00	641/006-JKK.LS.8593245/SPK/RVW.FSS.FSM.BO JONEGARA/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.327.400,00	641/006-JKK.WP.7144245/SPK/SPV.PMTNGN-LHN.FSS.FSM.PMRYN-1/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.449.500,00	641/006-JKK.WP.7260245/SPK.RTH.PSPMKB.LJT /KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	96.150.975,00	641/006-JKK.WP.7147245/SPK/SPV.FSS.FSM.CN GK-1/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.330.250,00	610/06-PK.HS.7053245/SPK/PTSS.CSTU/KPA-SDA/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.412.200,00	610/08-E.KTLG.PK.HS.47151652/SPK/PTSS.BR GBG/KPA-SDA/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.427.780,00	610/08-E.KTLG.PK.HS.47151642/SPK/PTSS.MK R.JY/KPA-SDA/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.485.900,00	610/08-E.KTLG.PK.HS.47151653/SPK/PTSS.PN GRNGN/KPA-SDA/DPUPR/2024	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.849.900,00	610/08-E.KTLG.PK.HS.52784241/SPK/PTSS.CD NGNG/KPA-SDA/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.011.547,00	690/06-PK.HS.7345245/SPK/DRNS.KESERANG AN/KPA-SAM/DPUPR/2024 tanggal 10 Juli 2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.009.400,00	690/06-PK.HS.8386245/SPK/DRNS.CIPANDAN/K PA-SAM/DPUPR/2024 tanggal 10 Juli 2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.006.386,00	690/06-PK.HS.8387245/SPK/DRNS.KRJETAK/KP A-SAM/DPUPR/2024 tanggal 10 Juli 2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.008.367,00	690/06-PK.HS.7346245/SPK/DRNS.KBCEMPAK A/KPA-SAM/DPUPR/2024 tanggal 16 Agustus 2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.652.800,00	690/06-PK.HS.8402245/SPK/DRNS.SADAH2/KP A-SAM/DPUPR/2024 tanggal 07 Agustus 2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.001.224,00	690/06-PK.HS.7347245/SPK/DRNS.SAITMASJID /KPA-SAM/DPUPR/2024 tanggal 10 Juli 2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.050.000,00	690/06-PK.HS.8388245/SPK/DRNS.SAITMUNCA NG/KPA-SAM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.660.000,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289162/SPK/RKN.JL.DS. CRNG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.032.600,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289161/SPK/RKN.JL.DS. CRKCK/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.977.750,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289163/SPK/RKN.JL.DS. CBJG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.599.990,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289164/SPK/RKN.JL.DS. CKDG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.027.500,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289220/SPK/RKN.JL.DS. CKLLT/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.700.000,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289221/SPK/RKN.JL.DS. CST_(PGC)/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.209.050,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289222/SPK/RKN.JL.DS. KDBRM_(CTRP-CMNT)/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.123.600,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289226/SPK/RKN.JL.DS. KDBRM_(GN.KPK)/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.082.300,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289227/SPK/RKN.JL.DS. KLMPG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.182.350,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289228/SPK/RKN.JL.DS. KDG.SK/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.897.550,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289229/SPK/RKN.JL.DS. KPNDN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.350.600,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289238/SPK/RKN.JL.DS. KBN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.968.500,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289232/SPK/RKN.JL.DS.	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
		LBN/KPA-BM/DPUPR/2024	
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.100.000,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289231/SPK/RKN.JL.DS.PBRN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.246.500,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289233/SPK/RKN.JL.DS.PKNCN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.150.000,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289234/SPK/RKN.JL.DS.PNCRGG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.959.700,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289235/SPK/RKN.JL.DS.PSGGRHN_(KP.LMBRJR)/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.150.000,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289236/SPK/RKN.JL.DS.PSGGRHN_(KP.LBKBD)/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.907.550,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289237/SPK/RKN.JL.DS.PGRGN_(KP.KNTR)/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.850.200,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289246/SPK/RKN.JL.DS.RNJG_(BCP.1)/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.998.050,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289245/SPK/RKN.JL.DS.SLB_(KP.KDBNTG)/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.992.750,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289239/SPK/RKN.JL.DS.SKCI/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.999.550,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289240/SPK/RKN.JL.DS.TLG.LHR/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.982.100,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289242/SPK/RKN.JL.DS.TGKRK/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.519.900,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47289244/SPK/RKN.JL.DS.WRKS_(KP.BJG)/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.970.000,00	620/06-PK.HS.52851212/SPK/TPT.JL.DS.PNYG N.JY/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	77.347.900,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.52851182/SPK/TPT.JL.DS.MKRJY/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.633.681,00	600/07.E-KTLG.PK.HS.53655046/SPK/PEMEL.RPEPPJ/KPA-SEKRE/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Tagihan Listrik	35.443.141,00	0034/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DPUPR
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	35.020.000,00	056/15-JK.8623245/SPK/PPK-DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	35.000.000,00	056/15-JK.8622245/SPK/PPK-DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.800.000,00	056/15-JK.8621245/SPK/PPK-DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	49.947.225,00	641/JK.8650245/SPK/PPK-BP/DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi LayananJasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	49.952.220,00	641/JK.8652245/SPK/PPK-BP/DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	64.000.000,00	800/65/BP/DPRKP/VI/2024	DPRKP
Utang Belanja Sewa Hotel	51.200.000,00	602/14-JL.52880197/SP/PPK-Perumahan/DPRKP/2024	DPRKP



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan ArsitekturJasa Desain Arsitektural	99.866.700,00	056/13-JKK-10000681000/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan Gedung Tempat KerjaBangunan Terbuka	7.471.439,00	600/PK.RSS-P2411-10853810/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Tagihan Listrik	30.533.160,00	Surat Tagihan No. 0126/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DPRKP
Utang Belanja Tagihan Listrik	3.934.013,00	Surat Tagihan No. 02538/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	SATPOL PP
Utang Belanja Tagihan Telepon	53.391,00	Surat Tagihan No.054/KU-01/KOPRG/II/2025	SATPOL PP
Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	7.044.000,00	027/913/SP/ BPBD/2024	BPBD
Utang Belanja Tagihan Telepon	2.763.899,00	No.C.TEL.01/KU.370/DGS-B30002000/2025	BPBD
Utang Belanja Tagihan Listrik	12.624.050,00	Surat Tagihan No. 0060 /AGA.01.02/ULP.SRG/2025	BPBD
Utang Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	999.800,00	042.SP.PPOB/KKBTS/II/2025	BPBD
Utang Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Pemotretan	10.000.000,00	000.3/75/E-Katalog/PPK/Dinsos/XI/2024	DINSOS
Utang Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Pemotretan	10.000.000,00	000.3/76/E-Katalog/PPK/Dinsos/XI/2024	DINSOS
Utang Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Pemotretan	9.600.000,00	000.3/77/E-Katalog/PPK/Dinsos/XI/2024	DINSOS
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00	Honor Narasumber Sosialisasi	DINSOS
Utang Belanja Jasa Operator Komputer	65.200.000,00	Honor Operator SIKS-NG	DINSOS
Utang Belanja Sewa Gedung	125.125.000,00	027/137/SPK/PPK/DINSOS/2024	DINSOS
Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	3.420.600,00	027/040/Dinsos/XII/2024	DINSOS
Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	11.574.000,00	027/039/Dinsos/XII/2024	DINSOS
Utang Belanja Tagihan Listrik	5.609.468,00	Surat Tagihan No. 0081 /AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DINSOS
Utang Belanja Tagihan Listrik	13.123.674,00	Surat Tagihan No. 0196/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DISNAKERTRANS
Utang Belanja Tagihan Air	631.500,00	Surat Tagihan No.070500100412-202412-2024	DISNAKERTRANS
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air irigasi-Bangunan Air irigasi Lainnya	159.441.880,00	500.6.5/1947/SPK-Pras/ABT/DKPP/XI/2024 tanggal 28 November 2024	DKPP
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air irigasi-Bangunan Air irigasi Lainnya	153.492.000,00	500.6.5/1946/SPK-Pras/ABT/DKPP/XI/2024 tanggal 28 November 2024	DKPP
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.803.432,00	027/1235/DKPP/2024 tanggal 20 Agustus 2024	DKPP
Utang Belanja Tagihan Listrik	15.629.610,00	Surat Tagihan No. 0044/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DKPP
Utang Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	89.835.630,00	027/9480/SPK-JKL/DLH/2024	DLH
Utang Belanja Tagihan Listrik	20.910.039,00	Surat Tagihan No. O140 /AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DLH
Utang Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	897.148.650,00	Luncuran Tahun 2023	DLH
Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	311.055.000,00	027/2080/Disdukcapil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	333.000,00	027/1920/Disdukcapil/2024	DISDUKCAPIL



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Pemeliharaan Printer)	19.430.000,00	027/1766/Disdukcabil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak (Buku Pokok Kematian)	17.864.800,00	027/2055/Dukcabil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Tagihan Listrik	13.370.626,00	0068/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	10.000.000,00	000.3.2/545/SP/DPMD/2024	DPMD
Utang Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	6.000.000,00	000.3.2/549/SP/DPMD/2024	DPMD
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.507.600,00	000.3.2/496/SP/DPMD/2024	DPMD
Utang Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	220.500.000,00	SK Bupati No 002/Kep.499-Huk.DPMD/2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Para Juara Lomba Kampung bersih dan Aman Kab. Serang	DPMD
Utang Belanja Tagihan Listrik	4.690.533,00	Surat Tagihan No. 0072 1AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DPMD
Utang Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.896.000,00	027/1448.1/SP/e-Catalogue/DKBPPPA/2024	DKBP3A
Utang Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.500.000,00	900/593/DKBPPPA/2024	DKBP3A
Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat anhkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	21.548.000,00	027/1481/SP/Sekret/DKBPPPA/2024	DKBP3A
Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat anhkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	69.938.455,00	027/1475/SP/Sekret/DKBPPPA/2024	DKBP3A
Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia	1.700.000,00	900 / 480.e/ DKBPPPA/ 2024	DKBP3A
Utang Belanja Tagihan Listrik	5.898.349,00	Surat Tagihan No. 0103/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DKBP3A
Utang Belanja Tagihan Air	86.000,00	Tagihan Nomor 070500100558-202504-2025	DKBP3A
Utang Belanja Sasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian	99.511.500,00	SPK/001-JK.PEL/X/DISHUB/2024	DISHUB
Utang Belanja Sasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian	99.123.000,00	SPK/001-JK.PEL/X/ DISHUB/2024	DISHUB
Utang Belanja Tagihan Listrik	739.697.086,00	Surat Tagihan No. 0011/AGA.04.02/F32030000/2025	DISHUB
Utang Belanja Tagihan Telepon	289.821,00	Surat Tagihan No. 023/KU-01/KOPRG/1/2025	DISHUB
Utang Belanja Jasa Konusltasi Berorientasi Bidang-Telematika Penyusunan Pedomaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Terintegrasi	49.960.000,00	000.3/289/SPK/PPK-Diskominfoatik/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Kawat/Fasmili/Intenet/TV Langganan	165.000.000,00	027/001/SP/E-katalog/Diskominfoatik/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Kawat/Fasmili/Intenet/TV Langganan	165.000.000,00	027/002/SP/E-katalog/Diskominfoatik/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	72.116.800,00	000.3/1141/SP/e-Katalog/Diskominfoatik/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Jasa Konusltasi Berorientasi Bidang-Telematika Analisis Media	49.950.000,00	000.3/10000818000/SPK/PPK-Diskominfoatik/Bid.KIP/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Jasa Konusltasi Berorientasi Bidang-Telematika Radio Serang Gawe manjadi BUMD	49.998.840,00	000.3/10000807000/SPK/PPK-Diskominfoatik/Bid.KIP/%%%% 2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.000.000,00	000.3/0711/SP/e-Katalog/Diskominfoatik/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.000.000,00	000.3/0731/SP/e-Katalog/Diskominfoatik/2024	DISKOMINFOS ATIK



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.100.000,00	000.3/1156/SP/e-Katalog/DiskominfoSATIK/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Jsa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.500.000,00	000.3/1081/SP/e-Katalog/DiskominfoSATIK/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Jsa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	000.3/1151/SP/e-Katalog/DiskominfoSATIK/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Jsa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50.000.000,00	000.3/1011/SP/e-Katalog/DiskominfoSATIK/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Jsa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50.000.000,00	000.3/1026/SP/e-Katalog/DiskominfoSATIK/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Jsa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50.000.000,00	000.3/1086/SP/e-Katalog/DiskominfoSATIK/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Jsa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50.000.000,00	000.3/1091/SP/e-Katalog/DiskominfoSATIK/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Jsa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50.000.000,00	000.3/0841/SP/e-Katalog/DiskominfoSATIK/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Jsa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50.000.000,00	000.3/0891/SP/e-Katalog/DiskominfoSATIK/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survey Optimalisasi Sosiaa Media Pemerintah	49.839.000,00	000.3/10001830000/SPK/PPK-DiskominfoSATIK/Bid.KIP/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja makanan dan minuman Rapat	5.120.000,00	000.3/124/SP/e-Katalog/Sanditik/DiskominfoSATIK/2024	DISKOMINFOS ATIK
Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1.800.000,00	Daftar Honor Kegiatan Penyelenggaraan Hasil Penilaian EPSS	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	247.500.000,00	000.3/110/SP/e-Katalog/DiskominfoSATIK/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Tagihan Listrik	9.818.504,00	Surat Tagihan No. 0196 /AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Metrologi	14.000.000,00	027/2466/SPK-DISKOUMPERINDAG/2024	DISKOPERIND AG
Utang Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.250.000,00	027/2441.a/SP-DISKOUMPERINDAG/2024 Tanggal 16 Desember 2024	DISKOPERIND AG
Utang Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	7.110.000,00	027/2245.b/SP-DISKOUMPERINDAG/2024	DISKOPERIND AG
Utang Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Komputer Lainnya	7.960.000,00	027/2245.a/SP-DISKOUMPERINDAG/2024	DISKOPERIND AG
Utang Belanja Tagihan Listrik	18.219.082,00	Surat Tagihan No. 0196/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DISKOPERIND AG
Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.796.000,00	027/502/SP/DPMTSP/2024	DPMTSP
Utang Belanja Tagihan Air	3.538.000,00	Tagihan Nomor 070500100425-202502-2025	DPMTSP
Utang Belanja Tagihan Listrik	21.365.545,00	Surat Tagihan No.196 /AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DPMTSP
Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	34.800.000,00	500.13/32/SP-Disporapar/2024	DISPORAPAR
Utang Belanja Tagihan Listrik	5.632.903,00	Surat Tagihan No. 0148/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DISPORAPAR
Utang Belanja Tagihan Listrik	5.995.040,00	42100-16/2025/801834	DPKD
Utang Belanja Tagihan Telepon	268.900,00	42100-51/2025/801575	DPKD
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.656.000,00	027/2212/06.0008/SP/PPK/2024	DINAS PERIKANAN
Utang Belanja Natura dan PakanNatura	5.597.900,00	027/2358/06.0008/SP/PPK/ADD/DISKAN/2024	DINAS PERIKANAN
Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.100.000,00	-900/1025/09.0010/Diskan/12/2024 Tgl 4 Desember 2024	DINAS PERIKANAN
Utang Belanja BahanBahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	28.595.000,00	3.25/4.2/03-31.2/EK/PPK/DISKAN/2024	DINAS PERIKANAN
Utang Belanja BahanBahan Lainnya	16.790.000,00	3.25/4.2/03-32.2/EK/PPK/DISKAN/2024	DINAS PERIKANAN
Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.900.000,00	3.25/4.2/03-33.2/EK/PPK/DISKAN/2024	DINAS PERIKANAN
Utang Belanja Natura dan PakanNatura	102.090.000,00	3.25/4.2/03-30.2/EK/PPK/DISKAN/2024	DINAS



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
dan Pakan Lainnya			PERIKANAN
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan AirBangunan Air IrigasiBangunan Pembawa Irigasi	8.739.604,00	3.25/4.2/03-4.2/SPK/PPK-K/DISKAN/2024	DINAS PERIKANAN
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan AirBangunan Air IrigasiBangunan Pembawa Irigasi	8.732.571,00	3.25/4.2/03-6.2/SPK/PPK-K/DISKAN/2024	DINAS PERIKANAN
Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan AirBangunan Air IrigasiBangunan Pembawa Irigasi	8.738.716,00	3.25/4.2/03-5.2/SPK/PPK-K/DISKAN/2024	DINAS PERIKANAN
Utang Belanja Tagihan Listrik	1.034.421,00	Surat Tagihan No. 0100/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	DINAS PERIKANAN
Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	20.000.000,00	0119/A/s.k/aspeksindo/VII/2024	SETDA
Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	165.589.500,00	027/396/SP/Umum-Setda/2024	SETDA
Utang Belanja Sewa Hotel	50.260.000,00	602/14-JL. 10060593000 /SP/Umum-Setda/2024	SETDA
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.130.000,00	500/324/SP-Adendum/PE-SETDA/2024	SETDA
Utang Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.360.000,00	270/314/PE-SETDA/2024	SETDA
Utang Belanja Tagihan Listrik	103.850.860,00	Surat Tagihan NO. :0040/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	SETDA
Utang Belanja Tagihan Listrik	18.397.409,00	Surat Tagihan No. 0155/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	SETWAN
Utang Belanja Tagihan Telepon	40.855,00	Surat Tagihan No.022/KU-01/KOPRG/II/2025	BAPPEDA LITBANG
Utang Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	19.435.000,00	025.SP.PPOB/KKBTS/II/2025	BAPENDA
Utang Belanja Tagihan Telepon	273.171,00	Tel.222/YN 000/T2W-0A0K0000/2024	BAPENDA
Utang Belanja Tagihan Listrik	21.785.185,00	Surat Tagihan No. 0062/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	BAPENDA
Utang Belanja Tagihan Listrik	8.248.684,00	Surat Tagihan No. 0134/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	BPKAD
Utang Belanja Tagihan Air	897.000,00	070500100712-202412-2024	BKPSDM
Utang Belanja Tagihan Listrik	11.382.676,00	Surat Tagihan No. 0196 /AGA.01.02/ULP.SRG/2025	BKPSDM
Utang Belanja Tagihan Listrik	9.335.262,00	Surat Tagihan No.0105 /AGA.01.02/ULP.SRG/2025	Inspektorat
Utang Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	35.052.700,00	Lunc th 2021	Kec. Ciruas
Utang Belanja Tagihan Listrik	2.501.428,00	Surat Tagihan No. 0124/AGA.01.02/ULP.SRG/2025	Kec. Kramatwatu
Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.800.000,00	DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.21.0000/001/2024	Kec. Padarincang
Utang Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	39.000.000,00	056/SP/BAKESBANGPOL/2024	Kesbangpol
Utang Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas	10.500.000,00	056/SP/BAKESBANGPOL/2024	Kesbangpol
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	295/SP/BAKESBANGPOL/XII/2024	Kesbangpol
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	286/SP/BAKESBANGPOL/XII/2024	Kesbangpol
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.490.000,00	292/SP/BAKESBANGPOL/XII/2024	Kesbangpol
Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Utang Belanja Cetak	59.615.500,00	250/SP/BAKESBANGPOL/X/2024	Kesbangpol
Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.200.000,00	301/SP/BAKESBANGPOL/XII/2024	Kesbangpol
Utang Utang Belanja Modal	19.585.440.218,76		
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	131.989.600,00	Lunuran Tahun 2018	DISDIK



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.908.512,00	027/01-PK.8413245/SPK/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.913.454,00	027/01-PK.8412245/SPK/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.915.076,00	027/01-PK.8411245/SPK/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.910.700,00	027/01-PK.8410245/SPK/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.913.000,00	027/01-PK.8408245/SPK/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.894.395,00	027/01-PK.8407245/SPK/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	35.684.850,00	027/01-PK.8093245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	36.638.729,00	027/01-PK.8094245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.000.313,00	027/01-PK.8092245/SP/SARPRAS.2024	DISDIK
Utang Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	11.567.580,00	642/03-PK.8150245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Modal Buku Umum	37.230.000,00	027 /47222951/KPA-SD/Disdikbud.2024.1	DISDIK
Utang Belanja Modal Personal Computer (Laptop dan PC)	98.600.000,00	870/4041/Umum-Dinkes/2024	DINKES
Utang Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.400.000,00	870/4043/Umum-Dinkes/2024	DINKES
Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30.920.000,00	870/4042/Umum-Dinkes/2024	DINKES
Utang Belanja Modal Mebel	925.257.457,00	870/3661/UMUM-DINKES/2024	DINKES
Utang Belanja modal Bangunan Kesehatan (DAK Fisik)	1.239.977.523,00	641/04-PK.8085245/SPK/PKM.KIBIN/KPA-SDK/DINKES/2024 Tanggal: 05-Juli-2024	DINKES
Utang Belanja Modal Bangunan Kesehatan	250.180.000,00	641/07/E-KTLG.PK.HS.52560596/SPK/RHB.PKM.BRS/KPA.SDK/DINKES/2024	DINKES
Utang Belanja Modal Bangunan Kesehatan	248.570.000,00	641/07/E-KTLG.PK.HS.52885464/SPK/RHB.PKM.ANYR/KPA.SDK/DINKES/2024	DINKES
Utang Belanja Modal Bangunan Kesehatan	249.410.000,00	641/07/E-KTLG.PK.HS.52560670/SPK/RHB.PKM.PTR/KPA.SDK/DINKES/2024	DINKES
Utang Belanja Modal Bangunan Kesehatan	199.619.100,00	641/07/E-KTLG.PK.HS.52560376/SPK/RHB.PKMN YMPK/KPA.SDK/DINKES/2024	DINKES
Utang Belanja Modal Bangunan Kesehatan	198.260.000,00	641/07/E-KTLG.PK.HS.52560445/SPK/RHB.PKM.TNJGTJ/KPA.SDK/DINKES/2024	DINKES
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	559.917.983,00	620/06-PK.HS.7015245/SPK/RKN.JLN-PKT.23/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	254.474.905,00	620/06-PK.HS.7037245/SPK/RKN.JLN-PKT.9/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.990.007,00	620/07.PK.HS.6584245/SPK/PNKT.SLRN.DRNS.BRGBG/KPA-BM/DPUPR/2023	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	7.497.500,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.44436549/SPK/PNKT.SLRN.DRNS.JL.CKD.PRM(LNJTN)/KPA-BM/DPUPR/2023	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	7.496.750,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.44436777/SPK/PNKT.SLRN.DRNS.JLGRD-BDG/KPA-BM/DPUPR/2023	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.386.014.780,00	641/06-PK.HS.6942245/SPK/GDNG.PLZ.ASPRS-1/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	64.350.000,00	641/07.E-KTLG.PK.HS.53057536/SPK/PMTNGN.LHN.SGNE.PSMPKB-1/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	835.594.500,00	641/09.E-KTLG.PK.HS.47112044/SPMK/PMBGN.O PD01.LNJTN/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	188.635.420,00	641/006-PK.HS.10001801000/SPK/PNTN.HLM.CI KEUSAL/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	25.052.509,00	610/06-PK.HS.7049245/SPK/DI.CST/KPA-SDA/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	8.751.750,00	610/08-E.KTLG.PK.HS.47167204/SPK/DI.KDBR M/KPA-SDA/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	7.134.900,00	610/08-E.KTLG.PK.HS.47167203/SPK/DI.OTO/KPA-SDA/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	161.507.877,00	660/07.E.KTLG.PK.HS.51935475/SPK/OP T-TPST.KIBIN/KPA-SAM/DPUPR/2024 tanggal 02 Oktober 2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	42.108.600,00	620/06-PK.HS.7041245/SPK/PBN.AKS.PUSPEM KAB THP.2/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	754.499.600,00	620/06-PK.HS.6819245/SPK/PBN.JLN.PUSPEM KAB_S3.LJTN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	221.602.350,00	620/06-PK.HS.7017245/SPK/BDN.JLN.AKS.TPS.BJG.MNTG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	380.348.200,00	620/06-PK.HS.6818245/SPK/PPM.JLN.PUSPEM KAB THP.1/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	16.741.050,00	620/07.E-KTLG.PK.HS.47204928/SPK/RHB.JLN.B NHR-BNJRSR/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	24.529.450,00	620/06-PK.HS.6983245/SPK/RHB.JLN.CKNG-GMBR/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	97.010.050,00	620/06-PK.HS.6979245/SPK/RHB.JLN.GRD-WWLH/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	31.436.050,00	620/06-PK.HS.6985245/SPK/RHB.JLN.JWLN-PMRYN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	73.587.450,00	620/06-PK.HS.6982245/SPK/RHB.JLN.MLBR-JNT/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	72.670.950,00	620/06-PK.HS.6984245/SPK/RHB.JLN.NGL-KP/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	71.023.500,00	620/06-PK.HS.6978245/SPK/RHB.JLN.SNTL-KSRP/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	24.723.150,00	620/06-PK.HS.6981245/SPK/RHB.JLN.SRH-KMSN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	44.699.900,00	620/06-PK.HS.6980245/SPK/RHB.JLN.TMBK-MLBR-PMRYN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	76.410.400,00	620/06-PK.HS.6995245/SPK/RKN.JLN.KBN-LTR-ALG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	188.742.900,00	620/06-PK.HS.7036245/SPK/RKN.JLN-PKT.1/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	204.214.850,00	620/06-PK.HS.6925245/SPK/RKN.JLN-PKT.3/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	227.093.450,00	620/06-PK.HS.7031245/SPK/RKN.JLN-PKT.4/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	138.118.300,00	620/06-PK.HS.6926245/SPK/RKN.JLN-PKT.5/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	252.748.650,00	620/06-PK.HS.7030245/SPK/RKN.JLN-PKT.6/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	207.561.650,00	620/06-PK.HS.7033245/SPK/RKN.JLN-PKT.7/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	195.749.950,00	620/06-PK.HS.7037245/SPK/RKN.JLN-PKT.9/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	128.579.850,00	620/06-PK.HS.6928245/SPK/RKN.JLN-PKT.10/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	272.899.500,00	620/06-PK.HS.7061245/SPK/RKN.JLN-PKT.11/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	340.737.400,00	620/06-PK.HS.7019245/SPK/RKN.JLN-PKT.12/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	195.134.750,00	620/06-PK.HS.7018245/SPK/RKN.JLN-PKT.13/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	262.966.600,00	620/06-PK.HS.7028245/SPK/RKN.JLN-PKT.14/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	122.220.250,00	620/06-PK.HS.7034245/SPK/RKN.JLN-PKT.15/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	214.720.250,00	620/06-PK.HS.7035245/SPK/RKN.JLN-PKT.16/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	220.533.700,00	620/06-PK.HS.6930245/SPK/RKN.JLN-PKT.17/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	192.868.400,00	620/06-PK.HS.6931245/SPK/RKN.JLN-PKT.18/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	191.819.400,00	620/06-PK.HS.6932245/SPK/RKN.JLN-PKT.19/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	161.999.950,00	620/06-PK.HS.6933245/SPK/RKN.JLN-PKT.20/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	142.758.050,00	620/06-PK.HS.7014245/SPK/RKN.JLN-PKT.21/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR





Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	137.383.400,00	620/06-PK.HS.6998245/SPK/RKN.JLN-PKT.22/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	196.462.450,00	620/06-PK.HS.7015245/SPK/RKN.JLN-PKT.23/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	67.580.450,00	620/06-PK.HS.7016245/SPK/RKN.JLN.RAAB-SGGM.JY/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	68.528.850,00	620/06-PK.HS.6997245/SPK/RKN.JLN.TMBK-WRKS/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	15.673.650,00	630/06-PK.HS.6991245/SPK/PMB.JBT.CNYRND H_DS.CST_THP.2/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	72.000.000,00	630/06-PK.HS.7020245/SPK/PMB.JBT.DS.SKTG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	53.661.950,00	630/06-PK.HS.7011245/SPK/PMB.JBT.KP.KMSN.KBGSN_DS.MRGSN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	132.353.100,00	630/06-PK.HS.7013245/SPK/PMB.JBT.KP.LWG.SMT_DS.JRK.TPS/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	13.477.350,00	630/06-PK.HS.7001245/SPK/RHB.JBT.DS.KDGN P/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	19.344.500,00	630/06-PK.HS.7040245/SPK/RHB.JBT.DS.PGNT GN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	24.107.450,00	630/06-PK.HS.7039245/SPK/RHB.JBT.KSTR_DS.CRG.AGG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	13.178.150,00	630/06-PK.HS.7000245/SPK/RHB.JBT.PSR.BYT/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	27.257.750,00	630/06-PK.HS.7038245/SPK/PLB.JBT.IRGS_I/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	13.500.600,00	630/06-PK.HS.7021245/SPK/PLB.JBT.(JL.PNDK.KHR) DS.LBK/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	24.732.300,00	620/06-PK.HS.6977245/SPK/PMB.SSTM.DRNS.CKND.PRM-JNT/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	24.728.450,00	620/06-PK.HS.7023245/SPK/PMB.SSTM.DRNS.CST-LBK/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	22.383.950,00	620/06- PK.HS.6992245/SPK/PMB.SSTM.DRNS.J WLN-PMRYN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	24.616.200,00	620/06- PK.HS.6993245/SPK/PMB.SSTM.DRNS.T MBK-MNDY/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.889.400,00	620/06- PK.HS.7319245/SPK/RKN.JLN.KWSN.PS R.ANYR/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.893.800,00	620/06- PK.HS.7318245/SPK/RKN.JLN.KWSN.PS R.PDRNCG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.991.000,00	620/06- PK.HS.7321245/SPK/TPT.JL.KMYNGN.B NDG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.993.350,00	956.21/17- PK.HS.7326245/BAP.100%/TPT.JL.DS.B RGBG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.997.200,00	620/06- PK.HS.7325245/SPK/TPT.JL.DS.SNGAN G/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.992.250,00	620/06- PK.HS.7324245/SPK/TPT.JL.DS.WRNGN /KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.993.500,00	620/06- PK.HS.7322245/SPK/TPT.JL.PDRCG- RYK-GSLI/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.992.500,00	620/06-PK.HS.7323245/SPK/TPT.JL. SNTL.TRSBNDG.TRTYS/KPA- BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.990.400,00	620/06- PK.HS.7320245/SPK/TPT.JL.TRTYS.TNG KRK/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.990.000,00	620/06- PK.HS.7337245/SPK/PNKT.DRNS.JLN.D S.BNTRWNGI/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.990.000,00	620/06- PK.HS.7158245/SPK/PNKT.DRNS.JLN.K RMTWT-WR.KRG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.995.383,26	620/06- PK.HS.7157245/SPK/PNKT.DRNS.JLN.D S.PNGRNGN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.998.880,00	620/06- PK.HS.7161245/SPK/PNKT.DRNS.JLN.D S.SKRNA/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.992.775,00	620/06- PK.HS.7162245/SPK/PNKT.DRNS.JLN.G RDA-BNDG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.996.382,50	620/06- PK.HS.7159245/SPK/PNKT.DRNS.JLN.J NTI-BNNG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.984.450,00	620/06- PK.HS.7160245/SPK/PNKT.DRNS.JLN.P SURN-SDTNI/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR





Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.987.225,00	620/06- PK.HS.7154245/SPK/PNKT.DRNS.JL.SN P-SDDG/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.992.309,00	620/06- PK.HS.7156245/SPK/PNKT.DRNS.JL.WD S-LMBGSR/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.990.555,00	620/06- PK.HS.7155245/SPK/PNKT.DRNS.JL.SK CI-CGGR/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.984.450,00	630/06/PK.HS.7331245/SPK/PMB.JBT.DS .CKP.SLNJN/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.970.000,00	630/06- PK.HS.7332245/SPK/PMB.JBT.(JL.MNCK .CWRN)/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.995.000,00	630/06- PK.HS.7327245/SPK/PLB.JBT.CRG.MJG N.DS.TMN.SR/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.972.500,00	630/06- PK.HS.7330245/SPK/PLB.JBT.(JL. BRS- CSLM)/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.990.000,00	630/06- PK.HS.7329245/SPK/PLB.JBT.(JL.KP.BR- SEUAT)/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.978.900,00	630/06- PK.HS.7328245/SPK/PLB.JBT(MRGGR- PNGRGN)/KPA-BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	23.767.650,00	620/07.E- KTLG.PK.HS.52851232/SPK/PMB.SSTM. DRNS.CKND.PRM-JNT.LJTN/KPA- BM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	55.314.715,00	641/06-PK.HS.6820245/SPK/G- SLSR.B1.PUSPEMKAB.LJT/KPA- PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	140.964.440,00	641/06-PK.HS.6822245/SPK/LNDSCP- RTH.B1.PUSPEMKAB.LJT/KPA- PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	398.999.126,00	641/06- PK.HS.6942245/SPK/GDNG.PLZ.ASPRS- 1/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	24.306.225,00	641/06- PK.HS.6988245/SPK/RMH.DNS.CNGK/K PA-PB/DPUPR/2024	DPUPR





Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	674.974.400,00	641/06-PK.HS.6987245/SPK/TRNG.CNTR/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	148.590.660,00	641/06-PK.HS.7027245/SPK/PTSP.KJR.SRG/KP A-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	64.276.500,00	641/09.E-KTLG.PK.HS.47112044/SPMK/PMBGN.O PD01.LNJTN/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	26.900.819,00	641/07.E-KTLG.PK.HS.53057626/SPK/PERKERAS AN-OPD/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	49.500.000,00	641/07.E-KTLG.PK.HS.53057536/SPK/PMTNGN.L HN.SGNE.PSMPKB-1/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.960.343,00	641/006-PK.HS.10000937000/SPK/PMTNGN.BPB D/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	24.278.820,00	641/06-PK.HS.7025245/SPK/RHB-GDNG.KNTR.BNAG/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	24.840.445,00	641/06-PK.HS.6941245/SPK/RHB.AULA.PTR/KP A-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.942.915,00	641/06-PK.HS.7026245/SPK/RHB-GDNG.BPPD/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	33.239.180,00	641/06-PK.HS.6951245/SPK/RHB-ASRM.YGYA/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.994.150,00	641/006-PK.HS.7045245/SPK/RHB.RUMDIN.CMS/ KPAPB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.988.050,00	641/006-PK.HS.7124245/SPK/RHB.AULA.PMRYN/ KPAPB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.989.100,00	641/006-PK.HS.7313245/SPK/RHB.PGR.PDRCNG /KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.992.150,00	641/006-PK.HS.7314245/SPK/RHB.WORKSHOP/ KPAPB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.990.550,00	641/006-PK.HS.7316245/SPK/RHB.ANYER/KPA/P B/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.992.800,00	641/006-PK.HS.7317245/SPK/RUMDIN.KRAMAT/ KPA PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	85.737.495,00	641/06-PK.HS.6844245/SPK/FSS.FSM.CNGK- 1/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	99.096.975,00	641/06-PK.HS.6824245/SPK/FSS.FSM.ANYR- 1/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR





Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	124.431.280,00	641/06-PK.HS.7012245/SPK/PNTN-ALUN.KRMAT/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	48.783.920,00	641/06-PK.HS.6940245/SPK/PNTN.LING.LBK-WNGI/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	71.826.520,00	641/06-PK.HS.6845245/SPK/PMTNGN-LHN.FSS.FSM.PMRYN-1/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	35.109.805,00	641/06-PK.HS.6989245/SPK/PNTN-FSS.FSM.CKSL-2/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	57.860.430,00	641/06-PK.HS.6950245/SPK/RTH.PSPMKB.LJT/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.979.800,00	641/006-PK.HS.7344245/SPK/PNTN.LNGKGN.TN JNGTJ/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.928.180,00	641/006-PK.HS.10001801000/SPK/PNTN.HLM.CI KEUSAL/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.961.850,00	602/12-PK.7100245/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.963.100,00	602/12-PK.7175245/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Modal Mebel	937.213.928,00	E-Katalog/ADD.010-SP/UP/DKPP/2024 tanggal 13 Desember 2024	DKPP
Utang Belanja Modal Alat Laboratorium	19.000.000,00	SP/7938/E-CATLG/PPK-UPTDLAB/DLH/2024	DLH
Utang Belanja Modal Personal Computer	140.200.000,00	027/1913/Disdukcapil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.350.000,00	027/1921/Disdukcapil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	56.104.150,00	027/1915/Disdukcapil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.225.000,00	027/1953/Disdukcapil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Modal Peralatan Cetak	53.450.000,00	027/1919/Disdukcapil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Modal Alat Studio Lainnya	312.000,00	027/1914/Disdukcapil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.240.000,00	027/1918/Disdukcapil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Modal Peralatan Jaringan	920.000,00	027/1916/Disdukcapil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	52.390.000,00	027/1917/Disdukcapil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (TAB S9)	13.100.000,00	027/1911/Disdukcapil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Modal Peralatan Kantor Lainnya (Printer)	12.600.000,00	024/1840/Disdukcapil/2024	DISDUKCAPIL
Utang Belanja Modal Personal Computer	137.600.000,00	000.3.2/801/SP/ e-Katalog/Diskominfosatik/2024	DISKOMINFOS ATIK
Utang Belanja Modal Mebel	11.900.000,00	027/2306.a/SP-DISKOUMPERINDAG/2024	DISKOPERIND AG
Utang Belanja Modal Mebel	471.794.468,00	027/ 2190.b/SP-DISKOUMPERINDAG/2024	DISKOPERIND AG
Utang Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.007.800,00	278/SP/BAKESBANGPOL/XII/2024	Kesbangpol
Utang Hibah	1.936.439.627,22		
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.983.020,00	642/04-PK.8448245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.975.916,00	642/04-PK.8449245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.970.234,00	642/04-PK.8573245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.932.919,00	642/04-PK.8452245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.970.402,00	642/04-PK.8447245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.978.823,00	642/04-PK.8556245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.972.463,00	642/04-PK.8456245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.954.024,00	642/04-PK.8558245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.917.935,00	642/04-PK.8458245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.979.885,00	642/04-PK.8460245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.990.000,00	642/04-PK.8453245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.990.000,00	642/04-PK.8464245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.988.267,00	642/04-PK.8459245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.990.655,00	642/04-PK.8450245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.969.232,00	642/04-PK.8454245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.919.436,00	642/04-PK.K17-P2409-10496620/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.913.866,00	642/04-PK.8446245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.950.563,00	642/04-PK.8455245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.928.008,00	642/04-PK.8457245/ADD-1/SARPRAS/2024	DISDIK
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	270.709.884,00	690/07.E-KTLG.PK.HS.51936206/SPK/MNR-DHR/KPA-SAM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.110.411,00	690/07.E-KTLG.PK.HS.47472565/SPK/SPAM-SLRA/KPA-SAM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	304.196.251,00	690/07.E-KTLG.PK.HS.47675088/SPK/SPAM-LBK/KPA-SAM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	39.000.000,00	690/38090463.PKS/AM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	176.199.065,00	660/06-PK.HS.10000284000/SPK/MCK.CURUG/KPA-SAM/DPUPR/2024 tanggal 03 April 2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.226.621,00	690/07.E-KTLG.PK.HS.47471814/SPK/SPAM-KMRT/KPA-SAM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.379.579,00	690/07.E-KTLG.PK.HS.47472141/SPK/SPAM-WRKS/KPA-SAM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.211.400,00	690/PK.5741245/SPK/PPK-PERKIMKES/DPKPTB/2022	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.209.950,00	690/PK.5742245/SPK/PPK-PERKIMKES/DPKPTB/2022	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.241.300,00	690/PK.5686245/SPK/PPK-PERKIMKES/DPKPTB/2022	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.898.900,00	690/PK.5685245/SPK/PPK-PERKIMKES/DPKPTB/2022	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.949.692,22	690/06-PK.HS.8369245/SPK/MENARA-MBWG/KPA-SAM/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.661.778,00	690/06-PK.HS.8353245/SPK/BOR-CKD.DUHUR/KPA-SAM/DPUPR/2024	DPUPR



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.235.808,00	690/06-PK-HS.6960245/SPK/BOR-AIR-2UL/KPA-SAM/DPUPR/2023	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.097.400,00	SPK Awal : 660/06-PK.HS.7127245/SPK/MCK.DSBJPANDAN /KPA-SAM/DPUPR/2024, tanggal 03 April 2024 SPK Add. Ke 1 : 660/06-PK.HS.7127245/SPK.ADD/MCK.DSBJPA NDAN/KPA-SAM/DPUPR/2024, tanggal 23 April 2024 SPK Add. Ke 2 : 660/06-PK.HS.7127245/SPK.ADD2/MCK.DSBJP ANDAN/KPA-SAM/DPUPR/2024, tanggal 01 Juli 2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.205.100,00	SPK Awal : 660/06-PK.HS.7130245/SPK/TOILET.DSCIKOLE LET/KPA-SAM/DPUPR/2024, tanggal 03 April 2024 SPK Add. ke 1 : 660/06-PK.HS.7130245/SPK.ADD/TOILET.DSCIK OLELET/KPA-SAM/DPUPR/2024, tanggal 23 April 2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.200.150,00	SPK Awal : 660/06-PK.HS.7129245/SPK/TOILET.DSKBBAR OS/KPA-SAM/DPUPR/2024 tanggal 03 April 2024 SPK Add. Ke 1 : 660/06-PK.HS.7129245/SPK.ADD/TOILET.DSKB BAROS/KPA-SAM/DPUPR/2024 tanggal 23 April 2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.273.635,00	660/06-PK.HS.10000284000/SPK/MCK.CURUG/ KPA-SAM/DPUPR/2024 tanggal 03 April 2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang u dangan	199.238.965,00	641/06-PK.HS.6823245/SPK/GDNG.MAKO.PLSK .BRS/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang u dangan	37.465.785,00	641/06-PK.HS.6846245/SPK/GDNG.PLSBSKTR. GNGSR/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang u dangan	67.227.980,00	641/06-PK.HS.6976245/SPK/AULA.PLRS- SRG/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang undangan	32.262.575,00	641/06-PK.HS.7024245/SPK/GDNG.POSPOL.BD G/KPA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang undangan	9.946.650,00	641/006 PK.HS.7348245/SPK/PGR.POL.BINUAN G /KPA PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang udangan	9.980.300,00	641/006-PK.HS.7308245/SPK/RHB.ASRAMA.CIO MAS/K PA-PB/DPUPR/2024	DPUPR
Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	99.380.800,00	600.2/PK.KSJ-P2410-10674694/SPK/PPK-KP/DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	9.948.950,00	600.2/PK.KSJ-P2410-10666988/SPK/PPK-KP/DPRKP/2024	DPRKP



Jenis Utang	Jumlah Utang	Dasar	SKPD
Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	9.920.900,00	600.2/PK.KSJ-P2410-10672145/SPK/PPK-KP/DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	9.946.250,00	600.2/PK.KSJ-P2410-10672564/SPK/PPK-KP/DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	9.917.650,00	600.2/PK.KSJ-P2410-10767089/SPK/PPK-KP/DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan	9.963.350,00	602/PK.KSJ-P2404-9021755/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2024	DPRKP
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan	9.956.900,00	602/PK.KSJ-P2404-9021546/SPK/PPK-PSU/DPRKP/2024	DPRKP
Utang Transfer	74.622.787.265,00		BPKAD
	38.072.257.333,00	BHPRD 2023	BPKAD
	36.399.329.932,00	BHPRD 2024	BPKAD
	151.200.000,00	ADD atas 2 Desa	BPKAD
Total	136.731.025.889,98		

5.8.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.893.515.363,00 terdiri dari Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.103.854,00 dan Kewajiban akibat likuidasi LKM Ciomas sebesar Rp1.891.411.509,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 121
Rincian Kewajiban LKM Ciomas

No.	Uraian	Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2023	Pembayaran melalui APBD	Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2024
1	Kewajiban Tabungan	865.875.637,00	865.875.637,00	0,00
2	Kewajiban Deposito	1.616.250.000,00	1.616.250.000,00	0,00
3	Kewajiban Pelunasan Bank BJB	809.912.131,00	0,00	809.912.131,00
4	Kewajiban Pelunasan PT. BPR (Bank Serang)	1.081.499.378,00	0,00	1.081.499.378,00
	Jumlah	4.373.537.146,00	2.482.125.637,00	1.891.411.509,00

5.9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di neraca merupakan saldo akhir ekuitas pada perubahan saldo ekuitas.

Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 sebesar Rp4.785.872.519.116,79 dari saldo awal sebesar Rp4.678.828.762.677,73.

Penjelasan lebih rinci mengenai mutasi ekuitas tersebut dapat dilihat pada Catatan 5.16 mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL****5.10. Pendapatan**

Pendapatan adalah hak Pemerintah Kabupaten Serang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang selama tahun 2024 sebesar Rp3.542.428.158.909,29 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp962.064.277.490,89 Pendapatan Transfer sebesar Rp2.472.885.234.372,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp107.478.647.046,40. Seperti tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 122
Pendapatan LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	589.235.012.053,79	549.975.098.384,81	39.259.913.668,98	7,14
Pendapatan Retribusi Daerah	332.903.789.921,00	37.329.603.361,00	295.574.186.560,00	791,80
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	25.400.790.422,35	25.259.841.245,50	140.949.176,85	0,56
Lain-lain PAD yang sah	14.524.685.093,75	288.074.491.603,49	(273.549.806.509,74)	(94,96)
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	962.064.277.490,89	900.639.034.594,80	61.425.242.896,09	6,82
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	86.474.428.000,00	130.387.065.000,00	(43.912.637.000,00)	(33,68)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.782.987.000,00	6.847.295.000,00	(3.064.308.000,00)	(44,75)
Dana Alokasi Umum	1.125.696.401.999,00	1.066.694.399.940,00	59.002.002.059,00	5,53
Dana Alokasi Khusus	604.744.295.130,00	561.447.917.680,00	43.296.377.450,00	7,71
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.820.698.112.129,00	1.765.376.677.620,00	55.321.434.509,00	3,13
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Penyesuaian	360.851.091.000,00	348.945.405.000,00	11.905.686.000,00	3,41
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	360.851.091.000,00	348.945.405.000,00	11.905.686.000,00	3,41
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	266.413.513.945,00	243.969.783.237,00	22.443.730.708,00	9,20
Pendapatan Bantuan Keuangan	24.922.517.298,00	29.971.334.965,00	(5.048.817.667,00)	(16,85)
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PROVINSI	291.336.031.243,00	273.941.118.202,00	17.394.913.041,00	6,35
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.472.885.234.372,00	2.388.263.200.822,00	84.622.033.550,00	3,54
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	107.478.647.046,40	60.209.025.453,11	47.269.621.593,29	78,51
JUMLAH LAIN - LAIN YANG SAH	107.478.647.046,40	60.209.025.453,11	47.269.621.593,29	78,51
JUMLAH PENDAPATAN	3.542.428.158.909,29	3.349.111.260.869,91	193.316.898.039,38	5,77

**5.10.1. Pendapatan PAD**

Pendapatan PAD per 31 Desember 2024 sebesar Rp962.064.277.490,89.

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp589.235.012.053,79 berasal dari pendapatan tahun 2024 yang berhak diterima atas transaksi 2023 dan hak tagih atau piutang atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan sepanjang tahun 2024. Sebagaimana penjelasan pada pendapatan pajak LRA, pendapatan pajak LO juga dilakukan reklasifikasi sesuai dengan peraturan pajak daerah terbaru. Dengan rincian berikut:

Tabel 123
Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024

Uraian	2024	2023
Pendapatan Pajak Daerah	589.235.012.053,79	549.975.098.384,81
Pajak Parkir	3.165.913,00	0,00
Pajak Reklame	4.058.434.342,00	1.994.214.340,00
Pajak Air Tanah	2.627.429.132,80	3.127.602.381,80
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	46.362.864.037,99	16.171.276.789,81
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	142.787.258.209,00	131.676.065.745,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	119.969.032.098,00	166.899.742.269,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	16.544.084.325,00	16.245.102.548,00
PBJT-Tenaga Listrik	229.038.067.359,00	187.655.974.318,20
PBJT-Jasa Perhotelan	25.112.986.465,00	23.883.569.857,00
PBJT-Jasa Parkir	618.924.014,00	891.188.734,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.112.766.158,00	1.430.361.402,00

Bahwa dari jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Serang yang penetapannya melalui *Official Assesment* adalah Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Selain itu jenis pajak ditetapkan melalui *Self-Assesment*.

Tabel 124
Rincian Perbandingan Pendapatan Pajak LO dengan Pendapatan Pajak LRA

Uraian	Jumlah
Pendapatan Pajak LO	589.235.012.053,79
Pendapatan Pajak LRA	573.381.060.252,00
Selisih	15.853.951.801,79
Pejelasan Selisih :	
Mutasi Piutang	2.665.982.207,79
Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka	(300.463.360,00)





Uraian	Jumlah
Koreksi Ekuitas Piutang Pajak	13.488.432.954,00
Jumlah	15.853.951.801,79

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp332.903.789.921,00 berasal dari pendapatan tahun 2024 yang berhak diterima atas transaksi 2023 dan hak tagih atau piutang atas penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan sepanjang tahun 2024. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 125
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024

Uraian	2024	2023
Pendapatan Retribusi Daerah	332.903.789.921,00	19.160.120.222,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	290.705.194.588,00	5.100.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	637.164.600,00	1.126.510.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	115.565.000,00	73.980.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	872.275.000,00	1.062.781.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	1.100.349.120,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	192.671.780,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	3.612.056.980,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	298.229.000,00	361.560.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	98.389.665,00	97.176.825,00
Retribusi Terminal	0,00	20.690.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	570.106.920,00	411.443.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	5.752.960,00	6.091.815,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	51.414.500,00	53.220.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	34.000.000,00	31.505.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	26.439.476.913,00	0,00
Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	6.359.383.907,00	11.004.984.702,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	6.716.836.868,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	18.169.483.139,00

Tabel 126
Rincian Perbandingan Pendapatan Retribusi LO dengan Pendapatan Retribusi LRA

Uraian	Jumlah
Pendapatan Retribusi LO	332.903.789.921,00
Pendapatan Retribusi LRA	336.443.197.168,00
Selisih	(3.539.407.247,00)
Pejelasan Selisih :	
Mutasi Piutang Retribusi	(27.750.295.091,00)



Uraian	Jumlah
Mutasi Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka	1.120.477.725,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Retribusi	30.167.120.759,00
Koreksi pencatatan atas kelebihan pembayaran retribusi yang diterima dari pasien	2.103.854,00
Jumlah	3.539.407.247,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp25.400.790.422,35 berasal dari pendapatan tahun 2024 yang berhak diterima atas transaksi 2024 yang merupakan dividen atas penyertaan modal pada BUMD dan pengakuan laba dan penyesuaian atas Investasi dengan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127
Rincian Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2024

Uraian	Jumlah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	25.400.790.422,35
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	19.600.932.217,00
Selisih	5.799.858.205,35
Pejelasan Selisih :	
Deviden yang mengurangi laba	
BPR	3.157.542.332,00
PDAM	1.100.000.000,00
Pengakuan Laba	
BPR	6.510.897.022,35
PDAM	3.546.503.515,00
Jumlah	5.799.858.205,35

4. Lain-lain PAD Yang Sah

Per 31 Desember sebesar Rp14.524.685.093,75 merupakan pendapatan yang berhak diterima atas transaksi 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128
Rincian Lain-lain PAD yang SAH 2024

Uraian	2024	2023
Lain-lain PAD Yang Sah	14.524.685.093,75	288.074.491.603,49
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.183.840.300,00	626.490.252,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	73.303.704,31	668.321.985,00
Penerimaan Jasa Giro	3.562.583.997,00	3.644.146.008,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.846.133.518,00	1.994.319.679,00
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	28.380.310,00	219.938.239,00



Uraian	2024	2023
Pendapatan Denda Pajak	1.661.545.671,44	1.445.441.342,49
Pendapatan Denda Retribusi	37.527.216,00	22.219.038,00
Pendapatan dari Pengembalian	309.667.840,00	1.284.982.450,00
Pendapatan BLUD	3.821.702.537,00	278.168.632.610,00

Tabel 129
Rincian Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah LO
dengan Lain-lain PAD yang Sah LRA

Uraian	Jumlah
Lain-lain PAD yang Sah LO	14.524.685.093,75
Lain-lain PAD yang Sah LRA	14.889.752.988,00
Selisih	(365.067.894,25)
Pejelasan Selisih :	
Mutasi Piutang	(30.802.203.480,56)
Mutasi pendapatan diterima dimuka	92.293.879,31
Koreksi Piutang	30.298.732.068,00
Mutasi TGR yang masuk dalam piutang bagian lancar TGR	46.109.639,00
Jumlah	(365.067.894,25)

5.10.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.472.885.234.372,00 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.820.698.112.129,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp360.851.091.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp291.336.031.243,00.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.820.698.112.129,00 merupakan pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Pusat sebesar Rp86.474.428.000,00, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebesar Rp3.782.987.000,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.125.696.401.999,00, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp604.744.295.130,00 secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 130
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023
1	Dana Bagi Hasil Pajak PBB	3.106.366.000,00	4.196.214.000,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak PPh 21.25 dan 29	83.365.665.000,00	126.188.701.000,00
3	Dana Bagi Hasil CHT	2.397.000,00	2.150.000,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	86.474.428.000,00	130.387.065.000,00
4	Dana Bagi Hasil SDA Provisi Sumber Daya Hutan	142.696.000,00	227.431.000,00
5	Dana Bagi Hasil SDA Provisi Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan	500.000.000,00	1.097.089.000,00



No	Uraian	2024	2023
6	Dana Bagi Hasil SDA Iuran Eksploitasi/ Royalti	55.926.000,00	1.408.596.000,00
7	Dana Bagi Hasil SDA Pungutan Hasil Perikanan	1.882.092.000,00	2.149.603.000,00
8	Dana Bagi Hasil SDA Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	702.273.000,00	0,00
9	Dana Bagi Hasil SDA Batu Bara Landrent	0,00	1.964.576.000,00
10	Dana Bagi Hasil SDA Sawit	500.000.000,00	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	3.782.987.000,00	6.847.295.000,00
11	Dana Alokasi Umum	1.125.696.401.999,00	1.066.694.399.940,00
12	Dana Alokasi Khusus	604.744.295.130,00	561.447.917.680,00
	Jumlah	1.820.698.112.129,00	1.765.376.677.620,00

Pada pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak ini terdapat Dana Bagi Hasil Pajak yang belum diterima dikarenakan masih tercatat dalam rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) atas nama Kabupaten Serang pada akhir tahun 2024 sebesar Rp1.518.535.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 131
Rincian Treasury Deposit Facility

Uraian	Anggaran
Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	1.049.102.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	305.170.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	111.401.000,00
DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	5.000,00
DBH PBB Bagi Rata	1.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	10.249.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	1.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	42.603.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	2.000,00
Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan – PSDH	1.000,00
Jumlah	1.518.535.000,00

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp360.851.091.000,00 merupakan Insentif Fiskal dan Dana Desa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023
1	Dana Insentif Daerah	0,00	24.535.866.000,00
2	Dana Desa	334.511.418.000,00	324.409.539.000,00
3	Insentif Fiskal	26.339.673.000,00	0,00
	Jumlah	360.851.091.000,00	348.945.405.000,00



3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 sebesar Rp291.336.031.243,00 merupakan Pendapatan atas Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi termasuk didalamnya piutang atas pelampauan target dana bagi hasil provinsi, terlihat pada tabel berikut.

Tabel 133
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo	
		2024	2023
1	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	266.413.513.945,00	243.969.783.237,00
2	Pendapatan Bantuan Keuangan	24.922.517.298,00	29.971.334.965,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		291.336.031.243,00	273.941.118.202,00

Tabel 134
Rincian Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA

Uraian	Jumlah
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LO	291.336.031.243,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA	309.492.044.441,00
Selisih	(18.156.013.198,00)
Pejelasan Selisih :	
Mutasi Piutang Transfer	(18.156.013.198,00)
Jumlah	(18.156.013.198,00)

5.10.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp107.478.647.046,40, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 135
Rincian Pendapatan Hibah LO Tahun 2024

Uraian	2024	2023
Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	6.820.402.529,00	4.158.307.125,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	2.064.896.523,00	27.549.716.982,11
Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta dalam Negeri – LO	98.593.347.994,40	28.501.001.346,00
Jumlah	107.478.647.046,40	60.209.025.453,11

Tabel 136
Rincian Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA

Uraian	Jumlah
Lain-lain Pendapatan yang Sah LO	107.478.647.046,40
Lain-lain Pendapatan yang Sah LRA	10.893.241.588,00
Selisih	96.585.405.458,40





Uraian	Jumlah
Penjelasan Selisih :	
Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap	89.776.399.479,40
Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Persediaan	6.809.005.979,00
Jumlah	96.585.405.458,40

5.11. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Serang selama per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.402.126.390.467,58 yang terdiri atas:

5.11.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.328.456.496.327,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 137
Rincian Beban Pegawai Tahun 2024

Uraian	2024	2023
Beban Gaji dan Tunjangan	728.223.618.955,00	686.333.741.194,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	324.338.359.637,00	300.238.925.122,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	209.062.977.863,00	207.358.061.857,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.703.157.000,00	1.587.128.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD dan KDH/WKDH	44.067.312.849,00	42.673.533.271,00
Beban Pegawai BOS	0,00	60.997.358.456,00
Beban Pegawai BLUD	21.061.070.023,00	20.876.917.829,00
Jumlah	1.328.456.496.327,00	1.320.065.665.729,00

Tabel 138
Rincian Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai

Uraian	Jumlah
Beban Pegawai	1.328.456.496.327,00
Belanja Pegawai	1.325.832.224.608,00
Selisih	2.624.271.719,00
Pejelasan Selisih :	
Mutasi Utang Belanja Pegawai	2.616.571.719,00
Koreksi Utang Belanja Pegawai Kesbangpol	7.700.000,00



Uraian	Jumlah
Jumlah	2.624.271.719,00

5.11.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.060.861.397.601,41 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 139
Rincian Barang dan Jasa Tahun 2024

Uraian	2024	2023
Beban Bahan Pakai Habis	148.715.282.445,79	158.880.133.421,01
Beban Barang Tak Habis Pakai	63.748.000,00	16.809.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	42.311.188.746,00	0,00
Beban Jasa Kantor	197.149.877.832,00	201.638.918.253,00
Beban Premi Asuransi	57.759.333.790,34	39.361.073.451,27
Beban Sewa Tanah	1.619.950.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	9.929.532.568,49	8.179.437.500,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	14.571.417.403,01	11.282.864.313,48
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	664.168.500,00	577.322.135,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	4.018.909.570,00	15.997.986.217,00
Beban Jasa Konsultasi	1.637.969.122,00	15.904.940.510,00
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	8.499.668.547,00	6.065.314.278,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	114.456.000,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	2.004.750.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.108.368.500,00	14.756.103.000,00
Beban Pemeliharaan	30.084.600.856,00	55.521.075.012,00
Beban Perjalanan Dinas	82.851.755.704,00	86.470.664.726,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.696.166.000,00	7.587.541.000,00
Beban Barang dan Jasa Dana BOS	155.701.221.160,00	93.751.454.055,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.133.011.824,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	260.230.771.032,78	251.787.899.621,80
Total	1.060.861.397.601,41	969.784.286.493,56

Tabel 140
Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Jumlah
Beban Barang dan Jasa	1.060.861.397.601,41
Belanja Barang dan Jasa	1.050.074.683.873,00
Selisih	10.786.713.728,41
Pejelasan Selisih :	
Mutasi Utang Belanja Barang Dan Jasa	137.733.652,00
Mutasi Barang Dan Jasa Dibayar Dimuka	21.128.904.010,84
Mutasi Persediaan Barang	25.823.198.823,57
Koreksi Belanja Modal (Ekstrakomtabel)	41.416.444.746,00





Uraian	Jumlah
Koreksi Utang	302.052.053,00
Kapitalisasi Aset	(63.332.079.904,00)
Hibah Persediaan	6.809.005.979,00
Utang bansos yang tercatat pada barjas dikarenakan tidak ada koring utang bansos - SKPD Dinsos	(14.994.600,00)
Reklas Dari Beban Dibayar Dimuka Aset Tanah Ke Aset Lain-Lain	(21.483.551.032,00)
Jumlah	10.786.713.728,41

5.11.3. Beban Bunga

Beban Bunga per 31 Desember 2024 adalah nihil.

5.11.4. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp179.256.016.049,22. Berikut rincian dari beban hibah:

Tabel 141
Rincian Beban Hibah Tahun 2024

Uraian	2024	2023
Beban Hibah kepada Pemerintah	2.873.600.730,00	4.719.047.003,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	109.245.573.447,22	120.158.429.496,00
Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	24.496.428.872,00	25.132.782.440,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.544.491.000,00	2.485.785.000,00
Beban Hibah Dana BOSP	40.095.922.000,00	0,00
Total	179.256.016.049,22	152.496.043.939,00

Tabel 142
Rincian Perbandingan Beban Hibah dengan Belanja Hibah

Uraian	Jumlah
Beban Hibah	179.256.016.049,22
Belanja Hibah	179.022.715.458,00
Selisih	233.300.591,22
Pejelasan Selisih :	
Mutasi Utang Belanja Hibah	(114.698.867,78)
Koreksi utang hibah DPUPR	381.814.934,00
Kapitalisasi Beban Hibah ke Aset Tetap DISDIK	(33.815.475,00)
Jumlah	233.300.591,22

5.11.5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial selama per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.606.680.600,00 merupakan Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat.





Tabel 143
Rincian Perbandingan Beban Bantuan Sosial

Uraian	Jumlah
Beban Bantuan Sosial	6.606.680.600,00
Belanja Bantuan Sosial	6.591.686.000,00
Selisih	14.994.600,00
Pejelasan Selisih :	
Pencatatan Utang bansos pada utang barjas	14.994.600,00
Jumlah	14.994.600,00

Selisih perbandingan antara Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial disebabkan karena terdapat Utang Luncuran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Sosial untuk Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang akan diberikan kepada masyarakat di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa. Utang belanja tersebut dicatat pada kode rekening Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

5.11.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi selama per 31 Desember 2024 sebesar Rp314.054.768.126,68 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 144
Rincian Beban Penyusutan Tahun 2024

Uraian	2024	2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	84.156.071.388,33	80.029.447.880,73
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.358.770.016,11	35.207.512.610,88
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	179.346.565.868,26	167.694.799.397,13
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	119.444.867,98	96.061.155,78
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	12.073.915.986,00	2.563.159.390,00
Jumlah	314.054.768.126,68	285.590.980.434,52

5.11.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang selama per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp7.087.812.699,73. Saldo beban piutang tahun 2024 bersaldo minus dikarenakan terjadi penurunan nilai piutang, yang menyebabkan juga terjadinya penurunan saldo penyisihan piutang sehingga menyebabkan nilai beban penyisihan piutang menjadi minus, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 145
Beban Penyisihan Piutang Per SKPD

Uraian	2024	2023
BAPENDA	(8.088.729.963,32)	3.261.341.583,64





Uraian	2024	2023
RSUD	1.008.762.389,88	4.927.435.803,09
BPKAD	171.093,70	(19.910.191,70)
DPUPR	(6.287.319,99)	8.820.170,00
DISPORAPAR	(1.728.900,00)	1.728.900,00
Jumlah	(7.087.812.699,73)	8.179.416.265,03

5.11.8. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2024 adalah nihil turun jika dibandingkan TA 2023 sebesar Rp59.361.646.148,84.

Beban lain lain yang tahun sebelumnya digunakan untuk mencatat beban ekstrakomptabel dan beban penghapusan aset, pada TA 2024 sudah tidak digunakan lagi karena beban ekstrakomptabel sudah dicatat pada beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi didalam beban barang dan jasa sesuai pemptakhiran terakhir Permendagri 90 tahun 2019. Sedangkan beban penghapusan aset dicatat pada defisit non operasional dari penghapusan aset non lancar.

5.11.9. Beban Transfer

Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Serang selama per 31 Desember 2024 sebesar Rp519.581.756.823,00 naik sebesar Rp2.205.741.823,00 atau 0,43% jika dibandingkan tahun 2023 beban Transfer sebesar Rp517.376.015.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 146
Rincian Beban Transfer

Uraian	2024	2023
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	57.338.106.025,00	53.186.656.000,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	57.338.106.025,00	53.186.656.000,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	4.453.752.798,00	3.918.520.000,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	4.453.752.798,00	3.918.520.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	457.789.898.000,00	460.270.839.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	457.789.898.000,00	460.270.839.000,00
Jumlah	519.581.756.823,00	517.376.015.000,00

5.11.10. Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas dalam bentuk pengeluaran dari Belanja Tak Terduga. Per 31 Desember 2024 Beban Tidak Terduga sebesar Rp397.087.640,00 yang dikeluarkan untuk belanja tidak terduga.





5.12. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.799.258.212,83 merupakan penghapusan aset lain-lain, jika dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2023 sebesar dengan nilai tahun 2023 yang bersaldo nihil, terjadi peningkatan sebesar Rp1.799.258.212,83 atau 100%.

5.13. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos Luar Biasa tahun 2024 dan 2023 adalah nihil.

5.14. Surplus/Defisit LO

Per 31 Desember 2024 Kabupaten Serang mengalami Surplus LO sebesar Rp138.502.510.228,88 naik sebesar Rp110.596.283.368,92 atau 396,31% dari Surplus Tahun 2023 sebesar Rp27.906.226.859,96.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

5.15. Laporan Arus Kas

5.15.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Serang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp432.629.209.192,00. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan pengurangan arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp3.489.604.212.362,00 dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp3.056.975.003.170,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 147
Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	2024	2023
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	573.381.060.252,00	539.805.674.041,00
Penerimaan Retribusi Daerah	336.443.197.168,00	35.321.450.150,00
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.600.932.217,00	21.844.221.657,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	13.705.912.688,00	281.334.853.841,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	129.122.606.000,00	86.273.208.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA	5.669.171.000,00	4.908.255.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.125.696.401.999,00	1.066.694.399.940,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	604.748.554.009,00	561.369.332.081,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	360.851.091.000,00	348.945.405.000,00





Uraian	2024	2023
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	284.569.527.143,00	262.181.027.143,00
Penerimaan Hibah	10.893.241.588,00	10.272.840.346,00
Penerimaan Lainnya	24.922.517.298,00	29.971.334.965,00
Jumlah Arus Kas Masuk	3.489.604.212.362,00	3.248.922.002.164,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	1.325.832.224.608,00	1.321.436.650.750,00
Pembayaran Barang	1.050.074.683.873,00	948.772.846.825,00
Pembayaran Hibah	179.022.715.458,00	147.121.371.516,00
Pembayaran Bantuan Sosial	6.591.686.000,00	8.231.193.500,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	457.638.698.000,00	464.533.239.000,00
Pembayaran Tak Terduga	397.087.640,00	119.786.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	30.953.122.353,00	28.922.997.367,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	6.464.785.238,00	2.135.300.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	3.056.975.003.170,00	2.921.273.385.458,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	432.629.209.192,00	327.648.616.706,00

5.15.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan perbandingan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Serang di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp434.618.525.088,00. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi merupakan pengurangan arus masuk kas dari aktivitas investasi sebesar Rp1.183.840.300,00 dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp435.802.365.388,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 148
Laporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	2024	2023
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.183.840.300,00	626.490.252,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.183.840.300,00	626.490.252,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	1.161.432.715,00	748.902.305,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	132.027.958.530,00	111.613.710.440,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	93.613.564.317,00	91.356.409.648,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	188.198.027.641,00	133.901.375.096,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	12.970.147.048,00	22.895.922.552,00
Perolehan Aset Lainnya	349.109.500,00	295.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	1.500.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	2.482.125.637,00	3.066.821.934,00
Jumlah Arus Kas Keluar	435.802.365.388,00	365.378.141.975,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(434.618.525.088,00)	(364.751.651.723,00)



5.15.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan per 31 Desember 2024 adalah nihil.

5.15.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran berupa potongan yang dipungut dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang terdiri dari PPh Pasal 21, Iuran Wajib Pegawai, Tabungan Perumahan dan Perhitungan Pihak Ketiga lainnya serta Iuran Wajib Pemerintah Daerah atas Askes yang pembayarannya dianggarkan pada Belanja Pegawai. Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.358.340,00. Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris merupakan pengurangan arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp241.158.689.343,45 dengan arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp241.157.331.003,45. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 149
Laporan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	241.158.689.343,45	209.145.119.973,99
Jumlah Arus Kas Masuk	241.158.689.343,45	209.145.119.973,99
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	241.157.331.003,45	209.205.613.702,99
Jumlah Arus Kas Keluar	241.157.331.003,45	209.205.613.702,99
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	1.358.340,00	(60.493.729,00)

5.15.5. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode berjalan merupakan total dari aliran kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode berjalan kemudian dijumlahkan dengan saldo awal kas di BUD/kas daerah, sehingga diperoleh saldo akhir kas daerah. Per 31 Desember 2024 penurunan bersih kas selama periode berjalan adalah sebesar Rp1.987.957.556,00 sehingga saldo akhir kas sebesar Rp30.898.406.078,00. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD :

Tabel 150
Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD

Uraian	2024	2023
Kenaikan/Penurunan Kas	(1.987.957.556,00)	(37.163.528.746,00)



Uraian	2024	2023
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	32.886.363.634,00	70.049.892.380,00
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	30.898.406.078,00	32.886.363.634,00

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.16.Laporan Perubahan Ekuitas

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 151
Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
EKUITAS AWAL	4.678.828.762.677,73	4.636.835.508.049,18
Surplus / Defisit LO	138.502.510.228,88	27.906.226.859,96
Dampak Perubahan Kumulatif atas Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	(31.458.753.789,82)	14.087.027.768,59
Lain-lain	(31.458.753.789,82)	14.087.027.768,59
EKUITAS AKHIR	4.785.872.519.116,79	4.678.828.762.677,73

Mutasi tambah kurang atas perubahan ekuitas tersebut berasal dari Surplus/Defisit LO sebesar Rp138.502.510.228,88 yang diperoleh dari Laporan Operasional dan dampak dari kesalahan mendasar yakni jurnal-jurnal penyesuaian akhir tahun yang mengurangi ekuitas sebesar Rp31.458.753.789,82. Berikut ini adalah rincian dari Dampak Perubahan Kumulatif lain-lain:

Tabel 152
Rincian Per Akun Dampak Kumulatif Lain-lain

No	SKPD	Akun	Jumlah
1	DISDIK	Jurnal Eliminir Hutang Luncuran Gaji Non ASN 2023	567.495.499,00
		Jurnal Eliminir Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2023	
		Koreksi pencatatan aset tanah double catat berupa Kantor UPTD Kec. Pabuaran	
		Koreksi pencatatan aset tanah double catat berupa SDN Pangawinan	
		Jurnal Koreksi Penyusutan Berkurang Peralatan dan Mesin	
2	DINKES	Koreksi pencatatan aset tanah double catat berupa Tanah Eks Rumdin PKM Petir	(3.600.000,00)
3	RSUD	Mengeliminasi saldo awal piutang kerjasama (piutang non operasional/non jasa layanan) 2024 dikurangi lebih catat piutang tahun 2023	(5.093.768.042,52)
		Mengeliminasi saldo awal piutang pendapatan (piutang operasional/jasa layanan) 2024 dikurangi lebih catat piutang pada tahun 2023	
		Jurnal Koreksi Penyusutan Bertambah atas Gedung dan Bangunan	
		"Penyesuaian Beban barang dan jasa BLUD yang diakibatkan kurang catat utang beban persediaan	



No	SKPD	Akun	Jumlah
		di tahun 2023 tapi sudah diakui sebagai beban persediaan di tahun 2023. (Koreksi kurang catat Utang Bahan Pakai Habis - Bahan-bahan Lainnya 10.695.003)"	
		Penyesuaian Beban barang dan jasa BLUD yang diakibatkan kurang catat utang beban persediaan di tahun 2023 tapi sudah diakui sebagai beban persediaan di tahun 2023. (Koreksi kurang catat Utang Obat 56.133.877)	
		"Penyesuaian Beban barang dan jasa BLUD yang diakibatkan kurang catat utang beban persediaan di tahun 2023 tapi sudah diakui sebagai beban persediaan di tahun 2023. (Koreksi kurang catat Utang Bahan Kimia 18.136.512)"	
		Reklas dari Peralatan dan Mesin menjadi Gedung dan Bangunan (Pembangunan Turap/Tembok Penahan Tanah dalam anggaran masuk pada anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin seharusnya Gedung dan Bangunan)	
		Koreksi Pencatatan Aset Gedung dan Bangunan	
		Koreksi lebih catat saldo awal kewajiban (utang beban) tahun 2024 Utang Bahan Pakai Habis - Bahan-bahan Lainnya 70.105.313 (utang BHP)	
		Koreksi lebih catat saldo awal kewajiban (utang beban) tahun 2024 Utang Obat 4.444.195.	
		Penyesuaian Pendapatan LO karena Kurang Catat Piutang Operasional Thn 2023 tapi sudah diakui sbg pendapatan LO pada 2023	
		Penyesuaian Pendapatan LO karena Kurang Catat Piutang Non Operasional Thn 2023 tapi sudah diakui sbg pendapatan LO pada 2023	
		Jurnal Koreksi kredit Eliminir saldo awal utang retensi tahun 2024	
4	DPUPR	Jurnal Pengakuan utang kembali atas retensi tahun lalu (2023)	(8.751.408.856,35)
		Jurnal Koreksi Pembukuan kredit akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin	
		Jurnal koreksi penyusutan bertambah aset Gedung dan bangunan	
		Jurnal koreksi penyusutan kredit JIJ	
		Jurnal Penambahahan penilaian sementara aset tanah sebanyak 16 ruas yang belum diketahui nilainya	
		Jurnal Koreksi Pembukuan aset peralatan dan mesin dikarenakan pecah register	
		Jurnal Koreksi harga atas aset Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
		Jurnal Koreksi debet koreksi harga atas Jalan kabupaten	
		Jurnal koreksi penyusutan berkurang aset Gedung dan bangunan	
		Jurnal Koreksi debet Penyusutan JIJ	
		Jurnal Koreksi Penyusutan debet aset JIJ	
		Jurnal Koreksi debet penyusutan aset lain-lain	
		Jurnal Eliminir saldo awal Utang Luncuran Tahun 2024	
5	SATPOL PP	Jurnal Eliminir Utang Luncuran Tahun 2024	53,00
6	BPBD	Jurnal eliminir Utang tagihan listrik, telepon dan internet	9.737.514,29
		Jurnal Koreksi Debet Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin	
7	DKPP	Jurnal Eliminir Utang Luncuran Gaji Non ASN	(218.453.180,86)
		Jurnal Eliminir Utang Air Desember 2024	



No	SKPD	Akun	Jumlah
		Koreksi pencatatan aset tanah double catat berupa Kantor BPP Kec. Ciomas	
		Koreksi pencatatan aset tanah double catat berupa Sawah Garapan Pertanian	
		Koreksi Penyusutan Bertambah	
8	DLH	koreksi pencatatan atas aset motor roda tiga yang sudah dihibahkan ke Desa	(661.714.285,80)
9	DISDUKCAPIL	Jurnal Eliminir Utang Luncuran Tahun 2024	38,00
10	DPMD	Jurnal Eliminir Utang Luncuran Tahun 2024	72,00
11	DISHUB	JP Eliminir Utang Beban Luncuran Tahun 2023	(54.000,00)
12	DISKOMINFO	Jurnal Koreksi Pembukan Aset Kajian ke Beban Jasa Konsultansi non Konstruksi	(24.669.750,00)
13	DIKOPERINDAG	Jurnal Eliminir Utang Luncuran	1.550.000,00
14	SETDA	Jurnal Eliminir Utang Luncuran Gaji Non ASN	44.695.642,00
		Jurnal Penyusutan Koreksi Penyusutan Berkurang atas Aset Personal Komputer Luncuran	
15	BAPENDA	Jurnal Eliminir Saldo Awal Utang Beban Pengiriman Dokumen Pajak Daerah/JNE Tahun 2024	(13.481.844.653,00)
		Koreksi BPK RI Pencatatan Saldo Awal Piutang Pajak Tahun 2024	
		Jurnal koreksi pembukuan gedung dan bangunan (penggabungan)	
16	BPKAD	Jurnal Koreksi Nilai Investasi Tahun 2024 hasil perhitungan ulang dengan Laporan Audited BUMD	(3.638.378.869,58)
		Koreksi pencatatan atas pengadaan lahan puspemkab yang dicatat pada beban dibayar dimuka, dipindahkan pada aset lain-lain senilai Rp21.483.551.032,00 ditambah biaya umum sebesar Rp293.365.525,00	
17	KEC. CIKANDE	Eliminir Utang Luncuran 2023	(2.310.000,00)
18	KEC. CIRUAS	Jurnal Eliminir Utang	2.244.888,00
19	KEC. GUNUNGSARI	Jurnal Eliminir Utang Jasa Tenaga Administrasi dan Jasa Keamanan	6.036.961,00
20	KEC. KIBIN	Jurnal Eliminir Utang Luncuran	(2.468.628,00)
21	KEC. KRAGILAN	Eliminir Utang Luncuran 2024	4.260.000,00
22	KEC. MANCAK	Jurnal Eliminir Utang 2024	1.000,00
23	KEC. PABUARAN	Jurnal Eliminir Utang	56.288.791,00
24	KEC. PADARINCANG	Jurnal Eliminir Utang luncuran tahun 2024	(144.456,00)
25	KEC. PONTANG	Koreksi pencatatan aset tanah double catat berupa Tanah Puskesmas Pontang	(280.000.000,00)
26	KEC. TANARA	Jurnal Eliminir Saldo Awal Utang Luncuran	54.360,00
27	KEC. WARINGINKURUNG	Eliminir Utang Luncuran tahun 2024	(115.000,00)
28	KESBANGPOL	Jurnal Eliminir Utang Luncuran Gaji Non ASN	7.811.114,00
Jumlah			(31.458.753.789,82)

Penjelasan atas rincian dampak kumulatif lain-lain berdasarkan rekening yang dikoreksi sebagai berikut:

Tabel 153
Rincian Per Akun Dampak Kumulatif Lain-lain berdasarkan rekening yang dikoreksi

No	SKPD	Nama Akun	Nilai
1	DISDIK	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.877.749,00
		Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.815.350,00



No	SKPD	Nama Akun	Nilai
		Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	567.892.400,00
		Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(16.800.000,00)
		Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(4.290.000,00)
		Total Koreksi DISDIK	567.495.499,00
2	DINKES	Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal	(3.600.000,00)
		Total Koreksi DINKES	(3.600.000,00)
3	RSUD	Piutang Pendapatan BLUD	(131.452.465,00)
		Piutang Pendapatan BLUD	(10.850.000,00)
		Bangunan Gedung Kantor	359.594.000,00
		Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(7.191.880,00)
		Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(5.300.944.729,52)
		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	70.105.313,00
		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	4.444.195,00
		Beban Barang dan Jasa BLUD	(10.695.003,00)
		Beban Barang dan Jasa BLUD	(56.133.877,00)
		Beban Barang dan Jasa BLUD	(18.136.512,00)
		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah – LO	4.691.156,00
		Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain - LO	6.000.000,00
		Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(3.198.240,00)
		Total Koreksi RSUD	(5.093.768.042,52)
4	DPUPR	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	44.392.557,00
		Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	69.042.000,00
		Tanah untuk Jalan	16,00
		Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	4.865.200,00
		Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.459,00
		Jalan Kabupaten	271.800,00
		Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	(24.984.257,00)
		Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(1.240.507.530,64)
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	115.963.852,48
		Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(9.365.848.830,63)
		Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat / Usang	1.108.506.883,44
		Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	536.887.994,00
		Total Koreksi RSUD	(8.751.408.856,35)
5	SATPOL PP	Utang Belanja Iuran Jaminan / Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	53,00
		Total Koreksi SATPOL PP	53,00
6	BPBD	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	1.026.800,00
		Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	6.960.714,29
		Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.750.000,00
		Total Koreksi BPBD	9.737.514,29
7	DKPP	Utang Belanja Iuran Jaminan / Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	(538,00)



No	SKPD	Nama Akun	Nilai
		Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	(545.500,00)
		Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(66.857.142,86)
		Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(10.000.000,00)
		Tanah Basah	(141.050.000,00)
		Total Koreksi DKPP	(218.453.180,86)
8	DLH	Aset Lain-lain – Lainnya	(661.714.285,80)
		Total Koreksi DLH	(661.714.285,80)
9	DISDUKCAPIL	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	38,00
		Total Koreksi DISDUKCAPIL	38,00
10	DPMPD	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	72,00
		Total Koreksi DPMPD	72,00
11	DISHUB	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	(54.000,00)
		Total Koreksi DISHUB	(54.000,00)
12	DISKOMSANTIK	Kajian	(24.669.750,00)
		Total Koreksi DISKOMSANTIK	(24.669.750,00)
13	DISKOMPERINDAG	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.550.000,00
		Total Koreksi DISKOMPERINDAG	1.550.000,00
14	SETDA	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	670.642,00
		Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	44.025.000,00
		Total Koreksi SETDA	44.695.642,00
15	BAPENDA	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket / Pengiriman	1.353.181,00
		Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.235.120,00
		Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	(13.488.432.954,00)
		Total Koreksi BAPENDA	(13.481.844.653,00)
16	BPKAD	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	(3.931.744.394,58)
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	293.365.525,00
		Total Koreksi BPKAD	(3.638.378.869,58)
17	KEC. CIKANDE	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	(2.310.000,00)
		Total KEC. CIKANDE	(2.310.000,00)
18	KEC. CIRUAS	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.244.888,00
		Total KEC. CIRUAS	2.244.888,00
19	KEC. GUNUNGSARI	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	6.036.961,00
		Total KEC. GUNUNGSARI	6.036.961,00
20	KEC. KIBIN	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	(2.468.628,00)
		Total KEC. KIBIN	(2.468.628,00)
21	KEC. KRAGILAN	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	4.260.000,00
		Total KRAGILAN	4.260.000,00
22	KEC. MANCAK	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.000,00
		Total KEC. MANCAK	1.000,00
23	KEC. PABUARAN	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	56.288.791,00
		Total KEC. PABUARAN	56.288.791,00



No	SKPD	Nama Akun	Nilai
24	KEC. PADARINCANG	Utang Belanja Iuran Jaminan / Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	(144.456,00)
		Total KEC. PADARINCANG	(144.456,00)
25	KEC. PONTANG	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(280.000.000,00)
		Total KEC. PONTANG	(280.000.000,00)
26	KEC. TANARA	Utang Belanja Iuran Jaminan / Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	54.360,00
		Total KEC. TANARA	54.360,00
27	KEC. WARINGINKURUNG	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	(115.000,00)
		Total KEC. WARINGINKURUNG	(115.000,00)
28	KESBANGPOL	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	7.811.114,00
		Total KESBANGPOL	7.811.114,00
		TOTAL KOREKSI EKUITAS	(31.458.753.789,82)





BAB VI PENGUNGKAPAN LAIN

6.1. Gambaran Umum Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan bagian dari Provinsi Banten yang mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dari catatan yang ada Pemerintah Kabupaten Serang telah mengalami 4 (empat) kali masa peralihan, yaitu:

- a. Pemerintah Kesultanan Banten yang berkuasa selama $\pm$ 290 tahun. Dimulai sejak Sultan Maulana Hasanudin yaitu tahun 1526 sampai tahun 1816. Saat berdirinya Keraton Surosowan sebagai pusat pemerintahan ditandai dengan penobatan Pangeran Sabakingking dengan Pangeran Hasanudin pada tanggal 1 Muharram 933 H / 8 Oktober 1526 M. yang kemudian dijadikan landasan penetapan sebagai hari jadi Kabupaten Serang.
- b. Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa selama $\pm$ 126 tahun yaitu pada tahun 1816 sampai dengan tahun 1942.
- c. Pemerintah Jepang yang berjalan selama 3.6 tahun yaitu dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945.
- d. Pemerintah Republik Indonesia dimulai dari Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dilingkup Propinsi Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2000 tepatnya tanggal 30 Oktober 2000 dibentuklah Propinsi Banten dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten. Kabupaten Serang dan Kota yang ada di provinsi Banten hanya berjarak $\pm$ 70 Km dari Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, maka Kabupaten Serang berfungsi sebagai daerah Pemukiman, Industri, dan Pelabuhan. Luas wilayah secara administratif tercatat seluas 173.409 Ha. yang terbagi atas 29 wilayah Kec. dan 326 desa.

6.2. Aset Dalam Sengketa

6.2.1. Bekas Rumah Dinas Kelautan dan Perikanan

Bekas Rumah Dinas Kelautan dan Perikanan yang beralamat di Jalan Tb. A. Khatib Kota Serang adalah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Serang yang status kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 Tanggal 23 September 1986 dan berada dalam 1 (satu) hamparan dengan Eks Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Serang. Bahwa Eks Rumah Dinas Kelautan dan Perikanan dahulu dipergunakan oleh Saudara Tb. Rafe'i sebagai Kepala Jawatan Perikanan Darat berdasarkan Ijin Atasan namun setelah meninggal dunia. eks Rumah Dinas Tersebut sampai saat ini dipergunakan oleh Ahli Waris Alm .Tb. Rafe'i tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



- Pemerintah Kabupaten Serang telah mengirimkan surat Bupati Serang Nomor : 032/2919/BPKAD/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang penggunaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan maksud agar pihak ahli waris segera mengosongkan bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Serang;
- Mengingat ahli waris tidak mengindahkan Surat Bupati tersebut, bahkan melalui kuasa hukumnya yaitu “ Adhikari Law Firm “ telah berkirim surat ke Bupati pada tanggal 5 Februari 2018 dengan isi tuntutan agar pemerintah daerah memberikan hak milik atas tanah dan bangunan tersebut, atau memberikan kompensasi sebagaimana yang sebelumnya pernah dituntut ahli waris kepada pemerintah daerah, maka atas dasar surat dari kuasa hukum ahli waris tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang kembali mengirimkan Surat Peringatan/Somasi Nomor :730/353/BPKAD/2018 tanggal 28 Maret 2018 kepada ahli waris Tb. Rafe'i yang menempati Eks. Rumah Dinas Perikanan tersebut untuk segera mengosongkan bangunan tersebut.
- Saat ini telah selesai proses pengadilan yang hasil keputusannya menguatkan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Serang terhadap aset tersebut.

6.2.2. Aset Tanah yang masih dalam Sengketa

Aset Tanah pada Dinas Perhubungan yang diatas tanah tersebut berdiri stasiun repeater yang terletak di Kabupaten Pandeglang. Status tanah diklaim oleh pihak lain yang memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Proses atas sengketa ini pemerintah kabupaten serang memohon untuk membatalkan sertifikat tanah tersebut pada BPN Pandeglang.

Aset tanah pada Dinas Pendidikan (SD dan SMP) yang terletak di Kec. Mancak, Cikande, Desa Kosambi Dalem, Kec. Petir, Kec. Anyar. Permasalahan Aset sekolah tersebut antara lain ada yang menggugat pihak lain, terploting pada sertifikat dan HGU pihak lain dan penyerobotan yang prosesnya masih tahap mediasi dengan pihak lain.

Terkait Tanah SDN Petir 1 tanah tersebut telah tercatat pada Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan Nama/Kode Barang Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan/1.3.1.01.01.04.002/930, Register Nomor 0001, Luas 3.718 m2, Tahun perolehan 1902, Alamat Jalan Raya Serang – Petir KM 16 Desa Mekarbaru Kecamatan Petir Kabupaten Serang, cara perolehannya yaitu cara perolehan lainnya (dari Tanah Negara).

Pada tahun 2024 tanah SDN Petir 1 digugat oleh SAYU Dkk yaitu para ahli waris dari Ny SAPIAH yang mengklaim bahwa tanah yang digunakan oleh SDN Petir 1 adalah milik Ny SAPIAH. Gugatan tersebut masuk ke Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor perkara 102/Pdt.G/2024/PN SRG.

Sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 telah dilakukan Sidang sebanyak 18 kali, Sidang ke-1 pada tanggal 29 Juli 2024 dan Sidang ke-18 pada tanggal 04 Februari 2025.



Aset Tanah pada Dinas Koperasi dan Perdagangan berupa Aset Tanah alun-alun Anyar dengan Objek: Persil 5b/d/II, Kohir C No. 613 luas 8.810 m² (Sertifikat Hak Pakai No. 12 Desa Anyar, Kec. Anyar. Penggunaan: Alun-alun Anyar) yang permasalahannya digugat oleh pihak lain yang prosesnya sudah inkrah dengan adanya dua putusan pada objek yang sama. Pemerintah daerah memenangkan putusan sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) sedangkan pihak lain menang putusan sampai tingkat kasasi sehingga pemerintah daerah dan pihak lain tidak bisa mengeksekusi alun-alun Anyar. Langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah adalah harus menguji kebenaran dan keabsahan girik yang ada pada penggugat ke mabes polri.

Pemerintah Kabupaten Serang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten yg mana berdasarkan putusan banding No. 60/PDT/2008/PT.BTN, Pengadilan Tinggi Banten menolak permohonan banding. Pemerintah Kabupaten Serang mengajukan kasasi ke MA dan berdasarkan putusan kasasi No. 2855K/PDT/2008, permohonan kasasi ditolak. Pemerintah Kabupaten Serang mengajukan Peninjauan Kembali ke MA dan dg putusan Peninjauan Kembali No. 799PK/Pdt/2012, permohonan Peninjauan Kembali ditolak. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Serang mengajukan permohonan fatwa MA.

Aset Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup terletak di kampung tegal sapat desa nagara padang Kec. Petir seluas 2.561m² terdapat permasalahan dalam pengadaan dan pembayarannya, atas kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan Polda Banten. Pengadaan aset tanah tersebut pada tahun 2021 sebesar Rp461.123.000,00 yang merupakan uang muka dan biaya umum selanjutnya pengadaan pada tahun 2022 sebesar Rp1.146.662.000,00 yang merupakan pembayaran lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) zona selatan.

Aset Tanah Eks Pasar Kramatwatu dengan Objek: Tanah seluas 1.844 m² dg Sertipikat Hak Pakai No. 10 a.n. Pemkab Serang asal SHM No. 560 a.n. A. Ridwan (tanah girik C.628 persil 21 Blok Bengkel Desa Kramatwatu luas 2.200 m² a.n Gendut bin Khalis).

Pemerintah Kabupaten Serang mengajukan banding dan berdasarkan putusan banding No. 34/PDT/2014/PT.BTN, Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan PN Serang (Pemerintah Kabupaten Serang kalah) Kemudian Pemerintah Kabupaten Serang mengajukan kasasi ke MA dan dengan putusan No. 2610 K/PDT/2014, MA membatalkan putusan banding Pengadilan Tinggi Banten yg menguatkan putusan PN Serang, serta menolak eksepsi Tergugat (Ismail Djaenul), gugatan Penggugat (Pemerintah Kabupaten Serang) tidak dapat diterima, dan gugatan Penggugat Rekonvensi (Ismail Djaenul) tidak dapat diterima.

6.3. Peningkatan Jalan Desa

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Serang melakukan peningkatan jalan pada sebelas ruas jalan desa dan telah ditetapkan menjadi jalan Kabupaten dengan Keputusan Bupati Serang Nomor : 620/Kep.301-Huk.DPUPR/2023, dan atas asset tersebut sudah tercatat dalam Neraca Per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 154
Rincian Peningkatan Jalan Desa

No	Nama paket pekerjaan	keterangan
1	Rekonstruksi Jalan Desa Taman Sari Kecamatan Baros	Jalan Kabupaten (Sukacai - Cigeger)
2	Rekonstruksi Jalan Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang	Jalan Kabupaten (Kubang Puji - Kubang Bahad)
3	Rekonstruksi Jalan Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara	Jalan Kabupaten (Wadas - Lambang Sari)
4	Rekonstruksi Jalan Desa Leuwi Limus Kecamatan Cikande	Jalan Kabupaten (Raab - Situ Terate)
5	Rekonstruksi Jalan Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal	Jalan Kabupaten (Cilayang - Cadas Ngampar)
6	Rekonstruksi Jalan Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal	Jalan Kabupaten (Sukaratu - Bantar Panjang)
7	Rekonstruksi Jalan Desa Kamasan Kecamatan Cinangka	Jalan Kabupaten (Pasir Sirih - Sindanglaya)
8	Rekonstruksi Jalan Desa Rancasanggal Kecamatan Cinangka	Jalan Kabupaten (Rancasanggal - Cikolelet)
9	Rekonstruksi Jalan Desa Citaman Kecamatan Ciomas	Jalan Kabupaten (Pondok Kahuru - Citaman)
10	Rekonstruksi Jalan Desa Pasir Buyut Kecamatan Jawilan	Jalan Kabupaten (Cidahu - Pasir Buyut)
11	Rekonstruksi Jalan Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa	Jalan Kabupaten (Kebon Lontar - Alang-alang)

6.4. Penggunaan Aplikasi Pada Tahun 2024

Berdasarkan amanat Kementerian Dalam Negeri seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri tanpa terkecuali Kabupaten Serang. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Serang telah menggunakan SIPD khususnya untuk Penyusunan APBD 2024 dan Pelaksanaan APBD 2024.

Proses Penyusunan APBD menggunakan aplikasi SIPD dilakukan dari mulai penyusunan RKA, Rancangan APBD sampai pengesahan APBD baik untuk APBD murni, pergeseran sampai dengan perubahan. Sedangkan untuk pelaksanaan APBD aplikasi SIPD digunakan untuk pelaksanaan pendapatan yang dimulai dari input penerimaan dan setoran pendapatan serta pelaksanaan belanja melalui mekanisme UP/GU/TU dan LS.

Namun untuk pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dikarenakan masih terdapat berbagai kendala dalam aplikasi SIPD Pemerintah Kabupaten Serang masih menggunakan Aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan). Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada SIMRAL dilakukan dengan memindahkan APBD 2024 dan Pelaksanaan APBD 2024 dari aplikasi SIPD kepada aplikasi SIMRAL. Pemindahan data ini melalui proses migrasi maupun input ulang data-data yang terdapat pada SIPD.

Proses penyusunan jurnal penyesuaian pada seluruh entitas akuntansi seluruhnya dilakukan melalui aplikasi SIMRAL sampai dengan pengkonsolidasian Laporan Keuangan SKPD sampai menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.





6.5. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Pemerintah Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2024 telah menerima Aset tetap berupa PSU dari 11 pengembang perubahan, 9 diantaranya telah tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2024, dan 2 penyerahan PSU belum teratat dalam neraca disebabkan belum terdapat nilai asetnya, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 155
Aset Tetap Berupa PSU Yang Belum Terdapat Nilai Asetnya Tahun 2024

No.	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Desa	Kecamatan	No. BAST	Tanggal	Aset Berupa	Keterangan
1.	PT. Esaputra Kharisma	Griya Serang Kharisma	Pelamunan	Kramatwatu	648/01/BAST-PSU/DPRKP/2023	13 Januari 2023	Tanah Jalan, Tanah Saluran dan Lahan Tempat Pemakaman Umum	Tercatat
2.	PT. Pondok Hijau	Pondok Dewata Cikande	Cikande	Cikande	648/02/BASTPSU/DPRKP/2023	25 Januari 2023	Lahan Tempat Pemakaman Umum	Belum Tercatat
3	PT. Fiqri Putra Pertama	Bumi Kendayakan Permai	Nagara	Kibin	648/03/BAST-PSU/DPRKP/2024	18 Januari 2024	Jalan Tanah, Tanah Saluran, Ruang Terbuka Hijau, Sarana Olahraga dan Lahan Tempat Pemakaman Umum.	Tercatat
4	PT. Esaputra Kharisma	Griya Serang Kharisma	Pelamunan	Kramatwatu	648/BAST-PSU/DPRKP/2023	13 Januari 2023	Tanah Jalan, Tanah Saluran dan Lahan Tempat Pemakaman Umum	Tercatat
5	PT. Indo Graha Lestari	Bumi Nagara Lestari	Nagara	Kibin	648/01/BAST-PSU/DPRKP/2024	5 Januari 2024	Tanah Jalan, Masjid, Mushola dan Taman, Danau, Taman Bermain, RTH, Parkiran Ruko	Tercatat
6	PT. Rejeki Agung Sedaya Grup	Pesona Sindangheula	Sindangheula	Pabuaran	648/02/BAST-PSU/DPRKP/2024	18 Januari 2024	Tanah Jalan, Drainase, Ruang Terbuka Hijau	Tercatat
7	PT. Pradipta Ratnapratata	Citra Garden BMW	Wayanasa	Kramatwatu	648/06/BAST-PSU/DPRKP/2024	30 April 2024	Tanah Jalan, Drainase, Pertamanan/Ruang	Tercatat



No.	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Desa	Kecamatan	No. BAST	Tanggal	Aset Berupa	Keterangan
							Terbuka Hijau	
8	PT. Atapmas Potensa	Taman Krakatau	Waringinkurung	Waringinkurung	648/BAST-PSU/DPRKP/2024	30 April 2024	Tanah Jalan, Drainase, Masjid, Taman, Sarana Pendidikan	Tercatat
9	PT. Bumi Cipta Rahayu	Kampung Bahagia	Kendayakan	Kragilan	648/16/BAST-PSU/DPRKP/2024	6 November 2024	Tanah Jalan, Saluran, Ruang Terbuka Hijau, Lahan Tempat Pemakaman Umum	Tercatat
10	PT. Surya Abadi Propertindo	Griya Sukadalem Indah	Sukadalem	Waringinkurung	648/17/BAST-PSU/DPRKP/2024	6 November 2024	Tanah Jalan, Drainase, Tempat Pembuangan Sampah, Mushola, Sarana Olahraga, Taman dan RTH, Lahan Tempat Pemakaman Umum	Tercatat
11	PT. Jasasurya Tjandra	Cisait Puri Pratama	Cisait	Kragilan	648/18/BAST-PSU/DPRKP/2024	6 November 2024	Tanah Jalan, Saluran dan Gorong-Gorong, Fasilitas Sosial dan Sarana Olahraga, Lahan Tempat Pemakaman Umum	Tercatat
12	-	Harjatani Heritage Estate	Margatani	Kramatwatu	-	-	Tanah Jalan, Saluran dan Gorong-Gorong, Sarana Peribadatan dan Pendopo, Sarana Pertamanan, RTH/ Fasilitas Sosial, Pos Jaga, Gardu Listrik	Tercatat

6.6. Tanah hasil sita tindak pidana korupsi

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst atas tindak pidana korupsi tanggal 17 Januari





2023, pada salah satu amar putusannya, dinyatakan bahwa satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00112 seluas 120.000 m² yang terletak di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Kabupaten Serang. Satu bidang tanah tersebut merupakan tanah reklamasi atas HPL 00163 milik Pemerintah Kabupaten Serang dimana di atasnya telah dibangun bangunan Workshop 1, 4 dan 5, jalan beton dan pagar pembatas oleh PT WSBP.

Atas penyerahan tanah tersebut Pemerintah Kabupaten Serang belum mencatat ke dalam laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan pengukuran dan penentuan batas wilayah tanah HPL 00163 seluas 120.000 m² bersama dengan BPN Kabupaten Serang. Pengukuran dan penentuan batas wilayah tanah dilakukan untuk menentukan bangunan yang berada di dalam area tanah HPL dan kemudian dilakukan pengukuran dimensi struktur bangunan. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut akan ditentukan luas dan nilai bangunan yang berada di atas tanah HPL 00163 yang kemudian dicatat pada Neraca Pemerintah Kabupaten Serang.

6.7. Pengungkapan aset LKM Ciomas

Berdasarkan laporan dari Tim Likuidasi PT. LKM Ciomas diketahui bahwa per 31 Desember 2024 PT. LKM Ciomas (dalam likuidasi) memiliki aset sebesar Rp10.491.873.703,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Asen Lancar	
a.	Kredit Yang diberikan Per 31 Desember 2024	Rp 4.498.209.834,00
b.	Kas di Bank BJB	Rp 407.325,00
2.	Aset Tidak Lancar	
a.	Tanah (298 M2) Nilai Buku	Rp 72.500.000,00
b.	Gedung (Nilai Buku)	Rp 211.081.376,00
c.	Kendaraan Roda dua 3 Unit (Nilai Buku):	
	1) Sepeda Motor Honda CB 150R SE 2018	Rp 7.491.250,00
	2) Sepeda Motor Honda Sonic 150R SE 2018	Rp 6.080.217,00
	3) Sepeda Motor Honda CB 150R SE 2018	Rp 9.929.065,00
	Jumlah Aset Lancar dan Tidak Lancar	Rp 4.805.699.067,00
3.	Aset Para Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan:	
a.	A. Tamami (Sudah Bebas)	Rp 0,00
b.	H. Tb. Boyke (Sudah Incraht PN)	Rp 333.620.000,00
c.	Najarudin (Sudah Incraht PN)	Rp 495.167.000,00
d.	Neneng Nurchasanah	Rp 4.857.387.636,00
	Jumlah Aset Terdakwa	Rp 5.686.174.636,00
	Jumlah Aset	Rp 10.491.873.703,00

Atas aset-aset tersebut Pemerintah Kabupaten Serang belum dapat mencatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang karena masih ditangani oleh Tim Likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pemerintah Kabupaten Serang melakukan koordinasi dengan Tim Likuidasi dalam upaya pengalihan aset-aset tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Serang.

Mengenai sisa kewajiban atas likuidasi PT LKM Ciomas yang masih tercatat sebesar Rp1.891.411.509 terdiri dari kewajiban kepada bank BJB sebesar Rp809.912.131 dan kepada PT BPR (bank Serang) sebesar Rp1.081.499.378 telah dianggarkan pada tahun 2025 pada belanja tak terduga untuk penyelesaiannya.

6.8. Pengungkapan PT Serang Berkah Mandiri

Perhitungan laba/rugi pada SBM tahun 2024 belum dapat dilakukan dikarenakan sampai dengan Laporan Keuangan ini diterbitkan SBM belum menyerahkan Laporan Keuangan tahun 2024. SBM baru melakukan perikatan dengan KAP Roni Pupung untuk melakukan audit Laporan Keuangan SBM tahun 2022, 2023, dan 2024 pada 28 April 2025 berdasarkan Nomor Surat Perikatan Kerja (SPK) Nomor: 180/RP/SBMP/SP/RB/IV/2025. Jangka waktu pelaksanaan audit ini maksimal 60 hari kalender dimulai sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan 27 Juni 2025.



BAB VII PENUTUP

Sebagai penutup perlu dikemukakan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang TA 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan Peraturan Bupati Serang Nomor 250 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang TA 2024 ini diharapkan dapat lebih membantu menjelaskan kondisi dan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Serang TA 2024.



BUPATI SERANG,

RATU RACHMATUZAKIYAH



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	BAPENDA	Piutang Pajak Hotel	1.039.727.058,00	-	1.039.727.058,00	-
2	BAPENDA	Piutang Pajak Restoran	606.536.797,00	-	606.536.797,00	-
3	BAPENDA	Piutang Pajak Hiburan	347.639.500,00	-	347.639.500,00	-
4	BAPENDA	Piutang Pajak Reklame	217.812.300,00	703.018.324,00	217.812.300,00	703.018.324,00
5	BAPENDA	Piutang Pajak PJU	179.848.576,20	-	179.848.576,20	-
6	BAPENDA	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.308.953.030,81	3.851.998.317,00	1.420.026.438,01	3.740.924.909,80
7	BAPENDA	Piutang Pajak Parkir	30.964.800,00	4.057.913,00	30.964.800,00	4.057.913,00
8	BAPENDA	Piutang Pajak Air Tanah	603.819.884,80	596.132.732,60	603.819.884,80	596.132.732,60
9	BAPENDA	Piutang PBJT-Restoran	-	891.225.306,00	286.619.834,00	604.605.472,00
10	BAPENDA	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	179.887.488,00	-	179.887.488,00
11	BAPENDA	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	-	16.798.694.236,20	16.654.572.855,00	144.121.381,20
12	BAPENDA	Piutang PBJT-Hotel	-	2.099.161.138,00	-	2.099.161.138,00
13	BAPENDA	Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	-	38.425.463,00	-	38.425.463,00
14	BAPENDA	Piutang PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio	-	416.261.326,00	-	416.261.326,00
15	BAPENDA	Piutang Pajak PJU PLN	16.654.611.767,00	-	16.654.611.767,00	-
16	BAPENDA	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	284.283.324.873,00	301.010.528.695,00	286.119.933.801,00	299.173.919.767,00
17	BAPENDA	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	-	238.704.880,00	-	238.704.880,00
		Jumlah Piutang Pajak Daerah	305.273.238.586,81	326.828.095.818,80	324.162.113.611,01	307.939.220.794,60
1	DPUPR	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.763.627.440,00	506.569.963,00	1.763.627.440,00	506.569.963,00
2	DPUPR	Piutang Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	406.600,00	-	406.600,00	-
3	RSUD	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum	30.293.882.068,00	29.632.395.174,00	30.918.924.674,00	29.007.352.568,00
		Jumlah Piutang Retribusi Daerah	32.057.916.108,00	30.138.965.137,00	32.682.958.714,00	29.513.922.531,00
1	BAPENDA	Piutang Denda Pajak Hotel	246.012.574,16	-	246.012.574,16	-
2	BAPENDA	Piutang Denda Pajak Restoran	92.798.071,56	-	92.798.071,56	-
3	BAPENDA	Piutang Denda Pajak Hiburan	166.704.720,00	-	166.704.720,00	-

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
4	BAPENDA	Piutang Denda Pajak Reklame	75.172.770,34	74.508.413,00	75.172.770,34	74.508.413,00

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
5	BAPENDA	Piutang Denda Pajak PJU	86.327.316,58	-	86.327.316,58	-
6	BAPENDA	Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	578.492.730,19	562.146.711,00	578.492.730,19	562.146.711,00
7	BAPENDA	Piutang Denda Pajak Parkir	10.713.944,00	-	10.713.944,00	-
8	BAPENDA	Piutang Denda Pajak Air Tanah	244.536.621,73	203.802.225,00	244.536.621,73	203.802.225,00
9	BAPENDA	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-	-	50.545.025,00	-	50.545.025,00
10	BAPENDA	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi	-	86.337.004,00	-	86.337.004,00
11	BAPENDA	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	-	298.902.492,00	-	298.902.492,00
12	BAPENDA	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau	-	12.438.006,00	-	12.438.006,00
13	BAPENDA	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-	-	166.740.510,00	-	166.740.510,00
14	RSUD	Piutang Pendapatan pada RSUD BLUD	1.338.072.543,00	1.335.935.517,00	1.338.072.543,00	1.335.935.517,00
15	DINKES	Piutang Pedapatan pada DINKES BPJS	281.586.800,00	259.788.100,00	281.586.800,00	259.788.100,00
16	SETDA	BMT	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00
17	SETDA	BMI	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
18	DISKOPERINDAG	Piutang Pedagang Pasar Anyar Kios Pasar	771.098.752,00	-	14.125.200,00	756.973.552,00
19	DISPORAPAR	Piutang Hasil Sewa BMD (Batu Kuwung) Disporapar	345.780.000,00	-	345.780.000,00	-
		Jumlah Piutang Pendapatan Lainnya	4.623.296.843,56	3.437.144.003,00	3.866.323.291,56	4.194.117.555,00
1	BPKAD	Bagian Lancar Tuntutan ganti rugi	395.303.713,00	362.827.753,00	395.303.713,00	362.827.753,00
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	395.303.713,00	362.827.753,00	395.303.713,00	362.827.753,00
1	BPKAD	Piutang Pendapatan Lainnya (Dana BH Pajak Provinsi)	28.210.662.721,00	10.054.649.523,00	28.210.662.721,00	10.054.649.523,00
2	BPKAD	Piutang Lainnya (Dana BOS)	78.585.599,00	74.326.720,00	78.585.599,00	74.326.720,00
3	BPKAD	Piutang Lainnya (Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP/Dana BOK)	149.925,00	-	149.925,00	-
		Jumlah Piutang Lancar Lainnya	28.289.398.245,00	10.128.976.243,00	28.289.398.245,00	10.128.976.243,00
		Jumlah Piutang Daerah (11 +13+ 30 + 32 + 35)	370.639.153.496,37	370.896.008.954,80	389.396.097.574,57	352.139.064.876,60



 BUPATI SERANG,



 RATU RACHMATUZAKIAH



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan Piutang	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
1	Piutang Pajak Reklame	703.018.324,00	-61.582.679,25	641.435.644,75
2	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.740.924.909,80	- 1.051.900.970,72	2.689.023.939,08
3	Piutang Pajak Parkir	4.057.913,00	-	4.057.913,00
4	Piutang Pajak Air Tanah	596.132.732,60	- 254.342.924,07	341.789.808,53
5	Piutang PBJT-Restoran	604.605.472,00	- 46.171.638,39	558.433.833,61
6	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	179.887.488,00	-	179.887.488,00
7	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	144.121.381,20	- 180.569.377,59	36.447.996,39
8	Piutang PBJT-Hotel	2.099.161.138,00	- 396.343.645,30	1.702.817.492,70
9	Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	38.425.463,00	- 20.691.432,56	17.734.030,44
10	Piutang PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	416.261.326,00	- 173.997.394,13	242.263.931,87
11	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	299.173.919.767,00	- 220.450.580.725,76	78.723.339.041,24
12	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	238.704.880,00	-	238.704.880,00
	Jumlah Piutang Pendapatan Pajak BAPENDA	307.939.220.794,60	- 222.636.180.787,77	85.303.040.006,83
1	Piutang Denda Pajak Reklame	74.508.413,00	- 26.979.009,00	47.529.404,00
2	Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	562.146.711,00	- 495.820.702,00	66.326.009,00
3	Piutang Denda Pajak Air Tanah	203.802.225,00	- 118.767.279,00	85.034.946,00
4	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	50.545.025,00	- 20.420.943,00	30.124.082,00
5	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	86.337.004,00	- 86.327.365,00	9.639,00
6	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	298.902.492,00	- 176.376.371,00	122.526.121,00
7	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	12.438.006,00	- 9.532.860,00	2.905.146,00
8	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	166.740.510,00	- 83.346.542,00	83.393.968,00
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pajak BAPENDA	1.455.420.386,00	- 1.017.571.071,00	437.849.315,00
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	29.007.352.568,00	- 11.135.983.243,88	17.871.369.324,12
2	Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.335.935.517,00	- 1.267.720.448,00	68.215.069,00
	Jumlah Piutang Pendapatan BLUD RSUD	30.343.288.085,00	- 12.403.703.691,88	17.939.584.393,12
1	Piutang Pendapatan pada DINKES	259.788.100,00	-	259.788.100,00
	Jumlah Piutang Pendapatan BLUD DINKES	259.788.100,00	-	259.788.100,00
1	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	506.569.963,00	- 2.532.850,01	504.037.112,99
2	Piutang Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	-
	Jumlah Piutang Pendapatan Retribusi DPUPR	506.569.963,00	- 2.532.850,01	504.037.112,99
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	362.827.753,00	-336.636.368,00	26.191.385,00
2	Piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	10.054.649.523,00	-	10.054.649.523,00
3	Piutang Pendapatan Lainnya (Dana BOS)	74.326.720,00	-	74.326.720,00
	Jumlah Piutang Pendapatan BPKAD	10.491.803.996,00	- 336.636.368,00	10.155.167.628,00
1	BMT pada SETDA	186.000.000,00	- 186.000.000,00	-
2	BMI pada SETDA	200.000.000,00	- 200.000.000,00	-
3	Piutang Pedagang Pasar Anyar Kios Pasar Diskoumperindag	756.973.552,00	-	756.973.552,00
	Jumlah Piutang Pendapatan	1.142.973.552,00	- 386.000.000,00	756.973.552,00
	JUMLAH PIUTANG DAERAH	352.139.064.876,60	- 236.782.624.768,66	115.356.440.107,94



TANGGAL : 19 Agustus 2025



RATU RACHMATUZAKIYAH

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 5 Tahun 2025

TANGGAL : 19 Agustus 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH BERDASARKAN COST METHOD
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tahun Penyer- taan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal daerah Berdasarkan PERDA	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan modal tahun ini (2024)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2024	PDAM "Tirta AlBantani"	Perda No. 7/2015	Penyertaan Modal	107.500.000.000	67.500.000.000	5.000.000.000	72.500.000.000	35.000.000.000	1.100.000.000	-	72.500.000.000
2	2024	PT. BANK JABAR-BANTEN	Perda No. 6/2018	Penyertaan Modal	100.000.000.000	62.961.813.015	-	62.961.813.015	37.038.186.985	15.343.389.885	-	62.961.813.015
3	2024	PD/BPR Bank Serang	Perda No. 7/2015	Penyertaan Modal	55.000.000.000	27.588.930.000	-	27.588.930.000	27.411.070.000	3.157.542.332	-	27.588.930.000
4	2024	PT. SERANG BERKAH MANDIRI	Perda No. 13/2020	Penyertaan Modal	25.000.000.000	22.000.000.000	-	22.000.000.000	3.000.000.000	-	-	22.000.000.000
		JUMLAH			287.500.000.000	180.050.743.015	5.000.000.000	185.050.743.015	102.449.256.985	19.600.932.217		185.050.743.015

*) coret yang tidak perlu


 BUPATI SERANG,

 RATU RACHMATUZAKIAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	811.113.545.321,87	165.827.282.221,86	134.932.671.361,41	842.008.156.182,32
2	DINAS KESEHATAN	129.428.223.028,44	36.565.540.991,00	16.122.590.590,61	149.871.173.428,83
3	RUMAH SAKIT DR.DRADJAT PRAWIRANEGARA	183.361.107.363,76	95.098.241.613,20	90.894.086.214,92	187.565.262.762,04
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.730.413.621.721,22	441.866.100.185,95	460.266.353.946,64	1.712.013.367.960,53
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	172.862.054.030,85	88.461.588.406,40	5.915.301.400,45	255.408.341.036,80
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.570.444.178,11	0,00	176.909.033,43	2.393.535.144,68
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.836.154.803,51	141.235.714,29	1.198.643.680,82	2.778.746.836,98
8	DINAS SOSIAL	5.534.738.416,59	89.743.000,00	784.164.885,95	4.840.316.530,64
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.275.489.648,18	16.289.931.961,59	6.032.876.787,69	14.532.544.822,08
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	36.342.348.299,65	14.520.164.601,41	6.765.717.523,30	44.096.795.377,76
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.993.141.160,06	28.930.714.679,00	10.025.020.035,51	37.898.835.803,55
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.119.035.909,33	1.674.513.150,00	998.049.769,63	3.795.499.289,70
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.722.697.611,44	74.252.000,00	76.257.246,19	2.720.692.365,25
14	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.929.035.454,91	605.635.433,72	1.301.429.328,85	8.233.241.559,78
15	DINAS PERHUBUNGAN	84.066.284.704,24	4.972.396.100,00	3.448.633.651,65	85.590.047.152,59
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	1.011.191.318,48	3.840.186.066,00	1.647.926.535,59	3.203.450.848,89
17	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	65.664.670.678,71	6.781.159.901,00	3.639.832.756,85	68.805.997.822,86
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.759.261.199,14	2.680.811.000,00	828.309.479,82	3.611.762.719,32
19	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	9.360.110.279,14	64.600.000,00	1.842.105.586,58	7.582.604.692,56
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	3.729.690.805,26	1.786.445.857,15	720.783.249,56	4.795.353.412,85
21	DINAS PERIKANAN	28.907.775.181,12	682.216.400,00	1.498.500.008,86	28.091.491.572,26

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
22	SEKRETARIAT DAERAH	180.558.975.287,14	5.086.310.092,00	120.275.026.194,90	65.370.259.184,24
23	SEKRETARIAT DPRD	6.096.209.248,47	2.564.673.871,44	3.711.924.156,43	4.948.958.963,48
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	371.641.451,76	419.870.000,00	345.499.542,76	446.011.909,00
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.157.077.207,87	1.580.308.144,00	807.131.393,48	2.930.253.958,39
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	410.586.795.196,64	112.286.683.180,43	16.719.669.636,87	506.153.808.740,20
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.790.331.555,24	1.163.123.936,00	1.298.688.826,44	17.654.766.664,80
28	INSPEKTORAT DAERAH	1.050.771.157,70	5.600.000,00	311.433.420,87	744.937.736,83
29	KECAMATAN ANYAR	7.080.873.655,02	31.200.000,00	282.946.614,16	6.829.127.040,86
30	KECAMATAN BANDUNG	5.821.062.448,80	57.740.667,00	126.777.243,64	5.752.025.872,16
31	KECAMATAN BAROS	1.836.927.631,12	55.645.000,00	62.972.726,01	1.829.599.905,11
32	KECAMATAN BINUANG	4.209.446.509,67	0,00	53.771.413,70	4.155.675.095,97
33	KECAMATAN BOJONEGARA	4.227.313.721,14	42.700.000,00	75.762.557,94	4.194.251.163,20
34	KECAMATAN CARENANG	3.703.542.255,96	43.440.000,00	82.245.681,30	3.664.736.574,66
35	KECAMATAN CIKANDE	8.583.531.554,90	0,00	215.333.982,26	8.368.197.572,64
36	KECAMATAN CIKEUSAL	2.338.138.497,26	5.228.198.499,00	338.310.479,32	7.228.026.516,94
37	KECAMATAN CINANGKA	1.604.934.639,25	247.019.600,00	131.473.908,98	1.720.480.330,27
38	KECAMATAN CIOMAS	2.450.009.389,18	49.000.000,00	219.483.601,66	2.279.525.787,52
39	KECAMATAN CIRUAS	4.996.711.471,47	270.717.300,00	58.499.371,97	5.208.929.399,50
40	KECAMATAN GUNUNGSARI	5.502.495.435,59	375.223.354,00	462.142.860,06	5.415.575.929,53
41	KECAMATAN JAWILAN	1.264.508.975,30	24.080.000,00	67.955.837,87	1.220.633.137,43
42	KECAMATAN KIBIN	4.401.660.485,98	19.800.000,00	46.798.284,05	4.374.662.201,93
43	KECAMATAN KOPO	4.481.552.551,33	0,00	72.839.999,07	4.408.712.552,26
44	KECAMATAN KRAGILAN	10.056.942.620,13	1.983.425.000,00	265.303.175,05	11.775.064.445,08
45	KECAMATAN KRAMATWATU	9.962.409.904,13	427.273.354,00	568.605.335,46	9.821.077.922,67
46	KECAMATAN LEBAK WANGI	3.597.090.084,43	59.201.650,00	84.792.045,14	3.571.499.689,29
47	KECAMATAN MANCAK	5.962.777.316,80	679.675.154,00	482.713.547,60	6.159.738.923,20
48	KECAMATAN PABUARAN	5.561.790.957,59	25.420.500,00	281.313.621,03	5.305.897.836,56
49	KECAMATAN PADARINCANG	7.022.993.386,04	0,00	248.753.089,91	6.774.240.296,13
50	KECAMATAN PAMARAYAN	2.434.264.008,94	0,00	64.274.896,10	2.369.989.112,84
51	KECAMATAN PETIR	1.230.586.232,59	15.803.600,00	31.285.104,88	1.215.104.727,71
52	KECAMATAN PONTANG	6.595.470.708,63	56.859.200,00	438.768.484,88	6.213.561.423,75

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
53	KECAMATAN PULO AMPEL	1.064.431.567,94	0,00	35.243.631,20	1.029.187.936,74
54	KECAMATAN TANARA	3.289.330.828,82	575.000,00	197.245.530,82	3.092.660.298,00
55	KECAMATAN TIRTAYASA	2.033.598.752,94	51.150.000,00	217.133.440,35	1.867.615.312,59
56	KECAMATAN TUNJUNG TEJA	4.962.533.406,74	28.395.000,00	107.672.609,85	4.883.255.796,89
57	KECAMATAN WARINGINKURUNG	2.885.018.794,67	30.723.700,00	268.262.464,31	2.647.480.030,36
58	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	130.516.250,00	673.421.162,00	602.242.678,67	201.694.733,33
	J U M L A H	4.055.904.886.261,19	1.044.536.016.246,44	898.776.460.463,30	4.201.664.442.044,33

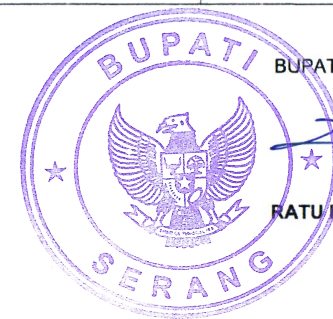




PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	URAIAN	Nilai Aset Per 31 Desember 2023	MUTASI		Nilai Aset Per 31 Desember 2024
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	1.156.375.526.386,78	197.862.424.912,83	137.713.965.217,43	1.216.523.986.082,18
2	Peralatan dan Mesin	1.250.335.045.133,99	201.157.833.970,02	100.740.308.850,06	1.350.752.570.253,95
3	Gedung dan Bangunan	1.761.700.427.814,42	242.373.484.446,14	67.111.634.722,30	1.936.962.277.538,26
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.651.268.515.828,30	247.789.902.517,23	61.653.944.832,20	2.837.404.473.513,33
5	Aset Tetap Lainnya	35.709.076.532,10	29.983.891.116,00	24.831.592.976,00	40.861.374.672,10
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	59.172.336.328,00	990.000.000,00	59.172.336.328,00	990.000.000,00
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.069.597.641.105,07)	17.397.437.458,93	93.592.876.066,96	(1.145.793.079.713,10)
8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(575.842.916.576,35)	5.320.182.916,48	48.386.982.171,29	(618.909.715.831,16)
9	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.210.812.523.102,50)	101.660.858.908,81	305.453.374.431,08	(1.414.605.038.624,77)
10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2.402.960.978,48)	0,00	119.444.867,98	(2.522.405.846,46)

No.	URAIAN	Nilai Aset Per 31 Desember 2023	MUTASI		Nilai Aset Per 31 Desember 2024
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	4.055.904.886.261,19	1.044.536.016.246,44	898.776.460.463,30	4.201.664.442.044,33



BUPATI SERANG,

[Handwritten signature in blue ink]

RATU RACHMATUZAKIYAH

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR : 5 Tahun 2025
TANGGAL : 19 Agustusn 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFI KASI/ PENGHAPU SAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERKURANG				BERTAMBAH					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATA N DAN MESIN		
1	Rumah Sakit dr. Drajat Prawiranegara	58.686.749.708,00	-	58.686.749.708,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-				990.000.000,00			-	-	990.000.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	485.586.620,00	485.586.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah												990.000.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Saldo Awal	MUTASI		Saldo Akhir
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14.356.203.583,23	7.055.107.159,00	1.425.614.420,00	19.985.696.322,23
2	DINAS KESEHATAN	1.659.880.797,28	1.233.747.558,00	649.854.258,00	2.243.774.097,28
3	RUMAH SAKIT DR.DRADJAT PRAWIRANEGARA	1.278.769.396,00	8.087.961.870,80	9.138.838.370,80	227.892.896,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	96.706.023.143,43	93.595.100.174,82	56.190.048.435,61	134.111.074.882,64
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.693.530.490,46	98.494.428,56	108.921.500,00	100.683.103.419,02
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
8	DINAS SOSIAL	65.142.857,14	458.208.142,86	473.711.000,00	49.640.000,00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	151.754.000,00	29.370.500,00	29.370.500,00	151.754.000,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	338.234.490,00	169.117.245,00	169.117.245,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.409.964.285,80	2.864.002.774,20	3.351.258.360,00	922.708.700,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.250.000,00	22.500.000,00	23.750.000,00	0,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	54.399.750,00	356.516.881,72	378.941.631,72	31.975.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	107.071.900,00	63.450.375,00	63.450.375,00	107.071.900,00
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	61.643.056,75	753.701.066,00	575.220.816,00	240.123.306,75
17	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	43.000.000,00	241.761.500,00	241.761.500,00	43.000.000,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	170.978.300,00	170.978.300,00	0,00
19	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	679.000.001,00	16.000.000,00	16.000.000,00	679.000.001,00

No	SKPD	Saldo Awal	MUTASI		Saldo Akhir
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	131.940.000,00	26.594.857,15	26.594.857,15	131.940.000,00
21	DINAS PERIKANAN	160.273.100,00	346.000.000,00	406.273.100,00	100.000.000,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	14.032.790.729,42	3.421.642.067,00	1.836.342.067,00	15.618.090.729,42
23	SEKRETARIAT DPRD	135.900.000,00	3.890.510.271,44	3.908.510.271,44	117.900.000,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	86.491.118,56	55.341.491,44	61.732.610,00	80.100.000,00
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	610.261.700,00	0,00	92.407.500,00	517.854.200,00
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	51.013.509.346,06	24.853.688.868,00	47.826.003.000,00	28.041.195.214,06
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	39.310.000,00	118.790.000,00	123.135.000,00	34.965.000,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
29	KECAMATAN ANYAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30	KECAMATAN BANDUNG	0,00	28.881.334,00	28.881.334,00	0,00
31	KECAMATAN BINUANG	0,00	0,00	0,00	0,00
32	KECAMATAN BOJONEGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
33	KECAMATAN CARENANG	0,00	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00
34	KECAMATAN CIKEUSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
35	KECAMATAN CINANGKA	0,00	27.280.000,00	27.280.000,00	0,00
36	KECAMATAN CIOMAS	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
37	KECAMATAN CIRUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
38	KECAMATAN GUNUNGSARI	0,00	0,00	0,00	0,00
39	KECAMATAN JAWILAN	9.655.000,00	0,00	0,00	9.655.000,00
40	KECAMATAN KOPO	0,00	0,00	0,00	0,00
41	KECAMATAN KRAMATWATU	0,00	0,00	0,00	0,00
42	KECAMATAN LEBAK WANGI	0,00	37.203.300,00	37.203.300,00	0,00
43	KECAMATAN MANCAK	0,00	0,00	0,00	0,00
44	KECAMATAN PABUARAN	0,00	50.841.000,00	50.841.000,00	0,00
45	KECAMATAN PADARINCANG	0,00	0,00	0,00	0,00
46	KECAMATAN PAMARAYAN	0,00	0,00	0,00	0,00
47	KECAMATAN PETIR	0,00	0,00	0,00	0,00
48	KECAMATAN PONTANG	22.500.000,00	28.806.400,00	28.806.400,00	22.500.000,00

No	SKPD	Saldo Awal	MUTASI		Saldo Akhir
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
49	KECAMATAN PULO AMPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	KECAMATAN TIRTAYASA	0,00	0,00	0,00	0,00
51	KECAMATAN TUNJUNG TEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	208.550.000,00	208.550.000,00	0,00
	J U M L A H	283.518.264.255,13	148.504.914.809,99	127.695.047.151,72	304.328.131.913,40

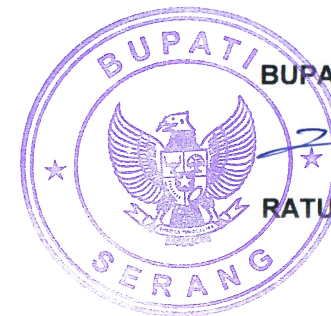


LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR : 5 Tahun 2025
TANGGAL : 19 Agustus 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH PER 31 DESEMBER 2024

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Taransfer dari Kas Daerah	Taransfer ke Kas Daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst								
Jumlah								



BUPATI SERANG,

RATU RACHMATUZAKIYAH



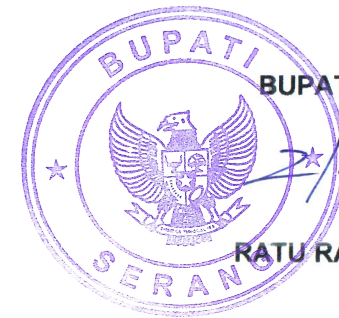
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024

No.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	19.555.966,00	241.158.689.343,45	241.157.331.003,45	20.914.306,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	8.383.602.323,00	9.442.249.528,69	8.113.602.323,00	9.712.249.528,69
3	Utang Belanja Pegawai	6.264.809.065,00	8.881.380.784,00	6.264.809.065,00	8.881.380.784,00
4	Utang Belanja Barang dan Jasa	31.567.244.343,00	181.999.004.570,00	181.861.270.918,00	31.704.977.995,00
5	Utang Belanja Hibah	2.051.138.495,00	44.803.877.013,22	44.918.575.881,00	1.936.439.627,22
6	Utang Belanja Modal Tanah	0,00	256.692.494,00	256.692.494,00	0,00
7	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.894.424.300,00	72.158.462.238,00	74.008.301.735,00	3.044.584.803,00
8	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.440.755.622,00	89.413.330.841,00	83.409.424.188,00	8.444.662.275,00
9	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.868.977.850,00	189.853.013.181,76	188.663.027.891,00	8.058.963.140,76
10	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	51.339.500,00	656.040.500,00	670.150.000,00	37.230.000,00
11	Utang Belanja Bagi Hasil	50.097.636.033,00	74.471.587.265,00	50.097.636.033,00	74.471.587.265,00
12	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	151.200.000,00	0,00	151.200.000,00
13	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.373.537.146,00	2.103.854,00	2.482.125.637,00	1.893.515.363,00

No.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	117.013.020.643,00	913.247.631.613,12	881.902.947.168,45	148.357.705.087,67



NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
Jumlah					



RATU RACHMATUZAKIYAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN
ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DISDIK	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.758.353.680,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.347.000,00	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					6.908.512,00	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					6.913.454,00	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					6.915.076,00	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					6.910.700,00	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					6.913.000,00	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					6.894.395,00	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					8.100.000,00	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					81.000.000,00	
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (DAU SG)					31.948.000,00	
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (DAU SG)					10.800.000,00	
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (DAU SG)					33.000.000,00	
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan					8.960.000,00	
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan					1.800.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan					11.000.000,00	
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					8.960.000,00	
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					6.000.000,00	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru					35.684.850,00	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru					36.638.729,00	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru					13.000.313,00	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					16.500.000,00	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					12.480.000,00	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					22.000.000,00	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					28.160.000,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					8.337.000,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					53.737.000,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					8.100.000,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					55.000.000,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					25.659.043,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					8.705.732,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					24.415.950,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					15.213.023,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					25.746.403,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					24.415.950,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					25.176.987,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					21.833.494,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					25.198.512,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					25.198.512,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					23.789.900,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					15.150.000,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					14.853.036,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					45.030.494,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					53.104.691,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					34.777.077,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					73.235.025,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					73.248.900,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					73.231.140,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					50.430.000,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					75.346.260,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					37.563.000,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					18.781.500,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					19.763.157,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					37.563.000,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					39.202.456,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					29.470.300,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					18.781.500,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					27.729.900,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					37.563.000,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					9.803.727,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					19.720.575,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					28.931.150,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					99.821.190,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					57.200.000,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					42.000.000,00	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD					20.000.000,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					11.567.580,00	
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					9.000.000,00	
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					8.700.000,00	
		Bimbingan Teknis ,Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					22.000.000,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.983.020,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.975.916,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.970.234,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.932.919,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.970.402,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.978.823,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.972.463,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.954.024,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.917.935,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.979.885,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.990.000,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.990.000,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.988.267,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.990.655,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.969.232,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					19.919.436,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.913.866,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.950.563,00	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					9.928.008,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik					45.950.000,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik					4.446.200.000,00	
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar					27.600.000,00	
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar					37.230.000,00	
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					3.600.000,00	
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					27.900.000,00	
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar					7.234.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar					3.600.000,00	
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar					26.126.000,00	
		Penataan Pendidtribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1.533.150.000,00	
							10.007.149.521,00	
2	DINKES	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					98.600.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					11.400.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30.920.000,00	
		Pengadaan Mebel					925.257.457,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					61.140.000,00	
		Pembangunan Puskesmas					1.239.977.523,00	
		Pembangunan Puskesmas					98.948.175,00	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					82.189.950,00	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					95.670.900,00	
		Pembangunan Puskesmas					82.090.050,00	
		Pembangunan Puskesmas					98.379.300,00	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					250.180.000,00	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					248.570.000,00	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					249.410.000,00	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					199.619.100,00	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					198.260.000,00	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					48.290.550,00	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					50.155.350,00	
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					3.350.000,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV					9.600.000,00	
		Operasional Pelayanan Puskesmas					6.080.000,00	
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					10.575.000,00	
							4.098.663.355,00	
3	DPUPR	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					270.709.884,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					61.438.500,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					300.110.411,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					96.192.600,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					304.196.251,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					96.320.250,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					96.237.000,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					96.103.800,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					83.438.700,00	
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					39.000.000,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					69.042.000,00	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					500.000.000,00	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					300.000.000,00	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					176.199.065,00	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					20.975.000,00	
		Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					99.789.000,00	
		Rekonstruksi Jalan					559.917.983,00	
		Rekonstruksi Jalan					254.474.905,00	
		Rekonstruksi Jalan					162.287.550,00	
		Pelebaran Jembatan					98.459.775,00	
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					98.459.775,00	
		Rekonstruksi Jalan					98.462.550,00	
		Pembangunan Jalan					183.266.550,00	
		Pembangunan Jembatan					134.873.325,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Pembangunan Jembatan					161.114.280,00	
		Pembangunan Jembatan					129.515.910,00	
		Rehabilitasi Jembatan					98.457.000,00	
		Rehabilitasi Jalan					130.247.733,00	
		Rekonstruksi Jalan					129.567.636,00	
		Rekonstruksi Jalan					161.114.280,00	
		Rekonstruksi Jalan					165.040.350,00	
		Rekonstruksi Jalan					129.170.700,00	
		Rekonstruksi Jalan					132.722.700,00	
		Rekonstruksi Jalan					162.287.550,00	
		Rekonstruksi Jalan					191.402.850,00	
		Rekonstruksi Jalan					128.718.375,00	
		Rekonstruksi Jalan					62.561.376,00	
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					9.990.007,00	
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					7.497.500,00	
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					7.496.750,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					2.386.014.780,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					64.350.000,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					835.594.500,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					99.600.300,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					132.978.000,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					50.427.300,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					95.894.010,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					237.273.600,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					151.859.100,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					50.493.900,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					98.259.975,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					82.167.750,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					98.224.455,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					98.324.355,00	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					81.436.260,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					98.351.550,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					98.290.500,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					82.128.900,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					98.170.758,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					98.170.620,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					98.135.100,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					50.327.400,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					50.449.500,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					96.150.975,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					188.635.420,00	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					25.052.509,00	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					8.751.750,00	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					7.134.900,00	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					15.330.250,00	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					9.412.200,00	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					8.427.780,00	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					8.485.900,00	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					9.849.900,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					21.226.621,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					21.379.579,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					10.211.400,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					10.209.950,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					5.241.300,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					4.898.900,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					9.949.692,22	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					6.661.778,00	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					5.235.808,00	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					9.097.400,00	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					9.205.100,00	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					9.200.150,00	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					9.273.635,00	
		Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					161.507.877,00	
		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan					9.011.547,00	
		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan					9.009.400,00	
		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan					9.006.386,00	
		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan					9.008.367,00	
		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan					8.652.800,00	
		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan					9.001.224,00	
		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan					9.050.000,00	
		Pembangunan Jalan					42.108.600,00	
		Pembangunan Jalan					754.499.600,00	
		Pembangunan Jalan					221.602.350,00	
		Pembangunan Jalan					380.348.200,00	
		Rehabilitasi Jalan					16.741.050,00	
		Rehabilitasi Jalan					24.529.450,00	
		Rehabilitasi Jalan					97.010.050,00	
		Rehabilitasi Jalan					31.436.050,00	
		Rehabilitasi Jalan					73.587.450,00	
		Rehabilitasi Jalan					72.670.950,00	
		Rehabilitasi Jalan					71.023.500,00	
		Rehabilitasi Jalan					24.723.150,00	
		Rehabilitasi Jalan					44.699.900,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Rekonstruksi Jalan					76.410.400,00	
		Rekonstruksi Jalan					188.742.900,00	
		Rekonstruksi Jalan					204.214.850,00	
		Rekonstruksi Jalan					227.093.450,00	
		Rekonstruksi Jalan					138.118.300,00	
		Rekonstruksi Jalan					252.748.650,00	
		Rekonstruksi Jalan					207.561.650,00	
		Rekonstruksi Jalan					195.749.950,00	
		Rekonstruksi Jalan					128.579.850,00	
		Rekonstruksi Jalan					272.899.500,00	
		Rekonstruksi Jalan					340.737.400,00	
		Rekonstruksi Jalan					195.134.750,00	
		Rekonstruksi Jalan					262.966.600,00	
		Rekonstruksi Jalan					122.220.250,00	
		Rekonstruksi Jalan					214.720.250,00	
		Rekonstruksi Jalan					220.533.700,00	
		Rekonstruksi Jalan					192.868.400,00	
		Rekonstruksi Jalan					191.819.400,00	
		Rekonstruksi Jalan					161.999.950,00	
		Rekonstruksi Jalan					142.758.050,00	
		Rekonstruksi Jalan					137.383.400,00	
		Rekonstruksi Jalan					196.462.450,00	
		Rekonstruksi Jalan					67.580.450,00	
		Rekonstruksi Jalan					68.528.850,00	
		Pembangunan Jembatan					15.673.650,00	
		Pembangunan Jembatan					72.000.000,00	
		Pembangunan Jembatan					53.661.950,00	
		Pembangunan Jembatan					132.353.100,00	
		Rehabilitasi Jembatan					13.477.350,00	
		Rehabilitasi Jembatan					19.344.500,00	
		Rehabilitasi Jembatan					24.107.450,00	
		Rehabilitasi Jembatan					13.178.150,00	
		Pelebaran Jembatan					27.257.750,00	
		Pelebaran Jembatan					13.500.600,00	
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					24.732.300,00	
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					24.728.450,00	
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					22.383.950,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					24.616.200,00	
		Rekonstruksi Jalan					9.889.400,00	
		Rekonstruksi Jalan					9.893.800,00	
		Rekonstruksi Jalan					9.991.000,00	
		Rekonstruksi Jalan					9.993.350,00	
		Rekonstruksi Jalan					9.997.200,00	
		Rekonstruksi Jalan					9.992.250,00	
		Rekonstruksi Jalan					9.993.500,00	
		Rekonstruksi Jalan					9.992.500,00	
		Rekonstruksi Jalan					9.990.400,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.660.000,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.032.600,00	
		Rekonstruksi Jalan					18.977.750,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.599.990,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.027.500,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.700.000,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.209.050,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.123.600,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.082.300,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.182.350,00	
		Rekonstruksi Jalan					18.897.550,00	
		Rekonstruksi Jalan					18.350.600,00	
		Rekonstruksi Jalan					18.968.500,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.100.000,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.246.500,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.150.000,00	
		Rekonstruksi Jalan					18.959.700,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.150.000,00	
		Rekonstruksi Jalan					18.907.550,00	
		Rekonstruksi Jalan					18.850.200,00	
		Rekonstruksi Jalan					18.998.050,00	
		Rekonstruksi Jalan					18.992.750,00	
		Rekonstruksi Jalan					18.999.550,00	
		Rekonstruksi Jalan					18.982.100,00	
		Rekonstruksi Jalan					19.519.900,00	
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					9.990.000,00	
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					9.990.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					9.995.383,26	
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					9.998.880,00	
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					9.992.775,00	
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					9.996.382,50	
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					9.984.450,00	
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					9.987.225,00	
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					9.992.309,00	
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					9.990.555,00	
		Pembangunan Jembatan					9.984.450,00	
		Pembangunan Jembatan					9.970.000,00	
		Pelebaran Jembatan					9.995.000,00	
		Pelebaran Jembatan					9.972.500,00	
		Pelebaran Jembatan					9.990.000,00	
		Pelebaran Jembatan					9.978.900,00	
		Pelebaran Jembatan					9.970.000,00	
		Pelebaran Jembatan					23.767.650,00	
		Pelebaran Jembatan					77.347.900,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					55.314.715,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					140.964.440,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					199.238.965,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					37.465.785,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					398.999.126,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					67.227.980,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					32.262.575,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					24.306.225,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					674.974.400,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					148.590.660,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					64.276.500,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					26.900.819,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					49.500.000,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					9.960.343,00	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					24.278.820,00	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					24.840.445,00	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					14.942.915,00	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					33.239.180,00	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					9.994.150,00	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					9.988.050,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					9.989.100,00	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					9.992.150,00	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					9.990.550,00	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					9.992.800,00	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					9.946.650,00	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					9.980.300,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					85.737.495,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					99.096.975,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					124.431.280,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					48.783.920,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					71.826.520,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					35.109.805,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					57.860.430,00	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					9.979.800,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					9.928.180,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2.633.681,00	
							22.211.723.660,98	
4	DPRKP	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh					99.380.800,00	
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh					9.948.950,00	
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh					9.920.900,00	
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh					9.946.250,00	
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh					9.917.650,00	
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh					35.020.000,00	
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh					35.000.000,00	
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh					20.800.000,00	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					49.947.225,00	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					49.952.220,00	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					64.000.000,00	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					51.200.000,00	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					99.866.700,00	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					7.471.450,00	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					9.961.850,00	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					9.963.100,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					9.963.350,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					9.956.900,00	
							592.217.345,00	
5	BPBD	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					7.044.000,00	
							7.044.000,00	
6	DINSOS	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					10.000.000,00	
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					10.000.000,00	
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					9.600.000,00	
		Sub Keg. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					4.000.000,00	
		Sub Keg. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					65.200.000,00	
		Sub Keg. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					125.125.000,00	
		Sub Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					3.420.600,00	
		Sub Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					11.574.000,00	
							238.919.600,00	
7	DKPP	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					159.441.880,00	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					153.492.000,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					937.213.928,00	
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya					14.803.432,00	
							1.264.951.240,00	
8	DLH	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota					89.835.630,00	
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota					19.000.000,00	
							108.835.630,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
9	DISDUKCAPIL	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					311.055.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					140.200.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					333.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					9.350.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					56.104.150,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					11.225.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					53.450.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					312.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.240.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					920.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					52.390.000,00	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					19.430.000,00	
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil					17.864.800,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					13.100.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.600.000,00	
							702.573.950,00	
10	DPMD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					10.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					6.000.000,00	
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					6.507.600,00	
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					220.500.000,00	
							243.007.600,00	
11	DKBPPPA	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					16.896.000,00	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					6.500.000,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					21.548.000,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					69.938.455,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG					1.700.000,00	
							116.582.455,00	
12	DISHUB	Penyendalian Pelaksanaan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal					99.511.500,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Penyediaan Pelaksanaan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal					99.123.000,00	
							198.634.500,00	
13	DISKOMINFOSATIK	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					49.960.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					137.600.000,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					165.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					165.000.000,00	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik					72.116.800,00	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik					49.950.000,00	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik					49.998.840,00	
		Layanan Hubungan Media					2.000.000,00	
		Layanan Hubungan Media					2.000.000,00	
		Layanan Hubungan Media					10.100.000,00	
		Layanan Hubungan Media					2.500.000,00	
		Layanan Hubungan Media					5.000.000,00	
		Layanan Hubungan Media					50.000.000,00	
		Layanan Hubungan Media					50.000.000,00	
		Layanan Hubungan Media					50.000.000,00	
		Layanan Hubungan Media					50.000.000,00	
		Layanan Hubungan Media					50.000.000,00	
		Layanan Hubungan Media					50.000.000,00	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					49.839.000,00	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					5.120.000,00	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					1.800.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					247.500.000,00	
							1.315.484.640,00	
14	DISKOPERINDAG	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa era tera Ulang					14.000.000,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					11.900.000,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					471.794.468,00	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.250.000,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.110.000,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.960.000,00	
							515.014.468,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
15	DPMPTSP	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					15.796.000,00	
							15.796.000,00	
16	DISPORAPAR	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					34.800.000,00	
							34.800.000,00	
17	DISPERIKAN	Fasilitasi Kunjungan Tamu					19.656.000,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					5.597.900,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.100.000,00	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					28.595.000,00	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					16.790.000,00	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					9.900.000,00	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					102.090.000,00	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					8.739.604,00	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					8.732.571,00	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					8.738.716,00	
							210.939.791,00	
18	SETDA	Penataan Administrasi Pemerintahan					20.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					165.589.500,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50.260.000,00	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					4.130.000,00	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					7.360.000,00	
							247.339.500,00	
19	BPKAD	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					35.457.737.333,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					2.614.520.000,00	
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					37.579.062.372,20	
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					(1.179.732.439,90)	
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					151.200.000,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					6.000.000.000,00	
							80.622.787.265,30	
20	PADARINCANG	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN					3.800.000,00	
							3.800.000,00	
21	BAKESBANGPOL	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					47.007.800,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					39.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					10.500.000,00	
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					3.200.000,00	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					3.200.000,00	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					17.490.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					59.615.500,00	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					8.200.000,00	
							188.213.300,00	
JUMLAH TOTAL LUNCURAN							122.944.477.821,28	



 BUPATI SERANG,



 RATU RACHMATUZAKIYAH

Lampiran XX.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 19 Agustus 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Labanya Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17x18
1	Bidang Perbankan 1. PT. BPR Serang (Penseroda)			568.590.625.589,00	10.637.880.701,00	1.375.500.310,00	580.604.006.600,00	466.034.284.815,00	-	466.034.284.815,00	48.439.478.950,00	-	-	47.697.262.963,00	-	96.136.741.913,00	54,11%	52.019.591.049,12
	Sub Total (1)			568.590.625.589,00	10.637.880.701,00	1.375.500.310,00	580.604.006.600,00	466.034.284.815,00	-	466.034.284.815,00	48.439.478.950,00	-	-	47.697.262.963,00	-	96.136.741.913,00		52.019.591.049,12
2	Bidang Pelayanan Air Minum 1. PDAM Tirta Albantani			55.387.590.250,00	95.706.586.393,00	1.313.882.498,00	152.408.059.141,00	6.151.653.398,00	-	6.151.653.398,00	160.908.192.078,00	-	-	-	- 14.651.786.335,000	146.256.405.743,00	100%	146.256.405.743,00
	Sub Total (2)			55.387.590.250,00	95.706.586.393,00	1.313.882.498,00	152.408.059.141,00	6.151.653.398,00	-	6.151.653.398,00	160.908.192.078,00	-	-	-	- 14.651.786.335,00	146.256.405.743,00		146.256.405.743,00
3	Bidang Perdagangan 1. PT. Serang Berkah Mandiri			3.180.178.002,00	1.609.278.571,00	-	4.789.456.573,00	3.012.851.703,00	-	3.012.851.703,00	22.100.000.000,00	-	-	-	- 20.323.395.130,00	1.776.604.870,00	100%	1.776.604.870,00
	Sub Total (3)			3.180.178.002,00	1.609.278.571,00	-	4.789.456.573,00	3.012.851.703,00	-	3.012.851.703,00	22.100.000.000,00	-	-	-	- 20.323.395.130,00	1.776.604.870,00	99,55%	1.776.604.870,00
	Total Seluruh Bidang Industri			627.158.393.841,00	107.953.745.665,00	2.689.382.808,00	737.801.522.314,00	475.198.789.916,00	-	475.198.789.916,00	231.447.671.028,00	-	-	47.697.262.963,00	- 34.975.181.465,00	244.169.752.526,00		200.052.601.662,12

 **BUPATI SERANG.**
[Signature]
RATU RACHMATUZAKIYAH

Lampiran XX.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 5 Tahun 2025

Tanggal : 19 Agustus 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Perbankan 1. PT. BPR Serang (Perseroda)			78.002.621.407,00	62.368.016.637,00	15.634.604.770,00	1.438.935.773,00	1.332.591.022,00	15.740.949.521,00
	Sub Total (1)			78.002.621.407,00	62.368.016.637,00	15.634.604.770,00	1.438.935.773,00	1.332.591.022,00	15.740.949.521,00
2	Bidang Pelayanan Air Minum 1. PDAM Tirta Albantani			52.963.823.684,00	25.139.509.632,00	27.824.314.052,00	3.912.551.733,00	26.531.052.091,00	5.205.813.694,00
	Sub Total (2)			52.963.823.684,00	25.139.509.632,00	27.824.314.052,00	3.912.551.733,00	26.531.052.091,00	5.205.813.694,00
3	Bidang Perdagangan 1. PT. Serang Berkah Madiri			-	321.445.452,00	- 321.445.452,00	903.447.714,00	6.399.000,00	575.603.262,00
	Sub Total (2)			-	321.445.452,00	- 321.445.452,00	903.447.714,00	6.399.000,00	575.603.262,00
	Total Seluruh Bidang industri			130.966.445.091,00	87.828.971.721,00	43.137.473.370,00	6.254.935.220,00	27.870.042.113,00	21.522.366.477,00


BUPATI SERANG,

RATU RACHMATUZAKIYAH